





PEMERINTAH KOTA CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON

Jalan Siliwangi No. 84 Telp. (0231) 206011 s/d 206015 Fax 202344

CIREBON 45124



KATA PENGANTAR

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan Otonomi Daerah. Melalui kebijakan Desentralisasi sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menyuburkan proses reformasi pada tingkat lokal. Disamping itu, kebijakan Desentralisasi diharapkan pula dapat memberi ruang gerak pada Bidang Politik, Administrasi, dan Sosial Ekonomi untuk kepentingan masyarakat lokal, sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah.

Di dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam memenuhi berbagai kebutuhan daerah secara bertanggungjawab, melalui berbagai prakarsa yang kreatif dan inovatif dalam menggulirkan layanan civil dan layanan publik, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dari waktu ke waktu. Secara konseptual, diskresi dan kemandirian daerah untuk mengekspresikan kreatifitas serta inovasi dalam mengelola urusan pemerintahan, telah terkonsepsikan pula di dalam 2 (dua) prinsip utama desentralisasi yang dirumuskan secara tepat oleh Dennis Rondinelli dan Shabir Cheema, yaitu sebagai: "a transfer of political power from state to society" dan "a transfer of management from centre to local government".

Kedua perspektif tersebut, baik normatif maupun konseptual, memberikan pemahaman kepada kita bahwa diskresi dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, akan menstimulir kemandirian daerah untuk secara leluasa mengekspresikan kreatifitas dan inovasinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan civil dan layanan publik pada saat dibutuhkan. Pada tahap berikutnya dapat meningkatkan daya saing daerah dengan landasan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.



Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser secara signifikan dan mendasar, dimulai dari Sistem Pemilihan Kepala Daerah, Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pola Pembagian Urusan Secara Proporsional Antar Tingkatan Pemerintahan, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan Kepegawaian, dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. Keseluruhannya mendorong interaksi manajemen pemerintahan daerah antara Pemerintah Daerah dengan DPRD menjadi lebih profesional dengan kontrol politik yang lebih dewasa.

Pada konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, hal yang perlu dicermati ialah berkaitan dengan hubungan Akuntabilitas Manajemen Pemerintahan Daerah, dari pendekatan Akuntabilitas Horisontal kepada Akuntabilitas Vertikal. Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah pola pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai berikut:

- ➤ **Pertama**, Akuntabilitas kepada Pemerintah Pusat dilakukan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.
- ➤ **Kedua**, Akuntabilitas kepada Masyarakat dilakukan dengan penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui berbagai media informasi yang memungkinkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat.
- Ketiga, dalam perspektif good governance, Akuntabilitas Kepada Lembaga Perwakilan Rakyat, sebagai refleksi dari nilai-nilai demokrasi lokal, dilakukan dengan penyampaian progress report kinerja pemerintahan daerah kepada DPRD, selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, yang mengemban fungsi Lembaga Wakil Rakyat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, setelah mengakhiri Tahun Anggaran 2015, Walikota Cirebon memiliki kewajiban untuk



menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. Diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat menjadi media informasi eksternal sekaligus menjadi alat koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disadari pula bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas serta upaya implementasi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah kedepan. Namun demikian, the show must go on, karena banyak inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan yang masih harus diwujudkan di masa yang akan datang; karenanya mari jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang dan awal keberhasilan di masa datang.

WALIKOTA CIREBON

Drs. NASRUDIN AZIS, SH



DAFTAR ISI

		H	alamar
KATA PE	NGA	NTAR	
DAFTAR	ISI		. iv
BAB. I	PEN	IDAHULUAN	
	A.	Dasar Hukum	1
	B.	Gambaran Umum Daerah	. 2
		1. Kondisi Geografis	. 2
		2. Gambaran Umum Demografis	5
		3. Kondisi Ekonomi	. 6
BAB. II	REN	NCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	
	A.	Visi dan Misi	13
	B.	Stategi dan Arah Kebijakan Daerah	14
	C.	Prioritas Daerah	. 24
BAB. III	URL	JSAN DESENTRALISASI	
	A.	Ringkasan Urusan Desentralisasi	30
		1. Angaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib & Urusar	
		Pilihan	38
		2. Satuan Kerja Perangkat Daerah	69
	B.	Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	
		Program dan Kegiatan	
		2. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal	
		3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusar	
		Wajib	202
		4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dar	
		Golongan, Jumlah Pejabat Struktutal dan Fungsional	
		5. Alokasi dan Realisasi Anggaran	
		Proses Perencanaan Pembangunan Kondisi Sarana dan Prasarana Yan Digunakan	-
		 Kondisi Sarana dan Prasarana Yan Digunakan Permasalahan dan Solusi 	
	C.	Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	
	Ο.	Program dan Kegiatan Urusan Pilihan	.00



BAB. VI PENUTUP

Halaman 2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Plihan 492 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 505 4. Indikator Kinerja Kunci 505 BAB. IV PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN A. Dasar Hukum 511 B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 512 C. Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan 517 D. Program, Kegiatan yang diterima dan dilaksanakan 512 BAB. V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 517 B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 518 C. Pembinaan Batas Wilayah 519 D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 524 E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 527

531



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kota Cirebon terbentuk dari kumpulan berbagai aktifitas kegiatan ekonomi terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan jasa. Hal tersebut dikarenakan letak Cirebon yang strategis (berada di pinggir Laut Jawa). Kondisi tersebut menyebabkan aktifitas ekonomi berkembang dengan pesat hingga menjadi tujuan para pedagang yang berasal dari Cina, Arab, dan negara lainnya. Selain dari sisi ekonomi, sisi pemerintahan juga menjadi terpengaruh yang menjadikan Kerajaan Cirebon berkembang pesat dan menjadi salah satu kerajaan Islam di Jawa Barat yang sangat berpengaruh. Perkembangan berikutnya Pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan transportasi darat berupa jalan dan jaringan kereta api dimana Cirebon sebagai salah satu titik simpul transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada Tahun 1910 s/d 1937 Kota Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheirebon berdasarkan Stlb 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370. Tahun 1942 Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan pada tahun 1957 status pemerintahannya ditingkatkan menjadi Kota Praja. Kota Cirebon sendiri ditetapkan menjadi daerah Kotamadya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551).



B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Wali demikianlah julukan bagi Kota Cirebon yang terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat. Mempunyai letak geografis yang strategis berada pada posisi 108,33° dan 6,41° lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar 37,35 km² atau 3.735,82 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane

- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon

- Sebelah selatan : Sungai Kalijaga

- Sebelah Timur : Laut Jawa

Topografis Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian bermula dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

- Kemiringan 0 3 %: terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 3 8 %: terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan kalijaga,
 sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 8 15 %: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
 Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 15 18 %: terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya,
 Kecamatan Harjamukti

Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri dalam pengaturan laju kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan



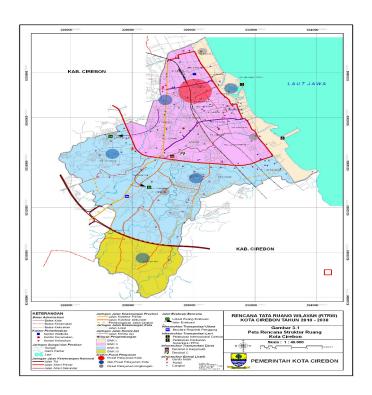
genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu dibeberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5 – 10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20 – 30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrupsi air laut. Adapun kondisi air laut, khususnya di kawasan pantai berwarna coklat karena pengaruh pendangkalan oleh lumpur yang dibawa oleh 4 sistem sungai (Sistem Sungai Kedung Pane/ Tangkil, Sistem Sungai Sukalila, Sistem Sungai Kesunean, dan Sistem Sungai Kalijaga) dan sungai-sungai dari wilayah Kabupaten Cirebon. Sedangkan kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Cirebon yang sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan.

Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan kerikil) hasil interupsi Gunung Ciremai. Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi.



Gambar 1 Peta Kota Cirebon



Tabel 1

Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1	Harjamukti	21.975	
2	Kesambi	14.541	
3	Pekalipan	6.105	
4	Lemahwungkuk	9.833	
5	Kejaksan	8.899	
Total Jumlah Bangunan		61.353	



2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2015 ini mencapai **388.854** jiwa yang terdiri dari **196.176** laki-laki dan **192.678** perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut jumlah penduduk terbesar berusia antara 0 s/d 59 tahun sebanyak **353.842** jiwa atau **90,99%.** Ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Cirebon merupakan penduduk dengan usia produktif.

Tabel 2.
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Tahun 2015

		Jenis Kelamin	
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	14.587	13.520	28.107
5 - 9	16.424	15.308	31.732
10 - 14	17.343	16.289	33.632
15 - 19	17.571	16.991	34.562
20 - 24	16.058	15.550	31.608
25 - 29	16.159	15.801	31.960
30 - 34	18.426	17.436	35.862
35 - 39	17.460	16.703	34.163
40 - 44	15.040	14.408	29.448
45 - 49	12.614	12.404	25.018
50 - 54	9.870	10.372	20.242
55 - 59	8.409	9.099	17.508
60 - 64	6.630	6.617	13.247
65 - 69	3.937	4.328	8.265
70 - 74	2.690	3.284	5.974
75 +	2.958	4.568	7.526
Jumlah	196.176	192.678	388.854

Sumber: Disdukcapil 2015

Berikut ini disajikan data Jumlah Kecamatan, Kelurahan, serta Penduduk Kota Cirebon Tahun 2015 :



Tabel 3

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi
Menurut Kecamatan Kota Cirebon

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km2)
Harjamukti	17.62	5	137.044	7.782.17
Lemahwungkuk	6.51	4	67.902	10.430.41
Pekalipan	1.56	4	36.840	23.464.97
Kesambi	8.06	5	89.110	11.069.57
Kejaksan	3.62	4	57.958	16.054.85
Kota Cirebon	37.36	22	388.854	10.408.85

Sumber: Disdukcapil 2015

Dari lima kecamatan yang ada, Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Pekalipan (23.464.97 jiwa per km²) dan Kejaksan (16.054.85 jiwa per km²). Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Harjamukti (7.782.17 jiwa per km²).

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kedudukan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada jalur persimpangan arus lalu lintas Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara umum dapat mempengaruhi kondisi perekonomian ke arah perkembangan dan kemajuan.

Beberapa sektor perekonomian yang menjadi Potensi unggulan di Kota Cirebon dan memberi kontribusi penuh terhadap perekonomian secara makro terdapat pada sektor tersier, yaitu perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan, serta jasa-jasa.



a.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

a.1.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir kepada pedagang besar atau pedagan eceran. Perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas.

a.1.2. Hotel

Sub sektor Hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah baik hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen dan motel

a.1.3. Restoran

Sub sektor Restoran mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan. Kegiatan yang termasuk dalam sektor ini seperti bar, kantin, warung kopi, rumah makan, warung nasi, warung sate, katering dan kegiatan sejenis lainnya.

a.2. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

a.2.1. Angkutan Rel

Angkutan ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI).



a.2.2. Angkutan Jalan Raya

Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut jalan raya, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk disini adalah kegiatan lainnya seperti sewa kendaraan (rent car) baik dengan atau tanpa pengemudi.

a.2.3. Angkutan Laut

Sub sektor Angkutan Laut mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal yang beroperasi di dalam dan di luar daerah domestik oleh perusahaan angkutan laut.

a.2.4. Angkutan Udara

Sub sektor Angkutan Udara mencakup kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah tersebut.

a.2.5. Angkutan Penyeberangan

Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal atau angkutan sungai, baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal Ferri.

a.2.6. Jasa Penunjang Angkutan

Sub sektor ini mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkuan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, darat (terminal dan parkir), sungai, bongkar muat laut dan udara, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol dan kegiatan lain yang sejenis.



a.2.7 Komunikasi

Sub sektor Komunikasi mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan warkat yang diusahakan oleh PT. (Persero) Pos Indonesia serta perusahaan swasta lainnya.

Telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan teleks yang diusahakan oleh PT. Telkom dan PT. Indosat.

Jasa penunjang telekomunikasi meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel, radio panggil dan telepon seluler).

a.3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

a.3.1. Bank

Sub sektor Bank mencakup kegiatan bank sentral dan bank komersial yang memberikan jasa keuangan kepada pihak lain misalnya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit atau pinjaman baik jangka pendek, menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/ surat dagang/ surat hutang dan sejenisnya.

a.3.2. Lembaga Keuangan Lainnya

Sub sektor Lembaga Keuangan lainnya mencakup asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan. Dalam sub sektor ini juga mencakup kegiatan valuta asing, pasar moal dan jasa penunjangnya seperti pialang penjamin emisi dan lain sebagainya.



a.3.3. Sewa Bangunan

Sub sektor Bangunan mencakup kegiatan usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, apartemen, serta usaha persewaan tanah persil.

a.3.4. Jasa Perusahaan

Sub sektor jasa perusahaan mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokasi dan kenotarisan), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa pembangunan/ arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

a.4. Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam dua sub sektor, yaitu :

- 1) Sub sektor Jasa Pemerintahan Umum, dan
- 2) Sub sektor Jasa Swasta.

a.4.1. Jasa Pemerintahan Umum

Sub sektor ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan rumah tangga serta masyarakat umum. Sebagai contoh Jasa Pemerintahan Umum, Pertahanan dan Keamanan dan lain sebagainya.

a.4.2. Jasa Swasta

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa yang dilakukan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta perorangan dan rumah tangga, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jasa Kemasyarakatan

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, riset/ penelitian, palang merah, panti werda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadat dan sejenisnya, baik swasta maupun pemerintah.



2) Jasa Hiburan dan Rekreasi

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya.

3) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Sub sektor ini mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga misalnya jasa reparasi, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu dan kegiatan lainnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Tabel 4
Produk Domistik Regiaonal Broto Kota Cirebon
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

	Lapangan Usaha		2013	2014
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,450.3	49,353.1	53,250.1
В	Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0
С	Industri Pengolahan	1,278,026.9	1,402,473.9	1,607,993.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	135,526.7	153,960.5	154,548.2
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,203.0	36,102.5	37,731.4
F	Konstruksi	1,304,522.5	1,418,263.5	1,588,957.2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor	4,173,284.8	4,609,943.4	4,907,718.4
Н	Transportasi dan Pergudangan	1,308,711.9	1,486,152.5	1,680,533.6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	597,807.6	681,911.3	769,183.0



J	Informasi dan Komunikasi	561,860.7	590,644.2	666,553.1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,269,282.3	1,492,527.9	1,598,702.7
L	Real Estat	115,706.6	126,965.0	137,165.0
M,N	Jasa Perusahaan	102,817.0	114,737.2	128,653.0
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	525,297.5	537,021.9	617,009.0
Р	Jasa pendidikan	362,939.7	413,074.7	496,433.6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,086.9	239,625.1	296,640.1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	252,031.5	277,192.2	314,548.4
Produk Domestik Regional Bruto		12,284,555.7	13,629,949.0	15,055,620.0



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2013-2018 disusun dengan maksud untuk mensinergikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan RPJP Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Tujuan penyusunan RPJM Kota Cirebon adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

A. Visi dan Misi Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Visi Kota Cirebon, yaitu :

"Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018".

Rumusan Misi Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

Mewujudkan aparatur Pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius



- 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN.
- 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum
- 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 6. Peningkatan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.

B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon (RPJMD) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2014, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religious

Strategi	Arah Kebijakan
1.1.1.1.1 Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur	1.1.1.1.1 Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-tempat hiburan dan membuka kota pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS



	Strategi		Arah Kebijakan
1.2.1.1.1	Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan	1.2.1.1.1.1	Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.
1.2.2.1.1	Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan Pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota	1.2.2.1.1.1	Pembinaan Keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.
1.2.3.1.1	Peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama	1.2.3.1.1.1	Meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat beragama

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

	Strategi		Arah Kebijakan
2.1.1.1.1	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah	2.1.1.1.1.1	Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan
		2.1.1.1.1.2	Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan
2.1.1.2.1	Penerapan reward dan punishment dalam disiplin PNS	2.1.1.2.1.1	Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat
2.1.2.1.1	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	2.1.2.1.1.1	Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
2.1.2.1.2	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	2.1.2.1.2.1	Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah



	Strategi		Arah Kebijakan
2.1.2.1.3	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah	2.1.2.1.3.1	Meningkatkan peran Aparat Pengawasn Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
2.1.2.2.1	Pelaksanaan proses perencaaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	2.1.2.2.1.1	Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.
2.1.2.2.2	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD	2.1.2.2.2.1	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD
		2.1.2.2.2.2	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah
2.1.2.23	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	2.1.2.2.3.1	Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
2.1.3.1.1	Peningkatan jumlah SKPD yang tertib adm inistrasi kearsipan	2.1.3.1.1.1	Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip
2.1.3.2.1	Penyediaan arsip dalam bentuk digital	2.1.3.2.1.1	Menyediakan dokumen arsip secara digital
2.1.4.1.1	Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	2.1.4.1.1.1	Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi
2.1.4.2.1	Peningkatan iklim invetasi yang kondusif	2.1.4.2.1.1	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
		2.1.4.2.1.2	Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal
2.1.5.1.1	Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan	2.1.5.1.1.1	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan
2.2.1.1.1	Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel	2.2.1.1.1	Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumberdaya aparatur berdasarkan prinsip good governance
2.3.1.1.1	Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	2.3.1.1.1	Menyelesaikan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon



Strategi			Arah Kebijakan
2.4.1.1.1	Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi	2.4.1.1.1	Mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka insfrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar instansi, Membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan egoverment

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

IVIISI J.	Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum					
	Strategi		Arah Kebijakan			
3.1.1.1.1	Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan	3.1.1.1.1	Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/ Kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan			
3.2.1.1.1	Peningkatan peranserta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	3.2.1.1.1	Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum			
	masyarakat	3.2.1.1.1.2	Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling			
		3.2.1.1.3	Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan Kantrantibmas			
3.2.1.1.2	Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum	3.2.1.1.2.1	Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum			
		3.2.1.1.2.2	Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum			
3.3.1.1.1	Peningkatan penanganan potensi pelanggaran Perda	3.3.1.1.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam sosialisasi dan penerapan perda			
3.4.1.1.1	Penilaian K-3 tingkat RW	3.4.1.1.1	Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat			
3.5.1.1.1	Optimalisasi rekayasa,sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titk rawan kemacetan dan kecelakaan	3.5.1.1.1.1	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang			
3.5.1.1.2	Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	3.5.1.1.2.1	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor			
3.5.1.1.3	Peningkatan Keselamatan Pelayaran	3.5.1.1.3.1	Meningkatkan keselamatan pelayaran			



Strategi		Arah Kebijakan	
3.5.1.1.4	Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta Menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih	3.5.1.1.4.1	Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, Penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir diluar badan jalan (off street) serta Menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.
3.6.1.1.1	Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL	3.6.1.1.1.1	Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL
3.7.1.1.1	Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	3.7.1.1.1	Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana
3.7.1.1.2	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana	3.7.1.1.2.1	Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan,kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Strategi		Arah Kebijakan		
4.1.1.1.1	Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya	4.1.1.1.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi	
		4.1.1.1.2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah	
4.1.1.1.2	Peningkatan mutu tenaga pendidik	4.1.1.1.2.1	Meningkatkan penyelkenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah	
4.1.1.2.1	Pengembangan pendidikan non formal dan informal	4.1.1.2.1.1	Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal ditingkat RW	
		4.1.1.2.1.2	Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan Kelurahan	



Strategi		Arah Kebijakan		
4.2.1.1.1	Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	4.2.1.1.1	Mengembangkan kawasan percontohan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat disemua tatanan kehidupan (Rukun Warga, Sekolah, Perkantoran, Tempat tempat Umum)	
		4.2.1.1.1.2	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat	
4.2.1.1.2	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	4.2.1.1.2.1	Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga Kota Cirebon	
4.2.1.1.3	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	4.2.1.1.3.1	Menyediakan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		4.2.1.1.3.2	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan	
		4.2.1.1.3.3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus Kelas III	
4.2.2.1.1	Pengendalian kelahiran	4.2.2.1.1.1	Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan	
4.3.1.1.1	Pembinaan atlit berpestasi	4.3.1.1.1.1	Melakukan pembinaan atlit berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan	
4.3.1.1.2	Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	4.3.1.1.2.1	Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	
4.4.1.1.1	Penetapan kalender budaya	4.4.1.1.1.1	Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton.	
4.4.1.2.1	Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	4.4.1.2.1.1	Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian	
4.5.1.1.1	Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (Manusia, Usaha dan Lingkungan)	4.5.1.1.1.1	Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM	
		4.5.1.1.1.2	Meningkatlan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan	
4.5.1.1.2	Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja	4.5.1.1.2.1	Meningkatkan kompetensi BLK	



Strategi		Arah Kebijakan		
		4.5.1.1.2.2	Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung	
4.5.1.1.3	Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	4.5.1.1.3.1	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	
		4.5.1.1.3.2	Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan	
4.5.1.1.4	Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan	4.5.1.1.4.1	Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan	
		4.5.1.1.4.2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan	
		4.5.1.1.3.3	Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif	
4.5.1.2.1	Peningkatan promosi wisata	4.5.1.2.1.1	Meningkatkan promosi wisata budaya khas cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif	
4.6.1.1.1	Peningkatan ketepatan sasaran	4.6.1.1.1.1	Menyediakan satu data keluarga miskin	
	program penanggulangan kemiskinan	4.6.1.1.1.2	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan	
4.6.1.1.2	Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin	4.6.1.1.2.1	Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa Beasiswa rawan DO	
		4.6.1.1.2.2	Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan	
		4.6.1.1.2.3	Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin	
		4.6.1.1.2.4	Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah	
		4.6.1.1.2.5	Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi	
4.6.1.1.3	Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	4.6.1.1.3.1	Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin	



Strategi			Arah Kebijakan		
4.7.1.1.1	Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	4.7.1.1.1	Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak		
		4.7.1.1.1.2	Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan Rukun Warga Layak Anak		
4.8.1.1.1	Penanganan PMKS	4.8.1.1.1.1	Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial		
4.9.1.1.1	Penyajian data terpilah	4.9.1.1.1.1	Meningkatkan peran dan keterwakilan Gender disetiap kegiatar pembangunan		

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Strategi		Arah Kebijakan		
5.1.1.1.1	Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan	5.1.1.1.1	Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang	
5.1.2.1.1	Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat	5.1.2.1.1.1	Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW	

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Strategi		Arah Kebijakan
6.1.1.1.1 Peningkatan ruang terbuka hijau publik	6.1.1.1.1	Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani asset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH



Strategi		Arah Kebijakan	
6.1.2.1.1	Penyediaan data dan informasi serta instrument SDA dan LH secara berkesinambungan	6.1.2.1.1.1	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut
6.1.2.2.1	Penerapan instrument pengendalian dan pengawasan pencemaran, perusakan lingkungan	6.1.2.2.1.1	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi.
6.1.2.3.1	Pengendalian pelaksanaan konservasi SDA	6.1.2.3.1.1	Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim
6.1.2.4.1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	6.1.2.4.1.1	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank Sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
6.1.3.1.1	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	6.1.3.1.1.1	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat (3R, RW Zero Waste) dan penyediaan sarana prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA Kopiluhur menjadi Sanitary Landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional
6.2.1.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	6.2.1.1.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan
6.2.2.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana drainase	6.2.2.1.1.1	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder



Strategi		Arah Kebijakan	
6.2.2.1.2	Pemeliharaan sarana prasarana drainase	6.2.2.1.2.1	Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
6.2.2.1.3	Konservasi sumberdaya air	6.2.2.1.3.1	Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah
6.2.3.1.1	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	6.2.3.1.1.1	Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.
6.2.4.1.1	Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	6.2.4.1.1.1	Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku
6.3.1.1.1	Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	6.3.1.1.1	Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
		6.3.1.1.1.2	Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfataan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui.
6.4.1.1.1	Penataan lingkungan kawasan permukiman kota	6.4.1.1.1.1	Menata lingkungan permukiman dan meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.
6.4.2.1.1	Pengembangan rumah sehat sederhana	6.4.2.1.1.1	Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.



Strategi		Arah Kebijakan	
6.4.3.1.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	6.4.3.1.1.1	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, Membangun Sistem Angkutan Umum Massal, Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui Peremajaan armada bus sedang, Penambahan dan Penataan Trayek, Penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayaanan angkutan hari-hari besar
		6.4.3.1.1.2	Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, Pejalan Kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda

C. Prioritas Daerah

Arah prioritas pembangunan pada tahun 2015 diarahkan kepada:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Diperlukan kebersamaan untuk membangun kinerja bersama yang dibangun secara bertahap meningkatkan kembali semangat kerja sebagai jawaban atas solusi masalah lingkup pemerintahan, dimana saat ini sebagai contoh terjadi hambatan dalam tingkat capaian pencairan anggaran yang dinilai sangat lamban;
- b. Pembenahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan asset daerah perlu menjadi perhatian seluruh SKPD agar mempersiapkan capaian WTP di Tahun 2016 bisa tercapai;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku perencana tingkat Kota Cirebon dalam membangun suatu perencanaan yang aspiratif dan aplikatif dalam rangka peningkatan transparansi publik dan pencapaian kesesuaian APBD dan dokumen perencanaan, akan selalu mengupayakan penguatan perencanaan pembangunan daerah melalui sistim perencanaan daerah;



- d. Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas dewan, akan selalu mendorong terciptanya suasana kondusifitas antara legistalif dan eksekutif;
- e. Terkait dengan focus pemeriksaan dan pegawasan pada tahun 2015 diprioritaskan kepada E-Audit dan SPIP. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut diadakan persiapan terkait dengan hal tersebut;
- f. Pagu anggaran untuk musrenbang Kecamatan dari 17 Milyar menjadi 22 Milyar pada tahun 2015;
- g. Menaikan pagu anggaran Kecamatan dan Kelurahan;
- h. SKPD yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Kelurahan untuk wajib melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal;
- i. Meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan melalui penguatan kapasitas pegawai;
- j. Perlu menyusun standar kriteria dan proses pelaksanaan kegiatan dalam bentuk lomba-lomba yang dilaksanakan seperti lomba Zero Waste dan RW K-3, sehingga bukan hanya semata lomba tetapi bisa menjadi kegiatan yang melekat di masyarakat;
- k. Sebagai hasil aspirasi musrenbang Kecamatan sebagian besar meminta agar pelaksanaan kegiatan fisik dilaksanakan secara swakelola di Kelurahan khususnya untuk yang anggarannya dibawah 50jt. Sesuai dengan peraturan Walikota tentang kewenangan Kecamatan dan Kelurahan hal tersebut dimungkinkan dilaksanakan tetapi khusus untuk pemeliharaan prasarana kota. Dan untuk melaksanakan kegiatan swakelola perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang jasa secara swakelola kepda unsur Kelurahan dan LKK



2. Bidang Fisik dan Lingkungan

- a. Tingkat ekslarasi kerusakan insfrastruktur yang semakin tinggi (kerusakan jalan dan saluran drainase) sehingga diperlukan pemeliharaan infrastruktur kota;
- b. Kebutuhan ruang terbuka hijau beserta penataannya (taman kota);
- c. Perlu diselesaikannya beberapa dokumen turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTRK, evaluasi Perda Bangunan Gedung, RTBL, dsb);
- d. Kebutuhan akan antisipasi perubahan iklim;
- e. Penanganan bencana;
- f. Penyelesaian pembangunan fisik prioritas: embung dan Jalan Lingkar Cirebon;
- g. Pelayanan perhubungan hingga wilayah selatan;
- h. Kebutuhan Penerangan Jalan Umum terutama di wilayah selatan;
- i. Memperhatikan akan pentingnya masalah persampah dan TPA;
- j. Perlu diperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- k. Keberadaan bongkar muat batu bara di pelabuhan Cirebon agar ditinjau kembali karena merugikan masyarakat sekitar pelabuhan, khususnya berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat;
- Dalam Forum SKPD tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat yang RAMAH, oleh karena itu SKPD agar bersinergis dalam menangani masalah kota secara komprehensif;
- m. Pemasangan Lampu Lalu Lintas di beberapa persimpangan yang lintasan kendaraannya sudah mulai padat;
- n. Kebutuhan untuk membuat *elevated rail way* pada perlintasan sebidang antara rel KA dan jalan raya di Kota Cirebon;
- o. Pengaturan jalan –jalan kota yang mulai macet akibat aktifitas baru yang ada pada kawasan seperti Jalan Cangkring dan sekitarnya;
- p. Penertiban sempadan sungai;
- q. Pengaturan perparkiran di beberapa titik ruas jalan.



3. Bidang Sosial Budaya

- a. Program dan kegiatan SKPD harus mampu mewujudkan pencapaian Kota Cirebon RAMAH;
- b. Peningkatan Upaya Penangggulangan HIV/AIDS;
- c. Akreditasi Balai Latihan Kerja dan kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Pelatihan;
- d. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat menuju Visi RAMAH melalui RW Bersih dan Sehat, RW Pintar, RW Zero Waste, RW Aman/K3 termasuk jenjang tingkat pemerintahan;
- e. Menuntaskan masyarakat Kota Cirebon bebas Buta Huruf Latin;
- f. Peningkatan mutu pendidikan dengan PPDB, penyediaan biaya sekolah sampai jenjang SMA/SMK termasuk beasiswa perguruan tinggi bagi penduduk Kota Cirebon;
- g. Pengembangan pendidikan karakter melalui institusi pendidikan dan kehidupan sektor masyarakat dengan Budi Pekerti, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kepramukaan;
- h. Pengurangan dan penanggulangan masalah Gizi masyarakat secara komprehensif dan terpadu lintas sektor;
- i. Program dan kegiatan SKPD bisa saling bersinergis untuk mencapai tujuan pembangunan Bidang Sosial Budaya di Kota Cirebon; Pendidikan kedinasan, Peningkatan kapasitas SD aparatur, Pembinaan Pengembangan Aparatur;
- j. Penataan peraturan perundang-undangan, Peningkatan kenyamanan keamanan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
- k. Pengembangan budaya baca & penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen; perbaikan system adm kearsipan; peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan; peningkatan sarpras; peningkatan pemeliharaan sarana kearsipan;



- RSUD Gunungjati sebagai RS rujukan BPJS Jawa Barat bagian timur (ciayumajakuning); RS rujukan pasien MDR TB;
- m. Pelayanan Rehabilitasi kessos; Peningkatan kualitas dan produktifitas naker; Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

4. Bidang Ekonomi

- a. Pagu Anggaran khususnya SKPD lingkup Bidang Ekonomi diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat agar mendukung peningkatan IPM melalui Daya Beli Masyarakat.
- b. Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi;
- c. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
- d. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- e. Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL;
- f. Melakukan pembinaan atlit berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan;
- g. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga;
- h. Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton;
- i. Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian;



- j. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM;
- k. Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan;
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan;
- m. Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis RW, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin;
- n. Perlu adanya pemberian/reward bagi masyarakat yang dapat meningkatkan status dirinya dari miskin menjadi tidak miskin.



BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal (local government), adanya pembagian kewenangan serta terjadinya ruang gerak yang ditandai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yang lebih rendah, hal inilah yang merupakan hal terpenting perbendaan antara desentralisasi dengan sentralisasi.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom.Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi :

 Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional,



- menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luarnegeri, dan sebagainya;
- 2. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara bagi setiap warga Negara, dan sebagainya;
- Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu kemanan Negara;
- 4. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang;
- 5. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional;
- 6. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam menyelengarakan kehidupan keagamaan.

Disamping itu terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan



Kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi; Eksternalitas, Akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimum, prasarana lingkungan dasar sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan yang bersifat regional menjadi kewenangan provinsi, dan jika bersifat nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikan, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya, apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna oleh daerah provinsi dan atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah, maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sebaliknya, apabila suatu bagian



urusan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna bila ditangani oleh pemerintah, maka bagian urusan tersebut tetap ditangai oleh pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan.Adalah pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai suatu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan.



1. ANGGARAN, REALISASI, DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB & URUSAN PILIHAN

Tabel 6. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib serta Urusan Pilihan

	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENDAPATAN	1,405,279,613,842.00	1,403,866,685,439.00	(1,412,928,403.00)	99.90
Urusan Wajib	1,405,013,551,842.00	1,403,478,526,711.00	(1,535,025,131.00)	99.89
Kesehatan	172,433,472,000.00	175,648,241,367.00	3,214,769,367.00	101.86
DINAS KESEHATAN	17,433,472,000.00	17,304,577,216.00	(128,894,784.00)	99.26
RSUD GUNUNG JATI	155,000,000,000.00	158,343,664,151.00	3,343,664,151.00	102.16
Pekerjaan Umum	75,000,000.00	77,686,000.00	2,686,000.00	103.58
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	75,000,000.00	77,686,000.00	2,686,000.00	103.58
Perumahan	1,610,000,000.00	2,975,258,432.00	1,365,258,432.00	184.80
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1,610,000,000.00	2,975,258,432.00	1,365,258,432.00	184.80
Perhubungan	4,537,000,000.00	4,272,039,176.00	(264,960,824.00)	94.16
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI	4,537,000,000.00	4,272,039,176.00	(264,960,824.00)	94.16
Penanaman Modal	2,500,000,000.00	2,198,153,881.00	(301,846,119.00)	87.93
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	2,500,000,000.00	2,198,153,881.00	(301,846,119.00)	87.93
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	1,223,858,079,842.00	1,218,307,147,855.00	(5,550,931,987.00)	99.55
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,223,808,079,842.00	1,218,250,122,855.00	(5,557,956,987.00)	99.55



KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	50,000,000.00	57,025,000.00	7,025,000.00	114.05
Urusan Pilihan	266,062,000.00	388,158,728.00	122,096,728.00	145.89
Pertanian	266,062,000.00	388,158,728.00	122,096,728.00	145.89
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERTANIAN	266,062,000.00	388,158,728.00	122,096,728.00	145.89
BELANJA	1,537,537,531,490.00	1,354,751,922,315.00	(182,785,609,175.00)	88.11
Urusan Wajib	1,499,351,018,265.00	1,330,217,799,347.00	(169,133,218,918.00)	88.72
Pendidikan	482,885,815,906.00	485,255,170,362.00	2,369,354,456.00	100.49
DINAS PENDIDIKAN	482,867,815,906.00	485,237,170,362.00	2,369,354,456.00	100.49
BELANJA TIDAK LANGSUNG	336,119,758,000.00	316,905,900,873.00	(19,213,857,127.00)	94.28
Belanja Pegawai	336,119,758,000.00	316,905,900,873.00	(19,213,857,127.00)	94.28
BELANJA LANGSUNG	146,748,057,906.00	168,331,269,489.00	21,583,211,583.00	114.71
Belanja Pegawai	21,028,964,175.00	20,458,806,650.00	(570,157,525.00)	97.29
Belanja Barang dan Jasa	45,531,938,359.00	63,494,364,499.00	17,962,426,140.00	139.45
Belanja Modal	80,187,155,372.00	84,378,098,340.00	4,190,942,968.00	105.23
KELURAHAN KALIJAGA	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	13,460,000.00	13,460,000.00	0.00	100.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
Kesehatan	368,491,715,549.00	326,320,653,169.00	(42,171,062,380.00)	88.56
DINAS KESEHATAN	101,112,250,692.00	87,384,845,770.00	(13,727,404,922.00)	86.42
BELANJA TIDAK LANGSUNG	41,566,823,000.00	40,913,952,676.00	(652,870,324.00)	98.43
Belanja Pegawai	41,566,823,000.00	40,913,952,676.00	(652,870,324.00)	98.43



		_		
BELANJA LANGSUNG	59,545,427,692.00	46,470,893,094.00	(13,074,534,598.00)	78.04
Belanja Pegawai	3,616,988,000.00	3,327,607,500.00	(289,380,500.00)	92.00
Belanja Barang dan Jasa	45,414,413,867.39	38,175,758,232.00	(7,238,655,635.39)	84.06
Belanja Modal	10,514,025,824.61	4,967,527,362.00	(5,546,498,462.61)	47.25
RSUD GUNUNG JATI	267,342,375,857.00	238,900,818,399.00	(28,441,557,458.00)	89.36
BELANJA TIDAK LANGSUNG	50,738,871,000.00	50,021,052,843.00	(717,818,157.00)	98.59
Belanja Pegawai	50,738,871,000.00	50,021,052,843.00	(717,818,157.00)	98.59
BELANJA LANGSUNG	216,603,504,857.00	188,879,765,556.00	(27,723,739,301.00)	87.20
Belanja Pegawai	291,987,500.00	256,225,500.00	(35,762,000.00)	87.75
Belanja Barang dan Jasa	201,378,594,502.00	174,925,622,209.00	(26,452,972,293.00)	86.86
Belanja Modal	14,932,922,855.00	13,697,917,847.00	(1,235,005,008.00)	91.73
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	27,100,000.00	26,150,000.00	(950,000.00)	96.49
BELANJA LANGSUNG	27,100,000.00	26,150,000.00	(950,000.00)	96.49
Belanja Pegawai	6,435,000.00	6,435,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	20,665,000.00	19,715,000.00	(950,000.00)	95.40
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	9,989,000.00	8,839,000.00	(1,150,000.00)	88.49
BELANJA LANGSUNG	9,989,000.00	8,839,000.00	(1,150,000.00)	88.49
Belanja Pegawai	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	6,989,000.00	5,839,000.00	(1,150,000.00)	83.55
Pekerjaan Umum	235,728,577,905.00	132,217,074,909.00	(103,511,502,996.00)	56.09
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	232,560,621,650.00	129,080,418,641.00	(103,480,203,009.00)	55.50
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,844,093,000.00	6,730,129,139.00	(113,963,861.00)	98.33
Belanja Pegawai	6,844,093,000.00	6,730,129,139.00	(113,963,861.00)	98.33
BELANJA LANGSUNG	225,716,528,650.00	122,350,289,502.00	(103,366,239,148.00)	54.21



	0.000.054.500.00	0.000.005.500.00	(4 500 000 000 000	04.00
Belanja Pegawai	8,336,251,500.00	6,802,625,500.00	(1,533,626,000.00)	81.60
Belanja Barang dan Jasa	13,242,581,150.00	12,651,524,302.00	(591,056,848.00)	95.54
Belanja Modal	204,137,696,000.00	102,896,139,700.00	(101,241,556,300.00)	50.41
KELURAHAN KEJAKSAN	385,173,600.00	382,695,000.00	(2,478,600.00)	99.36
BELANJA LANGSUNG	385,173,600.00	382,695,000.00	(2,478,600.00)	99.36
Belanja Pegawai	13,640,000.00	13,640,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	100.00
Belanja Modal	370,453,600.00	367,975,000.00	(2,478,600.00)	99.33
KELURAHAN KEBON BARU	378,545,000.00	373,482,000.00	(5,063,000.00)	98.66
BELANJA LANGSUNG	378,545,000.00	373,482,000.00	(5,063,000.00)	98.66
Belanja Pegawai	19,945,000.00	19,945,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	358,600,000.00	353,537,000.00	(5,063,000.00)	98.59
KELURAHAN KESENDEN	400,721,627.00	392,200,000.00	(8,521,627.00)	97.87
BELANJA LANGSUNG	400,721,627.00	392,200,000.00	(8,521,627.00)	97.87
Belanja Pegawai	25,650,000.00	23,350,000.00	(2,300,000.00)	91.03
Belanja Barang dan Jasa	6,600,000.00	3,400,000.00	(3,200,000.00)	51.52
Belanja Modal	368,471,627.00	365,450,000.00	(3,021,627.00)	99.18
KELURAHAN SUKAPURA	230,269,000.00	229,779,668.00	(489,332.00)	99.79
BELANJA LANGSUNG	230,269,000.00	229,779,668.00	(489,332.00)	99.79
Belanja Pegawai	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	216,349,000.00	215,859,668.00	(489,332.00)	99.77
KELURAHAN KESAMBI	65,890,000.00	64,230,000.00	(1,660,000.00)	97.48
BELANJA LANGSUNG	65,890,000.00	64,230,000.00	(1,660,000.00)	97.48
Belanja Pegawai	5,390,000.00	4,230,000.00	(1,160,000.00)	78.48



		_		
Belanja Barang dan Jasa	60,500,000.00	60,000,000.00	(500,000.00)	99.17
KELURAHAN DRAJAT	247,160,100.00	246,575,000.00	(585,100.00)	99.76
BELANJA LANGSUNG	247,160,100.00	246,575,000.00	(585,100.00)	99.76
Belanja Pegawai	6,320,000.00	6,320,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	400,000.00	300,000.00	(100,000.00)	75.00
Belanja Modal	240,440,100.00	239,955,000.00	(485,100.00)	99.80
KELURAHAN PEKIRINGAN	174,315,000.00	173,485,000.00	(830,000.00)	99.52
BELANJA LANGSUNG	174,315,000.00	173,485,000.00	(830,000.00)	99.52
Belanja Pegawai	3,645,000.00	2,975,000.00	(670,000.00)	81.62
Belanja Barang dan Jasa	170,670,000.00	170,510,000.00	(160,000.00)	99.91
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	496,700,000.00	487,650,000.00	(9,050,000.00)	98.18
BELANJA LANGSUNG	496,700,000.00	487,650,000.00	(9,050,000.00)	98.18
Belanja Pegawai	36,700,000.00	29,600,000.00	(7,100,000.00)	80.65
Belanja Barang dan Jasa	460,000,000.00	458,050,000.00	(1,950,000.00)	99.58
KELURAHAN PANJUNAN	50,918,300.00	50,918,300.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	50,918,300.00	50,918,300.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	15,260,000.00	15,260,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	35,658,300.00	35,658,300.00	0.00	100.00
KELURAHAN KASEPUHAN	88,975,000.00	88,600,000.00	(375,000.00)	99.58
BELANJA LANGSUNG	88,975,000.00	88,600,000.00	(375,000.00)	99.58
Belanja Pegawai	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	125,000.00	0.00	(125,000.00)	0.00
Belanja Modal	82,050,000.00	81,800,000.00	(250,000.00)	99.70



KELURAHAN PEKALIPAN	65,200,000.00	65,200,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	65,200,000.00	65,200,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN PEKALANGAN	44,440,000.00	44,440,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	44,440,000.00	44,440,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	40,600,000.00	40,600,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN JAGASATRU	309,021,628.00	307,980,000.00	(1,041,628.00)	99.66
BELANJA LANGSUNG	309,021,628.00	307,980,000.00	(1,041,628.00)	99.66
Belanja Pegawai	3,845,000.00	3,840,000.00	(5,000.00)	99.87
Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
Belanja Modal	304,676,628.00	303,640,000.00	(1,036,628.00)	99.66
KELURAHAN KALIJAGA	230,627,000.00	229,421,300.00	(1,205,700.00)	99.48
BELANJA LANGSUNG	230,627,000.00	229,421,300.00	(1,205,700.00)	99.48
Belanja Pegawai	11,915,000.00	11,915,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	20,712,000.00	20,157,400.00	(554,600.00)	97.32
Belanja Modal	198,000,000.00	197,348,900.00	(651,100.00)	99.67
Perumahan	19,922,817,150.00	19,211,039,312.00	(711,777,838.00)	96.43
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	492,045,000.00	397,321,000.00	(94,724,000.00)	80.75
BELANJA LANGSUNG	492,045,000.00	397,321,000.00	(94,724,000.00)	80.75
Belanja Pegawai	88,070,000.00	22,050,000.00	(66,020,000.00)	25.04
Belanja Barang dan Jasa	403,975,000.00	375,271,000.00	(28,704,000.00)	92.89
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	19,430,772,150.00	18,813,718,312.00	(617,053,838.00)	96.82



BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,739,450,000.00	14,574,146,942.00	(165,303,058.00)	98.88
Belanja Pegawai	14,739,450,000.00	14,574,146,942.00	(165,303,058.00)	98.88
BELANJA LANGSUNG	4,691,322,150.00	4,239,571,370.00	(451,750,780.00)	90.37
Belanja Pegawai	1,792,239,400.00	1,528,891,300.00	(263,348,100.00)	85.31
Belanja Barang dan Jasa	1,558,316,750.00	1,391,136,070.00	(167,180,680.00)	89.27
Belanja Modal	1,340,766,000.00	1,319,544,000.00	(21,222,000.00)	98.42
Penataan Ruang	684,360,000.00	517,350,000.00	(167,010,000.00)	75.60
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	409,980,000.00	271,910,000.00	(138,070,000.00)	66.32
BELANJA LANGSUNG	409,980,000.00	271,910,000.00	(138,070,000.00)	66.32
Belanja Pegawai	198,840,000.00	198,840,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	211,140,000.00	73,070,000.00	(138,070,000.00)	34.61
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	274,380,000.00	245,440,000.00	(28,940,000.00)	89.45
BELANJA LANGSUNG	274,380,000.00	245,440,000.00	(28,940,000.00)	89.45
Belanja Pegawai	209,970,000.00	202,670,000.00	(7,300,000.00)	96.52
Belanja Barang dan Jasa	64,410,000.00	42,770,000.00	(21,640,000.00)	66.40
Perencanaan Pembangunan	11,232,295,600.00	10,245,728,657.00	(986,566,943.00)	91.22
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11,123,131,800.00	10,139,702,957.00	(983,428,843.00)	91.16
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,516,632,000.00	3,390,162,241.00	(126,469,759.00)	96.40
Belanja Pegawai	3,516,632,000.00	3,390,162,241.00	(126,469,759.00)	96.40
BELANJA LANGSUNG	7,606,499,800.00	6,749,540,716.00	(856,959,084.00)	88.73
Belanja Pegawai	2,893,818,000.00	2,665,937,000.00	(227,881,000.00)	92.13
Belanja Barang dan Jasa	3,654,602,100.00	3,070,766,216.00	(583,835,884.00)	84.02
Belanja Modal	1,058,079,700.00	1,012,837,500.00	(45,242,200.00)	95.72
KECAMATAN KEJAKSAN	19,690,000.00	19,588,000.00	(102,000.00)	99.48



		•		
BELANJA LANGSUNG	19,690,000.00	19,588,000.00	(102,000.00)	99.48
Belanja Pegawai	11,968,000.00	11,968,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	7,722,000.00	7,620,000.00	(102,000.00)	98.68
KECAMATAN PEKALIPAN	21,475,000.00	20,475,000.00	(1,000,000.00)	95.34
BELANJA LANGSUNG	21,475,000.00	20,475,000.00	(1,000,000.00)	95.34
Belanja Pegawai	9,835,000.00	8,835,000.00	(1,000,000.00)	89.83
Belanja Barang dan Jasa	11,640,000.00	11,640,000.00	0.00	100.00
KECAMATAN KESAMBI	26,168,800.00	25,632,700.00	(536,100.00)	97.95
BELANJA LANGSUNG	26,168,800.00	25,632,700.00	(536,100.00)	97.95
Belanja Pegawai	16,235,000.00	16,235,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	9,933,800.00	9,397,700.00	(536,100.00)	94.60
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	16,560,000.00	15,060,000.00	(1,500,000.00)	90.94
BELANJA LANGSUNG	16,560,000.00	15,060,000.00	(1,500,000.00)	90.94
Belanja Pegawai	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	8,760,000.00	7,260,000.00	(1,500,000.00)	82.88
KECAMATAN HARJAMUKTI	25,270,000.00	25,270,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	25,270,000.00	25,270,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	15,175,000.00	15,175,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	10,095,000.00	10,095,000.00	0.00	100.00
Perhubungan	31,792,491,700.00	31,100,388,978.00	(692,102,722.00)	97.82
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI	31,742,491,700.00	31,051,588,978.00	(690,902,722.00)	97.82
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,347,560,000.00	12,159,244,050.00	(188,315,950.00)	98.47
Belanja Pegawai	12,347,560,000.00	12,159,244,050.00	(188,315,950.00)	98.47
BELANJA LANGSUNG	19,394,931,700.00	18,892,344,928.00	(502,586,772.00)	97.41



			_				
Belanja Pegawai	1,707,438	3,000.00	1,664,54	9,000.00	(42,88	9,000.00)	97.49
Belanja Barang dan Jasa	15,722,653	3,900.00	15,135,62	9,834.00	(587,024	4,066.00)	96.27
Belanja Modal	1,964,839	9,800.00	2,092,16	6,094.00	127,32	26,294.00	106.48
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	50,000	0,000.00	48,80	0,000.00	(1,20	0,000.00)	97.60
BELANJA LANGSUNG	50,000	0,000.00	48,80	0,000.00	(1,20	0,000.00)	97.60
Belanja Pegawai	4,400	0,000.00	3,70	0,000.00	(70	0,000.00)	84.09
Belanja Modal	45,600	0,000.00	45,10	0,000.00	(50	0,000.00)	98.90
Lingkungan Hidup	20,284,79	7,007.00	23,945,91	3,620.00	3,661,11	6,613.00	118.05
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	16,329,870	0,007.00	20,176,02	2,181.00	3,846,15	52,174.00	123.55
BELANJA LANGSUNG	16,329,870	0,007.00	20,176,02	2,181.00	3,846,15	52,174.00	123.55
Belanja Pegawai	491,890	0,000.00	475,46	4,000.00	(16,42	6,000.00)	96.66
Belanja Barang dan Jasa	6,931,154	4,207.00	6,844,58	8,681.00	(86,56	5,526.00)	98.75
Belanja Modal	8,906,829	5,800.00	12,855,96	9,500.00	3,949,14	3,700.00	144.34
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	3,816,900	0,000.00	3,634,34	2,439.00	(182,55	7,561.00)	95.22
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,236,333	3,000.00	1,192,38	7,445.00	(43,94	5,555.00)	96.45
Belanja Pegawai	1,236,333	3,000.00	1,192,38	7,445.00	(43,94	5,555.00)	96.45
BELANJA LANGSUNG	2,580,567	7,000.00	2,441,95	4,994.00	(138,61)	2,006.00)	94.63
Belanja Pegawai	508,418	5,000.00	467,95	1,000.00	(40,46	4,000.00)	92.04
Belanja Barang dan Jasa	1,344,239	1,344,239,000.00		3,994.00	(93,03	5,006.00)	93.08
Belanja Modal	727,913	727,913,000.00		0,000.00	(5,11	3,000.00)	99.30
KELURAHAN SUNYARAGI	23,917	23,917,000.00		8,000.00	(159	9,000.00)	99.34
BELANJA LANGSUNG	23,917	17,000.00 23,758,000.00		(159	9,000.00)	99.34	
Belanja Pegawai	9,12	7,000.00	8,96	8,000.00	(15	9,000.00)	98.26
Belanja Barang dan Jasa	14,790,000.00		14,790,000.00		0.00	100.00	j



KELURAHAN DRAJAT	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA LANGSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	85,000,000.00	82,881,000.00	(2,119,000.00)	97.51
BELANJA LANGSUNG	85,000,000.00	82,881,000.00	(2,119,000.00)	97.51
Belanja Pegawai	10,375,000.00	8,625,000.00	(1,750,000.00)	83.13
Belanja Barang dan Jasa	74,625,000.00	74,256,000.00	(369,000.00)	99.51
KELURAHAN PULASAREN	29,110,000.00	28,910,000.00	(200,000.00)	99.31
BELANJA LANGSUNG	29,110,000.00	28,910,000.00	(200,000.00)	99.31
Belanja Pegawai	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	360,000.00	360,000.00	0.00	100.00
Belanja Modal	28,000,000.00	27,800,000.00	(200,000.00)	99.29
Pertanahan	10,000,000,000.00	8,930,791,649.00	(1,069,208,351.00)	89.31
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10,000,000,000.00	8,930,791,649.00	(1,069,208,351.00)	89.31
BELANJA LANGSUNG	10,000,000,000.00	8,930,791,649.00	(1,069,208,351.00)	89.31
Belanja Pegawai	124,550,000.00	95,350,000.00	(29,200,000.00)	76.56
Belanja Barang dan Jasa	75,450,000.00	3,900,000.00	(71,550,000.00)	5.17
Belanja Modal	9,800,000,000.00	8,831,541,649.00	(968,458,351.00)	90.12
Kependudukan dan Catatan Sipil	7,125,602,300.00	6,776,704,233.00	(348,898,067.00)	95.10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,125,602,300.00	6,776,704,233.00	(348,898,067.00)	95.10
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,017,681,000.00	2,962,168,788.00	(55,512,212.00)	98.16
Belanja Pegawai	3,017,681,000.00	2,962,168,788.00	(55,512,212.00)	98.16



BELANJA LANGSUNG	4,107,921,300.00	3,814,535,445.00	(293,385,855.00)	92.86
Belanja Pegawai	1,797,709,000.00	1,766,520,000.00	(31,189,000.00)	98.27
Belanja Barang dan Jasa	2,043,222,300.00	1,790,655,445.00	(252,566,855.00)	87.64
Belanja Modal	266,990,000.00	257,360,000.00	(9,630,000.00)	96.39
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	311,031,000.00	303,211,000.00	(7,820,000.00)	97.49
KELURAHAN PANJUNAN	4,021,000.00	4,021,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	4,021,000.00	4,021,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	2,121,000.00	2,121,000.00	0.00	100.00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	307,010,000.00	299,190,000.00	(7,820,000.00)	97.45
BELANJA LANGSUNG	307,010,000.00	299,190,000.00	(7,820,000.00)	97.45
Belanja Pegawai	92,470,000.00	92,085,000.00	(385,000.00)	99.58
Belanja Barang dan Jasa	214,540,000.00	207,105,000.00	(7,435,000.00)	96.53
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1,295,075,000.00	1,243,259,000.00	(51,816,000.00)	96.00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	1,295,075,000.00	1,243,259,000.00	(51,816,000.00)	96.00
BELANJA LANGSUNG	1,295,075,000.00	1,243,259,000.00	(51,816,000.00)	96.00
Belanja Pegawai	311,754,000.00	309,704,000.00	(2,050,000.00)	99.34
Belanja Barang dan Jasa	301,684,000.00	287,255,000.00	(14,429,000.00)	95.22
Belanja Modal	681,637,000.00	646,300,000.00	(35,337,000.00)	94.82
Sosial	5,457,105,500.00	5,116,977,708.00	(340,127,792.00)	93.77
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5,388,079,000.00	5,049,751,208.00	(338,327,792.00)	93.72
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,712,365,000.00	3,638,643,595.00	(73,721,405.00)	98.01
Belanja Pegawai	3,712,365,000.00	3,638,643,595.00	(73,721,405.00)	98.01



			(
BELANJA LANGSUNG	1,675,714,000.00	1,411,107,613.00	(264,606,387.00)	84.21
Belanja Pegawai	238,905,500.00	238,335,500.00	(570,000.00)	99.76
Belanja Barang dan Jasa	1,321,408,500.00	1,059,038,163.00	(262,370,337.00)	80.14
Belanja Modal	115,400,000.00	113,733,950.00	(1,666,050.00)	98.56
KELURAHAN PANJUNAN	9,800,000.00	9,700,000.00	(100,000.00)	98.98
BELANJA LANGSUNG	9,800,000.00	9,700,000.00	(100,000.00)	98.98
Belanja Pegawai	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	7,400,000.00	7,300,000.00	(100,000.00)	98.65
KELURAHAN ARGASUNYA	59,226,500.00	57,526,500.00	(1,700,000.00)	97.13
BELANJA LANGSUNG	59,226,500.00	57,526,500.00	(1,700,000.00)	97.13
Belanja Pegawai	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	48,476,500.00	46,776,500.00	(1,700,000.00)	96.49
Tenaga Kerja	395,000,000.00	394,052,250.00	(947,750.00)	99.76
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	395,000,000.00	394,052,250.00	(947,750.00)	99.76
BELANJA LANGSUNG	395,000,000.00	394,052,250.00	(947,750.00)	99.76
Belanja Pegawai	195,522,500.00	195,522,500.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	199,477,500.00	198,529,750.00	(947,750.00)	99.52
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,975,467,850.00	2,380,798,500.00	(594,669,350.00)	80.01
KECAMATAN PEKALIPAN	12,265,000.00	12,265,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	12,265,000.00	12,265,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	5,665,000.00	5,665,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN PANJUNAN	45,750,000.00	43,414,000.00	(2,336,000.00)	94.89
BELANJA LANGSUNG	45,750,000.00	43,414,000.00	(2,336,000.00)	94.89



Delevie Degevei	4 670 000 00	4 500 000 00	(450,000,00)	96.79
Belanja Pegawai	4,670,000.00	4,520,000.00	(150,000.00)	
Belanja Barang dan Jasa	41,080,000.00	38,894,000.00	(2,186,000.00)	94.68
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	2,917,452,850.00	2,325,119,500.00	(592,333,350.00)	79.70
BELANJA LANGSUNG	2,917,452,850.00	2,325,119,500.00	(592,333,350.00)	79.70
Belanja Pegawai	501,270,000.00	447,970,000.00	(53,300,000.00)	89.37
Belanja Barang dan Jasa	2,416,182,850.00	1,877,149,500.00	(539,033,350.00)	77.69
Penanaman Modal	6,348,144,750.00	6,159,748,827.00	(188,395,923.00)	97.03
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	6,348,144,750.00	6,159,748,827.00	(188,395,923.00)	97.03
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,212,841,000.00	3,156,726,624.00	(56,114,376.00)	98.25
Belanja Pegawai	3,212,841,000.00	3,156,726,624.00	(56,114,376.00)	98.25
BELANJA LANGSUNG	3,135,303,750.00	3,003,022,203.00	(132,281,547.00)	95.78
Belanja Pegawai	597,217,800.00	592,623,300.00	(4,594,500.00)	99.23
Belanja Barang dan Jasa	2,410,655,950.00	2,285,049,903.00	(125,606,047.00)	94.79
Belanja Modal	127,430,000.00	125,349,000.00	(2,081,000.00)	98.37
Kebudayaan	5,608,177,800.00	5,341,691,351.00	(266,486,449.00)	95.25
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5,505,239,800.00	5,245,407,351.00	(259,832,449.00)	95.28
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,574,917,000.00	3,468,673,018.00	(106,243,982.00)	97.03
Belanja Pegawai	3,574,917,000.00	3,468,673,018.00	(106,243,982.00)	97.03
BELANJA LANGSUNG	1,930,322,800.00	1,776,734,333.00	(153,588,467.00)	92.04
Belanja Pegawai	253,382,500.00	236,622,500.00	(16,760,000.00)	93.39
Belanja Barang dan Jasa	1,468,730,800.00	1,332,717,333.00	(136,013,467.00)	90.74
Belanja Modal	208,209,500.00	207,394,500.00	(815,000.00)	99.61
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	66,790,000.00	65,475,000.00	(1,315,000.00)	98.03



BELANJA LANGSUNG	66,790,000.00	65,475,000.00	(1,315,000.00)	98.03
Belanja Pegawai	42,260,000.00	41,220,000.00	(1,040,000.00)	97.54
Belanja Barang dan Jasa	24,530,000.00	24,255,000.00	(275,000.00)	98.88
KELURAHAN KEJAKSAN	24,830,000.00	24,830,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	24,830,000.00	24,830,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	20,630,000.00	20,630,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN SUNYARAGI	11,318,000.00	5,979,000.00	(5,339,000.00)	52.83
BELANJA LANGSUNG	11,318,000.00	5,979,000.00	(5,339,000.00)	52.83
Belanja Pegawai	4,158,000.00	2,938,000.00	(1,220,000.00)	70.66
Belanja Barang dan Jasa	7,160,000.00	3,041,000.00	(4,119,000.00)	42.47
Pemuda dan Olah Raga	3,406,135,000.00	3,868,377,750.00	462,242,750.00	113.57
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,012,243,500.00	3,528,279,000.00	516,035,500.00	117.13
BELANJA LANGSUNG	3,012,243,500.00	3,528,279,000.00	516,035,500.00	117.13
Belanja Pegawai	463,076,000.00	460,826,000.00	(2,250,000.00)	99.51
Belanja Barang dan Jasa	1,500,857,500.00	1,478,130,000.00	(22,727,500.00)	98.49
Belanja Modal	1,048,310,000.00	1,589,323,000.00	541,013,000.00	151.61
KECAMATAN KEJAKSAN	4,950,000.00	4,585,500.00	(364,500.00)	92.64
BELANJA LANGSUNG	4,950,000.00	4,585,500.00	(364,500.00)	92.64
Belanja Pegawai	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	1,925,000.00	1,560,500.00	(364,500.00)	81.06
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	31,400,000.00	20,120,000.00	(11,280,000.00)	64.08
BELANJA LANGSUNG	31,400,000.00	20,120,000.00	(11,280,000.00)	64.08
Belanja Pegawai	16,350,000.00	6,100,000.00	(10,250,000.00)	37.31



		-		
Belanja Barang dan Jasa	15,050,000.00	14,020,000.00	(1,030,000.00)	93.16
KECAMATAN HARJAMUKTI	54,250,000.00	54,250,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	54,250,000.00	54,250,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	16,350,000.00	16,350,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	37,900,000.00	37,900,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN SUNYARAGI	36,168,000.00	35,691,000.00	(477,000.00)	98.68
BELANJA LANGSUNG	36,168,000.00	35,691,000.00	(477,000.00)	98.68
Belanja Pegawai	6,483,000.00	6,006,000.00	(477,000.00)	92.64
Belanja Barang dan Jasa	29,685,000.00	29,685,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN PEKIRINGAN	47,843,000.00	47,340,400.00	(502,600.00)	98.95
BELANJA LANGSUNG	47,843,000.00	47,340,400.00	(502,600.00)	98.95
Belanja Pegawai	6,690,000.00	6,690,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	41,153,000.00	40,650,400.00	(502,600.00)	98.78
KELURAHAN PANJUNAN	106,130,500.00	65,314,800.00	(40,815,700.00)	61.54
BELANJA LANGSUNG	106,130,500.00	65,314,800.00	(40,815,700.00)	61.54
Belanja Pegawai	24,399,000.00	13,804,000.00	(10,595,000.00)	56.58
Belanja Barang dan Jasa	81,731,500.00	51,510,800.00	(30,220,700.00)	63.02
KELURAHAN HARJAMUKTI	44,955,000.00	44,602,050.00	(352,950.00)	99.21
BELANJA LANGSUNG	44,955,000.00	44,602,050.00	(352,950.00)	99.21
Belanja Pegawai	15,325,000.00	15,325,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	29,630,000.00	29,277,050.00	(352,950.00)	98.81
KELURAHAN KALIJAGA	27,945,000.00	27,945,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	27,945,000.00	27,945,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	7,045,000.00	7,045,000.00	0.00	100.00



		-		
Belanja Barang dan Jasa	20,900,000.00	20,900,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN KECAPI	40,250,000.00	40,250,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	40,250,000.00	40,250,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	8,425,000.00	8,425,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	31,825,000.00	31,825,000.00	0.00	100.00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	13,616,155,899.00	13,067,707,840.00	(548,448,059.00)	95.97
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI	2,340,885,849.00	2,204,004,111.00	(136,881,738.00)	94.15
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,137,907,000.00	1,111,372,520.00	(26,534,480.00)	97.67
Belanja Pegawai	1,137,907,000.00	1,111,372,520.00	(26,534,480.00)	97.67
BELANJA LANGSUNG	1,202,978,849.00	1,092,631,591.00	(110,347,258.00)	90.83
Belanja Pegawai	487,154,008.00	469,849,000.00	(17,305,008.00)	96.45
Belanja Barang dan Jasa	611,025,141.00	520,068,591.00	(90,956,550.00)	85.11
Belanja Modal	104,799,700.00	102,714,000.00	(2,085,700.00)	98.01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11,171,038,800.00	10,770,922,479.00	(400,116,321.00)	96.42
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,082,176,000.00	4,982,536,049.00	(99,639,951.00)	98.04
Belanja Pegawai	5,082,176,000.00	4,982,536,049.00	(99,639,951.00)	98.04
BELANJA LANGSUNG	6,088,862,800.00	5,788,386,430.00	(300,476,370.00)	95.07
Belanja Pegawai	1,277,960,000.00	1,159,815,000.00	(118,145,000.00)	90.76
Belanja Barang dan Jasa	1,762,476,800.00	1,651,731,694.00	(110,745,106.00)	93.72
Belanja Modal	3,048,426,000.00	2,976,839,736.00	(71,586,264.00)	97.65
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	25,050,000.00	14,160,000.00	(10,890,000.00)	56.53
BELANJA LANGSUNG	25,050,000.00	14,160,000.00	(10,890,000.00)	56.53
Belanja Pegawai	6,550,000.00	4,750,000.00	(1,800,000.00)	72.52
Belanja Barang dan Jasa	18,500,000.00	9,410,000.00	(9,090,000.00)	50.86



KELURAHAN PANJUNAN	59,131,250.00	58,571,250.00	(560,000.00)	99.05
BELANJA LANGSUNG	59,131,250.00	58,571,250.00	(560,000.00)	99.05
Belanja Pegawai	9,110,000.00	9,110,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	50,021,250.00	49,461,250.00	(560,000.00)	98.88
KELURAHAN ARGASUNYA	20,050,000.00	20,050,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	20,050,000.00	20,050,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	13,250,000.00	13,250,000.00	0.00	100.00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	245,236,160,639.00	222,560,609,473.00	(22,675,551,166.00)	90.75
INSPEKTORAT	7,972,370,700.00	7,485,060,944.00	(487,309,756.00)	93.89
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,416,309,000.00	4,309,786,444.00	(106,522,556.00)	97.59
Belanja Pegawai	4,416,309,000.00	4,309,786,444.00	(106,522,556.00)	97.59
BELANJA LANGSUNG	3,556,061,700.00	3,175,274,500.00	(380,787,200.00)	89.29
Belanja Pegawai	2,188,781,000.00	2,070,726,000.00	(118,055,000.00)	94.61
Belanja Barang dan Jasa	1,367,280,700.00	1,104,548,500.00	(262,732,200.00)	80.78
SEKRETARIAT DAERAH	53,851,106,925.00	44,881,797,813.00	(8,969,309,112.00)	83.34
BELANJA TIDAK LANGSUNG	15,568,397,000.00	14,658,444,796.00	(909,952,204.00)	94.16
Belanja Pegawai	15,568,397,000.00	14,658,444,796.00	(909,952,204.00)	94.16
BELANJA LANGSUNG	38,282,709,925.00	30,223,353,017.00	(8,059,356,908.00)	78.95
Belanja Pegawai	6,921,290,525.00	5,191,269,250.00	(1,730,021,275.00)	75.00
Belanja Barang dan Jasa	27,397,304,900.00	21,350,391,317.00	(6,046,913,583.00)	77.93
Belanja Modal	3,964,114,500.00	3,681,692,450.00	(282,422,050.00)	92.88
SEKRETARIAT DPRD	17,426,506,998.00	14,965,181,461.00	(2,461,325,537.00)	85.88



BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,107,544,000.00	3,013,275,047.00	(94,268,953.00)	96.97
Belanja Pegawai	3,107,544,000.00	3,013,275,047.00	(94,268,953.00)	96.97
BELANJA LANGSUNG	14,318,962,998.00	11,951,906,414.00	(2,367,056,584.00)	83.47
Belanja Pegawai	966,623,500.00	814,161,000.00	(152,462,500.00)	84.23
Belanja Barang dan Jasa	12,734,581,498.00	10,574,037,414.00	(2,160,544,084.00)	83.03
Belanja Modal	617,758,000.00	563,708,000.00	(54,050,000.00)	91.25
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	11,077,894,930.00	10,473,855,912.00	(604,039,018.00)	94.55
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,437,292,000.00	5,319,499,750.00	(117,792,250.00)	97.83
Belanja Pegawai	5,437,292,000.00	5,319,499,750.00	(117,792,250.00)	97.83
BELANJA LANGSUNG	5,640,602,930.00	5,154,356,162.00	(486,246,768.00)	91.38
Belanja Pegawai	1,920,165,500.00	1,785,438,980.00	(134,726,520.00)	92.98
Belanja Barang dan Jasa	3,555,016,680.00	3,210,717,182.00	(344,299,498.00)	90.32
Belanja Modal	165,420,750.00	158,200,000.00	(7,220,750.00)	95.63
KECAMATAN KEJAKSAN	1,991,112,500.00	1,878,102,676.00	(113,009,824.00)	94.32
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,289,539,000.00	1,247,046,363.00	(42,492,637.00)	96.70
Belanja Pegawai	1,289,539,000.00	1,247,046,363.00	(42,492,637.00)	96.70
BELANJA LANGSUNG	701,573,500.00	631,056,313.00	(70,517,187.00)	89.95
Belanja Pegawai	76,264,500.00	74,469,500.00	(1,795,000.00)	97.65
Belanja Barang dan Jasa	498,315,500.00	430,566,813.00	(67,748,687.00)	86.40
Belanja Modal	126,993,500.00	126,020,000.00	(973,500.00)	99.23
KECAMATAN PEKALIPAN	2,111,332,600.00	1,956,593,807.00	(154,738,793.00)	92.67
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,291,647,000.00	1,258,851,612.00	(32,795,388.00)	97.46
Belanja Pegawai	1,291,647,000.00	1,258,851,612.00	(32,795,388.00)	97.46
BELANJA LANGSUNG	819,685,600.00	697,742,195.00	(121,943,405.00)	85.12



		•		
Belanja Pegawai	136,402,500.00	123,677,500.00	(12,725,000.00)	90.67
Belanja Barang dan Jasa	448,914,100.00	353,094,395.00	(95,819,705.00)	78.66
Belanja Modal	234,369,000.00	220,970,300.00	(13,398,700.00)	94.28
KECAMATAN KESAMBI	1,944,930,900.00	1,876,275,606.00	(68,655,294.00)	96.47
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,340,672,000.00	1,296,425,453.00	(44,246,547.00)	96.70
Belanja Pegawai	1,340,672,000.00	1,296,425,453.00	(44,246,547.00)	96.70
BELANJA LANGSUNG	604,258,900.00	579,850,153.00	(24,408,747.00)	95.96
Belanja Pegawai	92,355,000.00	90,777,000.00	(1,578,000.00)	98.29
Belanja Barang dan Jasa	411,195,700.00	389,032,153.00	(22,163,547.00)	94.61
Belanja Modal	100,708,200.00	100,041,000.00	(667,200.00)	99.34
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	1,970,242,500.00	1,861,256,257.00	(108,986,243.00)	94.47
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,566,176,000.00	1,498,975,021.00	(67,200,979.00)	95.71
Belanja Pegawai	1,566,176,000.00	1,498,975,021.00	(67,200,979.00)	95.71
BELANJA LANGSUNG	404,066,500.00	362,281,236.00	(41,785,264.00)	89.66
Belanja Pegawai	43,370,000.00	43,368,000.00	(2,000.00)	100.00
Belanja Barang dan Jasa	331,458,500.00	290,200,236.00	(41,258,264.00)	87.55
Belanja Modal	29,238,000.00	28,713,000.00	(525,000.00)	98.20
KECAMATAN HARJAMUKTI	2,003,848,950.00	1,935,678,397.00	(68,170,553.00)	96.60
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,494,999,000.00	1,448,065,466.00	(46,933,534.00)	96.86
Belanja Pegawai	1,494,999,000.00	1,448,065,466.00	(46,933,534.00)	96.86
BELANJA LANGSUNG	508,849,950.00	487,612,931.00	(21,237,019.00)	95.83
Belanja Pegawai	64,075,000.00	63,625,000.00	(450,000.00)	99.30
Belanja Barang dan Jasa	385,274,950.00	364,487,931.00	(20,787,019.00)	94.60
Belanja Modal	59,500,000.00	59,500,000.00	0.00	100.00



DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	96,442,807,859.00	89,563,061,258.00	(6,879,746,601.00)	92.87
BELANJA TIDAK LANGSUNG	79,207,801,433.00	73,832,934,279.00	(5,374,867,154.00)	93.21
Belanja Pegawai	30,476,722,336.00	29,176,504,386.00	(1,300,217,950.00)	95.73
Belanja Hibah	39,247,407,476.00	37,591,993,893.00	(1,655,413,583.00)	95.78
Belanja Bantuan Sosial	7,853,800,000.00	6,373,800,000.00	(1,480,000,000.00)	81.16
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	723,901,621.00	690,636,000.00	(33,265,621.00)	95.40
Belanja Tidak Terduga	905,970,000.00	0.00	(905,970,000.00)	0.00
BELANJA LANGSUNG	17,235,006,426.00	15,730,126,979.00	(1,504,879,447.00)	91.27
Belanja Pegawai	6,745,451,500.00	6,196,423,000.00	(549,028,500.00)	91.86
Belanja Barang dan Jasa	8,642,770,550.00	7,720,953,979.00	(921,816,571.00)	89.33
Belanja Modal	1,846,784,376.00	1,812,750,000.00	(34,034,376.00)	98.16
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	807,829,000.00	513,260,156.00	(294,568,844.00)	63.54
BELANJA TIDAK LANGSUNG	807,829,000.00	513,260,156.00	(294,568,844.00)	63.54
Belanja Pegawai	807,829,000.00	513,260,156.00	(294,568,844.00)	63.54
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8,698,973,600.00	8,275,430,283.00	(423,543,317.00)	95.13
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,698,973,600.00	8,275,430,283.00	(423,543,317.00)	95.13
Belanja Pegawai	8,698,973,600.00	8,275,430,283.00	(423,543,317.00)	95.13
KELURAHAN KEJAKSAN	1,178,926,950.00	1,135,044,358.00	(43,882,592.00)	96.28
BELANJA TIDAK LANGSUNG	871,148,000.00	841,461,122.00	(29,686,878.00)	96.59
Belanja Pegawai	871,148,000.00	841,461,122.00	(29,686,878.00)	96.59
BELANJA LANGSUNG	307,778,950.00	293,583,236.00	(14,195,714.00)	95.39
Belanja Pegawai	35,860,000.00	34,360,000.00	(1,500,000.00)	95.82
Belanja Barang dan Jasa	226,848,950.00	215,198,236.00	(11,650,714.00)	94.86



		-		
Belanja Modal	45,070,000.00	44,025,000.00	(1,045,000.00)	97.68
KELURAHAN KEBON BARU	1,174,790,000.00	1,115,786,173.00	(59,003,827.00)	94.98
BELANJA TIDAK LANGSUNG	899,621,000.00	869,549,597.00	(30,071,403.00)	96.66
Belanja Pegawai	899,621,000.00	869,549,597.00	(30,071,403.00)	96.66
BELANJA LANGSUNG	275,169,000.00	246,236,576.00	(28,932,424.00)	89.49
Belanja Pegawai	68,125,000.00	58,752,000.00	(9,373,000.00)	86.24
Belanja Barang dan Jasa	161,439,500.00	142,549,576.00	(18,889,924.00)	88.30
Belanja Modal	45,604,500.00	44,935,000.00	(669,500.00)	98.53
KELURAHAN KESENDEN	1,098,358,500.00	1,047,079,693.00	(51,278,807.00)	95.33
BELANJA TIDAK LANGSUNG	794,833,000.00	770,438,821.00	(24,394,179.00)	96.93
Belanja Pegawai	794,833,000.00	770,438,821.00	(24,394,179.00)	96.93
BELANJA LANGSUNG	303,525,500.00	276,640,872.00	(26,884,628.00)	91.14
Belanja Pegawai	44,025,000.00	43,825,000.00	(200,000.00)	99.55
Belanja Barang dan Jasa	188,100,500.00	162,540,872.00	(25,559,628.00)	86.41
Belanja Modal	71,400,000.00	70,275,000.00	(1,125,000.00)	98.42
KELURAHAN SUKAPURA	1,057,843,900.00	1,021,274,281.00	(36,569,619.00)	96.54
BELANJA TIDAK LANGSUNG	776,140,000.00	742,226,258.00	(33,913,742.00)	95.63
Belanja Pegawai	776,140,000.00	742,226,258.00	(33,913,742.00)	95.63
BELANJA LANGSUNG	281,703,900.00	279,048,023.00	(2,655,877.00)	99.06
Belanja Pegawai	59,774,000.00	59,774,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	179,629,900.00	178,624,023.00	(1,005,877.00)	99.44
Belanja Modal	42,300,000.00	40,650,000.00	(1,650,000.00)	96.10
KELURAHAN KESAMBI	1,235,019,000.00	1,196,545,535.00	(38,473,465.00)	96.88
BELANJA TIDAK LANGSUNG	891,310,000.00	859,555,835.00	(31,754,165.00)	96.44



		_		
Belanja Pegawai	891,310,000.00	859,555,835.00	(31,754,165.00)	96.44
BELANJA LANGSUNG	343,709,000.00	336,989,700.00	(6,719,300.00)	98.05
Belanja Pegawai	47,510,000.00	47,420,000.00	(90,000.00)	99.81
Belanja Barang dan Jasa	192,581,000.00	188,519,700.00	(4,061,300.00)	97.89
Belanja Modal	103,618,000.00	101,050,000.00	(2,568,000.00)	97.52
KELURAHAN SUNYARAGI	1,206,857,200.00	1,150,634,927.00	(56,222,273.00)	95.34
BELANJA TIDAK LANGSUNG	891,638,000.00	851,160,283.00	(40,477,717.00)	95.46
Belanja Pegawai	891,638,000.00	851,160,283.00	(40,477,717.00)	95.46
BELANJA LANGSUNG	315,219,200.00	299,474,644.00	(15,744,556.00)	95.01
Belanja Pegawai	36,294,000.00	35,180,000.00	(1,114,000.00)	96.93
Belanja Barang dan Jasa	230,632,700.00	222,406,144.00	(8,226,556.00)	96.43
Belanja Modal	48,292,500.00	41,888,500.00	(6,404,000.00)	86.74
KELURAHAN DRAJAT	1,301,644,600.00	1,198,002,319.00	(103,642,281.00)	92.04
BELANJA TIDAK LANGSUNG	937,612,000.00	869,119,634.00	(68,492,366.00)	92.70
Belanja Pegawai	937,612,000.00	869,119,634.00	(68,492,366.00)	92.70
BELANJA LANGSUNG	364,032,600.00	328,882,685.00	(35,149,915.00)	90.34
Belanja Pegawai	33,449,000.00	32,574,000.00	(875,000.00)	97.38
Belanja Barang dan Jasa	217,605,100.00	187,068,685.00	(30,536,415.00)	85.97
Belanja Modal	112,978,500.00	109,240,000.00	(3,738,500.00)	96.69
KELURAHAN PEKIRINGAN	1,302,706,000.00	1,260,306,936.00	(42,399,064.00)	96.75
BELANJA TIDAK LANGSUNG	873,802,000.00	842,790,168.00	(31,011,832.00)	96.45
Belanja Pegawai	873,802,000.00	842,790,168.00	(31,011,832.00)	96.45
BELANJA LANGSUNG	428,904,000.00	417,516,768.00	(11,387,232.00)	97.35
Belanja Pegawai	50,350,000.00	49,720,000.00	(630,000.00)	98.75



		=		
Belanja Barang dan Jasa	230,628,000.00	221,896,768.00	(8,731,232.00)	96.21
Belanja Modal	147,926,000.00	145,900,000.00	(2,026,000.00)	98.63
KELURAHAN KARYAMULYA	1,245,378,000.00	1,161,245,677.00	(84,132,323.00)	93.24
BELANJA TIDAK LANGSUNG	868,224,000.00	833,651,681.00	(34,572,319.00)	96.02
Belanja Pegawai	868,224,000.00	833,651,681.00	(34,572,319.00)	96.02
BELANJA LANGSUNG	377,154,000.00	327,593,996.00	(49,560,004.00)	86.86
Belanja Pegawai	36,380,000.00	30,300,000.00	(6,080,000.00)	83.29
Belanja Barang dan Jasa	237,674,000.00	200,639,996.00	(37,034,004.00)	84.42
Belanja Modal	103,100,000.00	96,654,000.00	(6,446,000.00)	93.75
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	1,064,372,125.00	934,668,808.00	(129,703,317.00)	87.81
BELANJA TIDAK LANGSUNG	754,746,000.00	685,686,316.00	(69,059,684.00)	90.85
Belanja Pegawai	754,746,000.00	685,686,316.00	(69,059,684.00)	90.85
BELANJA LANGSUNG	309,626,125.00	248,982,492.00	(60,643,633.00)	80.41
Belanja Pegawai	55,190,000.00	45,140,000.00	(10,050,000.00)	81.79
Belanja Barang dan Jasa	179,077,125.00	130,303,592.00	(48,773,533.00)	72.76
Belanja Modal	75,359,000.00	73,538,900.00	(1,820,100.00)	97.58
KELURAHAN PANJUNAN	1,112,712,000.00	1,023,348,010.00	(89,363,990.00)	91.97
BELANJA TIDAK LANGSUNG	865,062,000.00	801,003,979.00	(64,058,021.00)	92.59
Belanja Pegawai	865,062,000.00	801,003,979.00	(64,058,021.00)	92.59
BELANJA LANGSUNG	247,650,000.00	222,344,031.00	(25,305,969.00)	89.78
Belanja Pegawai	59,665,000.00	53,390,000.00	(6,275,000.00)	89.48
Belanja Barang dan Jasa	160,185,500.00	141,768,531.00	(18,416,969.00)	88.50
Belanja Modal	27,799,500.00	27,185,500.00	(614,000.00)	97.79
KELURAHAN KASEPUHAN	1,199,616,410.00	1,122,099,220.00	(77,517,190.00)	93.54



		-		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	788,415,000.00	760,428,071.00	(27,986,929.00)	96.45
Belanja Pegawai	788,415,000.00	760,428,071.00	(27,986,929.00)	96.45
BELANJA LANGSUNG	411,201,410.00	361,671,149.00	(49,530,261.00)	87.95
Belanja Pegawai	47,405,000.00	38,795,000.00	(8,610,000.00)	81.84
Belanja Barang dan Jasa	215,746,410.00	189,091,149.00	(26,655,261.00)	87.65
Belanja Modal	148,050,000.00	133,785,000.00	(14,265,000.00)	90.36
KELURAHAN PEGAMBIRAN	1,249,387,200.00	1,167,858,438.00	(81,528,762.00)	93.47
BELANJA TIDAK LANGSUNG	891,620,000.00	842,567,914.00	(49,052,086.00)	94.50
Belanja Pegawai	891,620,000.00	842,567,914.00	(49,052,086.00)	94.50
BELANJA LANGSUNG	357,767,200.00	325,290,524.00	(32,476,676.00)	90.92
Belanja Pegawai	53,530,000.00	51,200,000.00	(2,330,000.00)	95.65
Belanja Barang dan Jasa	224,787,700.00	199,235,524.00	(25,552,176.00)	88.63
Belanja Modal	79,449,500.00	74,855,000.00	(4,594,500.00)	94.22
KELURAHAN PEKALIPAN	1,179,999,000.00	1,140,224,789.00	(39,774,211.00)	96.63
BELANJA TIDAK LANGSUNG	831,008,000.00	802,999,861.00	(28,008,139.00)	96.63
Belanja Pegawai	831,008,000.00	802,999,861.00	(28,008,139.00)	96.63
BELANJA LANGSUNG	348,991,000.00	337,224,928.00	(11,766,072.00)	96.63
Belanja Pegawai	51,627,500.00	51,592,500.00	(35,000.00)	99.93
Belanja Barang dan Jasa	241,213,500.00	229,657,428.00	(11,556,072.00)	95.21
Belanja Modal	56,150,000.00	55,975,000.00	(175,000.00)	99.69
KELURAHAN PEKALANGAN	1,099,543,500.00	1,063,598,298.00	(35,945,202.00)	96.73
BELANJA TIDAK LANGSUNG	751,277,000.00	726,225,363.00	(25,051,637.00)	96.67
Belanja Pegawai	751,277,000.00	726,225,363.00	(25,051,637.00)	96.67
BELANJA LANGSUNG	348,266,500.00	337,372,935.00	(10,893,565.00)	96.87



		_		
Belanja Pegawai	54,829,000.00	54,789,000.00	(40,000.00)	99.93
Belanja Barang dan Jasa	241,872,500.00	232,058,935.00	(9,813,565.00)	95.94
Belanja Modal	51,565,000.00	50,525,000.00	(1,040,000.00)	97.98
KELURAHAN JAGASATRU	1,006,145,700.00	966,061,307.00	(40,084,393.00)	96.02
BELANJA TIDAK LANGSUNG	751,837,000.00	727,808,632.00	(24,028,368.00)	96.80
Belanja Pegawai	751,837,000.00	727,808,632.00	(24,028,368.00)	96.80
BELANJA LANGSUNG	254,308,700.00	238,252,675.00	(16,056,025.00)	93.69
Belanja Pegawai	29,947,000.00	27,307,000.00	(2,640,000.00)	91.18
Belanja Barang dan Jasa	169,606,500.00	156,315,675.00	(13,290,825.00)	92.16
Belanja Modal	54,755,200.00	54,630,000.00	(125,200.00)	99.77
KELURAHAN PULASAREN	1,142,802,100.00	1,045,050,125.00	(97,751,975.00)	91.45
BELANJA TIDAK LANGSUNG	878,414,000.00	802,215,086.00	(76,198,914.00)	91.33
Belanja Pegawai	878,414,000.00	802,215,086.00	(76,198,914.00)	91.33
BELANJA LANGSUNG	264,388,100.00	242,835,039.00	(21,553,061.00)	91.85
Belanja Pegawai	26,175,000.00	25,275,000.00	(900,000.00)	96.56
Belanja Barang dan Jasa	168,308,600.00	149,385,039.00	(18,923,561.00)	88.76
Belanja Modal	69,904,500.00	68,175,000.00	(1,729,500.00)	97.53
KELURAHAN HARJAMUKTI	1,192,008,992.00	1,146,987,719.00	(45,021,273.00)	96.22
BELANJA TIDAK LANGSUNG	951,322,000.00	917,666,973.00	(33,655,027.00)	96.46
Belanja Pegawai	951,322,000.00	917,666,973.00	(33,655,027.00)	96.46
BELANJA LANGSUNG	240,686,992.00	229,320,746.00	(11,366,246.00)	95.28
Belanja Pegawai	33,490,000.00	31,930,000.00	(1,560,000.00)	95.34
Belanja Barang dan Jasa	168,972,492.00	159,489,746.00	(9,482,746.00)	94.39
Belanja Modal	38,224,500.00	37,901,000.00	(323,500.00)	99.15



		-		
KELURAHAN ARGASUNYA	1,246,187,000.00	1,167,903,186.00	(78,283,814.00)	93.72
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,003,458,000.00	971,048,980.00	(32,409,020.00)	96.77
Belanja Pegawai	1,003,458,000.00	971,048,980.00	(32,409,020.00)	96.77
BELANJA LANGSUNG	242,729,000.00	196,854,206.00	(45,874,794.00)	81.10
Belanja Pegawai	19,260,000.00	9,300,000.00	(9,960,000.00)	48.29
Belanja Barang dan Jasa	165,385,000.00	132,293,206.00	(33,091,794.00)	79.99
Belanja Modal	58,084,000.00	55,261,000.00	(2,823,000.00)	95.14
KELURAHAN KALIJAGA	1,169,392,000.00	1,123,378,045.00	(46,013,955.00)	96.07
BELANJA TIDAK LANGSUNG	876,512,000.00	850,050,338.00	(26,461,662.00)	96.98
Belanja Pegawai	876,512,000.00	850,050,338.00	(26,461,662.00)	96.98
BELANJA LANGSUNG	292,880,000.00	273,327,707.00	(19,552,293.00)	93.32
Belanja Pegawai	26,060,000.00	25,635,000.00	(425,000.00)	98.37
Belanja Barang dan Jasa	182,220,000.00	165,877,707.00	(16,342,293.00)	91.03
Belanja Modal	84,600,000.00	81,815,000.00	(2,785,000.00)	96.71
KELURAHAN KECAPI	1,312,830,000.00	1,274,693,669.00	(38,136,331.00)	97.10
BELANJA TIDAK LANGSUNG	991,395,000.00	956,706,166.00	(34,688,834.00)	96.50
Belanja Pegawai	991,395,000.00	956,706,166.00	(34,688,834.00)	96.50
BELANJA LANGSUNG	321,435,000.00	317,987,503.00	(3,447,497.00)	98.93
Belanja Pegawai	31,300,000.00	31,300,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	239,835,000.00	236,487,503.00	(3,347,497.00)	98.60
Belanja Modal	50,300,000.00	50,200,000.00	(100,000.00)	99.80
KELURAHAN LARANGAN	1,149,900,000.00	1,064,553,837.00	(85,346,163.00)	92.58
BELANJA TIDAK LANGSUNG	901,707,000.00	871,527,814.00	(30,179,186.00)	96.65
Belanja Pegawai	901,707,000.00	871,527,814.00	(30,179,186.00)	96.65



BELANJA LANGSUNG	248,193,000.00	193,026,023.00	(55,166,977.00)	77.77
Belanja Pegawai	53,020,000.00	51,235,000.00	(1,785,000.00)	96.63
Belanja Barang dan Jasa	185,773,000.00	137,991,023.00	(47,781,977.00)	74.28
Belanja Modal	9,400,000.00	3,800,000.00	(5,600,000.00)	40.43
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	13,010,783,000.00	12,368,709,553.00	(642,073,447.00)	95.07
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,789,975,000.00	1,730,320,820.00	(59,654,180.00)	96.67
Belanja Pegawai	1,789,975,000.00	1,730,320,820.00	(59,654,180.00)	96.67
BELANJA LANGSUNG	11,220,808,000.00	10,638,388,733.00	(582,419,267.00)	94.81
Belanja Pegawai	1,323,704,500.00	1,179,983,000.00	(143,721,500.00)	89.14
Belanja Barang dan Jasa	2,560,888,000.00	2,336,240,813.00	(224,647,187.00)	91.23
Belanja Modal	7,336,215,500.00	7,122,164,920.00	(214,050,580.00)	97.08
Ketahanan Pangan	2,903,627,500.00	2,798,666,290.00	(104,961,210.00)	96.39
KANTOR KETAHANAN PANGAN	2,903,627,500.00	2,798,666,290.00	(104,961,210.00)	96.39
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,099,540,000.00	1,062,591,835.00	(36,948,165.00)	96.64
Belanja Pegawai	1,099,540,000.00	1,062,591,835.00	(36,948,165.00)	96.64
BELANJA LANGSUNG	1,804,087,500.00	1,736,074,455.00	(68,013,045.00)	96.23
Belanja Pegawai	752,881,500.00	741,801,500.00	(11,080,000.00)	98.53
Belanja Barang dan Jasa	1,036,243,000.00	981,666,955.00	(54,576,045.00)	94.73
Belanja Modal	14,963,000.00	12,606,000.00	(2,357,000.00)	84.25
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,655,948,140.00	14,935,318,456.00	(720,629,684.00)	95.40
KECAMATAN KEJAKSAN	445,920,500.00	383,036,050.00	(62,884,450.00)	85.90
BELANJA LANGSUNG	445,920,500.00	383,036,050.00	(62,884,450.00)	85.90
Belanja Pegawai	203,540,000.00	177,439,000.00	(26,101,000.00)	87.18



Belanja Barang dan Jasa	228,880,500.00	192,347,050.00	(36,533,450.00)	84.04
Belanja Modal	13,500,000.00	13,250,000.00	(250,000.00)	98.15
KECAMATAN PEKALIPAN	209,254,000.00	206,527,500.00	(2,726,500.00)	98.70
BELANJA LANGSUNG	209,254,000.00	206,527,500.00	(2,726,500.00)	98.70
Belanja Pegawai	47,245,000.00	47,200,000.00	(45,000.00)	99.90
Belanja Barang dan Jasa	162,009,000.00	159,327,500.00	(2,681,500.00)	98.34
KECAMATAN KESAMBI	327,572,300.00	321,961,600.00	(5,610,700.00)	98.29
BELANJA LANGSUNG	327,572,300.00	321,961,600.00	(5,610,700.00)	98.29
Belanja Pegawai	120,492,000.00	120,492,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	207,080,300.00	201,469,600.00	(5,610,700.00)	97.29
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	309,220,000.00	304,255,000.00	(4,965,000.00)	98.39
BELANJA LANGSUNG	309,220,000.00	304,255,000.00	(4,965,000.00)	98.39
Belanja Pegawai	104,880,000.00	102,750,000.00	(2,130,000.00)	97.97
Belanja Barang dan Jasa	204,340,000.00	201,505,000.00	(2,835,000.00)	98.61
KECAMATAN HARJAMUKTI	248,935,000.00	236,915,000.00	(12,020,000.00)	95.17
BELANJA LANGSUNG	248,935,000.00	236,915,000.00	(12,020,000.00)	95.17
Belanja Pegawai	101,025,000.00	101,025,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	147,910,000.00	135,890,000.00	(12,020,000.00)	91.87
KELURAHAN KEJAKSAN	222,021,000.00	218,557,750.00	(3,463,250.00)	98.44
BELANJA LANGSUNG	222,021,000.00	218,557,750.00	(3,463,250.00)	98.44
Belanja Pegawai	35,920,000.00	35,920,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	116,101,000.00	113,137,750.00	(2,963,250.00)	97.45
Belanja Modal	70,000,000.00	69,500,000.00	(500,000.00)	99.29
KELURAHAN KEBON BARU	250,737,000.00	241,073,550.00	(9,663,450.00)	96.15



		-		
BELANJA LANGSUNG	250,737,000.00	241,073,550.00	(9,663,450.00)	96.15
Belanja Pegawai	83,273,000.00	83,273,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	167,464,000.00	157,800,550.00	(9,663,450.00)	94.23
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
KELURAHAN KESENDEN	235,374,500.00	170,799,500.00	(64,575,000.00)	72.56
BELANJA LANGSUNG	235,374,500.00	170,799,500.00	(64,575,000.00)	72.56
Belanja Pegawai	72,050,000.00	68,550,000.00	(3,500,000.00)	95.14
Belanja Barang dan Jasa	163,324,500.00	102,249,500.00	(61,075,000.00)	62.61
KELURAHAN SUKAPURA	426,179,240.00	426,087,000.00	(92,240.00)	99.98
BELANJA LANGSUNG	426,179,240.00	426,087,000.00	(92,240.00)	99.98
Belanja Pegawai	110,224,000.00	110,136,000.00	(88,000.00)	99.92
Belanja Barang dan Jasa	315,955,240.00	315,951,000.00	(4,240.00)	100.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
KELURAHAN KESAMBI	166,890,000.00	166,190,000.00	(700,000.00)	99.58
BELANJA LANGSUNG	166,890,000.00	166,190,000.00	(700,000.00)	99.58
Belanja Pegawai	67,450,000.00	66,750,000.00	(700,000.00)	98.96
Belanja Barang dan Jasa	99,440,000.00	99,440,000.00	0.00	100.00
KELURAHAN SUNYARAGI	225,877,700.00	210,863,500.00	(15,014,200.00)	93.35
BELANJA LANGSUNG	225,877,700.00	210,863,500.00	(15,014,200.00)	93.35
Belanja Pegawai	85,348,000.00	80,521,500.00	(4,826,500.00)	94.34
Belanja Barang dan Jasa	140,529,700.00	130,342,000.00	(10,187,700.00)	92.75
KELURAHAN DRAJAT	184,305,500.00	174,179,500.00	(10,126,000.00)	94.51
BELANJA LANGSUNG	184,305,500.00	174,179,500.00	(10,126,000.00)	94.51
Belanja Pegawai	89,315,000.00	84,858,000.00	(4,457,000.00)	95.01



		_		
Belanja Barang dan Jasa	94,990,500.00	89,321,500.00	(5,669,000.00)	94.03
KELURAHAN PEKIRINGAN	187,938,000.00	186,657,100.00	(1,280,900.00)	99.32
BELANJA LANGSUNG	187,938,000.00	186,657,100.00	(1,280,900.00)	99.32
Belanja Pegawai	64,505,000.00	63,905,000.00	(600,000.00)	99.07
Belanja Barang dan Jasa	123,433,000.00	122,752,100.00	(680,900.00)	99.45
KELURAHAN KARYAMULYA	266,910,000.00	249,472,350.00	(17,437,650.00)	93.47
BELANJA LANGSUNG	266,910,000.00	249,472,350.00	(17,437,650.00)	93.47
Belanja Pegawai	83,055,000.00	73,030,000.00	(10,025,000.00)	87.93
Belanja Barang dan Jasa	183,855,000.00	176,442,350.00	(7,412,650.00)	95.97
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK	120,204,000.00	115,373,600.00	(4,830,400.00)	95.98
BELANJA LANGSUNG	120,204,000.00	115,373,600.00	(4,830,400.00)	95.98
Belanja Pegawai	24,400,000.00	23,800,000.00	(600,000.00)	97.54
Belanja Barang dan Jasa	95,804,000.00	91,573,600.00	(4,230,400.00)	95.58
KELURAHAN PANJUNAN	265,095,000.00	248,193,100.00	(16,901,900.00)	93.62
BELANJA LANGSUNG	265,095,000.00	248,193,100.00	(16,901,900.00)	93.62
Belanja Pegawai	46,609,000.00	43,415,000.00	(3,194,000.00)	93.15
Belanja Barang dan Jasa	218,486,000.00	204,778,100.00	(13,707,900.00)	93.73
KELURAHAN KASEPUHAN	254,103,800.00	249,764,600.00	(4,339,200.00)	98.29
BELANJA LANGSUNG	254,103,800.00	249,764,600.00	(4,339,200.00)	98.29
Belanja Pegawai	84,440,000.00	82,140,000.00	(2,300,000.00)	97.28
Belanja Barang dan Jasa	169,663,800.00	167,624,600.00	(2,039,200.00)	98.80
KELURAHAN PEGAMBIRAN	233,405,800.00	222,540,700.00	(10,865,100.00)	95.34
BELANJA LANGSUNG	233,405,800.00	222,540,700.00	(10,865,100.00)	95.34
Belanja Pegawai	102,415,000.00	92,913,000.00	(9,502,000.00)	90.72



		_		
Belanja Barang dan Jasa	130,990,800.00	129,627,700.00	(1,363,100.00)	98.96
KELURAHAN PEKALIPAN	278,136,750.00	273,992,250.00	(4,144,500.00)	98.51
BELANJA LANGSUNG	278,136,750.00	273,992,250.00	(4,144,500.00)	98.51
Belanja Pegawai	87,979,000.00	84,604,000.00	(3,375,000.00)	96.16
Belanja Barang dan Jasa	190,157,750.00	189,388,250.00	(769,500.00)	99.60
KELURAHAN PEKALANGAN	325,713,500.00	324,409,500.00	(1,304,000.00)	99.60
BELANJA LANGSUNG	325,713,500.00	324,409,500.00	(1,304,000.00)	99.60
Belanja Pegawai	114,098,000.00	112,834,000.00	(1,264,000.00)	98.89
Belanja Barang dan Jasa	211,615,500.00	211,575,500.00	(40,000.00)	99.98
KELURAHAN JAGASATRU	246,581,000.00	139,316,000.00	(107,265,000.00)	56.50
BELANJA LANGSUNG	246,581,000.00	139,316,000.00	(107,265,000.00)	56.50
Belanja Pegawai	54,693,000.00	36,773,000.00	(17,920,000.00)	67.24
Belanja Barang dan Jasa	191,888,000.00	102,543,000.00	(89,345,000.00)	53.44
KELURAHAN PULASAREN	155,707,000.00	150,477,000.00	(5,230,000.00)	96.64
BELANJA LANGSUNG	155,707,000.00	150,477,000.00	(5,230,000.00)	96.64
Belanja Pegawai	60,820,000.00	58,410,000.00	(2,410,000.00)	96.04
Belanja Barang dan Jasa	94,887,000.00	92,067,000.00	(2,820,000.00)	97.03
KELURAHAN HARJAMUKTI	284,458,000.00	282,821,150.00	(1,636,850.00)	99.42
BELANJA LANGSUNG	284,458,000.00	282,821,150.00	(1,636,850.00)	99.42
Belanja Pegawai	74,458,000.00	73,681,000.00	(777,000.00)	98.96
Belanja Barang dan Jasa	210,000,000.00	209,140,150.00	(859,850.00)	99.59
KELURAHAN ARGASUNYA	212,750,000.00	205,087,800.00	(7,662,200.00)	96.40
BELANJA LANGSUNG	212,750,000.00	205,087,800.00	(7,662,200.00)	96.40
Belanja Pegawai	65,180,000.00	58,750,000.00	(6,430,000.00)	90.14



Belanja Barang dan Jasa	147,570,000.00	146,337,800.00	(1,232,200.00)	99.17
KELURAHAN KALIJAGA	147,445,000.00	146,771,700.00	(673,300.00)	99.54
BELANJA LANGSUNG	147,445,000.00	146,771,700.00	(673,300.00)	99.54
Belanja Pegawai	54,146,000.00	54,146,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	93,299,000.00	92,625,700.00	(673,300.00)	99.28
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
KELURAHAN KECAPI	203,315,000.00	195,515,000.00	(7,800,000.00)	96.16
BELANJA LANGSUNG	203,315,000.00	195,515,000.00	(7,800,000.00)	96.16
Belanja Pegawai	89,615,000.00	89,615,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	96,250,000.00	95,950,000.00	(300,000.00)	99.69
Belanja Modal	17,450,000.00	9,950,000.00	(7,500,000.00)	57.02
KELURAHAN LARANGAN	326,807,000.00	307,104,150.00	(19,702,850.00)	93.97
BELANJA LANGSUNG	326,807,000.00	307,104,150.00	(19,702,850.00)	93.97
Belanja Pegawai	104,165,000.00	95,590,000.00	(8,575,000.00)	91.77
Belanja Barang dan Jasa	222,642,000.00	211,514,150.00	(11,127,850.00)	95.00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	8,895,091,550.00	8,577,376,506.00	(317,715,044.00)	96.43
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,803,060,000.00	5,736,711,173.00	(66,348,827.00)	98.86
Belanja Pegawai	5,803,060,000.00	5,736,711,173.00	(66,348,827.00)	98.86
BELANJA LANGSUNG	3,092,031,550.00	2,840,665,333.00	(251,366,217.00)	91.87
Belanja Pegawai	887,370,500.00	880,210,500.00	(7,160,000.00)	99.19
Belanja Barang dan Jasa	2,136,536,050.00	1,892,880,333.00	(243,655,717.00)	88.60
Belanja Modal	68,125,000.00	67,574,500.00	(550,500.00)	99.19
Statistik	389,326,000.00	383,107,700.00	(6,218,300.00)	98.40



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200 226 000 00	383,107,700.00	(6,218,300.00)	98.40
	389,326,000.00	, ,	, , ,	
BELANJA LANGSUNG	389,326,000.00	383,107,700.00	(6,218,300.00)	98.40
Belanja Pegawai	294,380,000.00	292,930,000.00	(1,450,000.00)	99.51
Belanja Barang dan Jasa	94,946,000.00	90,177,700.00	(4,768,300.00)	94.98
Kearsipan	4,228,454,970.00	3,974,766,470.00	(253,688,500.00)	94.00
SEKRETARIAT DAERAH	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00	100.00
BELANJA LANGSUNG	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00	100.00
Belanja Pegawai	6,190,000.00	6,190,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	100.00
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	4,219,434,970.00	3,965,746,470.00	(253,688,500.00)	93.99
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,859,565,000.00	2,781,179,591.00	(78,385,409.00)	97.26
Belanja Pegawai	2,859,565,000.00	2,781,179,591.00	(78,385,409.00)	97.26
BELANJA LANGSUNG	1,359,869,970.00	1,184,566,879.00	(175,303,091.00)	87.11
Belanja Pegawai	260,682,000.00	255,452,000.00	(5,230,000.00)	97.99
Belanja Barang dan Jasa	1,040,066,970.00	873,614,879.00	(166,452,091.00)	84.00
Belanja Modal	59,121,000.00	55,500,000.00	(3,621,000.00)	93.88
Komunikasi dan Informatika	3,037,372,900.00	2,836,395,743.00	(200,977,157.00)	93.38
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI	2,491,640,000.00	2,399,780,743.00	(91,859,257.00)	96.31
BELANJA LANGSUNG	2,491,640,000.00	2,399,780,743.00	(91,859,257.00)	96.31
Belanja Pegawai	724,417,400.00	676,657,000.00	(47,760,400.00)	93.41
Belanja Barang dan Jasa	1,281,298,800.00	1,238,388,743.00	(42,910,057.00)	96.65
Belanja Modal	485,923,800.00	484,735,000.00	(1,188,800.00)	99.76
SEKRETARIAT DAERAH	485,746,400.00	400,506,500.00	(85,239,900.00)	82.45
BELANJA LANGSUNG	485,746,400.00	400,506,500.00	(85,239,900.00)	82.45



Belanja Pegawai	154,618,400.00	131,190,000.00	(23,428,400.00)	84.85
Belanja Barang dan Jasa	240,028,000.00	193,616,500.00	(46,411,500.00)	80.66
Belanja Modal	91,100,000.00	75,700,000.00	(15,400,000.00)	83.10
KELURAHAN KEBON BARU	36,581,000.00	36,108,500.00	(472,500.00)	98.71
BELANJA LANGSUNG	36,581,000.00	36,108,500.00	(472,500.00)	98.71
Belanja Pegawai	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	34,621,000.00	34,148,500.00	(472,500.00)	98.64
KELURAHAN PANJUNAN	23,405,500.00	0.00	(23,405,500.00)	0.00
BELANJA LANGSUNG	23,405,500.00	0.00	(23,405,500.00)	0.00
Belanja Pegawai	10,200,000.00	0.00	(10,200,000.00)	0.00
Belanja Barang dan Jasa	13,205,500.00	0.00	(13,205,500.00)	0.00
Perpustakaan	339,362,200.00	332,296,100.00	(7,066,100.00)	97.92
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	339,362,200.00	332,296,100.00	(7,066,100.00)	97.92
BELANJA LANGSUNG	339,362,200.00	332,296,100.00	(7,066,100.00)	97.92
Belanja Pegawai	128,811,200.00	123,767,800.00	(5,043,400.00)	96.08
Belanja Barang dan Jasa	210,551,000.00	208,528,300.00	(2,022,700.00)	99.04
Urusan Pilihan	38,186,513,225.00	24,534,122,968.00	(13,652,390,257.00)	64.25
Pertanian	13,477,396,650.00	12,949,513,904.00	(527,882,746.00)	96.08
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERTANIAN	13,477,396,650.00	12,949,513,904.00	(527,882,746.00)	96.08
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,738,644,100.00	4,609,094,942.00	(129,549,158.00)	97.27
Belanja Pegawai	4,738,644,100.00	4,609,094,942.00	(129,549,158.00)	97.27
BELANJA LANGSUNG	8,738,752,550.00	8,340,418,962.00	(398,333,588.00)	95.44
Belanja Pegawai	1,237,007,100.00	1,130,767,500.00	(106,239,600.00)	91.41
Belanja Barang dan Jasa	3,284,607,050.00	3,031,492,462.00	(253,114,588.00)	92.29



Belanja Modal	4,217,138,400.00	4,178,159,000.00	(38,979,400.00)	99.08
Kehutanan	314,833,500.00	309,716,750.00	(5,116,750.00)	98.37
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERTANIAN	314,833,500.00	309,716,750.00	(5,116,750.00)	98.37
BELANJA LANGSUNG	314,833,500.00	309,716,750.00	(5,116,750.00)	98.37
Belanja Pegawai	155,200,000.00	155,200,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	159,633,500.00	154,516,750.00	(5,116,750.00)	96.79
Pariwisata	10,574,990,500.00	561,550,500.00	(10,013,440,000.00)	5.31
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	10,574,990,500.00	561,550,500.00	(10,013,440,000.00)	5.31
BELANJA LANGSUNG	10,574,990,500.00	561,550,500.00	(10,013,440,000.00)	5.31
Belanja Pegawai	557,425,500.00	115,985,500.00	(441,440,000.00)	20.81
Belanja Barang dan Jasa	1,669,580,000.00	445,565,000.00	(1,224,015,000.00)	26.69
Belanja Modal	8,347,985,000.00	0.00	(8,347,985,000.00)	0.00
Kelautan dan Perikanan	5,463,045,650.00	4,581,367,750.00	(881,677,900.00)	83.86
KELURAHAN PANJUNAN	29,790,250.00	29,720,250.00	(70,000.00)	99.77
BELANJA LANGSUNG	29,790,250.00	29,720,250.00	(70,000.00)	99.77
Belanja Pegawai	10,035,000.00	10,035,000.00	0.00	100.00
Belanja Barang dan Jasa	19,755,250.00	19,685,250.00	(70,000.00)	99.65
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERTANIAN	5,433,255,400.00	4,551,647,500.00	(881,607,900.00)	83.77
BELANJA LANGSUNG	5,433,255,400.00	4,551,647,500.00	(881,607,900.00)	83.77
Belanja Pegawai	435,450,000.00	386,895,500.00	(48,554,500.00)	88.85
Belanja Barang dan Jasa	466,249,500.00	450,119,000.00	(16,130,500.00)	96.54
Belanja Modal	4,531,555,900.00	3,714,633,000.00	(816,922,900.00)	81.97
Perdagangan	7,854,705,925.00	5,647,943,314.00	(2,206,762,611.00)	71.91



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	7,854,705,925.00	5,647,943,314.00	(2,206,762,611.00)	71.91
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,865,389,000.00	3,781,195,126.00	(84,193,874.00)	97.82
Belanja Pegawai	3,865,389,000.00	3,781,195,126.00	(84,193,874.00)	97.82
BELANJA LANGSUNG	3,989,316,925.00	1,866,748,188.00	(2,122,568,737.00)	46.79
Belanja Pegawai	382,683,000.00	308,168,000.00	(74,515,000.00)	80.53
Belanja Barang dan Jasa	1,662,033,925.00	1,447,165,188.00	(214,868,737.00)	87.07
Belanja Modal	1,944,600,000.00	111,415,000.00	(1,833,185,000.00)	5.73
Perindustrian	501,541,000.00	484,030,750.00	(17,510,250.00)	96.51
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	501,541,000.00	484,030,750.00	(17,510,250.00)	96.51
BELANJA LANGSUNG	501,541,000.00	484,030,750.00	(17,510,250.00)	96.51
Belanja Pegawai	127,695,000.00	113,742,000.00	(13,953,000.00)	89.07
Belanja Barang dan Jasa	363,846,000.00	360,288,750.00	(3,557,250.00)	99.02
Belanja Modal	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00
PEMBIAYAAN DAERAH				
Urusan Wajib				
Pendidikan				
DINAS PENDIDIKAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	485,237,170,362.00	485,237,170,362.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	485,237,170,362.00	485,237,170,362.00	0.00
Kesehatan				
DINAS KESEHATAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	70,080,268,554.00	70,080,268,554.00	0.00



Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	70,080,268,554.00	70,080,268,554.00	0.00
RSUD GUNUNG JATI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	80,557,154,248.00	80,557,154,248.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	80,557,154,248.00	80,557,154,248.00	0.00
Pekerjaan Umum				
DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	138,602,755,290.00	138,602,755,290.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	138,602,755,290.00	138,602,755,290.00	0.00
Perumahan				
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	36,014,482,061.00	36,014,482,061.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	36,014,482,061.00	36,014,482,061.00	0.00
Perencanaan Pembangunan				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	10,768,250,657.00	10,768,250,657.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	10,768,250,657.00	10,768,250,657.00	0.00
Perhubungan				
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	29,179,330,545.00	29,179,330,545.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	29,179,330,545.00	29,179,330,545.00	0.00
Lingkungan Hidup				
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	3,634,342,439.00	3,634,342,439.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	3,634,342,439.00	3,634,342,439.00	0.00



		1		
Kependudukan dan Catatan Sipil				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	6,776,704,233.00	6,776,704,233.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	6,776,704,233.00	6,776,704,233.00	0.00
Sosial				
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	5,443,803,458.00	5,443,803,458.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	5,443,803,458.00	5,443,803,458.00	0.00
Penanaman Modal				
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	3,961,594,946.00	3,961,594,946.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	3,961,594,946.00	3,961,594,946.00	0.00
Kebudayaan				
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	9,335,236,851.00	9,335,236,851.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	9,335,236,851.00	9,335,236,851.00	0.00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,204,004,111.00	2,204,004,111.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,204,004,111.00	2,204,004,111.00	0.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	10,770,922,479.00	10,770,922,479.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	10,770,922,479.00	10,770,922,479.00	0.00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,				



Kepegawaian				
. 5				
INSPEKTORAT				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	7,485,060,944.00	7,485,060,944.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	7,485,060,944.00	7,485,060,944.00	0.00
SEKRETARIAT DAERAH				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	45,291,324,313.00	45,291,324,313.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	45,291,324,313.00	45,291,324,313.00	0.00
SEKRETARIAT DPRD				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	14,965,181,461.00	14,965,181,461.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	14,965,181,461.00	14,965,181,461.00	0.00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	10,473,855,912.00	10,473,855,912.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	10,473,855,912.00	10,473,855,912.00	0.00
KECAMATAN KEJAKSAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,285,312,226.00	2,285,312,226.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,285,312,226.00	2,285,312,226.00	0.00
KECAMATAN PEKALIPAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,195,861,307.00	2,195,861,307.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,195,861,307.00	2,195,861,307.00	0.00
KECAMATAN KESAMBI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,223,869,906.00	2,223,869,906.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,223,869,906.00	2,223,869,906.00	0.00
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,292,316,257.00	2,292,316,257.00	0.00



		-		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,292,316,257.00	2,292,316,257.00	0.00
KECAMATAN HARJAMUKTI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,252,113,397.00	2,252,113,397.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,252,113,397.00	2,252,113,397.00	0.00
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	148,046,181,648.00	148,046,181,648.00	0.00	100.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148,046,181,648.00	148,046,181,648.00	0.00	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15,788,264,000.00	5,412,247,628.00	(10,376,016,372.00)	34.28
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15,544,264,000.00	5,249,000,000.00	(10,295,264,000.00)	33.77
Pembayaran Pokok Utang	244,000,000.00	163,247,628.00	(80,752,372.00)	66.90
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	(1,271,320,995,617.00)	(1,271,320,995,617.00)	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	(1,271,320,995,617.00)	(1,271,320,995,617.00)	0.00
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	513,260,156.00	513,260,156.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	513,260,156.00	513,260,156.00	0.00
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	8,275,430,283.00	8,275,430,283.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	8,275,430,283.00	8,275,430,283.00	0.00
KELURAHAN KEJAKSAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,761,127,108.00	1,761,127,108.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,761,127,108.00	1,761,127,108.00	0.00
KELURAHAN KEBON BARU				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,766,450,223.00	1,766,450,223.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,766,450,223.00	1,766,450,223.00	0.00



KELURAHAN KESENDEN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,610,079,193.00	1,610,079,193.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,610,079,193.00	1,610,079,193.00	0.00
KELURAHAN SUKAPURA				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,677,140,949.00	1,677,140,949.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,677,140,949.00	1,677,140,949.00	0.00
KELURAHAN KESAMBI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,426,965,535.00	1,426,965,535.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,426,965,535.00	1,426,965,535.00	0.00
KELURAHAN SUNYARAGI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,426,926,427.00	1,426,926,427.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,426,926,427.00	1,426,926,427.00	0.00
KELURAHAN DRAJAT				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,618,756,819.00	1,618,756,819.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,618,756,819.00	1,618,756,819.00	0.00
KELURAHAN PEKIRINGAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,667,789,436.00	1,667,789,436.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,667,789,436.00	1,667,789,436.00	0.00
KELURAHAN KARYAMULYA				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,410,718,027.00	1,410,718,027.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,410,718,027.00	1,410,718,027.00	0.00
KELURAHAN LEMAHWUNGKUK				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,692,372,408.00	1,692,372,408.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,692,372,408.00	1,692,372,408.00	0.00



				,
KELURAHAN PANJUNAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,533,200,710.00	1,533,200,710.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,533,200,710.00	1,533,200,710.00	0.00
KELURAHAN KASEPUHAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,460,463,820.00	1,460,463,820.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,460,463,820.00	1,460,463,820.00	0.00
KELURAHAN PEGAMBIRAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,390,399,138.00	1,390,399,138.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,390,399,138.00	1,390,399,138.00	0.00
KELURAHAN PEKALIPAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,479,417,039.00	1,479,417,039.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,479,417,039.00	1,479,417,039.00	0.00
KELURAHAN PEKALANGAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,432,447,798.00	1,432,447,798.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,432,447,798.00	1,432,447,798.00	0.00
KELURAHAN JAGASATRU				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,413,357,307.00	1,413,357,307.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,413,357,307.00	1,413,357,307.00	0.00
KELURAHAN PULASAREN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,224,437,125.00	1,224,437,125.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,224,437,125.00	1,224,437,125.00	0.00
KELURAHAN HARJAMUKTI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,474,410,919.00	1,474,410,919.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,474,410,919.00	1,474,410,919.00	0.00



KELURAHAN ARGASUNYA				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,450,567,486.00	1,450,567,486.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,450,567,486.00	1,450,567,486.00	0.00
KELURAHAN KALIJAGA				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,545,516,045.00	1,545,516,045.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,545,516,045.00	1,545,516,045.00	0.00
KELURAHAN KECAPI				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,510,458,669.00	1,510,458,669.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,510,458,669.00	1,510,458,669.00	0.00
KELURAHAN LARANGAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	1,371,657,987.00	1,371,657,987.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	1,371,657,987.00	1,371,657,987.00	0.00
KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	12,311,684,553.00	12,311,684,553.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	12,311,684,553.00	12,311,684,553.00	0.00
Ketahanan Pangan				
KANTOR KETAHANAN PANGAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	2,798,666,290.00	2,798,666,290.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	2,798,666,290.00	2,798,666,290.00	0.00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	10,119,825,506.00	10,119,825,506.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	10,119,825,506.00	10,119,825,506.00	0.00



Kearsipan				
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	4,298,042,570.00	4,298,042,570.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	4,298,042,570.00	4,298,042,570.00	0.00
Urusan Pilihan				
Pertanian				
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERTANIAN				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	17,422,719,426.00	17,422,719,426.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	17,422,719,426.00	17,422,719,426.00	0.00
Perdagangan				
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	8,457,093,564.00	8,457,093,564.00	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00	8,457,093,564.00	8,457,093,564.00	0.00



2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga Sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Pembentukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Cirebon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui :

- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008, tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008Tentang Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon.



Secara Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon adalah :

Tabel. 8
Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	SKPD	Nama Singkatan SKPD	Jumlah Personil	Kete- rangan
Α.	Sekretariar Daerah dan Sekretariat	DPRD pada Pemerintah Kot		(Perda No.
	7/2014)			
1	Sekretariat Daerah	SETDA KOTA CIREBON	240	
2	Seretariat DPRD	SERETARIAT DPRD KOTA CIREBON	35	
В.	Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerinta		(2014)	
1	Dinas Kependudukan dan	DISDUKCAPIL KOTA	35	
	Pencatatan Sipil	CIREBON		
2	Dinas Pendapatan dan	DPPKD	102	
3	Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kelautan, Perikanan,	KOTA CIREBON DKP-3 KOTA	60	
	Peternakan dan Pertanian	CIREBON	00	
4	Dinas Pemuda, Olah Raga,	DISPORBUDPAR	42	
5	Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	DISHUBINFOKOM KOTA CIREBON	193	
6	Dinas Pekerjaan Umum,	DPE-PESDM KOTA	98	
	Perumahan, Energi dan Sumber	CIREBON		
7	Daya Mineral Dinas Perindustrian, Perdagangan	DISPERINDAG-KUMKM	46	
	dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil	KOTA CIREBON		
8	Menengah Dinas Pendidikan	DISDIK KOTA	2893	
	Billas i Citalalkali	CIREBON	2000	
9	Dinas Kesehatan	DKK CIREBON	602	
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan	DINSOSNAKERTRAN	41	
4.4	Transmigrasi	KOTA CIREBON	000	
11	Dinas Kebersihan dan	DKP KOTA CIREBON	262	
	Pertamanan	CIREBON		
C.	Lembaga Teknis Daerah, Satuan Po	 olisi Pamong Praia Dan Kant	or Pelavana	an Periiinan
	Terpadu Pada Pemerintah Kota Cire	ebon. (Perda No. 9/2014)		
1	Inspektorat	INSPEKTORAT KOTA	47	
2	Badan Perencanaan Pembangunan	CIREBON BAPPEDA KOTA	44	
	Daerah	CIREBON		
3	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	BK-DIKLAT KOTA CIREBON	79	
4	Badan Perpustakaan dan	BAPUSIPDA KOTA	36	
_	Kearsipan Daerah	CIREBON	63	
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan	BPMPPKB KOTA CIREBON	63	
	Keluarga Berencana			
6	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	BPMPPTKOTA CIREBON	33	
1	, , ,		<u> </u>	Ì



6	Kantor Ketahanan Pangan	KKP KOTA CIREBON	12	I
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	KESBANGPOL KOTA	14	7
	dan Perlindungan Masyarakat	CIREBON		
8	Kantor Lingkungan Hidup	KLH KOTA CIREBON	17	8
9	Kantor Penanggulangan Bencana	KPBDPK KOTA CIREBON	27	9
	Daerah dan Pemadan Kebakaran			
10	Rumah Sakit Umum Daerah	BLU RSUD-GJ KOTA	759	10
	Gunung Jati	CIREBON		
11	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP KOTA	75	11
		CIREBON		

1	Kecamatan :	KECAMATAN		Sebutan
•	a. Kecamatan Harjamukti	Kec. Harjamukti	20	sesuai
	b. Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi	17	dengan
	c. Kecamatan Pekalipan	Kec. Pekalipan	15	nama
	d. Kecamatan Lemahwungkuk	Kec. Lemahwungkuk	17	wil-nya
	e. Kecamatan Kejaksan	Kec. Kejaksan	15	
2	Kelurahan	KELURÁHAN		
	a. Kelurahan Harjamukti	Kel. Harjamukti	14	Sebutan
	b. Kelurahan Argasunya	Kel. Argasunya	15	sesuai
	c. Kelurahan Kecapi	Kel. Kecapi	14	dengan
	d. Kelurahan Kalijaga	Kel. Kalijaga	12	nama
	e. Kelurahan Larangan	Kel. Larangan	12	wil-nya
	f. Kelurahan Kesambi	Kel. Kesambi	12	
	g. Kelurahan Sunyaragi	Kel. Sunyaragi	11	
	h. Kelurahan Pekiringan	Kel. Pekiringan	12	
	i. Kelurahan Karyamulya	Kel. Karyamulya	11	
	j. Kelurahan Drajat	Kel. Drajat	11	
	k. Kelurahan Kejaksan	Kel. Kejaksan	12	
	I. Kelurahan Kebon Baru	Kel. Kbn. Baru	12	
	m. Kelurahan Kesenden	Kel. Kesenden	11	
	n. Kelurahan Sukapura	Kel. Sukapura	11	
	o. Kelurahan Pegambiran	Kel. Pegambiran	12	
	p. Kelurahan Lemahwungkuk	Kel. Lemahwungkuk	9	
	q. Kelurahan Kasepuhan	Kel. Kasepuhan	9	
	r. Kelurahan Panjunan	Kel. Panjunan	11	
	s. Kelurahan Pekalipan	Kel. Pekalipan	11	
	t. Kelurahan Jagasatru	Kel. Jagasatru	12	
	u. Kelurahan Pekalangan	Kel. Pekalangan	10	
	v. KelurahanPulasaren	Kel. Pulasaren	11	1

B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, namun bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



Setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah tersebut, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Melalui kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menampilkan kreatifitasnya dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat,membangun daerah, serta meningkatkan Layanan Civil dan Layanan Publik bagi masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dapat dilihat dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat dua nilai dasar yang sangat fundamental, yaitu : nilai dasar unitaris dan nilai dasar desentralisasi. Nilai dasar unitaris diartikan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di daerah otonom dengan diberikannya sebagian kewenangan pusat kepada daerah dalam wujud otonomi daerah. Dalam hal persoalan mengenai nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yaitu pembentukan daerah otonom dengan undang-undang dan penyerahan wewenang secara hukum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan yang sudah diserahkan tersebut, diluar urusan yang bersifat absolut dan masih tetap melekat pada Pemerintah, yaitu Urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1. Urusan Wajib/Obligatory, yaitu urusan pemerintahan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar masyarakat.
- 2. Urusan Pilihan/Optional, yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, serta potensi unggulan daerah.



Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Cirebon telah menyelenggarakan Urusan Wajib/Obligatory dan Urusan Pilihan/Optional yang telah ditetapkan sebagai prioritas urusan dalam sistem desentralisasi sebagai berikut :

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Urusan Pendidikan

1.1.1 Dinas Pendidikan:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat14(empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 14) Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
 - 4) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
 - 4) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap
 - 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD
- f. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak
- g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada program ini terdapat 81 (delapan puluh satu) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah.
 - 2) Kegiatan Pembangunan ruang serba guna/aula
 - 3) Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD
 - 4) Kegiatan Pembangunan ruang ibadah
 - 5) Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah
 - 6) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD
 - 7) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
 - 8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
 - 9) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah



- 10)Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
- 11) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- 12) Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- 13) Kegiatan Pelatihan Penyusunan kurikulum
- 14) Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
- 15) Kegiatan Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
- 16) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Harjamukti
- 17) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Kesambi
- 18) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Pekalipan
- 19) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Lemahwungkuk
- 20) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Kejaksan
- 21)Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa sekolah dasar
- 22)Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Siswa Menengah Pertama
- 23) Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan sekolah
- 24) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor SD (Dana Propinsi)
- 25)Kegiatan Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar
- 26)Kegiatan Pengadaan Meubeulair Sekolah Menengah Pertama
- 27)Kegiatan Pembangunan Taman, lapangan Upacara, dan fasilitas parkir SMP
- 28) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Fasilitas SMP
- 29) Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Fasilitas SD
- 30) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP (Dana Propinsi)
- 31) Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka (Dana Propinsi)
- 32)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Kejaksan
- 33)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi
- 34)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalipan
- 35)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Harjamukti
- 36)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk



- 37)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SD Negeri Pamitran (Dana Propinsi)
- 38)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Pengampon II (Dana Propinsi)
- 39)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Kalijaga Permai (Dana Propinsi)
- 40)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Karyamulya (Dana Propinsi)
- 41)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Rinjani Perumnas (Dana Propinsi)
- 42)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 16 Kota Cirebon (Dana Propinsi)
- 43)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 8 Kota Cirebon (Dana Propinsi)
- 44)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 11 Kota Cirebon (Dana Propinsi)
- 45)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 6 Kota Cirebon (Dana Propinsi)
- 46)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 15 Kota Cirebon (Dana Propinsi)
- 47)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 1 Kota Cirebon (Ex RSBI) (Dana Propinsi)
- 48)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 5 Kota Cirebon (Ex RSBI) (Dana Propinsi)
- 49)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 17 Kota Cirebon (Dana Propinsi)
- 50)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Kejaksan
- 51)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Kesambi
- 52)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Lemahwungkuk
- 53)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Pekalipan



- 54)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Harjamukti
- 55) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 1
- 56) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 2
- 57) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 3
- 58) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 4
- 59) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5
- 60) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 6
- 61) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 7
- 62) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 8
- 63) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 9
- 64) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 10
- 65) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11
- 66) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 12
- 67) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 13
- 68) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 14
- 69)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15
- 70)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16
- 71)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17
- 72) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18
- 73)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 1 Harjamukti
- 74)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 2 Kesambi
- 75)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk
- 76) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1
- 77) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2
- 78)Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMP (Pengadaan Alat Sistem Penilaian Sekolah) (Dana Provinsi)
- 79) Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMP (Pengadaan Prasarana Kelas Berstandar Internasional) (Dana Provinsi)
- 80)Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SD (Pengadaan Alat Sistem Penilaian Sekolah) (Dana Provinsi)



- 81)Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka (Dana Propinsi Tahun 2014)
- h. Program Pendidikan Menengahpada program ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) tingkat SMA/SMK
 - 2) Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
 - 3) Kegiatan Pembangunan pepustakaan sekolah
 - 4) Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
 - 5) Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - 6) Kegiatan Pengadaan mebeluer sekolah
 - 7) Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah
 - 8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
 - 9) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
 - 10)KegiatanRehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
 - 11)KegiatanRehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
 - 12)KegiatanRehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
 - 13) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
 - 14) Kegiatan Penyelenggaraan paket C
 - 15)Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah
 - 16)Kegiatan Pembinaan Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Kota Cirebon
 - 17) Kegiatan Expo Pendidikan dan Teknologi bagi SMA/SMK
 - 18) Kegiatan Pelatihan Pendidikan Karakter Siswa SMA/SMK
 - 19) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Fasilitas SMA/SMK
 - 20) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMA (Dana Propinsi)
 - 21)Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMK (Dana Propinsi)
 - 22)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Sekolah Tingkat Menengah Atas
 - 23) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 1
 - 24) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 2
 - 25) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3
 - 26) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 4
 - 27) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 5
 - 28) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 6



- 29) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 7
- 30) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 8
- 31) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 9
- 32) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 1
- 33) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 2
- 34) Kegiatan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional
- 35)Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA/SMK (Pengadaan Alat Sistem Penilaian Sekolah) (Dana Provinsi)
- 36)Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA/SMK (Pengadaan Prasarana Kelas Berstandar Internasional) (Dana Provinsi)
- 37)Kegiatan Penyedian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Dana Provinsi)
- 38)Kegiatan Penyedian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Dana Provinsi)
- i. Program Pendidikan Non Formal, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan
 - 2) Kegiatan Pengembangan kurikulum, dan model perubahan ajar dan model pembelajaran
 - 3) Kegiatan Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
 - 4) Kegiatan Kecakapan Hidup (Lifeskill) bagi Anak/Remaja Putus Sekolah
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- j. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
 - 2) Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 3) Kegiatan Penilaian kinerja penerima sertifikasi
 - 4) Kegiatan Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional
- k. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, pada program ini terdapat11 (sebelas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan



- 3) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Indikator Capaian Pendidikan
- 4) Kegiatan Pendamping Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online
- 7) Kegiatan Pembinaan sekolah UKS
- 8) Kegiatan Publikasi, sosialisasi dan pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 9) Kegiatan Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Pendidikan
- 10)Kegiatan Pengadaan Media Pembelajaran Menyenangkan dengan Perpaduan Animasi Interaktif (Dana Propinsi)
- 11)Kegiatan Sarana Prasarana Pengadaan Efisiensi Pembelajaran di Kelas dengan Media Digital Interaktif Berbasis Tablet (Dana Propinsi)
- I. Program Penyelenggaraan Pengembangan Olah Raga Sekolah. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Mutu Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Sekolah
 - 2) Kegiatan Monitoring, Evalusi dan Pelaporan Penyelenggaraan Olahraga Sekolah
 - 3) Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pengembangan Olahraga Sekolah
- m. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Pada program ini terdapat16 (enam belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD
 - 2) Kegiatan DAK Pendidikan SD
 - 3) Kegiatan DAK Pendidikan SMP
 - 4) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SD
 - 5) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SMP
 - 6) Kegiatan DAK Pendidikan SMA
 - 7) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SMA
 - 8) Kegiatan DAK Pendidikan SMK
 - 9) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SMK



- 10) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMA
- 11) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP
- 12) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMK
- 13) Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SD
- 14) Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SMP
- 15) Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SMA
- 16) Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SMK

1.2. Urusan Kesehatan

1.2.1. Dinas Kesehatan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada program ini terdapat 14 (empat belas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) KegiatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 11) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional
 - 2) Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
- f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, pada program ini terdapat 35 (tiga puluh lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
 - 2) Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - Kegiatan peningkatan pelayanan Puskesmas, Laboratorium dan kesehatan khusus
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
 - 6) Kegiatan Peningkatan Kota Siaga
 - 7) Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
 - 8) Kegiatan Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM)
 - 9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan
 - 10) Kegiatan Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan
 - 11) Kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Emergency



- 13)Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
- 14) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalitanjung
- 15) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Larangan
- 16) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas Utara
- 17) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng
- 18) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga Permai
- 19) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesunean
- 20)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pegambiran
- 21)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir
- 22)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol
- 23)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jagasatru
- 24) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Astanagarib
- 25)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pekalangan
- 26)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pulasaren
- 27)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi
- 28) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Gunungsari
- 29)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sunyaragi



- 30) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Majasem
- 31)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Drajat
- 32)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan
- 33)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jalan Kembang
- 34)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan
- 35)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran
- h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
- i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin
 - Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi,
 Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
 Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
- j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Sanitasi dan Kota Sehat
- k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
 - 2) Kegiatan pengadaan alat foging dan bahan-bahan foging
 - 3) Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
 - 4) Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular.
 - 5) Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.
 - 6) Kegiatan Peningkatan surveillence Epidemiologi dan penanggulangan wabah



- 7) Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukatif (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- 8) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS
- I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
 - 3) Kegiatan Sistem Integrasi Puskesmas
 - 4) Kegiatan Standarisasi Kompetensi, Tenaga Medis, Paramedis, dan Tradisional Komplementer
- m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penunjang Operasi Katarak Bagi Maskin yang tidak mendapat Bantuan Kesehatan (Dana Propinsi)
 - 2) Kegiatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provins Jawa Barat (Dana Propinsi)
- n. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
 - 2) Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas (Dana Provinsi)
 - 3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Provinsi)
- o. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
- p. Program penigkatan Kualitas tenaga kesehatan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan seleksi tenaga aparatur yang berprestasi
- q. Program Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Dasar (DAK)
 - 2) Kegiatan Pelayanan Farmasi (DAK)



- 3) Kegiatan pendamping DAK Pelayanan Dasar
- 4) Kegiatan Pendamping DAK Pelayanan Farmasi.
- 5) Pelayanan Dasar (SILPA DAK)
- r. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

1.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati

1.2.2.1. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati

- a. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah Sakit Mata. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Perawatan di ICU/HCU/NICU/PICU (Dana Propinsi)
 - 2) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap (GAKIN) RSUD Gunung Jati (Silpa Dana Propinsi)
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Laundry dan Boiller
 - 2) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Instalasi Bedah Sentral
 - Kegiatan RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional (Silpa Dana Propinsi)
- c. Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (SILPA)
- d. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan terdapat 3 (tiga) kegiatan,
 yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK)
 - 2) Kegiatan Pendamping DAK Pelayanan Rujukan
 - 3) Pelayanan Rujukan (SILPA DAK)



- e. Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan

1.2.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati (BLUD)

- a. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan

1.2.3. Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdapat 1
 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan HIV/AIDS

1.2.4. Kelurahan Lemahwungkuk

- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan HIV/AIDS

1.3. Urusan Pekerjaan Umum

1.3.1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 13 (empat belas) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 12) Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor
- 13) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada progam ini terdapat 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 4) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 7) Kegiatan perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/jabatan.
 - 8) Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, Yaitu :
 - 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - KegiatanPenyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) KegiatanMonitoring dan Evaluasi
 - 3) KegiatanPenyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
 - 4) KegiatanPenyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 5) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD
- f. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana Propinsi)
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.



- g. Program Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
 - 2) Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
- h. Program Pengendalian Banjir. Pada program ini terdapat 4(empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
 - 2) Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
 - 3) Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
 - 4) Kegiatan Perencanaan / DED Pengendalian Banjir
 - 5) Pengendalian Banjir (Dana Provinsi)
- i. Program Program Pengaturan Jasa Konstruksi program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa
 - 2) Kegiatan Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
- j. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan. Pada program ini terdapat6 (enam) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan perkotaan
 - 2) KegiatanSurvai dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan
 - 3) Kegiatan Pembangunan/Penataan Taman Kota dan Lapangan Upacara
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan (Dana Propinsi)
 - 5) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan.
- k. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan.
 - 2) Kegiatan Pendamping DAK Infrastruktur Jalan
- Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum. Pada program ini terdapat 2
 (dua) kegiatan, yaitu :



- 1) Kegiatan Infrastruktur Air Minum (DAK)
- 2) Kegiatan Pendamping DAK Infrastruktur Air Minum
- m. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Infrastruktur Sanitasi (DAK)
 - 2) Kegiatan Pendamping Sanitasi USAID (DIPA)
- n. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan. Pada program ini terdapat 1(satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Jalan
- o. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan. Yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah
 - 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium
 - 4) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah (Dana Provinsi)
- p. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) kegiatan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman

1.4. Urusan Perumahan

1.4.1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pengembangan Perumahan. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Survey dan Pemetaan Pengembangan Perumahan.
 - 2) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan.
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan



1.4.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pada program ini terdapat
 13(tiga belas) kegiatan yaitu:
 - 1) KegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) KegiatanPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 5) KegiatanPenyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 6) KegiatanPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 7) KegiatanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 9) KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 10) KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 11) KegiatanPenyediaan Makanan dan Minuman.
 - 12) KegiatanRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
 - 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya.



4) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap

1.5. Urusan Penataan Ruang

1.5.1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Program Pemanfaatan Ruang. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan,
 yaitu :
 - 1) Kegiatan Survey dan pemetaan
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang
 - 2) Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
 - 3) Kegiatan Koordinasi Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang

1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

1.6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 10) Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
 - 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.



- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 6) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 7) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, padaprogram ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, padaprogram ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
 - 4) Kegiatan Penyusunan Profil
- e. Program Pengembangan Data/Informasi. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Kegiatan Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah
- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencana.
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, pada progam ini terdapat13 (tiga belas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
 - 2) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)
 - 3) Kegiatan Evaluasi RPJMD
 - 4) Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - 5) Kegiatan Rencana Pengembangan Penyediaan Air Bersih
 - 6) Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)



- 7) Kegiatan Publikasi dokumentasi perencanaan pembangunan
- 8) Kegiatan Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dar pulau-pulau kecil
- 9) Kegiatan Koordinasi penanganan permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim
- Kegiatan Penyusunan rencana pengembangan pasar-pasar tradisional Kota Cirebon
- 11) Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)
- 12) Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Provinsi)
- 13) Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP)
- h. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan
 - 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
 - 4) Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah
- i. Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan. pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
 - 3) Kegiatan Koordinasi program-program masalah gender dan anak
 - 4) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - 5) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Lingkungan
- j. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



- k. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP), pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan koordinasi Sanitasi Kota
- Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota

1.6.2 Kecamatan Kejaksan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1.6.3 Kecamatan Pekalipan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1)Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1.6.4 Kecamatan Kesambi

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1.6.5 Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1.6.6 Kecamatan Harjamukti

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1.7. Urusan Perhubungan

1.7.1 Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 12) Kegiatan yediaan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional
 - 2) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.



- 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA dan perubahannya.
- 6) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- 7) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD.
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan.
- g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
- h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- i. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan perbaikan lampu isyarat pengatur lalulintas (traffic light)
 - 2) Kegiatan Penataan dan Pembangunan PJU
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan PJU.
 - 4) Kegiatan Pengadaan Marka Jalan (Dana Propinsi).
 - 5) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
 - 6) Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 7) Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Dana Propinsi)
 - 8) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Lainnya (Dana Propinsi
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran
- k. Program Peningkatan Pelayanan UPTD, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan peningkatan pelayanan terminal.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum
 - 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor



- Program Peningkatan Pelayanan Parkir, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran
- m. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Marka Jalan (Dana Alokasi Khusus)
 - 2) Kegiatan Pendamping DAK Pengadaan Marka Jalan
 - 3) Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)
 - 4) Kegiatan Pendamping DAK Pengadaan Rambu Lalu Lintas

1.7.2 Kelurahan Lemahwungkuk

- a. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan pagar pengaman jalan

1.8. Urusan Lingkungan Hidup

1.8.1. Kantor Lingkungan Hidup

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 14 (empat belas)kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - 4) Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pda program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3) Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 6) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Kimia Laboratorium Pemerintah.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 2(dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengendalian B3 dan Limbah B3
 - 2) Kegiatan Pengujian kadar limbah cair
 - 3) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.
- f. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - 2) Kegiatan Pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
 - 3) Kegiatan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan



- h. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - 2) Kegiatan Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
 - 3) Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
 - 4) Kegiatan Koordinasi penilaian ADIPURA
- i. Program Dana Alokasi khusus bidang LH. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Dana alokasi Khusus LH
 - 2) Biaya umum Perencanaan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup

1.8.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan.
 - 2) Kegiatan Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah.
 - 3) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - 4) Kegiatan Pelayanan kebersihan kota pada hari-hari besar.
 - 5) Kegiatan Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan Kota.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 7) KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Dump Truck) (Dana propinsi)
 - 8) Kegiatan pengadaan alat berat / Escavator (Dana Propinsi)
- b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.
 - 2) Kegiatan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
- c. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
 - 2) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian RTH



- 3) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Dekorasi dan Keindahan Kota
- 4) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tanaman Penghijauan/ Pelindung dan Hutan Kota
- d. Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau

1.8.3. Kelurahan Sunyaragi

- a. Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemanfaatan Aset untuk Ruang Terbuka Hijau.

1.8.4. Kelurahan Drajat

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Dekorasi dan Keindahan Kota.

1.8.5. Kelurahan Lemahwungkuk

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Dekorasi dan Keindahan Kota.

1.8.6. Kelurahan Pulasaren

- a. Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan.

1.9. Urusan Pertanahan

1.9.1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembebasan lahan



1.9.2 Sekretariat Daerah Kota Cirebon

- a. Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum, Pada program ini terdapat 1
 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Pembebasan lahan

1.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 14 (empat belas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKegiatan Jasa Kebersihan Kantor
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 14) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.



- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 4) egiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
 - 6) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap
 - 7) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
- f. Program Pendaftaran Penduduk, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
 - 2) Kegiatan Pelayanan administrasi Kependudukan
- g. Program Pelayanan Pencatatan Sipil, pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penataan pelayanan kelahiran.
 - 2) Kegiatan Penataan pelayanan perkawinan dan perceraian
 - 3) Kegiatan Penataan pelayanan kematian
- h. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (updating dan pemeliharaan).
 - 2) Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
 - 3) Kegiatan Pemutahiran data kependudukan di masyarakat
- i. Program Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan
 - 2) Kegiatan Laporan perkembangan kependudukan
 - 3) Kegiatan Penyusunan kebijakan regulasi bidang kependudukan
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi



1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
- c. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) KegiatanFasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)
 - Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dana Provinsi)

1.11.2. Kelurahan Panjunan

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

1.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- a. Program Keluarga Berencana. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, vaitu :
 - Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin.
 - 2) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana.
 - 3) Kegiatan Profil keluarga berencana
- b. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendamping Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling.



2) Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling.

1.13. Urusan Sosial

1.13.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 12) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - 13) Kegiatan Jasa Keamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.



- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- 4) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD.
- 5) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- 6) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- 7) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
 - 2) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.
 - 3) Kegiatan Program Keluarga Harapan.
 - 4) Kegiatan Jaminan sosial bagi anak terlantar dan PMKS terlantar.
 - 5) Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan So

1.13.2 Kelurahan Panjunan

- a. Program Penanggulangan dan Rehabililtasi Kesejahteraan Sosial, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial.

1.13.3 Kelurahan Argasunya

- a. Program Penanggulangan Korban Bencana, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan Tagana dalam penanggulangan bencana.

1.14. Urusan Ketenagakerjaan

1.14.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
 - 2) Kegiatan Pemagangan Tenaga Kerja
- b. Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. Pada program ini terdapat 2
 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja.



- 2) Kegiatan Diseminasi Informasi Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan industrial.

1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. ProgramPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
- b. ProgramPengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Koperasi dan UMKM.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi.
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.
- d. Program Pembentukan lembagan ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis RW.
- e. Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Cirebon

1.15.2 Kecamatan Pekalipan

a. Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :



1) Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro berbasis RW.

1.15.3 Kelurahan Panjunan

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD.

1.16. Urusan Penanaman Modal

1.16.1 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

- a. ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 15 (lima belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
 - 15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.



- 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 5) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan evaluasi.
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya.
- e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi
- f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- g. Program Penataan dan Pelayanan Perijinan, pada program ini terdapat8 (delapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 - 2) Kegiatan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan.
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal.
 - 4) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
 - 5) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi
 - 6) Kegiatan Penanganan pengaduan pelayanan perijinan
 - 7) Kegiatan Pengukuran indeks kepuasan masyarakat



1.17. Urusan Kebudayaan

1.17.1 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.
 - 8) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
 - 4) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya.
- d. Program Pengembangan Nilai Budaya, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.



- e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
- f. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, pada program ini terdapat3(tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
 - 2) Kegiatan Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

1.17.2 Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya. Pada program ini terdapat 1 (satu)
 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

1.17.3 Kelurahan Kejaksan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya. Pada program ini terdapat 1 (satu)
 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

1.17.4 Kelurahan Sunyaragi

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

1.18. Urusan Kepemudaan Olah Raga

1.18.1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan.
- b. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan



- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
 - 3) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah
 - 5) Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Tk. Jabar
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
 - Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dana Propinsi)
- e. Program Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

1.18.2. Kecamatan Kejaksan

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

1.18.3. Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

1.18.4. Kecamatan Harjamukti

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.



1.18.5. Kelurahan Sunyaragi

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18.6. Kelurahan Pekiringan

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

1.18.6. Kelurahan Panjunan

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
 Hidup Pemuda, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga.

1.18.7. Kelurahan Harjamukti

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

1.18.8. Kelurahan Kalijaga

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahragPenyelenggaraan kompetisi olahraga.



1.18.9. Kelurahan Kecapi

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 13
 (tigabelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Kegiatan pemeliharaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 10) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 12) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.



- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
 - 3) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- d. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan.
- e. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
- h. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada program ini terdapat1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah.

1.19.2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.



- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 8) KegiatanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 11) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan pembangunan gedung kantor
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunanlaporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 - 3) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya.
- f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
 - 2) Kegiatan Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
 - 3) Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan.
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat



- h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
 - 2) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
- i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penegakan peraturan daerah di wilayah Kota Cirebon
 - 2) Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelanggaran pemasangan reklame

1.19.3. Kelurahan Lemahwungkuk

- a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

1.19.4. Kelurahan Panjunan

- a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

1.19.5. Kelurahan Argasunya

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.



1.19.3. Kantor Penanggulangan Bencana Daerahdan Pemadam Kebakaran

- a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.1. Inspektorat

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor;
 - 9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kantor;
 - 10) Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- c. Program Peningkatan disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :



- 1) Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada program ini terdapat12 (duabelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
 - 2) Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - 3) Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
 - 4) Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan.
 - 5) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - 6) Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 - 7) Laporan pajak-pajak pribadi
 - 8) Kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - 9) Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya pengawasan inspektorat;
 - 10) Fasilitasi e Audit Kota Cirebon;
 - 11) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 12) Penyediaan bantuan operasional pemeriksaan bantuan hibah, bansos dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat (Dana Provinsi)
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
 - 2) Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
 - 3) Kegiatan Fasilitas Penilaian Angka Kredit

1.20.2.Sekretariat Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat15(limabelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;



- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
- 14) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat;
- 15) Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 14 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 - 3) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 4) Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
 - 5) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 6) Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 - 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 - 12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 - 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;



- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
 - 5) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD;
 - 6) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 7) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 8) Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- f. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pada program ini terdapat7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - 2) Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
 - 3) Kegiatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
 - 4) Kegiatan Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 5) Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional;
 - 6) Kegiatan Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah;
 - 7) Kegiatan Pelayanan Protokoler Kedinasan Pimpinan Daerah;
- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
 - 2) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - 3) KegiatanPembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Pembangunan.
 - 4) KegiatanPembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
 - 5) KegiatanPembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- i. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah;
- j. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah;
 - 2) Kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga.
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Fasilitasi serta penyelesaian perkara peradilan diluar dan didalamperadilan;
 - 2) Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Penerbitan Lembaran Daerah/ Berita Daerah;
 - 6) Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyuluhan Hukum.



- I. Program Pendidikan Kedinasan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme.
- m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan, yaitu
 - 1) Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
 - 2) Kegiatan Analisis Jabatan PNS.
- n. Program penataan kelembagaan,pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Ketatalaksanaan;
 - 2) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan;
 - Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tingkat Kota.
- o. Program Pembinaan Pemerintahan. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Agraria;
 - Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Harmonisasi Hubungan Antar Susunan PemerintahanKegiatan Penyusunan LPPD Kota;
 - 3) Kegiatan Penyusunan LPPD Kota;
 - 4) Kegiatan Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan kerjasama dan tugas pembantuan
 - 5) Kegiatan Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan tata pemerintahan
- p. Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan, pada program ini terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan pertanian, perikanan, dan kelautan.
 - 2) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan Energi dan sumber daya alam.
 - 3) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan lingkungan hidup.



- 4) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan Koperasi usaha mikro, kecil. dan menengah.
- Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan penanaman modal, perindustrian dan perdagangan.
- 6) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi BUMD.
- 7) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Pembangunan dan Statistik.
- 8) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
- 9) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Budaya dan Pariwisata.
- 10) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan.
- 11) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
- 12) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Agama.
- 13) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
- 14) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemuda dan Olah Raga.
- 15) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- 16)Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pekerjaan Umum, Pertambangan, ESDM dan Lingkungan Hidup
- 17) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Perencanaan Pembangunan, Perhubungan dan Pariwisata



- 18) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
- 19) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Kesehatan dan Keluarga Berencana
- q. Program Pembinaan Administrasi Umum, pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah.
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sinergitas Propinsi Jawa Barat
 - 3) Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Layanan Pengadaan ULP) Kota Cirebon
 - 4) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Monev dan Pembinaan Administrasi Pengadaan Barang
 - 5) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Monev dan Pembinaan Administrasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
 - 6) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Monev dan Pembinaan Administrasi Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya
 - 7) Kegiatan Penunjang Keikutsertaan APEKSI
- r. Program Peningkatan Kualitas Religius, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Siraman Rohani.
- s. Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan;
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tarhim Romadhon;
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos untuk Sarana Peribadatan;
- t. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Qori dan Qoriah;
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Cirebon;
 - 3) Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Provinsi;
 - 4) Fasilitasi Pengiriman Peserta Bidang Keagamaan Tk. Provinsi Jabar.



- u. Program Kerukunan Umat Beragama, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tasyakuran Pemerintah Kota Cirebon.
- v. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

1.20.3. Sekretariat DPRD

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12
 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - 11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;



- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 8) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;
- 9) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 3) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat5 (lima) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada program ini terdapat7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
 - 3) Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
 - 4) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna;
 - 5) Kegiatan Kegiatan Reses;
 - 6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 7) Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan.
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.



1.20.4. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 16 (enam belas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
 - 5) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 14) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 15) Kegiatan penyediaan jasa keamanan kantor;
 - 16) Kegiatan penataan dokumen arsip Kantor/dinas/badan/sekretariat.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.



- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD;
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- f. Program Pendidikan Kedinasan, pada program ini terdapat4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - 2) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3) Kegiatan Pembuatan buku juknis/juklak
 - 4) Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme.
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah;
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah;
 - 3) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah.
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, pada program ini terdapat13 (tiga belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
 - 2) Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS;
 - 3) Kegiatan Penempatan PNS;
 - 4) Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
 - 5) Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
 - 6) Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
 - 7) Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;
 - 8) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan diklat;
 - 9) Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian
 - Kegiatan Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat,
 Pensiun dan Infasing Fungsional Umum/Struktural;



- 11) Kegiatan Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Infasing Fungsional Tertentu
- 12) Kegiatan Penyusunan Rencana Penataan PNS.
- 13) Kegiatan Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Kota Cirebon
- i. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur, pada program ini terdapat 1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan rohani aparatur

1.20.5. Kecamatan Kejaksan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3(tiga) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian;
- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4(empat) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 4) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan.

1.20.6. Kecamatan Pekalipan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 14(empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 5) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan LPTQ Tingkat Kecamatan;
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan.

1.20.7. Kecamatan Kesambi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat
 14(empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;



- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3(tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pakaian KORPRI
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5(lima) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan.



1.20.8. Kecamatan lemahwungkuk

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3(tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Qori dan Qoriah



2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan.

1.20.9. Kecamatan Harjamukti

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 14 (emat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian;
 - 2) Kegiatan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.



- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan SOP dan SPM SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- e. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan :
 - 1) Kegiatan Pembinaan rohani aparatur.
- f. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan.

1.20.10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 16(enam belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 4) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor;
 - 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 14) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor;
 - 16) Kegiatan Penatan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/ Badan/ Sekretariat



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya
 - 5) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
- f. Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah;
 - 2) Kegiatan Peningkatan manajemen investasi asset daerah;
 - 3) Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang daerah;
 - 4) Kegiatan Sistem Integrasil aset/barang daerah;
 - 5) Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset
 - 6) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset/Barang Daerah;
- g. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pada program ini terdapat 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :



- 1) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah;
- 2) Kegiatan Monitoring Penerimaan Pajak daerah;
- 3) Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Daerah;
- 4) Kegiatan Penataan Reklame;
- 5) Kegiatan Penelitian Pelaporan Pajak Daerah (SPTPD);
- 6) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- 7) Kegiatan Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB;
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi SIMPBB;
- h. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD, pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD;
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 5) Kegiatan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota;
 - 6) Kegiatan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
 - 7) Kegiatan Penyusunan Rencana Peraturan Tentang Keuangan Daerah;
- i. Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Penatausahaan Keuangan;
 - 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah;
- j. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD;
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon.

1.20.11. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12
 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;



- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Penanggulangan Bencana, pada program ini terdapat 1 (satu)
 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Bencana.
- e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran;
 - 2) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
 - 3) Kegiatan Pelayanan Pemadam Kebakaran di Luar Jam Kerja.
- f. Program Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
 - 2) Kegiatan Pendamping Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

1.20.12. Kelurahan Kejaksan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12
 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;



- 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

1.20.13. Kelurahan Kebon Baru

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;



- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2(dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.14. Kelurahan Kesenden

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;



- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;



- 5) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.15. Kelurahan Sukapura

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;
- f. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

1.20.16. Kelurahan Kesambi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;



- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- b. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;
- c. Program Kerukunan Umat Beragama, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.

1.20.17. Kelurahan Sunyaragi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;



- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.18. Kelurahan Drajat

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;



- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :



1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.19. Kelurahan Pekiringan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.20. Kelurahan Karyamulya

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;



- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 3) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.21. Kelurahan Lemahwungkuk

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;



- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.22. Kelurahan Panjunan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;



- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu)
 kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.23. Kelurahan Kesepuhan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12
 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;



- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.24. Kelurahan Pegambiran

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;



- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 5) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;



- f. Program Kerukunan Umat Beragama, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.

1.20.25. Kelurahan Pekalipan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.26. Kelurahan Pekalangan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.27. Kelurahan Jagasatru

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12
 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;



- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.28. Kelurahan Pulasaren

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;



- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.29. Kelurahan Harjamukti

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12
 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;



- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4(empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;

1.20.30. Kelurahan Argasunya

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11(sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;



- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 6(enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;



1.20.31. Kelurahan Kalijaga

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (duabelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 5(lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3(tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;



- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

1.20.32. Kelurahan Kecapi

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.



- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 2(dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

1.20.33. Kelurahan Larangan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12(duabelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3(tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- d. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, pada program ini terdapat 2(dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan;
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan.

1.21. Urusan Ketahanan Pangan

1.21.1 Kantor Ketahanan Pangan

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pada program ini terdapat12 (dua belas) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), pada program ini terdapat9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan
 - 2) Kegiatan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 - 3) Kegiatan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
 - 4) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
 - 5) Kegiatan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
 - 6) Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah
 - 7) Kegiatan Koordinasi kebijakan perberasan
 - 8) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 9) Kegiatan Pemantapan Koordinasi dewan Ketahanan Pangan
- f. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Kemananan Pangan
 - 2) Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan

1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

- a. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.



- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- b. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
 - 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD.
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, dalam program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kota
 - 3) Kegiatan Pendataan UED-SP dan KUBE.
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penunjang Bantuan RW.
 - 2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.



- 3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi).
- g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan,Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kelurahan
 - 3) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan.
- h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan,Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan LKK.

1.22.2 Kecamatan Kejaksan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang pembangunan.
 - 2) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
 - 3) Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan.
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan.
 - 4) Kegiatan Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja.
 - 5) Kegiatan Pembinaan LKK.



1.22.3 Kecamatan Pekalipan

- b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan.
- j. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan
 - 2) Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembinaan LKK.
 - 2) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan.

1.22.4 Kecamatan Kesambi

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan.
 - 2) Kegiatan Pembinaan LKK

1.22.5 Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan



- b. Program RW Bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan lomba kelurahan tingkat kecamatan.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, pada program ini terdapat 2
 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan Pembinaan LKK

1.22.6 Kecamatan Harjamukti

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan fasilitasi dan pembinaan psyandu tingkat kecamatan.
- b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan/kelurahan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyusunan profil kecamatan.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan.
 - 2) Kegiatan Pembinaan LKK.

1.22.7 Kelurahan Kejaksan

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan,
 pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan



- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.8 Kelurahan Kebonbaru

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan fasilitasi dan pembinaan posyandu tingkat kelurahan
- b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah
- c. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.9 Kelurahan Kesenden

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah



- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.10 Kelurahan Sukapura

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.11 Kelurahan Kesambi

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi



- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.12 Kelurahan Sunyaragi

- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota
 - 2) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan
 - 3) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- b. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.13 Kelurahan Drajat

- a. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK



1.22.14 Kelurahan Pekiringan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.15 Kelurahan Karyamulya

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan lomba RW zero waste Tingkat kelurahan
 - 2) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK



1.22.16 Kelurahan Lemahwungkuk

- a. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.17 Kelurahan Panjunan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan fasilitasi administrasi kelurahan
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.18 Kelurahan Kasepuhan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha



- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.19 Kelurahan Pegambiran

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK



1.22.20 Kelurahan Pekalipan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.21 Kelurahan Pekalangan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan lomba kelurahan tingkat kecamatan
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan lokakarya dan vitalisasi kinerja LKK
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK



1.22.22 Kelurahan Jagasatru

- a. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.23 Kelurahan Pulasaren

- a. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyusunan profil kelurahan
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK



1.22.24 Kelurahan Harjamukti

- a. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 5) Kegiatan lokakarya dan vitalisasi kinerja LKK
 - 6) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.25 Kelurahan Argasunya

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.26 Kelurahan Kalijaga

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha



- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penunjang bantuan RW
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- 3) Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.27 Kelurahan Kecapi

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
 - 2) Kegiatan lokakarya dan vitalisasi kinerja LKK
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.22.28 Kelurahan Larangan

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha
- b. Program RW bersih, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan



- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyusunan profil kelurahan
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK

1.23 Urusan Statistik

1.23.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB.
 - 2) Kegiatan Penyusunan IPM.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Indikator Makro Daerah
 - 5) Kegiatan penyusunan selayang pandang Kota Cirebon
 - 6) Kegiatan Penyusunan Indikator Kemahalan Konstruksi Kota Cirebon

1.24. Urusan Kearsipan

1.24.1 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat14 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya.
- f. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah,pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
- g. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan,pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.
 - 2) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:



1) Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

1.25.1 Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan LPSE.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi Kota Cirebon.
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Informasi, Komunikasi dan Telematika.
- d. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
- e. Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi. Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Wireless.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Tower.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Server dan Upgrade Konten Website.
 - 4) Kegiatan Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung.
 - 5) Kegiatan Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon.
 - 6) Kegiatan Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi Informasi LPSE.



1.25.2 Sekretariat Daerah

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

1.25.3 Kelurahan Kebonbaru

- a. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, pada program ini tedapat1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

1.25.4 Kelurahan Panjunan

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

1.26 Urusan Perpustakaan

1.26.1 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca;
 - 2) Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah;
 - 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum;
 - 4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling.

2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur,



terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Beberapan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Kota Cirebon dan telah diterapkan Standar Pelayanan Minimal antara lain sebagai berikut :

Tabel 9 Kebijakan Kota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minima

	Kebijakan	Kota Cirebon tentang Standar F	Pelayanan Minima
No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan Kota Cirebon Tentang SPM	Keterangan
1	Bidang Ketenagakerjaan	Peraturan walikota Cirebon Nomor 35 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan	Urusan Wajib
2	Bidang Kesehatan	Peraturan walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Kesehatan	Sda
3	Bidang Lingkungan Hidup	Peraturan walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup	Sda
4	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Peraturan walikota Cirebon Nomor 12 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Sda
5	Bidang Perhubungan	Peraturan walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan	Sda
6	Bidang Pekerjaan Umum	Peraturan walikota Cirebon Nomor 25 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum	Urusan Wajib
7	Bidang Sosial	Peraturan walikota Cirebon Nomor 36Tahun 2013 tentang SPM Bidang Sosial	Sda
8	Bidang Pendidikan	Peraturan walikota Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Pendidikan	Sda
9	Bidang Perumahan Rakyat	Peraturan walikota Cirebon Nomor 37 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat	Sda
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	Peraturan Walikota Cirebon Nomor 21 Tahun 2012 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Cirebon	Urusan Wajib
11	Bidang KBKS	Peraturan walikota Cirebon No. 43 Tahun 2012 tentang SPM Bidang KBKS di Kota Cirebon	Sda
12	Bidang Kesenian	Peraturan walikota Cirebon No. 43 Tahun 2012 tentang SPM Bidang Kesenian di Kota Cirebon	Sda
13	Bidang Layanan	Peraturan walikota Cirebon No.	



	,	T	
	Terpadu Bagi	45 Tahun 2012 tentang SPM	Sda
	Perempuan dan	Bidang Layanan Terpadu Bagi	
	Anak Korban	Perempuan dan Anak Korban	
	Kekerasan	Kekerasan	
14	Bidang	Peraturan walikota Cirebon No. 6	Sda
	Ketahanan	Tahun 2013 tentang SPM Bidang	
	Pangan	Ketahanan Pangan	
15	Bidang	Peraturan walikota Cirebon No. 7	Sda
	Penanaman	Tahun 2013 tentang SPM Bidang	
	Modal	Penanaman Modal	

Tabel 10
Data Capaian SPM Berdasarkan Indikator

NO.	Bidang Urusan	Indikator	Capaian	SKPD
1.	- Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	
		Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	
		Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	50%	
		Cakupan layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	



		Cakupan layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	
	Total capaian		630% : 8 = 78,75%	
2	Bidang KB dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	73%	
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	125%	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	77,15%	
		CCakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	126,52%	
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB.	111,79%	
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (Dua) Desa/ Kelurahan	100%	
		Ratio Pembantu Keluarga Berencana (PPKBD) 1(Satu) petugas disetiap masyarakat 30 % setiap tahun	100%	
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun	16,66%	
		Cakupan penyediaan informsi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100 % setiap tahun	100%	
	Total capaian		830 % : 9 = 92%	
3.	Bidang Perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota.	90%	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	80%	



- 1		14-	I
		kota.	
		Tersedianya halte pada setiap kota	80%
		yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	
		dalam hayek.	
		Tersedianya terminal angkutan	100%
		penumpang pada setiap kota yang	
		telah dilayani angkutan umum	
		dalam trayek.	4000/
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill)	100%
		dan penerangan jalam umum (PJU)	
		pada jalan kota.	
		Tersedianya unit pengujian	100%
		kendaraan bermotor bagi kota yang	
		memiliki populasi kendaraan wajib	
		uji minimal 4.000 (empat ribu)	
		kendaraan wajib uji. Tersedianya sumber daya manusia	90%
		(SDM) di bidang terminal pada kota	90%
		yang telah memiliki terminal.	
		Tersedianya sumber daya manusia	100%
		(SDM) di bidang pengujian	
		kendaraan bermotor pada kota yang telah melakukan pengujian berkala	
		kendaraan bermotor.	
		Tersedianya Sumber Daya Manusia	-
		(SDM) yang memiliki kompetensi	
		sebagai pengawas kelaikan	
		kendaraan pada setiap perusahaan	
		angkutan umum. Tersedianya Sumber Daya Manusia	
		(SDM) di bidang pengujian	_
		kendaraan bermotor di Kota yang	
		telah melakukan pengujian berkala	
		kendaraan bermotor.	
		Terpenuhinya standard	90%
		keselamatan Kapal dan ukuran	
		dibawah 7 GT yang beroperasi pd lintas dalam Kota.	
	Total capaian		830% : 11
	•		= 75 %
4.	- Bidang Informasi	Media massa seperti majalah,radio,	-
••	dan Komunikasi	dan televisi	
		Media baru seperti website (media	100%
		online) `	
		Media tradisional seperti	
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	-
		portarijanari ranyat	
			•



		Media interpesonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	100%	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Mayarakat di tingkat Kecamatan	-	
	Total capaian		200% : 5 = 40 %	
5.	Bidang Pendidikan			
	Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kota	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100%	Dinas Pendidikan
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	100%	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,	100%	
		Untuk setiap rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	53,93%	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	60,20%	
		Untuk setiap rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	79,54%	
		Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik.	75,24%	
		Setiap SMP dan MTs tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	6,98%	



		Т	
	setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	77,03%	
	setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;	46,91%	
	setiap SMP/MTs tersedia satu ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	34,88%	
	setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik	60,47%	
	setiap SD/MI memiliki 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	96,48%	
	setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	76,34%	
	setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-4;	88,37%	
	di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih	98,46%	
	di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 35% atau lebih (untuk daerah khusus 20% atau lebih) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik;	94,75%	
	setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, danPendidikan Kewarganegaraan.	95,35%	



		,	1
	semua kepala SD/MI di kota berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	82,56%	
	semua kepala SMP/MTs di kota berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	61,40%	
	semua pengawas sekolah dan madrasah di kota memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	88,27%	
	pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	69,77%	
	Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	
	Jumlah SMP/MTS yang mendapat kunjungan pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	
	setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	71,60%	
Total Capaian		1.781,32 % : 14 = 100%	
Pelayanan Pendidikan Dasar			
oleh Satuan Pendidikan	setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	79,43%	
	setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	44,24%	
	setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh	85,18%	



1		
peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;		
Jumlah SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;	81,48%	
Jumlah SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	60,47%	
Jumlah guru tetap SD/MI bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.	95,83%	
Jumlah guru tetap SMP/MI bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan elaksanakan tugas tambahan.	70,85%	
satuan pendidikan SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;	90,12%	
b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV -VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII -IX : 27 jam per minggu		
satuan pendidikan SMP/MTs menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV -VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII -IX : 27 jam per minggu	93,02%	
satuan pendidikan SD/MI yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	
satuan pendidikan SMP/MTS yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	



Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	97,91%	
setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	94,68%	
kepala sekolah SD/MI yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester kepala sekolah SMP/MTS yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	98,43%	
setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	89,53%	
kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTS menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik;	90,12%	
setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah(MBS),yaitu memiliki rencana kerja tahunan.	27,91%	
setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki laporan tahunan.	97,61%	
setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki komite sekolah yang berfungsi baik.	94,87%	
Kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTS menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik;	100%	
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-pronsip manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu memiliki rencana kerja tahun.	95,35% 95,35%	
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki laporan	9 0,30%	



		tahunan.		
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu memiliki komite sekolah yang berfungsi baik.	90,70%	
	Total capaian		1.995,08: 27 = 73,89%	
6.	Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni, yaitu kegiatan yang bersifat kajian.	80%	Dinas Pemuda, Olah, Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan Fasilitasi Seni, yaitu dukungan bagi kesenian di Kota Cirebon agar dapat hidup lebih layak.	143%	
		Cakupan Gelar Seni, yaitu ajang pertanggung jawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral, sajian artistic maupun profan lainnya.	133%	
		Misi Kesenian, yaitu salah satu upaya untuk penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk kesenian dan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu jati diri.	300%	
		Cakupan Sumber Daya Manusia	250%	
		Cakupan Tempat	200%	
		Cakupan Organisasi	98%	
	Total Capaian		1.204 : 7 = 172 %	
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.	0 %	Dinas PU, Perumahan, dan ESDM(Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
		Tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang	60%	
		Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab/kota	70%	
		Persentasi penduduk yang mendapatkam akses air minum yang aman.	80%	
		Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai	25%	
		Persentase pengurangan sampah diperkotaan	20%	
		Persentase pengangkutan sampah	75,47%	



Rakyat huni Perumahan, c ESDM(Dinas Kebersihan c	7.		Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase		
terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)lebih dari 2 kali setahun Persentase jumlah izin IMB yang diterbitkan Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa kontruksi tingkat kab/kota pada system informasi pembinaan jasa kontruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan izin usaha kontruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Meningkatnya ketersediaan 100% informasi penataan ruang Meningkatnya ketersediaannya 11% RTH Total Capaian Cakupan ketersediaan rumah layak huni 45,35% Earumahan, calibati kerjadi genama kalibati kerjadi genama kalibati kab/kota pada system informasi penataan ruang Meningkatnya ketersediaannya 11% RTH Cakupan ketersediaan rumah layak huni 45,35%	7.		terlayani system jaringan drainase	35%	
diterbitkan Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa kontruksi tingkat kab/kota pada system informasi pembinaan jasa kontruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan izin usaha kontruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Meningkatnya ketersediaan 100% informasi penataan ruang Meningkatnya ketersediaannya 11% RTH Total Capaian Cakupan ketersediaan rumah layak 76,57% Dinas Perumahan, asakyat Bidang Perumahan Rakyat Cakupan layanan rumah layak huni 45,35% Cakupan layanan rumah layak huni 45,35%			genangan (lebih dari 30 cm, selama		
informasi jasa kontruksi tingkat kab/kota pada system informasi pembinaan jasa kontruksi (SIPJAKI) Persentase tersedianya layanan izin usaha kontruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Meningkatnya ketersediaan 100% informasi penataan ruang Meningkatnya ketersediaannya 11% RTH Total Capaian Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni informasi penataan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni 45,35%				100%	
usaha kontruksi (IÚJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Meningkatnya ketersediaan ruang Meningkatnya ketersediaannya 11% RTH Total Capaian 8. Bidang Perumahan Rakyat Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni 45,35%			informasi jasa kontruksi tingkat kab/kota pada system informasi	5%	
informasi penataan ruang Meningkatnya ketersediaannya 11% RTH Total Capaian 8. Bidang Perumahan Rakyat Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni Ababaa ang Perumahan Perumahan ang Pertamanan polam) Cakupan layanan rumah layak huni Ababaa ang Perumahan ang Pertamanan polam)			usaha kontruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap		
8. Bidang Perumahan Rakyat Cakupan ketersediaan rumah layak 76,57% huni Cakupan ketersediaan rumah layak 76,57% Dinas Perumahan, ESDM(Dinas Kebersihan Pertamanan PDAM) Cakupan layanan rumah layak huni 45,35%			informasi penataan ruang		
8. Bidang Perumahan Rakyat Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni 76,57% Perumahan, ESDM(Dinas Kebersihan Pertamanan PDAM) Cakupan layanan rumah layak huni 45,35%					
Rakyat huni Perumahan, CESDM(Dinas Kebersihan CESDM) Cakupan layanan rumah layak huni 45,35%		Total Capaian		· ·	
	8.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76,57%	Perumahan, dan ESDM(Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan
				45,35%	
Lingkungan yang sehat dan aman 0% Tidak mengisi yang didukung dengan prasarana, kuesioner sarana dan utilitas umum (PSU).			yang didukung dengan prasarana,	-	
Total Capaian		Total Capaian		3 =	
9. Bidang Cakupan penerbitan kartu keluarga 100% Dinas Kependudukan da . Dalam Negeri Cakupan penerbitan kartu keluarga 100% Catatan Sipil	9.	Pemerintahan	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	Kependudukan dan
Cakupan penerbitan kartu tanda 80% penduduk				80%	
Cakupan penerbitan kutipan akta 86% kelahiran			l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	86%	
Cakupan penerbitan kutipan akta 73%	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73%	
kematian			kematian		



	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	80%	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Tingkat Waktu Tanggap (Respone Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80%	
		Presentase Aparatur Damkar memenuhi Standar Kualifikasi	64%	
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	90%	
	Total Capaian		330%:4=	
			82,5%	
	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kab/Kota	64,71%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan Patroli Siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab/Kota	97%	
	Total capaian		261% : 4 = 65,62%	
10	Bidang Sosial	Presentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	11,05%	
		Presentase (%) PMKS Skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.	6,35%	
		Persentase (%) Panti Sosial skala Kota yang menyediaan srana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	77,78%	
		Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%	
		% Korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	
		% Korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	



		% Penyandang Cacat Fisik dan	2,79%	
		Mental, serta Lanjut Usia tidak	2,1070	
		potensial yang menerima jaminan sosial		
	Total capaian	SUSIAI	97,97% :	
			7 = 13.9%	
44	Did	D	05.040/	
11.	Bidang Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65,01%	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	-	
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	71,15%	
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek	84,63%	
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	15,80%	
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	91,90%	
	Total capaian		328% : 7	
			= 46,9%	
12.	Bidang Ketahanan	Ketersediaan 198 energi 198 dan	120%	Kantor Ketahanan
	Pangan	protein perkapita. Penguatan cadangan pangan.	18,2	Pangan
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100%	
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,54%	
		Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan	80,95%	
		Penanganan daerah rawan pangan	100%	
	Total capaian		603% : 7 = 86%	
13.	Bidang Kesehatan	Cakupan Kunjungan Bumil K4	93,26%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	111,18%	
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi kebidanan	93,84%	



	Cakupan Palayanan Nifaa	86,70%
	Cakupan Pelayanan Nifas	
	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang di tangani	95,65%
	Cakupan Kunjungan Bayi	87,00%
	Cakupan Desa / Kelurahan UCI	95,45%
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	83,80%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin	46,50%
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat	95,90%
	Cakupan Peserta KB Aktif	81,45%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :	
	Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	4
	Kesembuhan penderita TBC BTA Positif	71,80%
	Cakupan balita dengan Pneumonia yang di obati	39,45%
	Klien yang mendapatkan penanganan HIV – AIDS	100%
	Penderita DBD yang ditangani	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%
	Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang di lakukan penyelidikan epideiologi < 24 jam	100%
	Cakupan Desa / Kelurahan Siaga Aktif	100%
Total capaian		1881,98% : 22 = 85%



14.	Bidang Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha 200 edic 200 / bidang usaha unggulan	80%	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinin Terpadu
		Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	60%	
		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	90%	
		Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal	90%	
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	85%	
		Terimplementasinya 200 sistim pelayanan informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	85%	
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	90%	
	Total capaian		580% : 7 = 82,85%	
15	Bidang Lingkungan Hidup	% usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	37%	
		% usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	40%	Tidak beroperasi
		% Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	
		Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Atau Perusakan Lingkungan Hidup	100%	
	Total capaian		277% : 4 = 69,25%	
	Total Capaian		12919,77	



Keseluruhan	% : 95 =
SKPD	135,99 %
	11,111

Capaian kinerja urusan pemerintahan oleh setiap SKPD yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya (SPM), masih dirasakan belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada SKPD sehingga capaian target sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagaimana di atas, belum bisa tercapai secara optimal. Namun demikian pembinaan terus dilakukan sehingga tingkat kesalahan dalam kondisi anggaran yang terbatas ini bisa diminimalisir.

Sejalan dengan regulasi kebijakan pemerintah pusat tentang urusan Pemerintahan yang mengharuskan ditindaklanjuti SPM di daerah, Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan kajian secara bertahap agar terwujud sinergitas dan harmonisasi kebijakan yang tidak tumpang tindih. Selain itu upaya pembinaan yang terkait dengan peningkatan pelayanan terus dilakukan. Pada tataran ini Monitoring dan Evaluasi terhadap bentuk pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu pembinaan yang dilakukan dan oleh pengambil kebijakan.



3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan serta Kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah di wilayah Kecamatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Tabel 11
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

	Satuan Kerja Perangkat Daeran P	enyelenggara orasan wajib
NO	SKPD	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Dilaksanakan
1	Sekretariat Daerah	Otonomi Daerah, Administrasi
		Pemerintahan Umum, dan
		Persandian
2	Seretariat DPRD	Pemerintahan Umum
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil
4	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan	Administrasi Keuangan Daerah
	Keuangan Daerah	
5	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan	Kepemudaan dan Olah dan
	Pariwisata	Raga, Kebudayaan
6	Dinas Perhubungan, Informatika dan	Perhubungan, Komunikasi dan
	Komunikasi	Informatika
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi	Pekerjaan Umum, Penataan
	dan Sumber Daya Mineral	Ruang, dan Perumahan
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan	Koperasi dan Usaha Kecil
	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Menengah



9	Dinas Pendidikan	Pendidikan	
10	Dinas Kesehatan	Kesehatan	
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosial, dan ketenagakerjaan	
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Lingkungan Hidup	
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan dan Statistik	
14	Inspektorat	Administrasi Pemerintahan Umum	
15	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	Kepegawaian	
16	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Kearsipan dan Perpustakaan	
17	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Masy. dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan KKBS	
18	Kantor Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	
19	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
20	Kantor Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	
21	Kantor Penanaman Modal	Penanaman Modal	
22	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Gunung Jati	Kesehatan	22
23	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	Penanaman Modal	
24	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Pemerintahan Umum	

4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Tabel 12 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

	SKPD/	Golongan Ruang																
N	Jabatan						1	I			ı	II	IV					
0								С										
	SEKRETARIAT DAERAH	a	b	С	d	а	b	C	d	а	b	С	d	а	b	С	d	е
Α		1 : 221																_
1	Struktural																	-
	Es.II.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0
2	Es. IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	17	3	0	0	0	0
3	Fungsional :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Staf	0	0	2	0	5	40	14	4	34	53	11	5	0	0	0	0	0
5	Jumlah	0	0	2	0	5	40	14	4	34	56	21	22	5	1	7	1	0
В	SEKRETARIAT DPRD =	35																
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0
2	Fungsional :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Staf	0	0	1	0	2	4	2	0	4	6	3	1	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	1	0	2	4	2	0	4	6	6	4	2	3	1	0	0
С	DISDUKCAPIL = 35	·					· ·		·		· ·	· ·	· ·	, and the second				
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



-																		
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		_	_												_	-		_
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0
2	Fungsional :	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Staf	0	0	0	0	0	3	0	1	4	6	2	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	0	0	3	0	1	5	6	6	8	3	2	1	0	0
D	DPPKAD = 102	-																
_																		
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	3	0	0	0	0
2	Fungsional :	0	-		0	0			2	2	-	1	_	0	-	-		_
2		-	0	0			1	0			3		0		0	0	0	0
3	Staf	0	0	0	0	1	7	4	5	7	24	14	2	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	0	1	8	4	7	9	28	23	12	8	1	1	0	0
E.	DPUESDM = 98																	
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			_										-		-		_	_
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Fungsional :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0
		_	-								-		-		-	-		_
3	Staf	0	0	0	1	6	14	16	3	3	22	2	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	1	6	14	16	3	3	32	1	7	1	2	1	0	0
F	DISPORBUDPAR = 42																	
1	Struktural																	
\vdash		0	0	Λ	Λ	0	0	Λ	0	0	Λ	^	n	0	Λ	1	Λ	Ω
		-											-					_
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	0	0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Fungsional :	-	_										-					_
3	Staf	0	0	0	0	0	3	0	2	5	7	1	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	0	0	3	0	2	5	7	6	12	5	1	1	0	0
G	DISHUBINFOKOM: 193																	
1	Struktural																	
_	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		_					-										_	
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	1	0	0	0	0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
2		0	-								-		-	0	-	-		_
2	Fungsional :	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3	Staf	0	2	2	1	4	74	16	8	12	30	10	4	1	0	0	0	0
4	Jumlah	0	2	2	1	4	74	16	8	12	30	19	17	6	1	1	0	0
H	DISPERINDAG-KUMKM	= 46																
1	Struktural																	
_													1		1			1
	Es.II.b						\vdash					_			-			+
	Es.III.a														1			ш
	Es.III.b											1	1	2				
	Es.IV.a												10	2				
2	Fungsional :										2	2	1	1				П
3	Staf				1		2	0	0	2	10	0	7		\vdash	-		$\boldsymbol{\vdash}$
		_	^	_		_	-							-	_	-		+
4	Jumlah	0	0	0	1	0	2	0	0	2	12	3	19	5	2			+
ı	DINAS PENDIDIKAN = 2	2908																Ш
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	_	0 0	0
		_		$\overline{}$									-			_	_	_
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1		0 0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	10	0	_	0 0	0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	0		0 0	0
	Es.V.a	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	11	7	0	0		0 0	0
2	Fungsional	0	0	2	0	17	5	19	10	253	404	455	284	512	594	6		0
$\overline{}$			_	$\overline{}$												_	_	_
3	Staf	3	0	8	6	31	27	24	14	33	53	11	8	1	1	_	0 0	0
4	Jumlah	3	0	10	6	48	32	43	26	287	466	488	306	597	597	6	7 2	0
J	DINAS KESEHATAN = 4	11																
01	Struktural																	
0																		Į
Ĕ	Eallh		_					_	-			1	-		_		- 1	-
	Es.II.b				\vdash		-				—	-	——		\vdash	1		
	Es.III.a												1					
	Es.III.b													4				
	Es.IV.a										1	2	15	20				
	Es.IV.b										5	10	6	2	\vdash		-+	
_				l	\vdash	_	_	40					-		H	_		_
2	Fungsional					3	6	18	38	77	78	59	103	24	4	1	1	1
3	Staf	1	0	1	0	3	7	9	10	28	46	16	10	0	0	0	0	0
4	Jumlah	1	0	1	0	6	13	27	48	105	130	87	135	50	4	2	1	1



-	DINCOCNAVEDEDANG	- 40															
K	DINSOSNAKERTRANS	- 42															
1	Struktural																
	Es.II.b															1	
	Es.III.a													1			
					-						\vdash			2	1		
	Es.III.b										-				' '		
	Es.IV.a											3	8	2			
	Es.IV.b											3	1				
2	Fungsional										1						
			-		-					_		_			\vdash		
3	Staf									3	9	6	0	1			
4	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	12	9	6	1	1	
	DKP = 262		•		•												
1	Struktural	_	_			_	_	_									
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0 0
			_				_	_		_					-	_	
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	0 0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0 0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
								_			-					_	
3	Staf	5	3	6	23	21	127	35	2	7	13	1	0	0	0	0	0 0
4	Jumlah	5	3	6	23	21	127	35	2	7	14	8	7	2	2	0	0 0
М	BAPPEDA = 44							-									
$\overline{}$																	
1	Struktural																
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 0
				_	_		-	_								-	-
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0 0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0 0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
_					_	_										_	
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0 0
3	Staf	0	0	0	0	1	4	1	0	3	5	10	0	0	0	0	0 0
4	Jumlah	0	0	0	0	1	4	1	0	3	6	16	5	5	4	0	0 0
N																	
1	INSPEKTORAT = 47 Struktural																
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0 0
			_		_		_		_		_		_		-		
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0 0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0 0
						_									-	_	
3	Staf	0	0	0	0	0	3	1	1	2	8	5	1	9	3	0	0 0
4	Jumlah	0	0	0	0	0	3	1	1	2	9	7	5	11	7	1	0 0
0	BKDIKLAT = 80																
1	Struktural																
					_					•			•			- 1	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0 0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0 0
			_			-				_				1	-	_	
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10		0	0	0 0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	2	1	0	0 0
3	Staf	0	0	0	0	0	3	2	0	3	24	11	1	0	0	0	0 0
4	Jumlah	0	0	0	0	0	3	2	0	3	28	20	12	9	2	1	0 0
					J		J				20	۷.	-14	9			U U
Р	BAPUSIPDA = 36																
1	Struktural																
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0 0
		_													-	_	
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0 0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0 0
	Es.IV.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0 0
2		0			0	0		_	1	4	0		-	^	0	0	
	Fungsional		0	0		_	0	0	-	4		3	5	0	-	_	
3		0	0	0	0	1	3	0	1	2	3	1	1	0	0	0	0 0
	Staf						3	0	0								
4	Jumlah	0	0	0	0	1			2	6	5	6	9	2	1	1	0 0
	Jumlah		0	0	0	1	J	U	2	6	5	6	9	2	1	1	0 0
Q	Jumlah BPMPPKB = 63		0	0	0	1	3		2	6	5	6	9	2	1	1	0 0
	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural	0			•											-	
Q	Jumlah BPMPPKB = 63		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0 0
Q	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b	0			•											-	
Q	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.a	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0 0 0 0
Q	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.a Es.III.b	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 2	0 1 3	0 0	1 0 0	0 0 0 0 0 0
Q	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.a	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0 0 0 0
Q	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.a Es.III.b	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 2	0 1 3	0 0	1 0 0	0 0 0 0 0 0
Q 1	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 2 1	0 0 2 14 3	0 1 3 2	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q 1	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b Fungsional	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 2 1	0 0 2 14 3	0 1 3 2 0	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q 1	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 2 1	0 0 2 14 3	0 1 3 2	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q 1	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b Fungsional	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 2 1	0 0 2 14 3	0 1 3 2 0	0 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q 1 2 3 4	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.a Es.III.b Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2	0 0 0 2 1 1 3	0 0 2 14 3 3	0 1 3 2 0 2	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 R	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.IV.a Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah KANTOR KETAHANAN	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2	0 0 0 2 1 1 3	0 0 2 14 3 3	0 1 3 2 0 2	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q 1 2 3 4	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.a Es.III.b Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2	0 0 0 2 1 1 3	0 0 2 14 3 3	0 1 3 2 0 2	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 R	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.IV.a Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah KANTOR KETAHANAN	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2	0 0 0 2 1 1 3	0 0 2 14 3 3	0 1 3 2 0 2	0 0 0 0 0	1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 R	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah KANTOR KETAHANAN Struktural Es.III.a	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 1 1 2	0 0 0 0 0 0 2 2	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2 2	0 0 0 0 0 2 13 15	0 0 0 2 1 1 3 7	0 0 2 14 3 3 2 24	0 1 3 2 0 2 0 8	0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 R	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.b Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah KANTOR KETAHANAN Struktural Es.III.a Es.III.a	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PANGA	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 1 1 2	0 0 0 0 0 0 2 2	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2 2	0 0 0 0 0 2 13 15	0 0 0 2 1 1 3 7	0 0 2 14 3 3 2 24	0 1 3 2 0 2 0 8	0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 R	Jumlah BPMPPKB = 63 Struktural Es.III.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b Fungsional Staf Jumlah KANTOR KETAHANAN Struktural Es.III.a	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 0 1 1 2	0 0 0 0 0 0 2 2	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 2 2	0 0 0 0 0 2 13 15	0 0 0 2 1 1 3 7	0 0 2 14 3 3 2 24	0 1 3 2 0 2 0 8	0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



_																		
3	Staf	0	0	0	0		1	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	2	0	1	0	0	0
S	SATPOL PP = 75	Ū	Ů		·	Ū	<u> </u>	Ů							<u> </u>	Ů	Ů	Ť
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0															
	Es.III.b	0	·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Staf	0	0	1	1	0	3	32	4	9	9	2	1	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	1	1	0	3	32	4	9	9	3	8	4	1	0	0	0
Т	KANTOR LINGKUNGAN	N HIDUP	= 17															
1	Struktural																	
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Staf	0	0	0	0	2	3	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	0	2	3	0	0	3	5	2	1	1	1	0	0	0
U	BPMPPT = 33	U	U	U	U		J	U	U	J	5	۷.				U	U	U
1	Struktural																	
\vdash									1							4		-
	Es.II.b						_					\vdash				1	1	
	Es.III.a				-		-								1	—	$oxed{oxed}$	
	Es.III.b									\bot		\perp	1	3				
	Es.IV.a																	
2	Fungsional										1	2	4					
3	Staf						1	0	1	2	13	3						
4	Jumlah	0	0	0	0	0	1	0	1	2	14	5	5	3	1	1	0	0
٧	BLU RSUD GUNUNG JA	ATI = 70	60															
1	Struktural																	
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	() (1	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 1	0	0	0
	Es.III.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2				0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	_	7	5	_		0	0
2	Fungsional	0	0	0	0	1	1	11	28	91	90		116				3	0
3	Staf	0	0	2	1	8	61	47	12	68	60		8	2		_	0	0
					_		_				_			_	_	_		_
4	Jumlah	0	0	2	1	9	62	58	40	159	15	1 94	133	3	4 8	6	3	0
W	KANTOR KESBANGPO	LDAGRI	= 15															
1	Struktural										_							_
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Staf	0	0	0	0	2	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah	0	0	0	0	2	1	2	2	1	2	0	3	1	1	0	0	0
Χ	KANTOR PENANGGUL	ANGAN	BENCA	NA DAE	RAH	AN PEN	/ADAN	KEBA	(ARAN =	26								
1	Struktural																	
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Es.IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
2	Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Staf	0	0	0	0	1	7	2	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	1	7	2	2	3	7	0	3	0	1	0	0	0
/	lumlah	0		U	U					3		U	J	U	_ '	U	U	U
4	Jumlah	0	U															
Z	DKP 3 = 60	0																
	DKP 3 = 60 Struktural									-		_					_	
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b	0 0	0	0		0	0	0	0	0			0	3	_			0
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b Es.III.a	0 0 0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0 3 3	1	0	0	0 0
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 4	0 0 5	0 3 3	0	0 0	0 0	0 0
Z	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.III.b Es.IV.a Es.IV.b	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	0 0 4 3	0 0 5	0 3 3 0	1 0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Z 1	DKP 3 = 60 Struktural Es.II.b Es.III.a Es.IV.a Es.IV.b Fungsional	0 0 0 0	0 0 1 1 4	0 0 4 3 4 3	0 0 5 1	0 3 3 0	1 0 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0								



5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

5.1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan ditangani oleh Dinas Pendidikan. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.1.1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan pada Tahun Anggaran 2015 untuk urusan pendidikan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 146.748.057.906,00 terealisasi sebesar Rp. 168.331.269.489,00 atau 114%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 188 (seratus delapan puluh delapan) kegiatan sebagai berikut :

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.679.227.600,00 terealisasi Rp. 1.664.381.321,00 atau 99,12%, digunakan untuk 20 (dua puluh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp.10.440.000,00 terealisasi Rp. 10.440.000,00 atau 100%.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 352.400.000,00 terealisasi Rp. 341.022.179,00 atau 96,77%
 - Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 71.881.000,00 terealisasi Rp. 71.301.600,00 atau 99,19%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 13.800.000,00 terealisasi Rp. 13.800.000,00 atau100%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 166.235.500,00 terealisasi Rp. 165.755.500,00 atau 99,71%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 182.300.000,00 terealisasi Rp. 182.259.000,00 atau 99,98%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 111.050.000,00 terealisasi Rp. 111.010.034,00 atau 99,96%



- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 28.040.000,00 terealisasi Rp. 28.040.000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 35.000.000,00 terealisasi Rp. 35.000.000,00 atau 100%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 128.880.000,00 terealisasi Rp. 128.247.000,00 atau 99,51%
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 4.200.000,00 terealisasi Rp. 4.150.000,00 atau 98,81%
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp 155.085.100,00 terealisasi Rp. 153.549.200,00 atau 99,01%
- 13) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 288.480.000,00 terealisasi Rp. 288.370.808,00 atau 99,96%
- 14) Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 131.436.000,00 terealisasi Rp. 131.436.000,00 atau 100%
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 2.112.100.000,00 terealisasi Rp. 2.102.460.400,00 atau 99,54%, digunakan untuk7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, anggaran Rp. 500.000.000,00 terealisasi Rp. 497.069.900,00 atau 99,41 %
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantoranggaran Rp. 172.050.000,00 terealisasi Rp. 168.800.000,00 atau 98,11 %
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor anggaran Rp. 173.550.000,00 terealisasi Rp. 173.325.000,00 atau 99,87%
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp.
 12.650.000,00 terealisasi Rp. 12.650.000,00 atau 100%



- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional anggaran Rp. 229.950.000,00 terealisasi Rp. 229.452.000,00 atau 99.78%
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor anggaran Rp. 23.900.000,00 terealisasi Rp. 23.750.000,00 atau 99,37%
- 7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor anggaran Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi Rp. 997.413.500,00 atau 99,74%
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 188.550.000,00 terealisasi Rp. Rp. 185.760.000,00 atau 98,52%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian berserta perlengkapannya, anggaran Rp. 188.550.000,00 terealisasi Rp. Rp. 185.760.000,00 atau 92,24%.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 837.192.375,00 terealisasi Rp. 772.222.975,00 atau 99,61%, digunakan untuk 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 139.000.000,00 terealisasi Rp 138.458.000,00 atau 98,52%
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan anggaran Rp. 319.580.000,00 terealisasi Rp 314.835.100,00 atau 98,19%.
 - 3) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional anggaran Rp. 140.612.375,00 terealisasi Rp. 82.469.875,00 atau 58,65%
 - 4) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur anggaran Rp. 238.000.000,00 terealisasi Rp. 236.460.000,00 atau 99,35%
- f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 503.806.147,00 terealisasi Rp. 478.091.600,00 atau 94,90%, digunakan untuk 5 (lima) kegiatan yaitu :



- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 63.416.000,00 terealisasi Rp 61.416.000,00 atau 96,85%
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD anggaran Rp. 84.619.547,00 terealisasi Rp 72.617.000,00 atau 85,82%
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 45.985.000,00 terealisasi Rp 44.545.000,00 atau 96,87%
- 4) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap, anggaran Rp. 223.080.000,00 terealisasi Rp 220.340.000,00 atau 98,77%
- 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD, anggaran Rp. 86.705.600,00 terealisasi Rp 79.173.600,00 atau 91,31%
- g. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.497.123.300,00 terealisasi Rp. 1.382.509.550,00 atau 92,34%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, anggaran Rp. 317.630.800,00 terealisasi Rp.208.489.550,00atau 65,64%
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, anggaran Rp.
 1.051.715.000,00 terealisasi Rp. 1.049.165.000,00 atau 99,76%
 - Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak, anggaran Rp. 127.777.500,00 terealisasi Rp. 124.855.000,00 atau 97,71%
- h. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Alokasi anggaran untuk program ini Rp.70.199.912.216,00 terealisasi Rp.65.068.065.632,00 atau 92,69%, digunakan untuk melaksanakan 81 (delapan puluh satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah, anggaran Rp.2.300.000.000,00 terealisasi Rp. 2.292.389.900,00 atau 99,67%
 - 2) Kegiatan Pembangunan ruang serba guna/aula, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.465.000,00 atau 99,73%



- Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD, anggaran Rp. 2.480.000.000,00 terealisasi Rp. 2.469.129.900,00 atau 99,56%
- 4) Kegiatan Pembangunan ruang ibadah, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.330.000,00 atau 99,67 %
- 5) Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah, anggaran Rp. 500.000.000,00 terealisasi Rp. 499.099.000,00 atau 99,82 %
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tingkat SD, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 398.395.000,00 atau 99,60%
- 7) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, anggaran Rp. 1.300.000.000,00 terealisasi Rp. 1.295.850.000,00 atau 99,68 %
- 8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 397.367.350,00 atau 99,34%
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 399.000.000,00 atau 99,75 %
- 10)Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 398.875.000,00 atau 99,72 %
- 11)Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.500.000,00 atau 99,75%
- 12)Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, anggaran Rp. 199.999.950,00 terealisasi Rp. 183.135.950,00 atau 91,57%
- 13)Kegiatan Pelatihan Penyusunan kurikulum, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 14)KegiatanPenambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 398.790.000,00 atau 99,70%
- 15)KegiatanPembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa, anggaran Rp. 250.000.000,00 terealisasi Rp.248.335.000,00 atau 99,33%



- 16) KegiatanMonitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Harjamukti, anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%
- 17) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Kesambi, anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%
- 18) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Pekalipan, anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%
- 19) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Lemahwungkuk, anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%
- 20) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPTD Kecamatan Kejaksan, anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%
- 21) Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Dasar, anggaran Rp.200.000.000,00 terealisasi Rp.198.535.000,00 atau 99.27%
- 22) Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah Pertama, anggaran Rp. 550.000.000,00 terealisasi Rp. 544.808.400,00 atau 99,06%
- 23) Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan sekolah, anggaran Rp. 350.000.000,00 terealisasi Rp. 348.465.000,00 atau 99,56%
- 24) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor SD (Dana Propinsi)), anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 199.440.000,00 atau 0 %
- 25) Kegiatan Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.375.900,00 atau 99,69%
- 26) Kegiatan Pengadaan Meubeulair Sekolah Menengah Pertama, anggaran Rp.200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.031.900,00 atau 99,52%
- 27) Kegiatan Pembangunan Taman, lapangan Upacara, dan fasilitas parkir SMP, anggaran Rp.900.000.000,00 terealisasi Rp. 897.394.000,00 atau 99,71%



- 28) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Fasilitas SMP, anggaran Rp. 2.800.000.000,00 terealisasi Rp. 2.792.569.500,00 atau 99,73%
- 29)Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Fasilitas SD, anggaran Rp. 1.800.000.000,00 terealisasi Rp. 1.789.374.900,00 atau 99,41%
- 30)Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP (Dana Propinsi), anggaran Rp.540.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 31)Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka (Dana Propinsi), anggaran Rp. 231.100.000,00 terealisasi Rp. 231.100.000,00 atau 100%
- 32)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Kejaksan, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00 atau 100%
- 33)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Kesambi, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.402.856,00 atau 99,40%
- 34)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalipan, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 94.049.989,00 atau 94,05%
- 35)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Harjamukti, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 91.571.811,00 atau 91,57%
- 36)Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 96.650.073,00 atau 96,65%
- 37)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SD Negeri Pamitran (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 38)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Pengampon II (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%



- 39)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Kalijaga Permai (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 40)Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Karyamulya (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 41) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SDN Rinjani Perumnas (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 42) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 16 Kota Cirebon (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 43) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 8 Kota Cirebon (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 44) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 11 Kota Cirebon (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%...
- 45) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 6 Kota Cirebon (Dana Propinsi), anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%...
- 46) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 15 Kota Cirebon (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%...
- 47) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 1 Kota Cirebon (Ex RSBI) (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 48) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 5 Kota Cirebon (Ex RSBI) (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00.



- 49) Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang SMPN 17 Kota Cirebon (Dana Propinsi), anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%..
- 50) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Kejaksan, anggaran Rp. 2.216.416.750,00 terealisasi Rp. 2.207.985.767,00 atau 99,62%.
- 51)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Kesambi, anggaran Rp. 2.694.293.650,00 terealisasi Rp. 2.684.017.770,00 atau 99,62%.
- 52) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Lemahwungkuk, anggaran Rp. Rp. 1.482.160.300,00 terealisasi Rp. 1.480.283.800,00 atau 99,87%.
- 53)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Pekalipan, anggaran Rp. 1.049.766.450,00 terealisasi Rp. 1.036.776.978,00 atau 98,76%.
- 54) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SDN Kecamatan Harjamukti, anggaran Rp. 3.538.709.850,00 terealisasi Rp. 3.499.321.718,00 atau 98,89%.
- 55) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 1, anggaran Rp. 992.166.916,00 terealisasi Rp. 948.363.433,00 atau 95,59 .
- 56) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 2, anggaran Rp. 578.348.050,00 terealisasi Rp. 578.348.050,00 atau 100%.
- 57) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 3, anggaran Rp. 476.615.750,00 terealisasi Rp. 476.615.750,00 atau 100%.
- 58) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 4, anggaran Rp. 885.799.400,00 terealisasi Rp. 885.789.000,00 atau 100%.
- 59) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 5, anggaran Rp. 785.005.100,00 terealisasi Rp. 772.323.730,00 atau 98,38%.
- 60)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 6, anggaran Rp. 752.472.550,00 terealisasi Rp. 745.074.830,00 atau 99,02%



- 61)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 7, anggaran Rp. 771.154.300,00 terealisasi Rp. 771.096.800,00 atau 99,99%
- 62)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 8, anggaran Rp. 503.963.900,00 terealisasi Rp. 499.519.950,00 atau 99,12%
- 63)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 9, anggaran Rp. 488.985.600,00 terealisasi Rp. 488.985.600,00 atau 100%
- 64)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 10, anggaran Rp. 522.967.150,00 terealisasi Rp. 522.242.150,00 atau 99,98%
- 65)Kegi86atan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 11, anggaran Rp. 719.392.750,00 terealisasi Rp. 719.349.900,00 atau 99,99%
- 66)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 12, nggaran Rp. 393.402.750,00 terealisasi Rp. 382.047.750,00 atau 97,11%
- 67)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 13, anggaran Rp. 474.786.250,00 terealisasi Rp. 474.786.250,00 atau 100%
- 68) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 14, anggaran Rp. 463.384.300,00 terealisasi Rp. 447.069.300,00 atau 96,48%
- 69)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 15, anggaran Rp. 522.447.850,00 terealisasi Rp. 522.447.850,00 atau 100%
- 70)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 16, anggaran Rp. 585.704.250,00 terealisasi Rp. 585.704.250,00 atau 100%
- 71)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 17, anggaran Rp. 439.836.800,00 terealisasi Rp. 438.436.750,00 atau 99,68%



- 72)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMPN 18, anggaran Rp. 398.929.450,00 terealisasi Rp. 398.929.450,00 atau 100%
- 73)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 1 Harjamukti, anggaran Rp. 62.982.200,00 terealisasi Rp. 62.982.200,00 atau 100%
- 74) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 2 Kesambi, anggaran Rp. 16.831.450,00 terealisasi Rp. 16.831.450,00 atau 100%
- 75)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Terbuka 3 Lemahwungkuk, anggaran Rp. 19.888.500,00 terealisasi Rp. 19.888.500,00 atau 100%
- 76)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 1, anggaran Rp. 158.250.000,00 terealisasi Rp. 158.250.000,00 atau 100%
- 77)Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah MTS Negeri 2, anggaran Rp. 103.950.000,00 terealisasi Rp. 103.950.000,00 atau 100%
- 78) Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMP (Pengadaan Alat Sistem Penilaian Sekolah) (Dana Provinsi), anggaran Rp. 4.440.000.000,00 terealisasi Rp. 4.346.632.000,00 atau 97,90.%
- 79) Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMP (Pengadaan Prasarana Kelas Berstandar Internasional) (Dana Provinsi), anggaran Rp. 8.325.000.000,00 terealisasi Rp. 4.829.773.000,00 atau 58,02%
- 80)Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SD (Pengadaan Alat Sistem Penilaian Sekolah) (Dana Provinsi), anggaran Rp. 16.200.000.000,00 terealisasi Rp. 16.018.610.227,00 atau 98,88%
- 81)Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka (Dana Propinsi Tahun 2014), anggaran Rp. 235.200.000,00 terealisasi Rp. 235.200.000,00 atau 100%



- Program Pendidikan Menengah Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 49.717.926.550,00 terealisasi Rp.45.859.262.678,00 atau 92,94%, digunakan untuk melaksanakan 38 (tiga puluhdelapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan ruang kelas baru (RKB) tingkat SMA/SMK, anggaran Rp. 800.000.000,00 terealisasi Rp 797.181.500,00 atau 99,65%
 - Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, anggaran Rp. 800.000.000,00 terealisasi Rp. 797.149.000,00 atau 99,64%
 - Kegiatan Pembangunan pepustakaan sekolah, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 398.574.900,00 atau 99,64%
 - 4) Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 196.088.300,00 atau 98,04%
 - 5) Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, anggaran Rp. 600.000.000,00 terealisasi Rp. 595.970.000,00 atau 99,33%
 - 6) Kegiatan Pengadaan mebeluer sekolah, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 198.547.900,00 atau 99,27%
 - 7) Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 198.265.000,00 atau 99,13%
 - 8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, anggaran Rp. 1.200.000.000,00 terealisasi Rp. 1.196.619.900,00 atau 99,72%
 - Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah, anggaran Rp.
 600.000.000,00 terealisasi Rp. 598.379.400,00 atau 99,73%
 - 10) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah, anggaran Rp. 600.000.000,00 terealisasi Rp. 598.529.900,00 atau 99,75%
 - 11) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula, anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.209.900,00 atau 99,60%
 - 12) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah, anggaran Rp. 700.000.000,00 terealisasi Rp. 697875.000,00 atau 99,70%



- 13) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 399.029.900,00 atau 99,76%
- 14) Kegiatan Penyelenggaraan paket C, anggaran Rp.449.499.900,00 terealisasi Rp. 449.499.900,00 atau 100%
- 15) Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah, anggaran Rp. 400.000.000,00 terealisasi Rp. 398.345.000,00 atau 99,59%
- 16) Kegiatan Pembinaan Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Kota Cirebon, anggaran Rp. 300.000.000,00 terealisasi Rp. 282.532.500,00 atau 94,18%
- 17) Kegiatan Expo Pendidikan dan Teknologi bagi SMA/SMK, anggaran Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 73.000.000,00 atau 97,33%
- 18) Kegiatan Pelatihan Pendidikan Karakter Siswa SMA/SMK, anggaranRp. 207946.000,00 terealisasi Rp. 184.832.500,00 atau 88,88%
- 19) Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang FasilitasSMA/SMK, anggaran Rp.2.050.000.000,00 terealisasi Rp.2.043.592.500,00 atau 99,69%
- 20) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMA (Dana Propinsi), anggaran Rp. 1350.000.000,00 Realisasi Rp. 802.311.000,00 atau 59,43%
- 21) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMK (Dana Propinsi), anggaran Rp. 2.160.000.000,00 Realisasi Rp. 2.133.428.000,00 atau 98,77%
- 22) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan di Sekolah Tingkat Menengah Atas, anggaran Rp. 450.000.000,00 Realisasi Rp. 430.719.100,00 atau 95,72%
- 23) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 1,anggaran Rp. 1.506.364.300,00 realisasi Rp. 1.434.230.893,00 atau 95,21%



- 24) KegiatanPenyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 2, anggaran Rp.1.633.000.400,00 realisasi Rp.1.582.175.804,00 atau 96,89%
- 25) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 3, anggaran Rp. 1.496.529.050,00 realisasi Rp.1.474.651.850,00 atau 98,54%.
- 26) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 4, anggaran Rp. 1.207.227.000,00 realisasi Rp.1.197.930.829,00 atau 99,23%.
- 27) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 5, anggaran Rp. 1.117.664.000,00 realisasi Rp.1.159.353.828,00 atau 98,53%.
- 28) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 6, anggaran Rp. 1.521.380.250,00 realisasi Rp.1.459.166.404,00 atau 95,91%.
- 29) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 7, anggaran Rp.1.258.436.750,00 realisasi Rp.1.258.358.750,00 atau 99,99%.
- 30) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 8, anggaran Rp. 1.142.328.000,00 terealisasi Rp. 1.129.490.900,00 atau 98,88%
- 31) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 9, anggaran Rp. 899.541.800,00 terealisasi Rp. 866.703.800,00 atau 96,35%
- 32) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 1, anggaran Rp. 2.350.663.550,00 terealisasi Rp. 2.326.985.373,00 atau 98,99%
- 33) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 2, anggaran Rp. 1.206.845.550,00 terealisasi Rp. 1.196.426.647,00 atau 99,14%



- 34) Kegiatan Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional, anggaran Rp. 280.000.000,00 terealisasi Rp. 275.703.000,00 atau 98,47%
- 35) Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA/SMK (Pengadaan Alat Sistem Penilaian Sekolah) (Dana Provinsi), anggaran Rp. 5.880.000.000,00 terealisasi Rp. 5.810.215.500,00 atau 98,81%
- 36) Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA/SMK (Pengadaan Prasarana Kelas Berstandar Internasional) (Dana Provinsi), anggaran Rp. 11.025.000.000,00 terealisasi Rp. 8.226.688.000,00 atau 74,62%
- 37) Kegiatan Penyedian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Dana Provinsi), anggaran Rp. 930.300.000,00 terealisasi Rp. 930.300.000,00 atau 100%
- 38) Kegiatan Penyedian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Dana Provinsi), anggaran Rp. 1.861.200.000,00 terealisasi Rp. 1.861.200.000,00 atau 100%
- j. Program Pendidikan Non Formal, Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 455.230.000,00 terealisasi Rp. 452.461.095,00 atau 99,39%, digunakan untuk 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan, anggaran Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp.75.000.000,00 atau 100 %
 - Kegiatan Pengembangan kurikulum, dan model perubahan ajar dan model pembelajaran, anggaran Rp. 79.980.000,00 terealisasi Rp. 79.200.000,00 atau 99,02%
 - Kegiatan Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, anggaran Rp. 120.250.000,00 terealisasi Rp. 119.430.000,00 atau 99,32%
 - Kegiatan Kecakapan Hidup (Lifeskill) bagi Anak/Remaja Putus Sekolah, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.114.900,00 atau 99,11%



- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), anggaran Rp. 80.000.000,00 terealisasi Rp. 79.716.195,00 atau 99,65%
- k. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 869.860.750,00 terealisasi Rp. 843.126.500,00 atau 96,93%, digunakan untuk4 (empat) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, anggaran Rp. 331.205.500,00 terealisasi Rp. 315.725.750,00 atau 95,33%
 - Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran Rp. 285.157.000,00 terealisasi Rp. 275.402.500,00 atau 96,58%
 - 3) Kegiatan Penilaian kinerja penerima sertifikasi, anggaran Rp. 64.712.500,00 terealisasi Rp. 64.712.500,00 atau 100%
 - 4) Kegiatan Penilaian Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional, anggaran Rp.188.785.750,00 terealisasi Rp. 187.285.750,00 atau 99,21%
- I. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.558.045.594,00 terealisasi Rp.35.480.792.700,00 atau 2,3%, digunakan untuk 11(sebelas) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan, anggaran Rp. 129.935.094,00 terealisasi Rp. 78.698.500,00 atau 60,57%
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan, anggaran Rp. 82.000.000,00 terealisasi Rp. 79.312.000,00 atau 96,72%
 - 3) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Indikator Capaian Pendidikan, anggaran Rp. 131.880.000,00 terealisasi Rp. 128.815.000,00 atau 97,68%



- 4) Kegiatan Pendamping Implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota, anggaran Rp. 245.185.000,00 terealisasi Rp. 209.131.000,00 atau 85,30%
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional, anggaran Rp. 271.000.000,00 terealisasi Rp. 263.475.300,00 atau 97,22 %
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, anggaran Rp.235.182.500,00 terealisasi Rp. 223.492.500,00 atau 95,03%
- 7) Kegiatan Pembinaan sekolah UKS,anggaran Rp.248.857.000,00 terealisasi Rp. 216.152.000,00 atau 86,86%
- 8) Kegiatan Publikasi, sosialisasi dan pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.99.360.000,00 atau 99,36%
- 9) Kegiatan Penyusunan Peraturan dan Kebijakan di Bidang Pendidikan, anggaran Rp.114.006.000,00 terealisasi Rp.72.525.000,00 atau 63,62%
- 10)Kegiatan Pengadaan Media Pembelajaran Menyenangkan dengan Perpaduan Animasi Interaktif (Dana Propinsi), anggaran Rp.0,00 terealisasi Rp.19.383.540.000,00 atau 0%
- 11)Kegiatan Sarana Prasarana Pengadaan Efisiensi Pembelajaran di Kelas dengan Media Digital Interaktif Berbasis Tablet (Dana Propinsi), anggaran Rp.0,00 terealisasi Rp.14.726.291.400,00 atau 0%
- m. Program Penyelenggaraan Pengembangan Olahraga Sekolah. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.1.180.000.000,00 terealisasi Rp.1.171.068.279,00 atau 99,24%, digunakan untuk5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan Mutu Olahraga dan Tenaga Keolahragaan Sekolah, Anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp.50.000.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan Monitoring, Evalusi dan Pelaporan Penyelenggaraan Olahraga Sekolah, Anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp.50.000.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Anggaran Rp.400.000.000,00 terealisasi Rp.394.517.500,00 atau 98,63%.
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar, Anggaran Rp.600.000.000,00 terealisasi Rp.596.639.000,00 atau 99,94%.
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Pengembangan Olahraga Sekolah, Anggaran Rp.80.000.000,00 terealisasi Rp.79.911.779,00 atau 99,89%.
- n. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.15.949.083.374,00 terealisasi Rp.12.871.066.759,00 atau 80,70%, digunakan untuk 16 (enam belas) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD, anggaran Rp.1.130.625.781,00 terealisasi Rp. 1.129.864.525,00 atau 99,93%
 - 2) Kegiatan DAK Pendidikan SD, anggaran Rp.5.225.462.224,00 terealisasi Rp. 3.874.311.822,00 atau 74,14%
 - 3) Kegiatan DAK Pendidikan SMP, anggaran Rp.3.320.058.000,00 terealisasi Rp. 1.819.254.800,00 atau 54,80%
 - 4) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SD, anggaran Rp.254.419.500,00 terealisasi Rp. 244.868.500,00 atau 96,25%
 - 5) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SMP, anggaran Rp.207.794.500,00 terealisasi Rp. 203.594.000,00 atau 97,98%
 - 6) Kegiatan DAK Pendidikan SMA, anggaran Rp.1.496.100.800,00 terealisasi Rp. 1.424.245.500,00 atau 95,20%
 - 7) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SMA, anggaran Rp.102.196.000,00 terealisasi Rp. 95.611.700,00 atau 93,56%
 - 8) Kegiatan DAK Pendidikan SMK, anggaran Rp.1.396.489.350,00 terealisasi Rp. 1.291.188.290,00 atau 92,46%



- 9) Kegiatan Pendamping DAK Pendidikan SMK, anggaran Rp.158.084.000,00 terealisasi Rp. 139.823.000,00 atau 88,45%
- 10) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMA, anggaran Rp.456.991.990,00 terealisasi Rp. 456.529.989,00 atau 99,90%.
- 11) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP, anggaran Rp.1.547.638.000,00 terealisasi Rp. 1.543.803.800,00 atau 99,75%.
- 12) Kegiatan Lanjutan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMK, anggaran Rp.488.506.833,00 terealisasi Rp. 488.506.833,00 atau 100%.
- 13) Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SD, anggaran Rp.51.392.080,00 terealisasi Rp. 50.221.000,00 atau 97,72%.
- 14) Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SMP, anggaran Rp.70.347.100,00 terealisasi Rp. 69.372.500,00 atau 98,61%.
- 15)Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SMA, anggaran Rp.20.772.360,00 terealisasi Rp. 20.251.500,00 atau 97,49%.
- 16)Kegiatan Lanjutan Pendamping DAK Pendidikan SMK, anggaran Rp.22.204.856,00 terealisasi Rp. 19.619.000,00 atau 88,35%.

5.2.1 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 59.545.427.692,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.470.893.094,00 atau 78,04%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 18 (delapan belas) program dan 91 (Sembilan puluh satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.1.867.585.100,00 terealisasi Rp.1.800.292.273,00 atau 96,40%, digunakan untuk14 (empat belas) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 4.095.000,00 terealisasi Rp. 3.462.000,00 atau 84,54%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 687.276.000,00 terealisasi Rp. 631.482.033,00 atau 91,88%.
- 3) KegiatanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 14.300.000,00 terealisasi Rp. 10.232.700,00 atau 71,56%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 180.300.000,00 terealisasi Rp. 180.047.500,00 atau 99,86%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp. 13.050.000,00 terealisasi Rp. 12.000.000,00 atau 91,95%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 79.044.100,00 realisasi Rp. 78.884.900,00 atau 99,80%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 203.025.000,00 terealisasi Rp. 202.761.700,00 atau 99,87%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 9.522.500,00 teralisasi Rp. 9.471.000,000 atau 99,46%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp. 5.932.500,00 terealisasi Rp. 5.932.500,00 atau 100%.
- 10) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 9.720.000,00 terealisasi Rp. 8.375.000,00 atau 86,16%.
- 11) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, anggaran sebesar Rp. 5.500.000,00 terealisasi Rp. 2.211.840,00 atau 40,22%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran sebesar Rp. 80.040.000,00 terealisasi Rp. 80.040.000,00 atau 100%.



- 13) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 408.040.000,00 terealisasi Rp. 408.290.600,00 atau 99,96%.
- 14) KegiatanPenyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran sebesar Rp. 167.340.000,00 terealisasi Rp. 167.100.500,00 atau 99,86%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Aokasi anggaran pada program ini sebesar Rp. 1.104.643.000,00 terealisasi Rp. 1048943509,00 atau 94,96% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 79.745.000,00 terealisasi Rp. 79.579.000,00 atau 99,97%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 282.958.000,00 realisasi Rp. 230.258.509,00 atau 81,38%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 9.895.000,00 realisasi Rp. 9.895.000,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, anggaran Rp. 732.045.000,00 realisasi Rp. 729.211.000,00 atau 99,61%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 195.350.000,00terealisasi Rp. 194.881.000,00 atau 99,76% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 195.350.000,00 realisasi Rp. 194.881.000,00 atau 99,76%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 647.401.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 605.351.400,00 atau 93,50% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional, anggaran Rp. 78.123.500,00 realisasi Rp. 74.819.750,00 atau 95,77%.
 - 2) Kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, anggaran sebesar Rp. 569.277.650,00 realisasi Rp. 530.531.650,00 atau 93,19%.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp



- 390.976.450,00 terealisasi sebesar Rp. 369.208.950,00atau 94,43% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan yaitu:
- 1) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran Rp. 39.481.250,00 realisasi Rp. 39.481.250,00 atau 100%.
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran anggaran Rp. 230.745.000,00 realisasi Rp. 208.977.500,00 atau 90,57%.
- 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi anggaran Rp. 37.568.000,00 realisasi Rp. 37.568.000,00 atau 100%.
- 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 45.772.200,00 realisasi Rp. 45.772.200,00 atau 100%.
- 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya anggaran Rp. 37.410.000,00 realisasi Rp. 37.410.000,00 atau 100%.
- f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 610.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 607.228.030,00 atau 99,55% digunakan untuk1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan anggaran Rp. 610.000.000,00 realisasi Rp. 607.228.030,00 atau 99,55%.
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 22.769.812.268,00 terealisasi Rp. 19.083.254.901,00 atau 83,81% digunakan untuk 35 (tiga puluh lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehata, anggaran Rp. 58.654.125,00 realisasi Rp. 56.729.100,00 atau 96,72%.
 - 2) Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, anggaran Rp. 33.400.000,00 realisasi Rp. 33.400.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat, anggaran Rp. 210.000.000 realisasi Rp. 208.220.000,00 atau 99,15%.
 - 4) Kegiatan peningkatan pelayanan Puskesmas, Laboratorium dan kesehatan khusus, anggaran Rp. 4.432.708.000,00 realisasi Rp. 3.472.562.780,00 atau 78,34%.



- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, anggaran Rp. 101.558.900,00 realisasi Rp. 100.694.630,00 atau 99,15%.
- 6) Kegiatan Peningkatan Kota Siaga, anggaran Rp. 187.603.400,00 realisasi Rp. 178.140.600,00 atau 94,96%.
- 7) Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, anggaran Rp. 173.517.650,00 realisasi Rp. 169.936.650,00 atau 97,94%.
- 8) Kegiatan Rumah Sakit Berbasis Masyarakat (RSBM), anggaran Rp. 400.000.000,00 realisasi Rp. 397.095.000,00 atau 99,27%.
- 9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan, anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp. 99.874.200,00 atau 99,87%.
- 10)Kegiatan Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan, anggaran Rp. 53.556.650,00 realisasi Rp. 53.108.950,00 atau 99,16%.
- 11) Kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, anggaran Rp. 75.000.000,00 realisasi Rp. 75.000.000,00 atau 100%.
- 12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Emergency, anggaran Rp. 100.645.875,00 realisasi Rp. 98.925.875,00 atau 98,29%.
- 13)Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, anggaran Rp. 1.135.148.500,00,00 realisasi Rp. 1.039.407.700,00 atau Rp. 91,57%.
- 14) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalitanjung, anggaran Rp. 1.158.945.792,00 realisasi Rp. 919.270.800,00 atau 79,32%.
- 15) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Larangan, anggaran Rp. 1.144.250.697,00 realisasi Rp. 966.144.471,00 atau 84,43%.
- 16)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas



- Utara, anggaran Rp. 479.645.402,00 realisasi Rp. 400.233.764,00 atau 83,44%.
- 17) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng, anggaran Rp. 1.235.148.458,00 realisasi Rp. 1.022.258.322,00 atau 82,76%.
- 18) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga Permai, anggaran Rp. 1.239.025.508,00 realisasi Rp. 949.160.485,00 atau 76.61%.
- 19) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesunean, anggaran Rp. 923.802.400,00 realisasi Rp. 728.235.328,00 atau 78,83%.
- 20) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pegambiran, anggaran Rp. 1.036.445.135,00 realisasi Rp. 878.522.064,00 atau 84,76%.
- 21)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir, anggaran Rp. 366.849.843,00 terealisasi Rp. 342.023.056,00 atau 93,23%.
- 22)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol, anggaran Rp. 456.428.042,00 realisasi Rp. 399.931.045,00 atau 87,62%.
- 23) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jagasatru, anggaran Rp. 715.027.019,00 realisasi Rp. 590.149.629,00 atau 82,54%.



- 24) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Astanagarib, anggaran Rp. 278.775.255,00 realisasi Rp. 229.460.299,00 atau 82,31%.
- 25)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pekalangan, anggaran Rp. 309.719.118,00 realisasi Rp. 283.881.279,00 atau 91,66%.
- 26) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pulasaren, anggaran Rp. 399.208.905,00 realisasi Rp. 366.680.361,00 atau 91,85%.
- 27) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi, anggaran Rp. 754.653.905,00 realisasi Rp. 620.515.114,00 atau 82,23%.
- 28) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Gunungsari, anggaran Rp. 673.752.454,00 realisasi Rp. 522.662.605,00 atau 77,57%.
- 29) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sunyaragi, anggaran Rp. 621.866.615,00 realisasi Rp. 575.370.559,00 atau 92,52%.
- 30) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Majasem, anggaran Rp. 845.210.488,00 realisasi Rp. 685.923.411,00 atau 81,15%.
- 31)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Drajat,



- anggaran Rp. 656.631.645,00 realisasi Rp. 592.053.115,00 atau 90,17%.
- 32) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan, anggaran Rp. 944.537.962,00 realisasi Rp. 803.660.641,00 atau 85,09%.
- 33) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jalan Kembang, anggaran Rp. 654.452.743,00 realisasi Rp. 528.395.333,00 atau 80,74%.
- 34) Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan, anggaran Rp. 340.266.260,00 realisasi Rp. 302.357.515,00 atau 88,86%.
- 35)Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran, anggaran Rp. 473.375.522,00 realisasi Rp. 393.270.220,00 atau 83,08%.
- h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 260.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 237.194.000,00 atau 91,23%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan, anggaran Rp. 260.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 237.194.000,00 atau 91,23%.
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.606.492.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.596.805.592,00 atau 99,40%, digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin, anggaran Rp. 1.400.732.500,00 realisasi Rp. 1.398.312.500,00 atau Rp. 99,83%.



- 2) Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya, anggaran Rp. 205.759.500,00 realisasi Rp. 198.493.092,00 atau 96,47%.
- j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 322.499.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 318.652.400,00 atau 98,81%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Sanitasi dan Kota Sehat, anggaran Rp. Rp. 322.499.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 318.652.400,00 atau 98,81%.
- k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.480.107.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.429.259.000,00atau 96,56%, digunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk, anggaran Rp. 328.244.000,00 realisasi Rp. 308.314.500,00 atau 93,93%.
 - 2) Kegiatan pengadaan alat foging dan bahan-bahan foging, anggaran Rp. 57.770.000,00 realisasi Rp. 55.539.000,00 atau Rp. 96,14%.
 - 3) Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, anggaran Rp. 102.553.000,00 realisasi Rp. 96.935.500,00 atau 94,52%.
 - 4) Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular, anggaran Rp. 329.437.000,00 realisasi Rp. 318.511.250,00 atau 96,68%.
 - 5) Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, anggaran Rp. 33.420.000,00 realisasi Rp. 33.420.000,00 atau 100%.
 - Kegiatan Peningkatan surveillence Epidemiologi dan penanggulangan wabah, anggaran Rp. 135.322.000,00 realisasi Rp. 131.707.500,00 atau 97,33%.



- 7) Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, anggaran Rp. 93.361.250,00 realisasi Rp. 92.861.250,00 atau 99,46%.
- 8) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, anggaran Rp. 400.000.000,00 realisasi Rp. 391.970.000,00 atau 97,99%.
- I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 388.399.424,00 dengan realisasi sebesar Rp. 319.379.700,00, digunakan untuk 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan, anggaran Rp. 80.579.950,00 realisasi Rp. 80.579.950,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan, anggaran Rp. 90.567.500,00 realisasi Rp. 89.927.500,00 atau 99,29%.
 - 3) Kegiatan Sistem Integrasi Puskesmas, anggaran Rp. 155.051.724,00 realisasi Rp. 86.672.000,00 atau 55,90%.
 - 4) Kegiatan Standarisasi Kompetensi, Tenaga Medis, Paramedis, dan Tradisional Komplementer, anggaran Rp. 62.200.250,00 realisasi Rp. 62.200.250,00 atau 100%.
- m. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 4.176.378.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%, digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penunjang Operasi Katarak Bagi Maskin yang tidak mendapat Bantuan Kesehatan (Dana Propinsi), anggaran Rp. 54.000.000,00 dengan realisasi Rp. 0 atau 0%.
 - 2) Kegiatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan luran (PBI) Provins Jawa Barat (Dana Propinsi), anggaran Rp. 4.122.378.300,000 dengan realisasi Rp. 0 atau 0%.
- n. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Alokasi anggaran



untuk program ini sebesar Rp. 3.545.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.529.148.200,00 atau 71,34%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu, anggaran Rp. 45.050.000,00 realisasi Rp. 43.947.200,00 atau 97,55%.
- 2) Kegiatan Pengadaan IPAL Puskesmas (Dana Provinsi), anggaran Rp. 1.000.000.000,00, realisasi Rp. 0 atau 0%.
- 3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Dana Provinsi), anggaran Rp. 2.500.000.000,00 realisasi Rp. 2.485.201.000,00 atau Rp. 99,41%.
- o. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 104.999.950,00 dengan realisasi sebesar Rp. 103.742.450,00 atau 98,80%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri, anggaran Rp. 104.999.950,00 dengan realisasi sebesar Rp. 103.742.450,00 atau 98,80%.
- p. Program penigkatan Kualitas tenaga kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 37.789.900,00 dengan realisasi Rp. 37.789.900,00 atau 100%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan seleksi tenaga aparatur yang berprestasi, anggaran Rp. 37.789.900,00 realisasi Rp. 37.789.900,00 atau 100%.
- q. Program Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.601.794.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.781.293.806,00 atau 31,80%, digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Dasar (DAK), anggaran Rp. 3.078.405.000,00 realisasi Rp. 0 atau 0%.
 - Kegiatan Pelayanan Farmasi (DAK), anggaran Rp. 1.751.970.000,00 realisasi Rp. 1.701.658.806,00 atau 97,13%.



- 3) Kegiatan pendamping DAK Pelayanan Dasar, anggaran Rp. 139.927.500,00 realisasi Rp. 0 atau 0%.
- 4) Kegiatan Pendamping DAK Pelayanan Farmasi, anggaran Rp. 79.635.000,00 realisasi Rp. 79.635.000,00 atau 100%.
- 5) Pelayanan Dasar (SILPA DAK), anggaran Rp. 551.857.000,00 realisasi Rp. 0 atau 0%.
- r. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 14.436.148.500,00dengan realisasi sebesar Rp. 14.408.467.983,00 atau 99,81%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya, anggaran Rp. 14.436.148.500,00dengan realisasi sebesar Rp. 14.408.467.983,00 atau 99,81%.

5.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati

Pada tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati selain sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga berperan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Alokasi anggaran yang dikelola sebesar Rp. 216.603.504.857,00 dengan realisasi sebesar Rp. 188.879.765.556,00 atau 87,20%.

5.2.2.1. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati

Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.302.015.355,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.020.288.347,00 atau 91,62%.Anggaran tersebut digunakan untuk 5(lima) program 10 (sepuluh) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah Sakit Mata. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 845.811.780,00 dengan realiasasi sebesar Rp. 810.519.280,00, digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Perawatan di ICU/HCU/NICU/PICU (Dana Propinsi), anggaran Rp. 27.155.000,00 realisasi Rp. 27.155.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap (GAKIN) RSUD Gunung Jati (Silpa Dana Propinsi), anggaran Rp. 818.656.780,00 realisasi Rp. 783.364.280,00 atau 95,69%.
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.533.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.146.765.000,00atau 84,72%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Laundry dan Boiller, anggaran Rp. 454.370.000,00 realisasi Rp. 432.230.000,00 atau 95,13%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Instalasi Bedah Sentral, anggaran Rp. 2.045.630.000,00 realisasi Rp. 1.680.630.000,00 atau 82,16%.
 - 3) Kegiatan RSUD Gunung Jati sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional (Silpa Dana Propinsi), anggaran Rp. 33.905.000,00 realisasi Rp. 33.905.000,00 atau 100%.
- c. Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bidang Kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.203.752.575,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.113.906.717,00 atau 98,27%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok, anggaran Rp. 3.211.469.000,00 realisasi Rp. 3.194.941.677,00 atau 99,49%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (SILPA), anggaran Rp. 1.992.283.575,00 realisasi Rp. 1.918.965.040,00 atau 96,32%
- d. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.218.546.000,00dengan realisasi sebesar Rp. 2.916.180.950,00 atau 90,61%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1. Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK), anggaran Rp. 2.393.476.000,00 realisasi Rp. 2.336.521.400,00 atau 97,62%.
 - 2. Kegiatan Pendamping DAK Pelayanan Rujukan, anggaran Rp. 40.180.000,00 realisasi Rp. 31.363.000,00 atau 78,06%.



- 3. Pelayanan Rujukan (SILPA DAK), anggaran Rp. 784.890.000,00 realisasi Rp. 548.296.550,00 atau 69,86%.
- e. Program Bagi Hasil Pajak Rokok Bidang Kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.032.916.400,00 atau 86,65%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan/ Alat Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan, anggaran Rp. 3.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.032.916.400,00 atau 86,65%.

5.2.2.2. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati (selaku BLUD)

Alokasi anggaran untuk RSUD Gunung Jati selaku BLUD sebesar Rp. 201.301.489.502,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.859.477.209,00 atau 86,86%, digunakan untuk 1 (satu) program yaitu Program pelayanan kesehatan lanjutan yang di dalamnya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan.

5.2.3. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada urusan kesehatan, Kecamatan Lemahwungkuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.150.000,00 atau 96,49%, digunakan untuk 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan HIV/AIDS.

5.2.4. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada urusan kesehatan, Kelurahan Lemahwungkuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 9.989.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.839.000,00 atau 88,49%, digunakan untuk 1 (satu) program yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan HIV/AIDS.



5.3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.3.1 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 228.884.484.905,00 realisasi sebesar Rp.125.486.945.770,00 atau 54.83%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan17 (tujuh belas) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.516.352.500,00 terealisasi Rp. 1.149.643.572,00 atau 75,82%. Pada program ini terdapat 13 (tiga belas) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran Rp.1.530.000,00 terealisasi Rp. 0 atau 0 %.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp.252.000.000,00 terealisasi Rp. 189.126.897,00 atau 75.05%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.28.700.000,00 terealisasi Rp.18.486.400,00 atau 64.41%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp.238.950.000,00 terealisasi Rp.196.800.000,00. atau 82.36 %.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran Rp.128.920.000,00 terealisasi Rp.109.370.000,00atau 84.84%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp.57.137.500,00 terealisasi Rp.49.450.000,00 atau 86.55%.



- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,anggaran Rp.38.925.000,00 terealisasi Rp.34.225.000,00 atau 87.93%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp.14.925.000,00 terealisasi Rp.9.600.000,00 atau 64.32%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp.143.400.000,00 terealisasi Rp.56.640.000,00 atau 39.50%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.88.250.000,00 terealisasi Rp.75.790.000,00 atau 85.88%.
- 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp.195.000.000,00 terealisasi Rp.194.765.275,00 atau 99.88%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp.309.150.000,00 terealisasi Rp.196.800.000,00 atau 63.66%.
- 13) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat, anggaran Rp. 19.465.000,00 terealisasi Rp.18.590.000,00 atau 95.50%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,alokasi anggaran untuk program ini Rp. 3.896.810.000,00 terealisasi Rp.2.744.783.430,00 atau 70.44%.Pada program ini terdapat 8 (delapam) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, anggaran Rp. 178.325.000,00 realisasi Rp. 177.925.000,00 atau 99.78%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.1.285.040.000,00 terealisasi Rp.970.591.200,00 atau 75.53%
 - 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp.55.270.000,00 terealisasi Rp.49.510.000,00 atau 89.58%.
 - 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.553.700.000,00 terealisasi Rp.516.045.000,00 atau 93.20%.



- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp.128.075.000,00 terealisasi Rp.122.588.000,00 atau 95.72%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.361.400.000,00 terealisasi Rp.187.565.730,00 atau 51.90%.
- 7) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan, anggaran Rp. 510.000.000,00 realisasi Rp. 431.301.000,00 atau 84.57%
- 8) Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan, anggaran Rp.825.000.000,00 terealisasi Rp.289.257.500,00 atau 35.06%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini Rp.30.567.500,00 terealisasi Rp. 26.675.000,00 atau 87.27%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian. anggaran Rp. .30.567.500,00 terealisasi Rp. 26.675.000,00 atau 87.27%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 776.420.000,00 terealisasi Rp. 770.930.000,00 atau 99.29% . Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp.167.585.000,00 terealisasi Rp.165.050.000,00atau 98.49%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp.152.475.000,00 terealisasi Rp.152.475.000,00 atau 100%
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 99.950.000,00 terealisasi Rp. 99.575.000,00 atau 99.62%
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD,anggaran Rp.75.610.000,00 terealisasi Rp. 74.830.000,00 atau 98.97%



- 5) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD,anggaran Rp. 280.800.000,00 terealisasi Rp. 279.000.000,00 atau 99,36%
- e. Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini Rp.116.545.000,00 terealisasi Rp.106.155.000,00 atau 91.08%.Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp.116.545.000,00 terealisasi Rp106.155.000,00 atau 91.08%.
- f. Program Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya. alokasi anggaran untuk program ini Rp.191.450.000,00 terealisasi Rp.174.740.000,00 atau 88,08%. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya, anggaran Rp.41.450.000,00 terealisasi Rp.39.400.000,00 atau 95.05%.
 - 2) Kegiatan Peningkatan konservasi air tanah, anggaran Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp. 135.340.000,00 atau 90.23%.
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran untuk program ini Rp.1.549.925.000,00 terealisasi Rp.1.530.930.500,00 atau 98.77%.Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, anggaran Rp.749.925.000,00 terealisasi Rp.745.900.000,00 atau 99,46%.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana Propinsi), anggaran Rp.800.000.000,00 terealisasi Rp.785.030.500,00 atau 98.13%.
- h. Program Pengendalian Banjir. alokasi anggaran untuk program ini Rp.7.848.348.500,00 terealisasi Rp.7.362.766.500,00 atau 93.81%. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan antara lain:



- 1) Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, anggaran Rp.1.729.771.500,00 terealisasi Rp.1.691.291.500,00 atau 97.78%.
- 2) Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, anggaran Rp.2.049.886.500,00 terealisasi Rp.1.930.479.500,00 atau 94.17%.
- 3) Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali, anggaran Rp.1.118.605.000,00 terealisasi Rp.960.226.500,00 atau 85.84%.
- 4) Kegiatan Perencanaan / DED Pengendalian Banjir, anggaran Rp.450.085.500,00 realisasi Rp. 427.282.000,00 atau 94,93%
- 5) Kegiatan Pengendalian Banjir (Dana Provinsi), anggaran Rp.2.500.000.000 terealisasi Rp.2.353.487.000,00 atau 94.14%
- i. Program Pengaturan Jasa Konstruksi. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.150.753.500,00 terealisasi Rp.144.426.000,00 atau 95,80%. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa, anggaran Rp. 64.337.500,00 terealisasi Rp.62.760.000,00 atau 97.55%.
 - 2) Kegiatan Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi, anggaran Rp. 86.416.000,00 realisasi Rp. 81.666.000,00 atau 94.50%
- j. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan. alokasi anggaran untuk program ini Rp.101.310.861.000,00 terealisasi Rp. 5.175.377.500,00 atau 5.11%. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan, anggaran Rp.5.310.861.000,00 terealisasi Rp.5.175.377.500,00 atau 97.45%.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK Tambahan), anggaran Rp.96.000.000.000,00 terealisasi Rp.0 atau 0%.



- k. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum,alokasi anggaran untuk program ini Rp. 2.937.468.000,00 terealisasi Rp.0 atau0%.Pada program ini terdapat 2(dua) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Air Minum, anggaran Rp.1.759.488.500,00 terealisasi Rp.0 atau 0%
 - 2) Kegiatan Lanjutan DAK Infrastruktur Air Minum,anggaran Rp.1.177.979.500,00 terealisasi Rp.0 atau 0%
- I. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi, alokasi anggaran untuk program ini Rp.1.921.137.000,00 terealisasi Rp.150.000.000,00 atau 7,81%. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Infrastruktur Sanitasi (DAK). anggaran Rp.1.771.137.000,00 terealisasi Rp.0 atau 0%.
 - 2) Kegiatan Pendamping Sanitasi USAID (DIPA). anggaran Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp.150.000.000,00 atau 100%.
- m. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 10.008.407.500,00 terealisasi Rp. 9.600.506.450,00 atau 95.92% . Pada program ini terdapat 2(dua) kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder, anggaran Rp.2.018.812.500,00 terealisasi Rp.1.939.228.500,00 atau 96.06%.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder (Dana Provinsi), anggaran Rp.7.989.595.000,00 terealisasi Rp.7.661.277.950,00 atau 95.89%
- n. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan. alokasi anggaran untuk program ini Rp.31.547.326.650,00 terealisasi Rp.32.317.781.850,00 atau 102.44%. Pada program ini terdapat 5(lima) kegiatan antara lain:
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan perkotaan, anggaran Rp.11.325.305.650,00 terealisasi Rp.11.277.220.650,00 atau 99.58%.



- 2) Kegiatan Survai dan Pemetaan Infrastruktur Perkotaan, anggaran Rp.164.850.000,00 terealisasi Rp. 97.218.000,00 atau 58.97%.
- 3) Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan,anggaran Rp.2.958.583.000,00 terealisasi Rp.2.933.698.000,00 atau 99,16%.
- 4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan (Dana Propinsi), anggaran Rp. 1.500.000.000,00 terealisasi Rp. 2.489.340.000,00 atau 165.96%.
- 5) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggaran Rp. 15.598.588.000,00 terealisasi Rp. 15.520.305.200,00 atau 99,50%.
- o. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan alokasi anggaran ini untuk program ini Rp.26.550.167.000,00 realisasi Rp. 26.187.341.000,00 atau 98.63%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Jalan, anggaran Rp. 26.550.167.000,00 realisai Rp. 26.187.341.000,00 atau 98.63%
- p. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan alokasi anggaran ini untuk program ini Rp. 32.010.129.500,00 realisai Rp. 31.574.707.700,00 atau 98.64%. Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan antara lain :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, anggaran Rp. 7.287.571.500,00 realisai Rp. 7.246.268.000,00 atau 99.43%
 - 2) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah, anggaran Rp.17.189.808.000,00 realisasi Rp. 16.953.219.000,00 atau 98.62%
 - 3) Kagiatan Peningkatan Pelayanan Alat Berat dan Laboratorium, anggaran Rp. 282.750.000,00 realisai Rp. 269.418.700,00 atau 95.9%
 - 4) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah (Dana Provinsi), anggaran Rp. 7.250.000.000,00 realisasi Rp. 7.105.802.000,00 atau 98.01%



- q. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman alokasi anggaran ini untuk program ini Rp. 3.353.860.000,00 realisasi Rp.3.333.525.000,00 atau 99.39%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan. Antara lain :
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Perumahan dan Permukiman, anggaran Rp. 3.353.860.000,00 realisasi Rp.3.333.525.000,00 atau 99.39%

5.3.2. Kelurahan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kejaksan untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 385.173.600,00 realisasi Rp. 382.695.000,00 atau 99.36%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 385.173.600,00 realisasi Rp. 382.695.000,00 atau 99.36%
 . pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggaran kegiatan ini Rp. 385.173.600,00 realisasi Rp. 382.695.000,00 atau 99.36%.

5.3.3. Kelurahan Kebon Baru

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kebon baru untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesa Rp. 378.545.000,00 realisasi Rp. 373.482.000,00 atau 98.66%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2(dua) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 77.655.000,00 realisai Rp. 76.449.000,00 atau 98.45%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, anggran Rp. 77.655.000,00 realisai Rp. 76.449.000,00 atau 98.45%



- b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder, alokasi anggaran pada program ini Rp. 300.890.000,00 realisai Rp.297.033.000,00 atau 98.72%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder, anggran Rp. 300.890.000,00 realisai Rp. 297.033.000,00 atau 98.72%

5.3.4. Kelurahan Kesenden

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kesenden untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesa Rp. 400.721.627,00 realisasi Rp.392.200.000,00 atau 97.87%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 400.721.627,00 realisasi Rp.392.200.000,00 atau 97.87%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 400.721.627,00 realisasi Rp.392.200.000,00 atau 97.87%.

5.3.5. Kelurahan Sukapura

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan sukapura untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesa Rp. 230.269.000,00 realisasi Rp.229.779.668,00 atau 99.79%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 230.269.000,00 realisasi Rp.229.779.668,00 atau 99.79%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 230.269.000,00 realisasi Rp.229.779.668,00 atau 99.79%.



5.3.6. Kelurahan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kesambi untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 65.890.000,00 realisasi Rp. 64.230.000,00 atau 97.48%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 65.890.000,00 realisasi Rp. 64.230.000,00 atau 97.48%.
 pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 65.890.000,00 realisasi Rp. 64.230.000,00 atau 97.48%.

5.3.7. Kelurahan Derajat

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kesambi untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 247.160.100,00 realisasi Rp.246.575.000,00 atau 99.76%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 247.160.100,00 realisasi Rp.246.575.000,00 atau 99.76%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan anggran Rp.133.800.100,00 realisasi Rp. 133.465.000,00 atau 99.75%.
 - 2) Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, anggaran Rp. 113.360.000.00 realisasi Rp. 113.110.000,00 atau 99.78%
 - Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan Saluran Lingkungan, anggran Rp.
 realisai Rp. 0 atau 0%

5.3.8.Kelurahan Pekiringan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan pekiringan untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 174.315.000,00 realisasi Rp.173.485.000,00 atau 99.52%. Anggaran tersebut



dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 174.315.000,00 realisasi Rp.173.485.000,00 atau 99.52%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 174.315.000,00 realisasi Rp.173.485.000,00 atau 99.52%

5.3.9. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan lemahwungkuk untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 496.700.000,00 realisasi Rp. 487.650.000,00 atau 98.18%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 496.700.000,00 realisasi Rp. 487.650.000,00 atau 98.18%. pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 376.700.000,00 realisasi Rp. 369.760.000,00 atau 98.16%
 - 2) Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan, anggaran Rp.120.000.000,00 ralisasi Rp. 117.890.000,00 atau 98.24%.

5.3.10 Kelurahan Panjunan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan panjunan untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 50.918.300,00 realisasi Rp. 50.918.300,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 50.918.300,00 realisasi Rp. 50.918.300,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 50.918.300,00 realisasi Rp. 50.918.300,00 atau 100%.
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggran Rp.0 realisai Rp. 0 atau 0%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan anggran Rp.0 realisai Rp. 0 atau 0%
- c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder alokasi anggran Rp.0 realisai Rp. 0 atau 0%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder, anggran Rp.0 realisai Rp. 0 atau 0%

5.3.11. Kelurahan Kasepuhan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kasepuhan untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 88.975.000,00 realisasi Rp.88.600.000,00 atau 99.58%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 72.625.000,00 realisasi Rp. 72.400.000,00 atau 99.69%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggran Rp. 72.625.000,00 realisasi Rp. 72.400.000,00 atau 99.69%.
- b. Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan, alokasi anggran Rp.16.350.000 realisai Rp. 16.200.000,00 atau 99.08%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Yang Menjadi Aset Pemerintah, anggaran Rp.16.350.000 realisai Rp. 16.200.000,00 atau 99.08%



5.3.12. Kelurahan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan pekalipan untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 65.200.000,00 realisasi Rp.65.200.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 65.200.000,00 realisasi Rp.65.200.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Lingkungan, anggran Rp. 65.200.000,00 realisasi Rp.65.200.000,00 atau 100%.

5.3.13. Kelurahan Pekalangan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan pekalangan untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 44.440.000,00 realisasi Rp.44.440.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 44.440.000,00 realisasi Rp.44.440.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Lingkungan, anggran Rp. 44.440.000,00 realisasi Rp.44.440.000,00 atau 100%.

5.3.14. Kelurahan Jagasatru

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan jagasatru untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309.021.628,00 realisasi Rp.307.980.000,00 atau 99.66%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:



- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 309.021.628,00 realisasi Rp.307.980.000,00 atau 99.66%. pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan, anggran Rp. 134.260.359,00 realisai Rp. 133.360.000,00 atau 99.33%
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Lingkungan, anggran Rp. 0 realisasi Rp.0 atau 0%.
 - 3) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan Jalan Lingkungan, anggaran Rp. 174.761.269.00 realisai Rp. 174.620.000.00 atau 99.92%

5.3.15. Kelurahan Kalijaga

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kalijaga untuk Urusan Pekerjaan Umum mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 230.627.000,00 realisasi Rp.229.421.300,00 atau 99.48%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 309.021.628,00 realisasi Rp.307.980.000,00 atau 99.66%.
 pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran dan jalan Lingkungan, anggran Rp. 15.000.000,00 realisasi Rp. 15.000.000.00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pembangunan / Pengadaan Perabot Jalan (Street Furniture), anggaran Rp. 215.627.000.00 realisai Rp. 214.421.300.00 atau 99.44%

5.4. Urusan Perumahan

Urusan Perumahanditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut:



5.4.1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 492.045.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 397.321.000,00 atau 80.75%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 3(tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 404.000.000,00 terealisasi Rp. 397.321.000,00 atau 98.35%. Pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan, anggaran Rp.60.500.000,00 terealisasi Rp.60.240.000,00 atau 99.57%.
 - 2) Kegiatan Survey dan Pemetaan Pengembangan Perumahan, anggaran Rp.343.500.000,00 terealisasi Rp.337.081.000,00 atau 98.13%.
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan, alokasi anggaran untuk program ini Rp.88.045.000,00 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan, anggaran Rp.88.045.000,00 terealisasi Rp. 0 atau 0%.

5.4.2. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Pada tahun anggaran 2015,dinas kebersihan dan pertamanan untuk Urusan Perumahan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.691.322.150,00 realisasi Rp.4.239.571.370,00 atau 90.37%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 4(empat) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran aloksi anggaran pada program ini Rp. 1.255.739.500,00 realisasi Rp. 1.094.941.320,00 atau 87.19%, pada program ini terdapat 13(tiga belas) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 7.357.000,00 realisasi Rp. 3.187.000,00 atau 43.32%
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 199.807.000,00 realisasi Rp. 111.102.832,00 atau 55.61%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 26.567.000,00 realisasi Rp. 16.261.700,00 atau 61.21%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor anggaran Rp. 191.640.000,00 realisasi Rp. 182.577.000,00 atau 95.27%
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 80.972.000,00 realisasi Rp. 73.320.000,00 atau 90.55%
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran Rp. 77.190.000,00 realisasi Rp. 64.124.900,00 atau 83.07%
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran Rp. 32.487.500,00 realisasi Rp. 29.500.000,00 atau 90.80%
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran Rp. 14.485.000,00 realisasi Rp. 14.195.000,00 atau 98.00%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan anggaran Rp. 50.987.000,00 realisasi Rp. 50.847.500,00 atau 99.73%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran Rp. 22.855.000,00 realisasi Rp. 20.100.000,00 atau 87.95%
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran Rp. 222.936.000,00 realisasi Rp. 220.054.000,00 atau 98.71%
- 12)Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah anggaran Rp. 80.336.000,00 realisasi Rp. 74.594.388,00 atau 92.85%
- 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor anggaran Rp. 248.120.000,00 realisasi Rp. 235.077.000,00 atau 94.74%



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.597.205.250,00 realisasi Rp. 1.569.796.250,00 atau 98.28% . pada program ini terdapat 7(tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan anggaran Rp. 466.575.000,00 realisasi Rp. 450.765.000,00 atau 96.61%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran Rp. 33.062.500,00 realisasi Rp. 32.261.000,00 atau 97.58%
 - 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor anggran Rp.0 realisasi Rp. 0 atau 0%
 - 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor anggaran Rp. 261.048.500,00 realisai Rp. 257.155.000,00 atau 98.51%
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor anggaran Rp. 194.693.250,00 realisasi Rp. 192.240.000,00 atau 98.74%
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 26.686.000,00 realisai Rp. 26.633.500,00 atau 99.80%
 - 7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor anggaran Rp. 615.140.000,00 realisai Rp. 610.741.750,00 atau 99.29%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur alokasi anggaran pada program ini Rp. 95.595.000,00 realisai Rp. 94.722.500,00 atau 99.09% pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan anggaran Rp. 68.922.500,00 realisasi Rp. 68.340.000,00 atau 99.15%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian anggaran Rp. 26.672.500,00 realisasi Rp. 26.382.500,00 atau 98.91%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.742.782.400,00 realisai Rp. 1.480.111.300,00 atau 84.93% pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu;



- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran Rp. 30.078.000,00 realisai Rp. 30.058.000,00 atau 99.93%
- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi anggran Rp. 41.060.000,00 relisasi Rp. 41.060.000,00 atau 97.74%
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya anggaran Rp. 87.004.000,00 realisasi Rp. 83.512.000,00 atau 95.99%
- 4) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap anggaran Rp. 1.584.640.400,00 realisasi Rp. 1.326.411.300,00 atau 83.70%.

5.5. Urusan Penataan Ruang

Urusan penataan ruang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.5.1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk urusan penataan ruang mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 684.360.000,00 realisasi sebesar Rp.517.350.000,00 atau 75.60% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 4(kegiatan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program perencanaan Tata Ruang, alokasi anggaran pada program ini Rp.60.500.000,00 terealisasi Rp. 59.340.000,00 atau 98.08 %, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Survey dan pemetaan, anggaran Rp.60.500.000,00 terealisasi Rp. 59.340.000,00 atau 98.08 %.
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran pada program ini Rp.623.860.000,00 terealisasi Rp. 458.010.000,00 atau 73.42%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, anggaran Rp.167.830.000,00 terealisasi Rp.167.830.000,00 atau 100 %.



- 2) Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, anggaran Rp. 181.650.000,00 terealisasi Rp.44.740.000,00 atau 24.63%.
- 3) Kegiatan Koordinasi Pemanfatan dan Pengendalian Tata Ruang, anggaran Rp. 274.380.000,00 terealisasi Rp245.440.000,00 atau 89.45%.

5.6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun uraian program dan kegiatan masing-masing adalah sebagai berikut :

5.6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun anggaran 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.606.499.800,00 realisasi sebesar Rp. 6.749.540.716,00 atau 88.73%, untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.074.459.000,00 realisasi sebesar Rp.974.609.268,00 atau 90.71%, untuk melaksanakan12 (dua belas) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.183.000.000,00 realisasi sebesar Rp.153.637.547,00 atau 83.95%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran sebesar Rp.33.740.000,00 realisasi sebesar Rp. 28.007.028,00 atau 83.01%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 11.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.041.000,00 atau 61.23%.



- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp.197.280.000,00 realisasi sebesarRp. 193.968.000,00 atau 98.32%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesarRp.59.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 59.127.000,00 atau 99,54%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 26.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 21.399.760,00 atau 81.68%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 11.520.000,00 realisasi sebesar Rp. 11.520.000,00 atau 100 %.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp. 15.270.000,00 realisasi sebesar Rp. 10.224.000,00 atau 66,95%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 11.868.000,00 realisasi sebesar Rp.11.068.000,00 atau 93.26%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp.3.720.000,00 realisasi sebesar Rp.3.150.000,00 atau 84.68%.
- 11)Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp.43.936.000,00 realisasi sebesar Rp. 35.743.000,00 atau 81.35%.
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 307.750.000,00 realisasi sebesar Rp.271.417.933,00 atau 88.19%.
- 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, anggaran sebesar Rp.184.545.000,00 realisasi sebesar Rp. 178.530.000,00 atau 97.74%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.463.505.800,00 realisasi sebesar Rp. 1.285.682.698,00 atau 87.85%, untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, anggaran sebesar Rp. 244.585.000,00 realisasi sebesar Rp. 175.217.500,00 atau 97,67%.
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 49.000.000,00 realisasi sebesar Rp.45.925.000,00 atau 93.72%
- 3) Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 239.156.100,00 realisasi sebesar Rp. 229.115.000,00 atau 95.80%.
- 4) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, anggaran sebesar Rp.648.064.700,00 realisasi sebesar Rp. 618.697.200,00 atau 95.47%.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, anggaran sebesar Rp. 196.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 104.116.584,00 atau 53.07%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 73.800.000,00 realisasi sebesar Rp.38.153.914,00 atau 51.70%.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 12.700.000,00 realisasi sebesar Rp. 11.730.000,00 atau 92.36%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp30.850.000,00 realisasi sebesar Rp.30.292.500,00 atau 98.19%,untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran sebesar Rp. 15.425.000,00 realisasi sebesar Rp. 15.320.000,00 atau 99.32%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran sebesar Rp.15.425.000,00 realisasi sebesar Rp. 14.972.500,00 atau 97.07%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.163.572.000,00 realisasi sebesar Rp. 154.491.000,00 atau 94.45% yang dipergunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu :



- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi sebesar Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 59.163.000,00 realisasi sebesar Rp. 52.280.000,00 atau 88.37%.
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 13.055.000,00 realisasi sebesar Rp. 13.055.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran sebesar Rp. 43.900.000,00 realisasi sebesar Rp. 43.900.000,00 atau 100%
- 4) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD , anggaran sebesar Rp.47.454.000,00 realisasi sebesar Rp. 45.256.000,00 atau 95.37%
- e. Program Pengembangan Data/Informasi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 160.829.500,00 realisasi sebesar Rp. 158.389.500,00 atau 98,48% yang dipergunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Informasi Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 108.202.000,00 realisasi sebesar Rp. 105.963.000,00 atau 97,93%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp. 80.423.000,00 realisasi sebesar Rp.57.466.000,00 atau 71.45%.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.314.843.000,00 realisasi sebesar Rp. 308.702.000,00 atau 98.05% yang dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, anggaran Rp.314.843.000,00 realisasi sebesar Rp. 308.702.000,00 atau 98.05%
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.770.005.500,00 realisasi sebesar Rp. 1.641.680.750,00 atau 92.75% yang dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD, anggaran sebesar Rp. 256.750.000,00 realisasi sebesar Rp. 240.545.000,00 atau 93.69%.
- 2) Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), anggaran sebesar Rp. 117.405.000,00 realisasi sebesar Rp. 117.405.000,00 atau 100%%
- 3) Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, anggaran sebesar Rp. 119.965.000,00 realisasi sebesar Rp. 119.965.000,00 atau 100%%
- 4) Kegiatan Publikasi dokumentasi perencanaan pembangunan, anggaran sebesar Rp. 157.570.000,00 realisasi sebesar Rp. 156.520.000,00 atau 99.33%
- 5) Kegiatan Evaluasi RPJMD, anggaran sebesar Rp.251.380.000,00 realisasi sebesar Rp.219.565.000,00 atau 99.39%
- 6) Kegiatan Rencana Pengembangan Penyediaan Air Bersih, anggaran sebesar Rp. 599.815.000,00 realisasi sebesar Rp. 582.418.500,00 atau 87.34%
- 7) Kegiatan Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, anggaran sebesar Rp. 0 realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
- 8) Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), anggaran sebesar Rp. 272.585.000,00 realisasi sebesar Rp. 220.545.000,00 atau 80.91%
- 9) Kegiatan Koordinasi penanganan permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim, anggaran sebesar Rp. 82.668.000,00 realisasi sebesar Rp. 67.320.000,00 atau 81.43%
- 10)Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), anggaran sebesar Rp. 72.673.000,00 realisasi sebesar Rp.71.273.000,00 atau 98.07%
- 11) Kegiatan Penyusunan rencana pengembangan pasar-pasar tradisional Kota Cirebon, anggaran sebesar Rp. 97.524.500,00 realisasi sebesar Rp. 97.474.500,00 atau 99.95%



- 12)Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Dana Provinsi), anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi sebesar Rp.93.830.000,00 atau 93.83%
- 13) Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP), anggaran sebesar Rp. 151.485.000,00 realisasi Rp. 147.785.000,00 atau 97.56%
- h. Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 545.587.000,00 realisasi sebesar Rp.527.865.500,00 atau 97,17% yang dipergunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus, anggaran sebesar Rp. 165.709.000,00 realisasi sebesar Rp. 165.709.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan, anggaran sebesar Rp. 85.140.000,00 realisasi sebesar Rp. 85.140.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, anggaran sebesar Rp.90.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 89.117.500,00 atau 99.02%.
 - 4) Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah, anggaran sebesar Rp. 204.738.000,00 realisasi sebesar Rp.187.899.000,00 atau 91.78%.
- i. Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.270.231.500,00 realisasi sebesar Rp. 970.384.000,00 atau 76,39% yang dipergunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, anggaran sebesar Rp. 365.720.500,00 realisasi sebesar Rp.174.466.000,00 atau 47.70%.



- 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, anggaran sebesar Rp. 236.312.000,00 realisasi sebesar Rp. 217.002.000,00 atau 91.83%.
- 3) Kegiatan Koordinasi program-program masalah gender dan anak, anggaran sebesar Rp. 105.795.000,00 realisasi sebesar Rp. 103.795.000,00 atau 98.11%.
- 4) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, anggaran sebesar Rp. 385.869.000,00 realisasi sebesar Rp.330.606.000,00 atau 85.68%.
- 5) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Lingkungan, anggaran sebesar Rp. 176.535.000,00 realisasi sebesar Rp. 144.515.000,00 atau 81.86%.
- j. Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 95.939.500,00 realisasi sebesar Rp. 94.232.500,00. atau 98.22%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), anggaran sebesar Rp. 95.939.500,00 realisasi sebesar Rp. 94.232.500,00. atau 98.22%.
- k. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP). Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 309.075.000,00 realisasi sebesar Rp. 223.405.000,00. atau 72.28%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Strategi Sanitasi Kota (Dana Pendamping), anggaran sebesar Rp. 309.075.000,00 realisasi sebesar Rp. 223.405.000,00. atau 72.28%.
- I. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 239.336.500,00 realisasi sebesar Rp. 234.666.500,00. atau 98.05%, untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota, anggaran sebesar Rp. 239.336.500,00 realisasi sebesar Rp. 234.666.500,00. atau 98.05%.
- m. Program Kerjasama Pembangunan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 140.470.000,00 realisai sebesar Rp. 140.100.000,00 atau 99.74%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan, anggaran sebesar Rp. 140.470.000,00 realisai sebesar Rp. 140.100.000,00 atau 99.74%

5.6.2. Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Kejaksanuntuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 19.690.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.588.000,00 atau 99.48%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. . 19.690.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.588.000,00 atau 99.48%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 19.690.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.588.000,00 atau 99.48%.

5.6.3. Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Pekalipan untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 21.475.000,00 realisasi sebesar Rp. 20.475.000,00 atau 95.34%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- **a.** Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 21.475.000,00 realisasi sebesar Rp. 20.475.000,00 atau 95.34%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 21.475.000,00 realisasi sebesar Rp. 20.475.000,00 atau 95.34%.



5.6.4. Kecamatan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Kesambi untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 26.168.800,00 realisasi sebesar Rp. 25.632.700,00 atau 97.95%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- **a.** Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 26.168.800,00 realisasi sebesar Rp. 25.632.700,00 atau 97.95%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 26.168.800,00 realisasi sebesar Rp. 25.632.700,00 atau 97.95%.

5.6.5. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Lemahwungkukuntuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 16.560.000,00 realisasi sebesar Rp. 15.060.000,00 atau 90.94%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- **a.** Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 16.560.000,00 realisasi sebesar Rp. 15.060.000,00 atau 90.94%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 16.560.000,00 realisasi sebesar Rp. 15.060.000,00 atau 90.94%.

5.6.6. Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Harjamuktiuntuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 25.270.000,00 realisasi sebesar Rp. 25.270.000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- **a.** Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 25.270.000,00 realisasi sebesar Rp. 25.270,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 25.270.000,00 realisasi sebesar Rp. 25.270,000,00 atau 100%.



5.6.7. Kelurahan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kesambi untuk Urusan perencanaan dan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 26.168.800,00 realisasi Rp.25.632.700,00 atau 97.95%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, alokasi anggaran pada program ini Rp. 26.168.800,00 realisasi Rp.25.632.700,00 atau 97.95%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran kegiatan ini Rp. 26.168.800,00 realisasi Rp.25.632.700,00 atau 97.95%.

5.6.8. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan lemahwungkuk untuk Urusan perencanaan dan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 16.560.000,00 realisasi Rp.15.060.000,00 atau 90.94%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, alokasi anggaran pada program ini Rp. 16.560.000,00 realisasi Rp.15.060.000,00 atau 90.94%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran kegiatan ini Rp. 16.560.000,00 realisasi Rp.15.060.000,00 atau 90.94%.

5.6.9. Kelurahan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan harjamukti untuk Urusan perencanaan dan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 25.270.000,00 realisasi Rp.25.270.000,00 atau 100%. Anggaran



tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, alokasi anggaran pada program ini Rp. 25.270.000,00 realisasi Rp.25.270.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, anggaran kegiatan ini Rp. 25.270.000,00 realisasi Rp.25.270.000,00 atau 100%.

5.7. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan Kelurahan Lemahwungkuk. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.7.1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk urusan Perhubungan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 19.394.931.700,00 realisasi sebesar Rp. 18.892.344.928,00 atau 97,41% untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11.398.849.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.221.448.321,00 atau 98,44%, digunakan untuk 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 6.000.000,00 realisasi Rp. 5.734.500,00 atau 95,58%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 10.500.000.000,00 realisasi RP. 10.371.308.626,00 atau 98,77%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 15.507.000,00 realisasi Rp. 15.187.000,00 atau 97,94%.



- 4) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 21.990.000,00 realisasi Rp. 12.231.900,00 atau 55,62%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 175.000.000,00 realisasi Rp. 170.138.000,00 atau 97,22%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 93.135.000,00 realisasi Rp. 89.354.600,00 atau 95,94%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi Rp. 32.516.000,00 atau 81,29%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 18.150.000,00 realaisasi Rp. 16.733.500,00 atau 92,20%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 92.500.000,00 realisasi Rp. 79.010.000,00 atau 85,42%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 112.067.000,00 realisasi Rp. 109.030.795,00 atau 97,29%.
- 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 149.500.000,00 realisasi Rp. 149.473.400,00 atau 99,98%.
- 12) Kegiatan yediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 175.000.000,00 realisasi Rp. 170.730.000,00 atau 97,56%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.542.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.277.854.567,00 atau 82,82%, digunakan untuk 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 287.722.000,00 realisasi Rp. 280.353.344,00 atau 97,44%.
 - 2) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, anggaran Rp. 310.000.000,00 realisasi Rp. 297.692.000,00 atau 96,03%.



- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 407.728.000,00 realisasi Rp.398.804.800,00 atau 97,81%.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, anggaran Rp. 500.000.000,00 realisasi Rp. 277.839.423,00 atau 55,57%.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 37.390.000,00 realisasi Rp. 23.165.000,00 atau 61,96%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 402.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 397.910.000,00 atau 98,83%, digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran Rp. 212.610.000,00 realisasi Rp. 208.010.000,00 atau 97,84%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, anggaran Rp. 190.000.000,00 realisasi Rp. 189.900.000,00 atau 99.95%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.275.000,00 atau 96,98% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 265.230.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 263.970.300,00atau 99,52% digunakan untuk 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 49.753.800,00 realisasi Rp. 49.753.800,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp. 6.026.500,00 realisasi Rp. 5.126.500,00 atau 85,07%.
 - 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 65.330.000,00 realisasi Rp. 65.330.000,00 atau 100%.



- 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, anggaran Rp. 7.545.000,00 realisasi Rp. 7.545.000,00 atau 100%.
- 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA dan perubahannya, anggaran Rp. 74.025.000,00 realisasi Rp. 74.025.000,00 atau 100%.
- 6) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap, anggaran Rp. 35.160.000,00 realisasi Rp. 34.800.000,00 atau 98,98%.
- 7) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD, anggaran Rp. 27.390.000,00 realisasi Rp. 27.390.000,00 atau 100%.
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, alokasi anggaran untuk proram ini sebesar Rp. 148.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.465.000,00 atau 99,16%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan.
- g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.180.000,00 atau 98,36% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
- h. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 249.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 245.540.000,00 atau 98,59%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- i. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.954.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.063.822.700,00 atau 103,71%, digunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan perbaikan lampu isyarat pengatur lalulintas (traffic light), anggaran Rp. 160.000.000,00 realisasi Rp. 157.489.000,00 atau 98,43%.



- 2) Kegiatan Penataan dan Pembangunan PJU, anggaran Rp. 62.000.000,00 realisasi Rp. 61.422.350,00 atau 99,07%.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan PJU, anggaran Rp. 490.000.000,00 realisasi Rp. 481.139.650,00 atau 98,19%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Marka Jalan (Dana Propinsi), anggaran Rp. 427.500.000,00 realisasi Rp. 404.450.000,00 atau 94,61%.
- 5) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, anggaran Rp. 266.500.000,00 realisasi Rp. 266.125.000,00 atau 99,86%
- 6) Kegiatan Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran Rp. 148.320.000,00 realisasi Rp. 146.445.000,00 atau 98,74%.
- 7) Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (Dana Propinsi), anggaran Rp. 400.000.000,00 realisasi Rp. 568.836.400,00 atau 142,21%.
- 8) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas dan Penunjang Lainnya (Dana Propinsi, anggaran Rp. 1.000.000.000,00 realisasi Rp. 977.915.300,00 atau 97,79%.
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.781.000,00 atau 100%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengawasan Keselamatan Pelayaran.
- k. Program Peningkatan Pelayanan UPTD, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.256.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.135.188.915,00, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan peningkatan pelayanan terminal, anggaran Rp. 503.000.000,00 realisasi Rp. 495.650.000,00 atau 98,54%.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerangan Jalan Umum, anggaran Rp. 253.910.000,00 realisasi Rp. 199.628.307,00 atau 78,62%.



- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, anggaran Rp. 500.000.000,00 realisasi Rp. 439.910.608,00 atau 87,98%.
- Program Peningkatan Pelayanan Parkir, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 390.000.000,00 realisasi Rp. 358.947.075,00 atau 92,04%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Perparkiran.
- m. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 664.757.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 659.963.050,00 atau 99,28%, digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Marka Jalan (Dana Alokasi Khusus), anggaran Rp. 462.552.200,00 realisasi Rp. 460.128.350,00 atau 99,48%.
 - 2) Kegiatan Pendamping DAK Pengadaan Marka Jalan, anggaran Rp. 20.934.800,00 realisasi Rp. 19.884.800,00 atau 94,98%.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK), anggaran Rp. 172.302.800,00 realisasi Rp. 171.482.300,00 atau 99,52%.
 - 4) Kegiatan Pendamping DAK Pengadaan Rambu Lalu Lintas, anggaran Rp. 8.967.600,00 realisasi Rp. 8.467.600,00 atau 94,42%.

5.7.2 Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun 2015, Kelurahan Lemahwungkuk mengalokasikan anggaran untuk urusan perhubungan sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.800.000,00 atau 97,60%. Anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) program yaitu program pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang didalamnya terdapat 1 kegiatan yaitu kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan.

5.8. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :



5.8.1. Kantor Lingkungan Hidup

Pada tahun anggaran 2015, Kantor Lingkungan Hidup untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.580.567.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.441.954.994,00 atau 94,63,% yang dipergunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 424.279.500,00 realisasi sebesarRp. 404.224.582,00 atau 95.27% untuk melaksanakan14 (empat belas) kegiatanyaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp.1.950.000,00 realisasi sebesar Rp.1.950.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp. 69.000.000,00 realisasi sebesarRp.57.972.955,00 atau 84.02%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, anggaran Rp. 9.431.500,00 terealisasi Rp.9.207.000,00 atau 97.62%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 3.650.000,00 terealisasi Rp.2.731.900,00 atau 94.85%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp51.400.000,00 realisasi sebesar Rp.50.800.000,00 atau 98.83%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 27.990.000,00 atau 99.96%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran sebesar Rp. 16.752.000,00 realisasi sebesar Rp. 14.840.900,00 atau 88.59%.



- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp. 1.852.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.852.000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.500.000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.140.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.050.000,00 atau 97.83%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 960.000,00 atau 80.00%.
- 12)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 13.140.000,00 realisasi sebesar Rp. 10.426.000,00 atau 79.35%.
- 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 110.864.000,00 realisasi sebesar Rp. 109.263.827,00 atau 98.56%.
- 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 111.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 110.680.000,00 atau 99.35%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 380.563.500,00 realisasi sebesar Rp. 347.832.612,00 atau 91.40%untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 56.550.000,00 realisasi sebesar Rp. 56.120.000,00 atau 99.24%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 17.765.000,00 terealisai Rp. 17.575.000,00 atau 98.93%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 86.987.500,00 terealisasi Rp. 56.862.612,00 atau 65.37%.



- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,anggaran sebesar Rp. 199.201.000,00 realisasi sebesar Rp. 197.885.000,00 atau 99.34%.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 20.060.000,00 realisai sebesar Rp. 19.390.000,00 atau 96.66%
- 6) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Kimia Laboratorium Pemerintah, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.14.000.000,00 realisasi sebesar Rp.12.900.000,00 atau 92.14% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp. 6.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.700.000,00 atau 95.00%.
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 terealisai Rp. 7.200.00 atau 90.00%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 112.299.000,00 realisasi sebesar Rp.101.528.800,00 atau 90.41% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 13.640.000,00 realisasi sebesar Rp. 6.820.000,00 atau 50.00%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 98.659.000,00 terealisasi Rp. 94.708.800,00 atau 96.00%.
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 200.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 175.871.000,00 atau 87.94% untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup anggaran sebesar Rp. 97.330.000,00 realisasi sebesar Rp. 73.851.000,00 atau 75.88%.
- 2) Kegiatan Pengendalian B3 dan Limbah B3, anggaran Rp. 12.635.000,00 terealisasi Rp. 12.135.000,00 atau 96.04%.
- 3) Kegiatan Pengujian kadar limbah cair, anggaran sebesar Rp. 90.035.000,00 realisasi sebesar Rp.89.885.000,00 atau 99.83%.
- f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 110.676.000,00 terealisasi Rp.109.335.000,00 atau 98,79% untuk membiayai 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, anggaran Rp.110.676.000,00 terealisasi Rp.109.335.000,00 atau 98,79%.
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, alokasi anggaran untuk program ini Rp.235.100.000,00 terealisasi Rp228.362.000,00 atau 97.13% untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp.99.117.000,00 atau 99.12%.
 - Kegiatan Pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, anggaran Rp. 85.100.000,00 terealisasi Rp. 83.780.000,00 atau 98.45%
 - 3) Kegiatan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan, anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp. 45.465.000,00 atau 90.93%.
- h. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 815.028.000,00 terealisasi Rp. 804.290.000,00 atau 98.68% untuk membiayai 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup, anggaran Rp. 779.592.000,00 terealisasi Rp. 770.820.000,00 atau 99.87%.



- 2) Kegiatan Biaya umum Perencanaan Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup, anggaran Rp. 35.436.000,00 terealisasi Rp. 33.470.000,00 atau 94.45%.
- i. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat, alokasi anggaran untuk program ini Rp.288.621.000,00 terealisasi Rp. 257.611.000,00 atau 89.26% untuk membiayai 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, anggaran Rp. 109.487.000,00 terealisasi Rp. 106.935.000,00 atau 97.67%.
 - 2) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA, anggaran Rp. 40.395.000,00 terealisasi Rp.39.935.000,00 atau 98.86%.
 - 3) Kegiatan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, anggaran Rp. 41.496.000,00 terealisasi Rp. 41.496.000,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan Koordinasi penilaian ADIPURA, anggaran Rp.97.243.000,00 terealisasi Rp. 69.245.000,00 atau 71.21%.

5.8.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam tahun anggaran 2015, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 16.329.870.007,00 realisasi sebesar Rp. 20.176.022.181,00 atau 123.55% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11.275.300.007,00 realisasi sebesar Rp. 15.839.625.231,00 atau 140.48% untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegitan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan, anggaran Rp. 1.037.803.500,00 terealisasi Rp. 1.030.457.500,00 atau 99,29%



- Kegitan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, anggaran Rp. 457.721.507,00 terealisasi Rp.455.009.000,00 atau 99.41%
- 3) Kegitan Pelayanan kebersihan kota pada hari-hari besar, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 93.240.000,00 atau 93.24%.
- 4) Kegitan Pelayanan Rutin/Berkala Kebersihan kota, anggaran Rp. 151.350.000,00 terealisasi Rp.151.107.000,00 atau 99.84%.
- 5) Kegitan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 4.928.425.000,00 terealisasi Rp. 4.917.165.231,00 atau 99.77%.
- 6) Kegitan Pengadaan Kendaraan operasional (Dump Truck)(Dana propinsi), anggaran Rp. 2.600.000.000,00 terealisasi Rp. 2.310.615.000,00 atau 88.87%.
- 7) Kegiatan Pengadaan Alat Berat / Ekscavator (Dana Propinsi), anggaran Rp. 2.000.000.000,00 realisasi Rp. 1.549.654.000,00 atau 77.48%
- 8) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan (Dana Propinsi), anggaran Rp. 0 terealisasi Rp.5.332.377.500,00 atau 0%
- b. *Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau* (RTH), alokasi anggaran untuk program ini Rp2.054.570.000,00 terealisasi Rp. 1.966.167.950,00 atau 95.70 %, digunakan untuk mendanai 4(empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH, anggaran Rp. 0 realisasi Rp.0 atau 0%
 - Kegiatan Pengawasan dan pengendalian RTH, anggaran Rp. 107.146.000,00 realisasi Rp. 106.112.500,00 atau 99.04%
 - 3) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Dekorasi dan Keindahan Kota, anggaran Rp. 866.686.200,00 realisasi Rp. 839.492.650,00 atau 96.86%



- 4) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tanaman Penghijauan/ Pelindung dan Hutan Kota, anggaran Rp. 1.080.737.800,00 realisasi Rp. 1.020.562.800,00 94.43%
- c. *Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau* (RTH), alokasi anggaran untuk program ini Rp. 3.000.000.000,00 terealisasi Rp. 2.370.229.000,00 atau 79.01 %, digunakan untuk mendanai 1(satu) kegiatan yaitu:
 - 1) KegiatanPembebasan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau, anggaran Rp. 3.000.000.000,00 terealisasi Rp. 2.370.229.000,00 atau 79.01%.

5.8.3. Kelurahan Sunyaragi

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan sunyaragi untuk Urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesa Rp. 23.917.000,00 realisasi Rp.23.758.000,00 atau 99.34%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau, alokasi anggaran pada program ini Rp. 23.917.000,00 realisasi Rp.23.758.000,00 atau 99.34% . pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemanfaatan Aset untuk Ruang Terbuka Hijau, anggaran kegiatan ini Rp. 23.917.000,00 realisasi Rp.23.758.000,00 atau 99.34%.

5.8.4. Kelurahan Derajat

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan derajat untuk Urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesa Rp. 0 realisasi Rp.0 atau 0%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

 a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran pada program ini Rp. 0 realisasi Rp.0 atau 0% . pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :



1) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Dekorasi dan Keindahan Kota, anggaran kegiatan ini Rp. 0 realisasi Rp.0 atau 0%.

5.8.5. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan lemahwungkuk untuk Urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 85.000.000,00 realisasi Rp.82.881.000,00 atau 97.51%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran pada program ini Rp. 85.000.000,00 realisasi Rp.82.881.000,00 atau 97.51%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman, Dekorasi dan Keindahan Kota, anggaran kegiatan ini Rp. 85.000.000,00 realisasi Rp.82.881.000,00 atau 97.51%.

5.8.6. Kelurahan Pulasaren

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan pulasaren untuk Urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 29.110.000,00 realisasi Rp.28.910.000,00 atau 99.31%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan1(satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 29.110.000,00 realisasi Rp.28.910.000,00 atau 99.31%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan, anggaran kegiatan ini Rp. 29.110.000,00 realisasi Rp.28.910.000,00 atau 99.31%.



5.9 Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun uraian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut.

5.9.1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineralmengalokasikan anggaran untuk urusan pertanahan sebesar Rp. 10.000.000.000,000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.930.791.649,00 atau 89,31%. Anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) program yaitu program pembebasan lahan untuk fasilitas umum yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kegiatanyaituKegiatan Pembebasan lahan.

5.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipildilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.10.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon pada tahun anggaran 2015,untuk mengelola belanja langsung menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 4.107.921.300,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.814.535.445,00 atau 92.86%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan9 (sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 760.961.000,00 terealisasi Rp. 687.918.709,00 atau 90.40%, digunakan untuk 14 kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 6.480.000,00 terealisasi Rp. 6.480.000,00 atau 100%



- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sumber Daya Air Dan Listrik (Telepon, PDAM dan PLN) anggaran Rp.183.000.000,00 terealisasi Rp. 140.407.676,00 atau 76.73 %
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah anggaran Rp.18.900.000,00 terealisasi Rp. 16.847.900,00 atau 89.14%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran Rp.7.560.000,00 terealisasi Rp. 7.138.900,00 atau 94.43%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. anggaran Rp.75.050.000,00 terealisasi Rp. 69.500.000,00 atau 97,49%
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. anggaran Rp.36.510.000,00 terealisasi Rp. 35.410.000,00 atau 96.99 %
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor anggaran Rp. 84.500.000,00 terealisasi Rp. 84.000.000,00 atau 99,41%
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. anggaran Rp. 73.300.000,00 terealisasi Rp. 71.185.400,00 atau 97.12%
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 8.500.000,00 terealisasi Rp. 8.500.000,00 atau 100%
- 10)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaranRp. 5.000.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 100%
- 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Rp. 34.996.000,00 terealisasi Rp.28.351.000,00 atau 81.01 %
- 12)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran Rp.49.215.000,00 terealisasi Rp. 47.506.500,00 atau 96.53%
- 13)Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah anggaran Rp.72.000.000,00 terealisasi Rp. 62.641.333,00 atau 87.00%



- 14)Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat anggaran Rp. 105.950.000,00 terealisasi Rp. 104.950.000,00 atau 99.06%
- b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur* Alokasi anggaran pada program ini Rp.411.440.000,00 terealisasi Rp. 364.977.436,00 atau 88.71%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 218.540.000,00 terealisasi Rp. 218.540.000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 160.700.000,00 terealisasi Rp. 153.760.000,00 atau 95.68%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp.32.200.000,00 terealisasi Rp. 32.200.000,00 atau 100 %
- c. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*, Alokasi anggaran pada program ini Rp. 20.940.000,00 terealisasi Rp. 18.780.000,00 atau 89.68 %, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, dengan angaran Rp. 20.940.000,00 terealisasi Rp. 18.780.000,00 atau 89.68 %
- d. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*, Alokasi anggaran pada program ini Rp. 37.605.000,00 terealisasi Rp.37.605.000,00 atau. 100 %, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan anggaran 37.605.000,00 terealisasi Rp.37.605.000,00 atau. 100 %
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran pada program ini Rp. 135.330.000,00 terealisasi Rp. 134.360.000,00 atau 99,28%, digunakan untuk 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 50.800.000,00 terealisasi Rp. 50.800.000,00 atau 100 %



- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semestera anggaran Rp.
 9.720.000,00 terealisasi Rp. 9.720.000,00 atau 100 %
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan anggaran Rp. 4.860.000,00 terealisasi Rp. 4.860.000,00 atau 100 %
- 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Anggaran Rp.9.330.000,00 terealisasi Rp. 9.330.000,00 atau 100 %
- 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya anggaran Rp. 28.240.000,00 terealisasi Rp. 28.240.000,00 atau 100%
- 6) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap anggaran Rp. 19.020.000,00 terealisasi Rp. 18.050.000,00 atau 94.90%
- 7) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPDanggaran Rp. 13.360.000,00 terealisasi Rp. 13.360.000,00 atau 100%
- f. Program Program Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran pada program ini Rp.1.109.676.500,00 terealisasi Rp. 989.723.500,00 atau 89.19 %. Digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, anggaran Rp. 608.231.500,00 terealisasi Rp. 51.8071.000,00 atau 98,48%.
 - 2) Kegiatan Pelayanan administrasi Kependudukan, anggaran Rp. 501.445.000,00 terealisasi Rp.471.652.500,00 atau 94.06%.
- g. *Program Pelayanan Pencatatan Sipil*, dengan anggaran pada program ini Rp. 407.755.000,00 terealisasi Rp. 407.755.000,00 atau 96.83%. Digunakan untuk 3 (tiga) Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penataan pelayanan kelahiran, dengan anggaran Rp. 319.245.000,00 terealisasi Rp. 308.834.000,00 atau 96.74%.
 - 2) Kegiatan Penataan pelayanan kematian, dengan anggaran Rp.308.834.000,00 terealisasi Rp. 13.175.000,00 atau 97.52%.
 - 3) Kegiatan Penataan pelayanan perkawinan dan perceraian, dengan anggaran Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 72.835.000,00 atau 97.11%.



- h. *Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*, dengan anggaran pada program ini Rp. 480.162.800,00 terealisasi Rp. 474.192.800,00 atau 98,76%. Digunakan untuk 3 (tiga) Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (updating dan pemeliharaan, dengan anggaran Rp. 208.742.800,00 terealisasi Rp.208.742.800,00 atau 98.64%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, dengan anggaran Rp. 117.950.000,00 terealisasi Rp. 114.820.000,00 atau 97.35%.
 - 3) Kegiatan Pemutahiran data kependudukan di masyarakat, dengan anggaran Rp. 153.470.000,00 terealisasi Rp. 153.470.000,00 atau 100%.
- i. *Program Perencanaan Kebijakan Kependudukan*, dengan anggaran pada program ini Rp. 744.051.000,00 terealisasi Rp. 712.134.000,00 atau 95.71%. Digunakan untuk 4 (empat) Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan, dengan anggaran Rp. 125.017.000,00 terealisasi Rp. 105.028.000,00 atau 84.01%.
 - 2) Kegiatan Laporan perkembangan Kependudukan, dengan anggaran Rp. 138.980.000,00 terealisasi Rp. 138.625.000,00 atau 99,74%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan kebijakan regulasi bidang Kependudukan, dengan anggaran Rp.279.760.000,00 terealisasi Rp. 271.535.000,00 atau 97.06%.
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, dengan anggaran Rp. 200.294.000,00 terealisasi Rp.196.946.000,00 atau 98.33%.



5.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana dan Kecamatan Kesambi. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut sebagai berikut:

5.11.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana mengalokasikan anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp. 307.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 299.190.000,00 atau 97,45%. Anggaran tersebut digunakan 3 (tiga) program yang terdiri dari4 (empat) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 62.285.000,00dengan realisasi sebesar Rp. 62.110.000,00 atau 99,72%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatanyaitu Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 101.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 99.890.000,00 atau 98,50%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
- c. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 143.315.000,00dengan realisasi sebesar Rp. 137.190.000,00 atau 95,73%, digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) KegiatanFasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A), anggaran Rp. 113.315.000,00 realisasi Rp. 107.190.000,00 atau 94,59%.



2) Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dana Provinsi), anggaran Rp. 30.000.000,00 realisasi Rp. 30.000.000,00 atau 100%.

5.11.2. Kelurahan Panjunan

Pada tahun 2015, Kelurahan Panjunan mengalokasikan anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp. 4.021.000,00 dengan realisasi Rp. 4.021.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk 1 (satu) program yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan yang terdiri dari1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

5.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera. Adapun uraian program dan kegiatannya sebagai berikut :

5.12.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengalokasikan anggaran untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp. 1.295.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.243.259.000,00 atau 96,00%. Anggaran tersebut digunakan untuk 2 (dua) program yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 337.075.000 ,00 dengan realisasi sebesar Rp. 336.575.000,00 atau 99,85%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, anggaran Rp. 231.835.000,00 realisasi Rp. 231.335.000 atau 99,78%.
- 3) Kegiatan Profil keluarga berencana, anggaran Rp. 55.240.000,00 realisasi Rp. 55.240.000,00 atau 100%.
- b. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 958.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 906.684.000,00 atau 94,64%, digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendamping Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling, anggaran Rp. 39.863.000,00 realisasi Rp. 36.284.000,00 atau 91,02%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling, anggaran Rp. 918.137.000,00 realisasi Rp. 870.400.000,00 atau 94,80%.

5.13. Urusan Sosial

Urusan sosial dikelola oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelurahan Panjunan dan Kelurahan Argasunya. Adapun uraian program dan kegiatannya sebagai berikut :

5.13.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tahun 2015, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran untuk urusan sosial sebesar Rp. 1.675.714.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.411.107.613,00 atau 84,21%. Anggaran tersebut digunakan untuk 5 (lima) program yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 641.385.000,00 dengan realisasi sebesar RP. 502.159.862,00 atau 78,29%, digunakan untuk 13 (tiga belas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran 585.000,00 realisasi Rp. 456.000,00 atau 77,95%.



- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 132.000.000,00 realisasi Rp. 65.785.462,00 atau 49,84%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional, anggaran Rp. 6.400.000,00 realisasi Rp. 4.263.500,00 atau 66,62%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 127.200.000,00 realisasi Rp. 125.876.600,00 atau 98,96%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 19.928.000,00 realisasi Rp. 19.272.250,00 atau 96,71%
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 28.504.000,00 realisasi Rp. 27.958.300,00 atau 98,09%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 7.328.000,00 realisasi Rp. 7.328.000,00 atau 100%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 7.980.000,00 realisasi Rp. 7.980.000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran 11.790.000,00 realisasi Rp. 11.790.000 atau 100%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 1.650.000,00 realisasi Rp. 1.610.000,00 atau 97,58%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 26.260.000,00 anggaran Rp. 21.564.000,00 atau 82,12%.
- 12) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 169.760.000,00 realisasi Rp. 107.334.550,00 atau 63,23%.
- 13)Kegiatan Jasa Keamanan Kantor, anggaran Rp. 102.000.000,00 realisasi Rp. 100.941.200,00 atau 98,96%.



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 261.800.000,00 dengan realisasi Rp. 169.766.327,00 atau 64,85%, digunakan untuk 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 49.192.550,00 atau 98,39%.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 26.250.000,00 realisasi Rp. 25.987.500,00 atau 99,00%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 178.950.000,00 realisasi Rp. 87.986.322,00 atau 49,17%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 6.600.000,00 realisasi Rp. 6.600.000,00 atau 100%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.750.000,00 dengan realisasi Rp. 9.976.000,00 atau 92,80%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaituKegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 81.779.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.131.500,00 atau 99,21%, digunakan untuk 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran Rp. 3.832.500,00 realisasi Rp. 3.832.500,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp. 3.088.000,00 realisasi Rp. 3.088.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 14.580.000,00 realisasi Rp. 14.580.000,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD, anggaran Rp. 3.832.500,00 realisasi Rp. 3.832.500,00 atau 100%.
 - 5) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 3.832.500,00 realisasi Rp. 3.832.500,00 atau 100%.



- 6) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 24.352.500,00 atau 97,41%.
- 7) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD, anggaran Rp. 27.613.500,00 realisasi Rp. 27.613.500,00 atau 100%.
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 680.000.000,00 dengan realisasi Rp. 648.073.879,00 atau 95,30%, digunakan untuk 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 25.000.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, anggaran Rp. 85.000.000,00 realisasi Rp. 84.095.550,00 atau 98,94%.
 - 3) Kegiatan Program Keluarga Harapan, anggaran Rp. 450.000.000,00 realisasi Rp. 419.578.729,00 atau 93,24%.
 - 4) Kegiatan Jaminan sosial bagi anak terlantar dan PMKS terlantar, anggaran Rp. 60.000.000,00 realisasi Rp. 59.399.600,00 atau 99,00%.
 - 5) Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, anggaran Rp. 60.000.000,00 realisasi Rp. 60.000.000,00 atau 100%.

5.13.2.Kelurahan Panjunan

Pada tahun 2015, Kelurahan Panjunan mengalokasikan anggaran untuk urusan sosial sebesar Rp. 9.800.000,00 dengan realisasi Rp. 9.700.000,00 atau 98,98%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yang terdiiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan dan Rehabililtasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.800.000,00 dengan realisasi Rp. 9.700.000,00 atau 98,98%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial, anggaran Rp. 9.800.000,00 realisasi Rp. 9.700.000,00 atau 98,98%.



5.13.3.Kelurahan Argasunya

Pada tahun 2015, Kelurahan Argasunya mengalokasikan anggaran untuk urusan sosial sebesar Rp. 59.226.500,00 dengan realisasi Rp. 57.526.500,00 atau 97,13%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yang terdiiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- b. Program Penanggulangan Korban Bencana, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 59.226.500,00 dengan realisasi Rp. 57.526.500,00 atau 97,13%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan Tagana dalam penanggulangan bencana,anggaran Rp. 59.226.500,00 dengan realisasi Rp. 57.526.500,00 atau 97,13%.

5.14. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut sebagai berikut:

5.14.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun anggaran 2015, urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 395.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 394.052.250,00 atau 99.76% yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 6 (enam). Adapun program yang dimaksud :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, alokasi anggaran Rp. 150.000.000,00 terealisasi Rp. 149.618.850,00 atau 99.75 %. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Kerja, alokasi anggaran Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 74.618.850,00 atau 99.49%.
 - 2) Kegiatan Pemagangan Tenaga Kerja, alokasi anggaran Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 75.000.000,00 atau 100%.



- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00 anggaran Rp. 50.000.000,00 atau 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, anggaran Rp. 50.000.000,00 anggaran Rp. 50.000.000,00 atau 100%.
- c. *Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja*. Alokasi anggaran Rp.95.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.433.400,00 atau 99.40%. Adapun jumlah kegiatan pada program ini sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja, alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.433.400,00 atau 99.24%.
 - 2) Kegiatan Diseminasi Informasi Penempatan Tenaga Kerja, alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%
- d. *Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100%. Adapun jumlah kegiatan pada program ini sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan Industrial, alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100 %.

5.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut .



5.15.1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.917.452.850,00 realisasi sebesar Rp. 2.325.119.500,00 atau 79.70% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, alokasi anggaran pada program ini Rp.40.012.000,00 terealisasi Rp. 32.812.000,00 atau 82.01%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, anggaran Rp.40.012.000,00 terealisasi Rp. 32.812.000,00 atau 82.01%.
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, alokasi anggaran pada program ini Rp. 128.112.450,00 terealisasi Rp. 126.695.600,00 atau 66,54% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, anggaran Rp. 35.302.500,00 terealisasi Rp. 34.341.250,00 atau 98.89%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Koperasi dan UMKM, anggaran Rp. 99.999.950,00 terealisasi Rp. 98.583.100,00 atau 98.58%.
- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, alokasi anggaran pada program ini Rp. 217.590.000,00 terealisasi Rp. 204.229.000,00 atau 93.86% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi, anggaran Rp. 161.777.500,00 terealisasi Rp. 148.560.500,00 atau 91.83%.



- 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, anggaran Rp. 55.812.500,00 terealisasi Rp.55.668.500,00 atau 99.74%.
- d. Program Program Pembentukan lembagan ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin, alokasi anggaran pada program ini Rp. 2.281.688.600,00 terealisasi Rp. 1.716.114.100,00 atau 75.21% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Berbasis RW, anggaran Rp. 2.281.688.600,00 terealisasi Rp. 1.716.114.100,00 atau 75.21%
- e. Program Inventarisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan, alokasi anggara pada program ini Rp. 250.049.800,00 realisasi Rp.245.268.800,00 atau 98.09% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Cirebon anggara pada program ini Rp. 250.049.800,00 realisasi Rp.245.268.800,00 atau 98.09%

5.15.2. Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan pekalipan untuk Urusan koperasi dan UKM mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.265.000,00 realisasi Rp.12.265.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid untuk keluarga miskin, alokasi anggaran pada program ini Rp. 12.265.000,00 realisasi Rp.12.265.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro berbasis RW, anggran Rp. 12.265.000,00 realisasi Rp.12.265.000,00 atau 100%.



5.15.3. Kelurahan Panjunan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan panjunan untuk Urusan koperasi dan UKM mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 45.750.000,00 realisasi Rp.43.414.000,00 atau 94.89%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, alokasi anggaran pada program ini Rp. 45.750.000,00 realisasi Rp.43.414.000,00 atau 94.89%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD, anggran Rp. 45.750.000,00 realisasi Rp.43.414.000,00 atau 94.89%.

5.16. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal ditangani oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Adapun uraian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

5.16.1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Pada tahun anggaran 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanModal untuk urusan penanaman modal mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.135.303.750,00 realisasi sebesar Rp.3.003.022.203,00 atau 95,78% untuk melaksanakan 8 (delapam) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.033.168.950,00 realisasi sebesar Rp.979.326.203,00 atau94.79 % untuk melaksanakan15 (lima belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.075.000,00 atau 88.44%.



- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp. 130.200.000,00 realisasi sebesar Rp.104.588.053,00 atau 80.33%.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 8.175.000,00 terealisasi Rp.7.448.200,00 atau 91.11%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor anggaran sebesar Rp.117.380.950,00 realisasi sebesar Rp. 116.610.000,00 atau 99.34%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja anggaran sebesar Rp. 32.248.000,00 realisasi sebesar Rp. 26.890.000,00 atau 83.39%
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor anggaran sebesar Rp.39.350.000,00 realisasi sebesarRp. 37.632.000,00 atau 95.63%
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran sebesar Rp. 101.640.000,00 realisasi sebesar Rp. 97.688.950,00 atau 96.11%
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp. 7.950.000,00 realisasi sebesar Rp.7.950.000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, anggaran Rp. 555.000,00 terealisasi Rp. 550.000,00 atau 99.10%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp. 39.600.000,00 realisasi sebesar Rp.37.560.000,00 atau 94.85%
- 11) Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, anggaran Rp. 540.000,00 realisasi sebesar Rp. 405.000,00 atau 75.00%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman anggaran sebesar Rp.68.270.000,00 realisasi sebesar Rp. 67.770.000,00 atau 99.27%.



- 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah anggaran sebesar Rp. 354.860.000,00 realisasi sebesar Rp. 344.245.000,00 atau 97.01%.
- 14) KegiatanPenyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp.38.470.000,00 realisasi Rp. 37.944.000,00 atau 98.63%
- 15) Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor. Anggaran Rp. 85.930.000,00 terealisasi Rp. 84.970.000,00 atau 98.88%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 480.005.000,00 realisasi sebesar Rp. 422.607.800,00 atau 88.04 % untuk melaksanakan5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung, anggaran sebesar Rp.58.000.000,00 terealisasi Rp. 57.100.000, 00 atau 98.45 %
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, anggaran sebesar Rp.19.825.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.734.000,00 atau 99.54%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional anggaran sebesarRp. 303.630.000,00 realisasi sebesarRp.250.644.800,00 atau 82.55%.
 - 4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor anggaran sebesar Rp. 48.550.000,00 realisasi sebesar Rp. 47.869.000,00 atau 98,60%
 - 5) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 47.260.000,00 atau 94.52%
- c. Program peningkatan disiplin aparatur. alokasi anggaran pada program ini Rp. 51.590.000,00 terealisasi Rp. 51.126.000,00 atau 99.10%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, anggaran Rp. 51.590.000,00 terealisasi Rp. 51.126.000,00 atau 99.10%.



- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 87.329.000,00 realisasi sebesar Rp. 87.329.000,00 atau 100 % untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 22.250.000,00 terealisasi Rp.22.250.000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp.38.400.000,00 terealisasi Rp. 38.400.000,00 atau 100 %
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya anggaran sebesar Rp. 26.679.000,00 realisasi sebesar Rp. 26.679.000,00 atau 100%.
- e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 658.132.000,00 realisasi sebesar Rp.646.863.000,00 atau 98.29% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 298.776.000,00 atau 99.59%;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi, anggaran sebesar Rp.358.132.000,00 realisasi sebesar Rp.348.087.000,00 atau 97.20%;
- f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi sebesar Investasi.Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.49.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 49.400.000,00 atau 100% untuk melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, anggaran Rp.49.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 49.400.000,00 atau 100%.



- g. *Program Penataan dan Pelayanan Perijinan*. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 775.678.800,00 realisasi sebesar Rp. 766.370.200,00 atau 98.80% untuk melaksanakan 7(tujuh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, anggaran sebesar Rp. 207.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 205.258.000,00 atau 99.16 %
 - 2) Kegiatan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan perijinan, anggaran sebesar Rp. 41.405.000,00 realisasi sebesar Rp. 41.405.000,00 atau 100 %
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perijinan dan Penanaman modal, anggaran sebesar Rp. 58.525.000,00 realisasi sebesar Rp. 56.025.000,00 atau 95.73 %
 - 4) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan, anggaran sebesar Rp. 292.060.000,00 realisasi sebesar Rp.288.560.400,00 atau 98.80 %
 - 5) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi, anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 realisasi sebesar Rp.83.708.000,00 atau 98.48 %
 - 6) Kegiatan Penanganan pengaduan pelayanan perijinan, anggaran sebesar Rp. 38.975.000,00 realisasi sebesar Rp.38.700.000,00 atau 99.29 %
 - 7) Kegiatan Pengukuran indeks kepuasan masyarakat, anggaran sebesar Rp. 52.713.800,00 realisasi sebesar Rp. 52.713.800,00 atau 100 %

5.17. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Lemahwungkuk, Kelurahan Kejaksan dan Kelurahan Sunyaragi. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :



5.17.1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengalokasikan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 1.930.322.800,00 realisasi sebesar Rp. 1.776.734.333,00 atau 92,04% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yaitu :

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 516.822.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 429.000.531,00 atau 83,01%, digunakan untuk melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 142.200.000,00 realisasi Rp. 83.586.225,00 atau 58,78%.
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 6.800.000,00 realisasi Rp. 5.755.700,00 atau 84,64%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 147.725.000,00 realisasi Rp. 146.285.000,00 atau 99,03%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran Rp. 17.930.000,00 realisasi Rp. 5.600.000,00 atau 31,23%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 46.939.800,00 realisasi Rp. 46.647.600,00 atau 99,38%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 14.404.500,00 realisasi Rp. 14.277.000,00 atau 99,11%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, anggaran Rp. 2.150,000,00 realisasi Rp. 2,150,000,00 atau 100%.
 - 8) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, anggaran Rp. 4.323.500,00 realisasi Rp. 4.318.500,00 atau 99,88%.



- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 22.080.000,00 realisasi Rp. 21.780.000.00 atau 98,64%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 3.000.000.00 realisasi Rp. 1.250.000,00 atau 41,67%.
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 57,270,000,00 realisasi Rp. 45,355,000,00 atau 79,20%.
- 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 52.000.000.00 realisasi Rp. 51.995.506,00 atau 99,99%.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 394.259.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 345.856.302,00, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 206.285.000,00 realisasi Rp. 205.470.000,00 atau 99.60%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 9.999.500,00 realisasi Rp. 9.999.500,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 177.975.000,00 realisasi Rp. 130.386.802,00 atau 73,26%.
- d. Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 104.999.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.246.500,00 atau 89,76% terdapat 4(empat) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 12.680.000.00 realisasi Rp. 12.530.000,00 atau 98,82%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 38.580.000.00 realisasi Rp. 38.577.000.00 atau 99,99%.



- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 17.317.500.00 realisasi Rp. 17.317.500.00 atau 100%.
- 4) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 36.422.000,00 realisasi Rp. 25.822.000.00 atau 70,90%.
- e. Program Pengembangan Nilai Budaya, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 249.365.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 246,360,000,00 atau 98,79%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.
- f. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 87.105.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 86,380,000,00 atau 99,17%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
- g. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 577.771.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 574.891.000,00 atau 99,50%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, 249.410.000,00 realisasi Rp. 247.930.000,00 atau 99,41%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan, anggaran Rp. 29.831.000,00 realisasi Rp. 29.831.000.00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah, anggaran Rp. 298.530.000,00 realisasi Rp. 297.130.000,00 atau 99,53%

5.17.2. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun 2015, Kecamatan Lemahwungkuk mengalokasikan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 66.790.000,00 realisasi Rp. 65.475.000,00 atau 98,03%. Anggaran tersebut digunakan untuk



melaksanakan Program Pengembangan Nilai Budaya yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

5.17.3. Kelurahan Kejaksan

Pada tahun 2015, Kelurahan Kejaksan mengalokasikan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 24.830.000,00 realisasi Rp. 24.830.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Nilai Budaya yang di dalamnya terdapat Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

5.17.4. Kelurahan Sunyaragi

Pada tahun 2015, Kelurahan Sunyaragi mengalokasikan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 11.318.000,00 realisasi Rp. 5.979.000,00 atau 52,83%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang di dalamnya terdapat Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

5.18. Urusan Kepemudaan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahragaditangani oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.18.1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan kepemudaan dan Olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.012.243.500,00 realisasi sebesar Rp. 3.528.279.000,00 atau 117.13% digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 520.773.000,00 terealisasi Rp. 506.747.300,00 atau 97.31% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1. Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan, anggaran Rp. 520.773.000,00 terealisasi Rp. 506.747.300,00 atau 97.31%.



- b. Program *Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda*. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 198.275.500,00 terealisasi Rp.193.942.500,00 atau 97.81% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1. Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan, anggaran Rp. 198.275.500,00 terealisasi Rp.193.942.500,00 atau 97.81%.
- c. Program *Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga*. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.068.869.500,00 terealisasi Rp. 1.065.014.500,00 atau 99.64% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, anggaran Rp125.000.000,00 terealisasi Rp. 125.000.000,00 atau 100%;
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi Olahraga, anggaran Rp.43.550.000,00 terealisasi Rp. 43.550.000,00 atau 100%;
 - Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di Masyarakat, anggaran Rp. 56.450.000,00 terealisasi Rp. 56.450.000,00 atau 100%;
 - Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Tk. Jabar, anggaran Rp. 484.301.500,00 terealisasi Rp. 481.751.500,00 atau 99.47%;
 - 5. Kegiatan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah, anggaran Rp . 359.568.000,00 terealisasi Rp. 358.263.000,00 atau 99.64%.
- d. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga*. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1.100.000.000,00 terealisasi Rp. 1.641.013.000,00 atau 149.18% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, anggaran Rp. 1.100.000.000,00 terealisasi Rp. 1.088.724.000,00 atau 98.97%



- Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Dana Propinsi), anggaran Rp. 0 realisasi Rp. 552.289.000,00 atau 0.00%
- e. Program *Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda*. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.124.325.500,00 terealisasi Rp121.561.700,00 atau 97.78% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi pemuda, anggaran Rp.124.325.500,00 terealisasi Rp121.561.700,00 atau 97.78%

5.18.2 Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kejaksan untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.950.000,00 realisasi Rp. 4.585.500,00 atau 92.64%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 4.950.000,00 realisasi Rp. 4.585.500,00 atau 92.64%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat, anggran Rp. 4.950.000,00 realisasi Rp. 4.585.500,00 atau 92.64%.

5.18.3. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan lemahwungkuk untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 31.400.000,00 realisasi Rp. 20.120.000,00 atau 64.80%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 31.400.000,00 realisasi Rp. 20.120.000,00 atau 64.80%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :



1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat, anggran Rp. 31.400.000,00 realisasi Rp. 20.120.000,00 atau 64.80%.

5.18.4. Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan harjamukti untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 54.250.000,00 realisasi Rp. 54.250.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 54.250.000,00 realisasi Rp. 54.250.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat, anggran Rp. 54.250.000,00 realisasi Rp. 54.250.000,00 atau 100%.

5.18.5. Kelurahan Sunyaragi

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan sunyaragi untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 35.691.000,00 realisasi Rp. 36.168.000,00 atau 98.68%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 35.691.000,00 realisasi Rp. 36.168.000,00 atau 98.68%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga, anggran Rp. 35.691.000,00 realisasi Rp. 36.168.000,00 atau 98.68%.

5.18.6. Kelurahan Pekiringan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan pekiringan untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 47.843.000,00 realisasi Rp. 47.340.400,00 atau 98.95%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:



- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 47.843.000,00 realisasi Rp. 47.340.400,00 atau 98.95%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat, anggran Rp. 47.843.000,00 realisasi Rp. 47.340.400,00 atau 98.95%.

5.18.7. Kelurahan Panjunan

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan panjunan untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 106.130.500,00 realisasi Rp. 65.314.800,00 atau 61.54%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 35.690.250,00 realisasi Rp. 0 atau 0%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, anggran Rp. 35.690.250,00 realisasi Rp. 0 atau 0%.
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, alokasi anggaran pada program ini Rp. 30.440.250,00 realisasi Rp. 30.314.800,00 atau 99.59%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda anggaran Rp. 30.440.250,00 realisasi Rp. 30.314.800,00 atau 99.59%
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 35.000.000,00 realisasi Rp. 35..000.000,00 atau 100%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga, anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi Rp. 35..000.000,00 atau 100%.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp.5.000.000,00 realisai Rp.0 atau 0%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :



1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga anggaran Rp.5.000.000,00 realisai Rp.0 atau 0%.

5.18.8. Kelurahan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan harjamukti untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 44.955.000,00 realisasi Rp. 44.602.050,00 atau 99.21%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 44.955.000,00 realisasi Rp. 44.602.050,00 atau 99.21%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga, anggran Rp. 44.955.000,00 realisasi Rp. 44.602.050,00 atau 99.21%.

5.18.9. Kelurahan Kalijaga

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kalijaga untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 27.945.000,00 realisasi Rp.27.945.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 27.945.000,00 realisasi Rp.27.945.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga, anggran Rp. 27.945.000,00 realisasi Rp.27.945.000,00 atau 100%.

5.18.10. Kelurahan Kecapi

Pada tahun anggaran 2015, kelurahan kecapi untuk Urusan kepemudaan dan olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 40.250.000,00 realisasi Rp.40.250.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:



- a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, alokasi anggaran pada program ini Rp. 40.250.000,00 realisasi Rp.40.250.000,00 atau 100%. pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga, anggran Rp. 40.250.000,00 realisasi Rp.40.250.000,00 atau 100%.

5.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditangani oleh 5 (lima) SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan dan Kelurahan Argasunya. Program dan kegiatan pada SKPD tersebut sebagai berikut:

5.19.1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun 2015, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mengalokasikan anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 1.202.978.849,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.092.631.591,00 atau 90,83%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program yang di dalamnya terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 258.509.999,00 dengan realsasi anggaran sebesar Rp. 235.585.271,00 atau 91,13%, digunakan untuk melaksanakan 13 (tigabelas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran Rp. 1.360.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.098.000,00 atau 80,74%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran Rp. 77.515.000,00 realisasi anggaran Rp. 62.369.988,00 atau 80,46%.
 - Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, alokasi anggaran Rp. 5.240.000,00 realisasi anggaran Rp. 3.183.378,00 atau 60,75%.



- 4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, alokasi anggaran Rp. 20.856.000,00 realisasi anggaran Rp. 20.334.000,00 atau 97,50%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, alokasi anggaran Rp. 20.000.099,00 realisasi anggaran Rp. 16.794.000,00 atau 83,97%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi anggaran Rp. 10.320.900,00 realisasi anggaran Rp. 9.949.550,00 atau 96,40%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi anggaran Rp. 3.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 2.989.975,00 atau 99,67%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi anggaran Rp. 3.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 2.943.200,00 atau 98,11%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 9.480.000,00 atau 94,80%.
- 10)Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, alokasi anggaran Rp. 900.000,00 realisasi anggaran Rp. 719.000,00 atau 79,89%.
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, alokasi anggaran Rp. 32.058.000,00 realisasi anggaran Rp. 31.528.800,00 atau 98,35%.
- 12) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, alokasi anggaran Rp. 32.500.000,00 realisasi anggaran Rp. 32.447.380,00 atau 99,84%.
- 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, alokasi anggaran Rp. 41.760.000,00 realisasi anggaran Rp. 41.748.000,00 atau 99,97%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 184.443.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.933.820,00 atau 80,75%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 85.566.700,00 realisasi anggaran Rp. 82.735.000,00 atau 96,69%.



- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, alokasi anggaran Rp. 88,972.200,00 realisasi anggaran Rp. 59.128.820,00 atau 66,46%.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 9.905.000,00 realisasi anggaran Rp. 7.070.000,00 atau 71,38%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 37.709.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.560.000,00 atau 86,34%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 66.435.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.447.900,00 atau 87,98%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, alokasi anggaran Rp. 24.849.950,00 realisasi anggaran Rp. 19.223.250,00 atau 77,36%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, alokasi anggaran Rp. 22.635.450,00 realisasi anggaran Rp. 20.974.650,00 atau 92,66%.
 - 3) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap, alokasi anggaran Rp. 18.950.000,00 realisasi anggaran Rp. 18.250.000,00 atau 96,31%.
- e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 108.472.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 106.490.300,00 atau 98,17%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan.
- f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 236.122.450,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 226.169.000,00 atau 95,78%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan



- g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 55.532.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 49.990.500,00 atau 90,02%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- h. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 205.753.000,00 dengan realissi anggaran sebesar Rp. 201.329.700,00 atau 97,85%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
- i. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.125.100,00 atau 66,25%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah.

5.19.2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun 2015, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 6.088.862.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.788.386.430,00 atau 95,07%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 657.343.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 625.294.294,00 atau 95,12%, digunakan untuk melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran Rp. 2.100.00,00 realisasi anggaran Rp. 2.100.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran Rp. 147.850.000,00 realisasi anggaran Rp. 128.326.944,00 atau 86,80%.



- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, alokasi anggaran Rp. 14.400.000,00 realisasi anggaran Rp. 9.840.300,00 atau 68,34%.
- 4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, alokasi anggaran Rp. 116.150.000,00 realisasi anggaran Rp. 116.025.000,00 atau 99,89%.
- 5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, alokasi anggaran Rp. 44.050.000,00 realisasi anggaran Rp. 43.910.000,00 atau 99,68%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, alokasi anggaran Rp. 24.965.200,00 realisasi anggaran Rp. 24.894.600,00 atau 99,72%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi anggaran Rp. 27.574.700,00 realisasi anggaran Rp. 27.571.850,00 atau 99,99%.
- 8) KegiatanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi anggaran Rp. 12.294.000,00 realisasi anggaran Rp. 12.294.000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran Rp. 28.940.000,00 realisasi anggaran Rp. 28.867.000,00 atau 99,75%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, alokasi anggaran Rp. 81.750.000,00 realisasi anggaran Rp. 74.590.000,00 atau 91,24%.
- 11)Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, alokasi anggaran Rp. 109.270.000,00 realisasi anggaran Rp. 109.234.600,00 atau 99.97%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, alokasi anggaran Rp. 48.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 47.640.000,00 atau 99,25%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.526.490.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.433.055.136,00 atau 97,35%, digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan pembangunan gedung kantor, alokasi anggaran Rp. 316.645.000,00 realisasi anggaran Rp. 314.592.000,00 atau 99,35%.
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, alokasi anggaran Rp. 2.633.376.000,00 realisasi anggaran Rp. 2.565.927.736,00 atau 97,44%.
- 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 146.825.000,00 realisasi anggaran Rp. 143.640.000,00 atau 97,83%.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 56.804.500,00 realisasi anggaran Rp. 56.445.000,00 atau 99,37%.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, alokasi anggaran Rp. 372.840.000,00 realisasi anggaran Rp. 352.450.400,00 atau 94,53%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 90.300.000,00 realisasi anggaran Rp. 87.450.000,00 atau 96,84%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 218.632.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 212.053.200,00 atau 96,99%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunanlaporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, alokasi anggaran Rp. 139.707.500,00 realiasasi anggaran Rp. 135.668.400,00 atau 97,11%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, alokasi anggaran Rp. 44.364.500,00 realisasi anggaran Rp. 43.476.800,00 atau 98,00%.
 - 3) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, alokasi anggaran Rp. 34.560.000,00 realisasi anggaran Rp. 32.908.000,00 atau 95,22%.
- e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 701.563.900,00 dengan realisasi



anggaran sebesar Rp. 597.981.000,00, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan, alokasi anggaran Rp. 96.618.000,00 realisasi anggaran Rp. 95.634.200,00 atau 98,98%.
- 2) Kegiatan Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat, alokasi anggaran Rp. 121.431.000,00 realisasi anggaran Rp. 119.873.400,00 atau 98,72%.
- 3) Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, alokasi anggaran Rp. 483.514.900,00 realisasi anggaran Rp. 382.473.400,00 atau 79,10%.
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 232.355.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 230.669.800,00 atau 99,27%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatanyaitu Kegiatan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
- g. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 203.810.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.409.000,00 atau 97,84%, digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - i. Kegiatan Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, alokasi anggaran Rp. 101.905.000,00 realisasi anggaran Rp. 99.704.500,00 atau 97,84%.
 - ii. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi, alokasi anggaran Rp. 101.905.000,00 realisasi anggaran Rp. 99.704.500,00 atau 97,84%.
- h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 458.367.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 402.474.000,00 atau 87,81%, digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Penegakan peraturan daerah di wilayah Kota Cirebon, alokasi anggaran Rp. 354.145.000,00 realisasi anggaran Rp. 301.105.000,00 atau 85,02%.
- 2) Kegiatan Pengawasan dan penertiban pelanggaran pemasangan reklame, alokasi anggaran Rp. 104.222.500,00 realisasi anggaran Rp. 101.369.000,00 atau 97,26%.

5.19.3. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun 2015, Kelurahan Lemahwungkuk mengalokasikan anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 25.050.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.160.000,00 aatau 56,53%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

5.19.4. Kelurahan Panjunan

Pada tahun 2015, Kelurahan Panjunan mengalokasikan anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 59.131.250,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.571.250,00 atau 99,05%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) progam yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 49.131.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.571.250,00 atau 98,86%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.



5.19.5. Kelurahan Argasunya

Pada tahun 2015, Kelurahan Argasunya mengalokasikan anggaran untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp. 20.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.050.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

5.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditangani oleh beberapa SKPD yaitu Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun uraian program dan kegiatan di masing-masing SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

5.20.1. Inspektorat

Pada tahun anggaran 2015, untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian,Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.556.061.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.175.274.500,00 atau 98,29%, untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi program ini sebesar Rp.528.494.400,00 dan realisasi sebesar Rp.464.202.380,00. atau 87,83%. Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :



- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.123.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.75.185.071,00 atau 61,13%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah,anggaran sebesar Rp.13.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp.13.440.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.8,000,000,00 dan realisasi sebesar Rp.5.651.600,00 atau 70,65%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor,anggaran sebesar Rp.34.862.200,00 dan realisasi sebesar Rp.34.410.550,00 atau 98,70%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,anggaran sebesar Rp.32.907.200,00 dan realisasi sebesar Rp.32.778.100,00 atau 99,61%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp.19.714.000,00 dan realisasi sebesar Rp.19.707.900,00 atau 99,97%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,anggaran sebesar Rp.29.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp.24.064.000,00 atau 80,75%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp.1,200,000,00 dan realisasi sebesar Rp.1,026,000,00 atau 85,50%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp.97.501.000,00 dan realisasi sebesar Rp.89.986.000,00 atau 92,29%.
- 10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,anggaran sebesar Rp.168.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp.167.953.159,00 atau 99,93%.



- b. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi program ini sebesar Rp. 530.544.400,00 dan realisasi sebesar Rp.445.880.770,00 atau terealisasi 84,04%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 258.892.000,00 terealisasi Rp. 258.207.000,00 atau 99,74%.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 204.142.400,00 terealisasi Rp. 120.733.770,00 atau 59,14%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.67.510.000,00 terealisasi Rp. 66.940.000,00 atau 99,16%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Alokasi program ini sebesar Rp.38.073.000,00 dan realisasi sebesar Rp.38.061.000,00 atau 99,97%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran sebesar Rp.16.732.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 16.732.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran sebesar Rp.21.341.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.329.000,00 atau 99,94%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi program ini sebesar Rp. 151.285.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 146.202.500,00 atau terealisasi96,64%. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 70.400.000,00 terealisasi Rp. 70.400.000,00 atau 100%
 - Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran sebesar Rp.80.885.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 75.802.500,00 atau 93,72%



- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Alokasi program ini sebesar Rp.2.110.747.500,00 dan realisasi sebesar Rp.1.960.846.150,00 atau terealisasi 92,90%. Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala, anggaran sebesar Rp. 842.295.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 807.235.000,00 atau 95,84%.
 - 2) Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, anggaran sebesar Rp. 213.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 173.035.000,00 atau 80,97%.
 - 3) Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, anggaran sebesar Rp. 54.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 53.800.000,00 atau 99,45%.
 - 4) Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, anggaran sebesar Rp. 39.762.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 37.568.750,00 atau 94,48%.
 - 5) Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, anggaran sebesar Rp. 258.285.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 215.647.400,00 atau 83,49%.
 - 6) Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, anggaran sebesar Rp. 93.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 91.025.000,00 atau 97.46%.
 - 7) Kegiatan Laporan pajak-pajak pribadi,anggaran sebesar Rp. 24.005.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.505.000,00 atau 97,92%.
 - 8) Kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan, anggaran sebesar Rp. 213.657.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 213.657.500,00 atau 100%.
 - 9) Kegiatan Fasilitasi e Audit Kota Cirebon, anggaran sebesar Rp. 70.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 66.580.000,00 atau 94,37%.



- 10)Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), anggaran sebesar Rp. 83.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 83.450.000,00 atau 100%.
- 11)Kegiatan Review Atas Laporan Pemerintah Daerah, anggaran sebesar Rp. 67.542.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 67.542.500,00 atau 100%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Dana Provinsi), anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 127.800.000,00 atau 85,20%.
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Alokasi program ini sebesar Rp. 196.917.400,00 dan realisasi sebesar Rp.120.081.700,00 atau terealisasi 60,98%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, anggaran sebesar Rp. 55.482.400,00 dan realisasi sebesar Rp. 49.737.700,00 atau 89,65%.
 - 2) Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, anggaran sebesar Rp. 106.275.000,00 dan realisasi sebesar Rp.38.100.000,00 atau 35,85%.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi penilaian angka kredit, anggaran sebesar Rp. 35.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 32.244.000,00 atau 91,71%.

5.20.2. Sekretariat DPRD

Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat DPRD untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.14.318.962.998,00 realisasi Rp.11.951.906.414,00 atau 83,47% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan sebagai berikut :



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.877.477.886,00 realisasi Rp. 5.554.656.576,00 atau 94,51% yang dipergunakan untuk melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 420.000.000,00 realisasi Rp. 292.441.632,00 atau 69,63%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.21.750.000,00 realisasi 13.289.000,00 atau 61,10%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp.286.710.000,00 realisasi Rp. 267.123.540,00 atau 93,17%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp.95.180.000,00 realisasi Rp. 90.490.600,00 atau 95,07%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 51.644.498,00 realisasi Rp.50.962.000,00 atau 98,68%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 28.173.388,00 realisasi Rp. 25.479.360,00 atau 90,44%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp. 30.160.000,00 realisasi Rp. 28.070.000,00 atau 93,07%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 535.170.000,00 realisasi Rp. 475.781.000,00 atau 88,90%.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 7.300.000,00 realisasi Rp. 4.523.000,00 atau 61,96%.
 - 10)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 334.395.000,00 realisasi Rp. 280.706.000,00 atau 83,94%.



- 11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp3.765.465.000,00 realisasi Rp. 3.742.940.444,00 atau99,40%.
- 12)Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 301.530.000,00 realisasi Rp. 282.850.000,00 atau 93,80%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.296.268.012,00 realisasi Rp. 2.000.210.068,00 atau 87,11% untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.201.610.000,00 realisasi Rp. 154.680.000,00 atau 76,72%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.20.920.000,00 realisasi Rp. 9.500.000,00 atau 45,41%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, anggaran sebesar Rp.478.290.000,00 realisasi Rp. 472.430.000,00 atau 98,77%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 280.720.012,00 realisasi Rp. 276.560.000,00 atau terealisasi 98,52%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 619.150.000,00 realisasi Rp. 417.723.676,00 atau terealisasi 67,47%.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 89.530.000,00 realisasi Rp. 81.241.392,00 atau 90,74%.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 130.600.000,00 realisasi Rp. 125.522.000,00 atau 96,11%.
 - 8) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan, anggaran sebesar Rp. 217.420.000,00 realisasi Rp. 207.840.000,00 atau 95,59%.



- 9) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.258.028.000,00 realisasi Rp. 254.713.000,00 atau 98,72%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 322.415.000,00 realisasi Rp. 310.920.000,00 atau 96,43% untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran sebesar Rp.205.805.000,00 realisasi Rp.197.885.000,00 atau 96,15%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 80.250.000,00 terealisasi Rp. 78.475.000,00 atau 97,79%
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 36.360.000,00 terealisasi Rp. 34.560.000,00 atau 95,05%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 466.918.500,00 realisasi Rp.367.121.000,00 atau 78,63% untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 254.650.000,00 realisasi Rp. 177.380.000,00 atau 69,66%
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, anggaran sebesar Rp. 40.461.000,00 realisasi Rp.32.561.000,00 atau 80,48%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 18.960.500,00 realisasi Rp. 18.573.000,00 atau 97,96%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 23.175.000,00 realisasi Rp. 21.315.000,00 atau 91,97%.
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran sebesar Rp.129.672.000,00 realisasiRp.117.292.000,00 atau 90,45%.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.037.903.600,00



realisasi Rp.3.415.031.770,00 atau 67,79% untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- 1) KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah, anggaran sebesar Rp.367.198.600,00 realisasi Rp. 149.650.050,00 atau 40,75%.
- 2) Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, anggaran sebesar Rp.198.016.000,00 realisasi Rp. 108.831.020,00 atau 54,96%.
- 3) Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, anggaran sebesar Rp.603.922.000,00 realisasi Rp. 458.666.200,00 atau 75,95%.
- 4) Kegiatan Rapat-rapat paripurna, anggaran sebesar Rp. 497.655.000,00 realisasi Rp. 322.876.500,00 atau 64,88%.
- 5) Kegiatan Kegiatan Reses, anggaran sebesar Rp. 1.866.507.000,00 realisasi Rp.1.377.448.000,00 atau 73,80%
- 6) Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, anggaran sebesar Rp. 1.488.330.000,00 realisasi Rp. 997.560.000,00 atau 67,03%.
- 7) Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 16.275.000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 223.440.000,00 terealissi Rp. 215.767.000,00 atau 96,57%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, anggaran Rp.223.440.000,00 terealissi Rp. 215.767.000,00 atau 96,57%.
- g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 94.540.000,00 terealissi Rp. 88.200.000,00 atau 93,29%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu :



1) Kegiatan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, anggaran Rp. 94.540.000,00 terealissi Rp. 88.200.000,00 atau 93,29%.

5.20.3. Sekretariat Daerah

Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat Daerah untuk urusan Sekretariat Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.38.282.709.925,00 realisasi Rp.30.223.353.017,00 atau78,95% untuk melaksanakan 22(dua puluh dua) program dan 114 (seratus empat belas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.9.349.739.500,00, terealisasi Rp.8.614.649.678,00 atau 92,14%. Pada program ini terdapat 15 (lima belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 1.869.078.000,00 terealisasi Rp. 1.595.038.077,00 atau 85,34%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp. 15,600,000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 210.125.000,00 terealisasi Rp. 186.232.000,00 atau 88,63%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 123.210.000,00 terealisasi Rp. 51.046.766,00 atau 41,43%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 1.684.036.500,00 terealisasi Rp. 1.653.788.500,00 atau 98,20%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 356.777.000,00 terealisasi Rp. 349.826.000,00 atau 98,05%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 209.131.500,00 terealisasi Rp. 203.013.500,00 atau 97,07%



- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 98.545.000,00 terealisasi Rp. 97.554.800,00 atau 99%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 200.965.000,00 terealisasi Rp. 195.306.250,00 atau 97,18%
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 544.642.000,00 terealisasi Rp. 535.362.000,00 atau 98,30%
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 1.436.700.000,00 terealisasi Rp. 1.304.605.375,00 atau 90,81%
- 12)Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 1.082.500.000,00 terealisasi Rp. 1.015.897.010,00 atau 93,85%
- 13)Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 1.268.054.500,00 terealisasi Rp. 1.197.863.400,00 atau 94,46%
- 14)Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat, anggaran Rp. 150.375.000,00 terealisasi Rp. 129.460.000,00 atau 86,09%
- 15)Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota, anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.656.000,00 atau 99,66%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.9.906.391.500,00, terealisasi Rp.7.489.567.364,00 atau 75,60%. Pada program ini terdapat 14 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 2.958.552.500,00 terealisasi Rp. 2.863.067.500,00 atau 96,77%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, anggaran Rp. 126.634.000,00 terealisasi Rp. 108.662.000,00 atau 85,81%.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 423.708.500,00 terealisasi Rp. 393.932.450,00 atau 92,97%.



- 4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, anggaran Rp. 242.915.500,00 terealisasi Rp. 151.683.500,00 atau 62,44%.
- 5) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 500.413.000,00 terealisasi Rp. 404.457.500,00 atau 80,82%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, anggaran Rp. 976.720.000,00 terealisasi Rp. 880.408.528,00 atau 90,14%.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, anggaran Rp. 285.540.000,00 terealisasi Rp. 262.750.000,00 atau 92,02%.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 1.617.413.000,00 terealisasi Rp. 778.324.000,00 atau 48,12%.
- 9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, anggaran Rp. 288.960.000,00 terealisasi Rp. 123.360.831,00 atau 42,69%.
- 10)Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 1.767.210.000,00 terealisasi Rp. 985.951.895,00 atau 55,79%.
- 11)Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas, anggaran Rp. 181.490.000,00 terealisasi Rp. 139.214.860,00 atau 76,71%.
- 12) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, anggaran Rp. 96.740.000,00 terealisasi Rp. 96.522.200,00 atau 99,77%.
- 13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, anggaran Rp. 110.280.000,00 terealisasi Rp. 43.000.600,00 atau 38,99%.
- 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 329.815.000,00 terealisasi Rp. 258.231.500,00 atau 78,30%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.852.851.000,00, terealisasi Rp.595.735.500,00 atau 69,85%. Pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran Rp. 523.220.000,00 terealisasi Rp. 324.582.500,00 atau 62,04%.
- 2) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 241.581.500,00 terealisasi Rp. 192.153.000,00 atau 79,54%.
- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 88.049.500,00 terealisasi Rp. 79.000.000,00 atau 89,72%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.260.706.000,00, terealisasi Rp.232.456.000,00 atau 89,16%. Pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, anggaran Rp. 221.005.000,00 terealisasi Rp. 198.855.000,00 atau 89,98%.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp. 39.701.000,00 terealisasi Rp. 33.601.000,00 atau 84,64%.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp.590.527.500,00, terealisasi Rp.538.332.000,00 atau 91,16%. Pada program ini terdapat8 (delapan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 89.304.000,00 terealisasi Rp. 89.293.000,00 atau 99,99%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, anggaran Rp. 121.984.000,00 terealisasi Rp. 117.696.500,00 atau 96,49%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp. 22.753.000,00 terealisasi Rp. 21.653.000,00 atau 95,17%.
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 30.699.500,00 terealisasi Rp. 30.699.500,00 atau 100%.
 - 5) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD, anggaran Rp. 44.835.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.



- 6) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 48.190.000,00 terealisasi Rp. 48.190.000,00 atau 100%.
- 7) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 213.190.000,00 terealisasi Rp. 212.950.000,00 atau 99,89%.
- 8) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap, anggaran Rp. 19.572.000,00 terealisasi Rp. 17.850.000,00 atau 91,20%.
- f. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, alokasi anggaran Rp.5.179.354.500,00, terealisasi Rp.4.437.127.550,00 atau 85,67%. Pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, anggaran Rp. 248.360.000,00 terealisasi Rp. 236.350.500,00 atau 95,16%.
 - 2) Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, anggaran Rp. 810.160.000,00 terealisasi Rp. 433.987.200,00 atau 53,57%.
 - 3) Kegiatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA, anggaran Rp. 843.330.000,00 terealisasi Rp. 830.504.650,00 atau 98,48%.
 - 4) Kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggaran Rp. 99.369.000,00 terealisasi Rp. 23.075.000,00 atau 23,22%.
 - 5) Kegiatan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional, anggaran Rp. 696.993.000,00 terealisasi Rp. 550.812.400,00 atau 79,03%.
 - 6) Kegiatan Dokumentasi Manual dan Elektronik Pimpinan Daerah, anggaran Rp.2.313.930.000,00 terealisasi Rp.2.219.395.000,00 atau 95,91%.
 - 7) Kegiatan Pelayanan Protokoler Kedinasan Pimpinan Daerah, anggaran Rp. 167.212.500,00 terealisasi Rp. 143.002.800,00 atau 85,52%.



- g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi anggaran Rp.630.494.000,00, terealisasi Rp.539.138.000,00 atau 85,51%. Pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja, anggaran Rp. 324.124.000,00 terealisasi Rp. 269.453.000,00 atau 83,13%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan standar satuan harga, anggaran Rp. 254.085.000,00 terealisasi Rp. 230.325.000,00 atau 90,65%.
 - 3) Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, anggaran Rp. 52.285.000,00 terealisasi Rp. 39.360.000,00 atau 75,28%.
- h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, alokasi anggaran Rp.51.640.000,00, terealisasi Rp.37.940.000,00 atau 73,47%. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan, anggaran Rp. .51.640.000,00, terealisasi Rp. 37.940.000,00 atau 73,47%.
- i. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, alokasi anggaran Rp.911.979.025,00, terealisasi Rp. 450.715.000,00 atau 49,42%. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, anggaran Rp. 181.950.000,00, terealisasi Rp.77.419.000,00 atau 42,55%.
 - 2) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, anggaran Rp. 184.265.000,00, terealisasi Rp.115.165.000,00 atau 62,50%.
 - 3) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Pembangunan, anggaran Rp. 180.160.000,00, terealisasi Rp.84.827.000,00 atau 47,08%.



- 4) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, anggaran Rp. 180.462.000,00, terealisasi Rp.77.695.000,00 atau 43,05%.
- 5) Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Evaluasi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, anggaran Rp. 185.142.025,00, terealisasi Rp.95.609.000,00 atau 51,64%.
- j. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, alokasi anggaran Rp.44.027.500,00, terealisasi Rp.6.296.500,00 atau 14,30%. Pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah, anggaran Rp. 11.377.000,000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
 - Kegiatan Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga, anggaran Rp. 32.650.500,00 terealisasi Rp. 6.296.500,00 atau 19,28%.
- k. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran Rp.921.232.000,00, terealisasi Rp.478.746.500,00 atau 51,97%. Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Fasilitasi serta penyelesaian perkara peradilan diluar dan didalam peradilan Rp. 490.575.000,00 terealisasi Rp. 105.400.500,00 atau 21,49%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, anggaran Rp. 19.530.000,00 terealisasi Rp. 15.930.000,00 atau 81,57%.
 - 3) Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, anggaran Rp. 183.924.000,00 terealisasi Rp. 169.411.500,00 atau 92,11%.
 - 4) Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan, anggaran Rp. 152.829.500,00 terealisasi Rp. 148.619.500,00 atau 97,25%.



- 5) Kegiatan Penerbitan Lembaran Daerah/ Berita Daerah, anggaran Rp. 39.385.000,00 terealisasi Rp. 39.385.000,00 atau 100%.
- Kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyuluhan Hukum, anggaran Rp. 34.988.500,00 terealisasi Rp.0,00atau 0%.
- k. Program Pendidikan Kedinasan, alokasi anggaran Rp.119.630.000,00, terealisasi Rp.88.380.000,00 atau 73,88%. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme, anggaran Rp.119.630.000,00, terealisasi Rp.88.380.000,00 atau 73,88%.
- I. Program Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran Rp.364.405.000,00, terealisasi Rp.75.518.400,00 atau 20,72%. Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, anggaran Rp. 25.560.000,000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
 - 2) Kegiatan Analisis Jabatan PNS, anggaran Rp. 338.845.000,00 terealisasi Rp. 75.518.400,00 atau 22,29%.
- m.Program penataan kelembagaan, alokasi anggaran Rp.718.348.500,00terealisasi Rp.53.166.000,00 atau 7,40%. Pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Ketatalaksanaan, anggaran Rp. 331.529 .000,00 terealisasi Rp. 12.920.000,00 atau 3,90%.
 - 2) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan, anggaran Rp. 293.563.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 1,70%.
 - Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tingkat Kota, anggaran Rp. 293.563.000,00 terealisasi Rp. 5.000.000,00 atau 1,70%.
- n. Program Pembinaan Pemerintahan, alokasi anggaran Rp.620.646.500,00, terealisasi Rp.298.059.025,00 atau 48,02%. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Agraria, anggaran Rp. 43.666.000,00 terealisasi Rp. 14.249.000,00 atau 32,63%.
- 2) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Harmonisasi Hubungan Antar Susunan Pemerintahan, anggaran Rp. 315.404.500,00 terealisasi Rp. 196.888.000,00 atau 62,42%.
- 3) Kegiatan Penyusunan LPPD Kota, anggaran Rp. 93.962.000,00 terealisasi Rp. 86.922.025,00 atau 92,51%.
- 4) Kegiatan Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan kerjasama dan tugas pembantuan, anggaran Rp. 8.768.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 5) Kegiatan Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan tata pemerintahan, anggaran Rp. 158.846.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- o. Program Pembinaan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, alokasi anggaran Rp.3.150.230.000,00, terealisasi Rp.2.473.733.700,00 atau 78,53%. Pada program ini terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan pertanian, perikanan, dan kelauatan, anggaran Rp. 39.712.000,00 terealisasi Rp. 39.712.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan Energi dan sumber daya alam, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan lingkungan hidup, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan Koperasi usaha mikro, kecil. dan



- menengah, anggaran Rp. 103.843.000,00 terealisasi Rp. 103.843.000,00 atau 100%.
- 5) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi urusan penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, anggaran Rp. 219.999.500,00 terealisasi Rp. 219.999.500,00 atau 100%.
- 6) Kegiatan Penyusunan kebijaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administrasi BUMD, anggaran Rp. 115.203.200,00 terealisasi Rp. 115.203.200,00 atau 100%.
- 7) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Pembangunan dan Statistik, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 8) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Perhubungan dan Pekerjaan Umum, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 9) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Budaya dan Pariwisata, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 10) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kesehatan, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 11)Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Serta Pembinaan Administrasi Urusan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, anggaran Rp. 182.247.500,00 terealisasi Rp. 75.600.500,00 atau 41,48%.
- 12) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Agama, anggaran Rp. 32.947.800,00 terealisasi Rp. 31.972.800,00 atau 97,04%.



- 13) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemuda dan Olah Raga, anggaran Rp. 184.030.000,00 terealisasi Rp. 75.630.500,00 atau 41,10%.
- 14) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pemberdayaan Masyarakat, anggaran Rp. 182.247.500,00 terealisasi Rp. 74.760.500,00 atau 41,02%.
- 15)Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, anggaran Rp. 836.262.000,00 terealisasi Rp. 725.290.700,00 atau 86,73%.
- 16)Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pekerjaan Umum, Pertambangan, ESDM dan Lingkungan Hidup, anggaran Rp. 397.228.000,00 terealisasi Rp. 287.472.500,00 atau 72,37%.
- 17) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Perencanaan Pembangunan, Perhubungan dan Pariwisata, anggaran Rp. 731.510.000,00 terealisasi Rp. 607.557.000,00 atau 83,06%.
- 18) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran Rp. 24.999.500,00 terealisasi Rp. 21.553.500,00 atau 86,22%.
- 19) Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran Rp. 24.999.500,00 terealisasi Rp. 95.138.000,00 atau 95,14%.
- p. Program Pembinaan Administrasi Umum, alokasi anggaran Rp.2.216.757.500,00, terealisasi Rp.1.849.008.300,00 atau 83,41%. Pada program ini terdapat7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah, anggaran Rp. 183.109.000,00 terealisasi Rp. 176.495.000,00 atau 96,39%.



- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sinergitas Propinsi Jawa Barat, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Monev dan Pembinaan Administrasi Pengadaan Barang, anggaran Rp. 437.402.500,00 terealisasi Rp. 374.963.100,00 atau 85,72%.
- 4) Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Layanan Pengadaan ULP) Kota Cirebon, anggaran Rp. 963.839.500,00 terealisasi Rp. 773.075.200,00 atau 80,21%.
- 5) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Monev dan Pembinaan Administrasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, anggaran Rp. 115.907.500,00 terealisasi Rp. 96.850.000,00 atau 83,56%.
- 6) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Monev dan Pembinaan Administrasi Pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya, anggaran Rp. 144.591.500,00 terealisasi Rp. 142.876.500,00 atau 98,81%.
- 7) Kegiatan Penunjang Keikutsertaan APEKSI, anggaran Rp. 371.907.500,00 terealisasi Rp. 284.748.500,00 atau 76,56%.
- r. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur, alokasi anggaran Rp.69.195.500,00, terealisasi Rp.69.195.500,00 atau 100%. Pada program ini terdapat1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Siraman Rohani, anggaran Rp. 69.195.500,00 terealisasi Rp. 69.195.500,00 atau 100%.
- s. Program Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan, alokasi anggaran Rp.260.922.300,00, terealisasi Rp.223.062.300,00 atau 85,49%. Pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Peribadatan, anggaran Rp. 109.108.800,00 terealisasi Rp. 71.748.800,00 atau 65,76%
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tarhim Romadhon, anggaran Rp. 63.719.500,00 terealisasi Rp. 63.719.500,00 atau 100%.



- 3) Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos untuk Sarana Peribadatan, anggaran Rp. 88.094.000,00 terealisasi Rp. 87.594.000,00 atau 99,43%.
- t. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, alokasi anggaran Rp.961.661.200,00, terealisasi Rp.825.057.200,00 atau 85,79%. Pada program ini terdapat4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Qori dan Qoriah, anggaran Rp. 187.668.100,00 terealisasi Rp. 183.492.100,00 atau 97,77%.
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Cirebon, anggaran Rp. 375.931.500,00 terealisasi Rp. 368.466.500,00 atau98,01%.
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Provinsi, anggaran Rp. 385.008.100,00 terealisasi Rp. 260.045.100,00 atau 67,54%.
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Peserta Bidang Keagamaan Tk. Provinsi Jabar, anggaran Rp. 13.053.500,00 terealisasi Rp. 13.053.500,00 atau 100%.
- u. Program Kerukunan Umat Beragama, alokasi anggaran Rp.991.613.900,00, terealisasi Rp.802.659.500,00 atau 80,94%. Pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan, anggaran Rp. 623.680.400,00 terealisasi Rp. 459.883.000,00 atau 73,74%.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tasyakuran Pemerintah Kota Cirebon, anggaran Rp. 367.933.500,00 terealisasi Rp. 342.776.500,00 atau 93,16%.
- v. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, alokasi anggaran Rp.110.357.000,00, terealisasi Rp.45.809.000,00 atau 41,51%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, anggaran Rp. 110.357.000,00 terealisasi Rp. 45.809.000,00 atau 41,51%.



5.20.4. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 5,640,602,930,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5,154,356,162,00 atau 91,38% untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp. 1,044,636,700,00 terealisasi Rp. 1,024,950,058,00 atau 91,38% digunakan untuk 16 (enam belas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 9,940,000,00 terealisasi Rp. 9,923,000,00 atau 99,83%
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 107,100,000,00 terealisasi Rp. 107,099,532,00 atau 100%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 25,970,000,00terealisasi Rp. 24,605,000,00 atau 94,74%
 - 4) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 29,480,000,00 terealisasi Rp. 21,587,900,00 atau 73,23%
 - 5) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, anggaran Rp. 110,739,900,00 terealisasi Rp. 110,570,000,00 atau 99,85 %
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran Rp. 65,992,000,00 terealisasi Rp. 64,643,480,00 atau 97,96%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 90,250,000,00 terealisasi Rp. 89,515,000, 00 atau 99,19%
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 78,595,000,00 terealisasi Rp. 78,129,000,00 atau 99,41%
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 11,997,400,00 terealisasi Rp. 11,994,750,00 atau 99,98%



- 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 4,801,400,00 terealisasi Rp. 4,679,185,00 atau 97,45%
- 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 32,820,000,00 terealisasi Rp. 30,505,000,00 atau 92,95%
- 12)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 4,575,000,00 terealisasi Rp. 3,550,000,00 atau 77,60%
- 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 86,002,000,00 terealisasi Rp. 82,174,318,00 atau 95,55%
- 14) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 286,119,000,00 terealisasi Rp. 285,719,212,00 atau 99,86%
- 15)Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, anggaran Rp.100,225,000,00 Rp. 100,225,000,00 atau 100%
- 16) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 454,898,150,00 terealisasi Rp. 438,670,094,00 atau 96,43% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp 191,923,750,00 terealisasi Rp. 187,245,000,00 atau 97,56%
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 93,654,800,00 terealisasi Rp. 90,860,050,00 atau 97,02%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 169,319,600,00 terealisasi Rp. 160,565,044,00 atau 94,83%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 61,255,000,00 terealisasi Rp. 60,535,000,00 atau 98,82% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu. anggaran Rp. 61,255,000,00 terealisasi Rp. 60,535,000,00 atau 98,82%
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , alokasi anggaran pada program ini Rp. 21,970,000,00 terealisasi Rp. 20,943,000,00 atau 95,33% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan anggaran Rp. 21,970,000,00 terealisasi Rp. 20,943,000,00 atau 95,33%
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , alokasi anggaran pada program ini Rp. 249,772,000,00 terealisasi Rp. 248,975,000,00 atau 99,68% digunakan untuk untuk 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. anggaran Rp.54,967,500,00 terealisasi Rp. 54,967,500,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun. anggaran Rp. 42,961,000,00 terealisasi Rp. 42,174,000,00 atau 98,17%
 - 3) Kegiatan Monitoring dan evaluasi. anggaran Rp. 64,354,000,00 terealisasi Rp. 64,354,000,00 atau 100%
 - 4) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD, anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
 - 5) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 40,899,500,00 terealisasi Rp. 40,899,500,00 atau 100%
 - 6) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 46,590,000,00 terealisasi Rp. 42,345,000,00 atau 99,98%
- f. Program Pendidikan Kedinasan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 706,105,900,00 terealisasi Rp. 687,697,400,00 atau 97,39%, digunakan untuk 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis , anggaran Rp. 436,587,950,00 terealisasi Rp. 420,606,950,00 atau 96,34%



- 2) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan. anggaran Rp. 45,545,000,00 terealisasi Rp. 45,545,000,00 atau 100%
- 3) Kegiatan Pembuatan Buku Juknis/Juklak , anggaran Rp. 0,00 terealisai Rp. 0,00 atau 0 %
- 4) Kegiatan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme. anggaran Rp. 223,972,950,00 terealisasi Rp. 221,545,450,00 atau 98,92%
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp.1,323,152,500,00 terealisasi Rp. 1,065,495,450,00 atau 79,96%, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah, anggaran Rp. 723,805,950,00 terealisasi Rp. 533,884,550,00 atau 73,76%
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah, anggaran Rp. 514,696,000,00 terealisasi Rp. 449,610,900,00 atau 87,35%
 - 3) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah, anggaran Rp. 94,015,000,00 terealisasi Rp. 82,000,000,00 atau 87,22%
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran pada Program ini Rp. 1,745,994,680,00 terealisasi Rp. 1,583,636,110,00 atau 90,70%, digunakan untuk 13 (tiga belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS , anggaran Rp. 0,00 terealisasi 0,00 atau 0%
 - 2) Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS, anggaran Rp. 144,115,000,00 terealisasi Rp. 118,713,000,00 atau 82,37%
 - 3) Kegiatan Penempatan PNS, anggaran Rp. 180,921,250,00 terealisasi Rp. 172,736,250,00 atau 95,48%



- 4) Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, anggaran Rp.435,813,300,00 terealisasi Rp. 366,997,750,00 atau 84,21%
- 5) Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, anggaran Rp. 69,191,500,00 terealisasi Rp. 63,500,430,00 atau 91,77%
- 6) Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, anggaran Rp. 158,067,000,00 terealisasi Rp. 157,662,000,00 atau 99,74%
- 7) Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, anggaran Rp. 209,412,680, terealisasi Rp. 193,442,680,00 atau 92,37%
- 8) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan diklat, anggara Rp. 27,055,000,00 terealisasi Rp. 27,055,000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Kota Cirebon , anggaran Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 10) Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian, anggaran Rp. 112,719,500,00 terealisasi Rp. 104,383,500,00 atau 92,60%
- 11) Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat , Pensiun dan Inpasing Fungsional Umum/Struktural , anggaran Rp. 92,878,000,00 terealisasi Rp. 89,778,000,00 atau 96,66%
- 12) Pemberkasan dan Penetapan Mutasi Kenaikan Pangkat , Pensiun dan Inpasing Fungsional Tertentu, anggaran Rp. 92,878,000,00 terealisasi Rp. 88,798,000,00 atau 95,61%
- 13) Kegiatan Penyusunan Rencana Penataan PNS, Anggaran Rp. 222,943,450,00 terealisasi Rp. 200,569,500,00 atau 89,96%.
- i. Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur, alokasi anggaran pada Program ini Rp. 23,453,550,00 terealisasi Rp. 23,453,550,00 atau 100%, digunakan untuk (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Rohani Aparatur, anggaran RP. 23,453,550,00 terealisasi Rp. 23,453,550,00 atau 100%.



5.20.5. Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2015,Kecamatan Kejaksan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.701.573.500,00 realisasi Rp.631.056.313,00 atau 89,95% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan sebagai berikut :

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.236.023.500,00 realisasi Rp.208.545.312,00 atau 88,36%, untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.42.600.000,00 realisasi Rp. 34.397.012,00 atau 80,74%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.2.000.000,00 realisasi Rp.1.953.200,00 atau 97,66%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp.52.709.600,00 terealisasi Rp.52.424.000,00 atau 99,46%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 31.012.200,00 terealisasi Rp.30.363.000,00 atau 97,91%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp.11.270.700,00 realisasi Rp. 9.521.100,00 atau 84,48%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp.1.081.000,00 realisasi Rp. 942.000,00 atau 87,14%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp.2.040.000,00 realisasi Rp. 2.000.000,00 atau 98,04%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 78.310.000,00 realisasi Rp. 69650.000,00 atau 88,94%.



- 9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.295.000,00 atau 48,63%.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Alokasi anggaran untuk program inisebesar Rp.331.082.000,00 realisasi Rp.299.845.001,00 atau 97,57% untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.63.068.500,00 realisasi Rp. 62.768.500,00 atau 99,52%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.37.250.000,00 realisasi Rp. 37.250.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 33.443.500,00 terealisasi Rp. 32.770.000,00 atau 97,99%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 89.160.000,00 realisasi Rp. 88.328.000,00 atau 99,07%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 81.480.000,00 realisasi sebesar Rp. 53.802.501,00 atau 66,03%.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 19.820.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.166.000,00 atau96,70%.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 6.860.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.760.000,00 atau83,97%.
- d. Program peningkatan disiplin aparatur. alokasi anggaran pada program ini Rp.27.000.000,00 terealisasi Rp. 26.400.000,00 atau 97,78%, digunakan untuk mendanai 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI, anggaran Rp. 6.000.000,00 terealisasi Rp. 5.850.000,00 atau 97,50%
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp.
 9.000.000,00 terealisasi Rp. 8.850.000,00 atau 98,33%.



- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 12.000.000,00 terealisasi Rp. 11.700.000,00 atau 97,50%
- e. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. alokasi anggaran untuk program ini Rp. 52.258.000,00 terealisasi Rp. 52.015.000,00 atau 99,53%, digunakan untuk mendanai 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 17.124.000,00 terealisasi Rp.17.094.000,000,00 atau 99,82%
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 4.266.000,00 terealisasi Rp. 4.216.000,00 atau 98,83%
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 20.708.000,00 terealisasi Rp. 20.693.000,00 atau 99,93%
 - 4) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD, anggaran Rp. 10.160.000,00 terealisasi Rp. 10.012.000,00 atau 98,54%
- f. Program Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesarRp.55.210.000,00 realisasi Rp.44.251.000,00 atau 80,15% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp.55.210.000,00 realisasi Rp. 44.251.000,00 atau 80,15%

5.20.6. Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2015,Kecamatan Pekalipan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 819,685,600,00 realisasi Rp.697,742,195,00 atau 85,12% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.283,636,600,00 realisasi Rp.214,378,060,00 atau7,58 %, untuk melaksanakan 14(empat belas) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat , anggaran Rp. 15,450,000,00 terealisasi Rp. 14,175,000,00 atau 91,75%
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 56,160,000,00 realisasi Rp. 28,004,910,00atau 49,87%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran sebesar Rp. 7,700,000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.5,500,000,00 terealisasi Rp.1,881,200,00 atau 34,20%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 46,297,000,00 terealisasi Rp. 46,297,000,00 atau 100%
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp. 22,900,000,00 Rp. 12,6920,5055,000,00 atau 89,54%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 9,886,800,00 realisasi Rp. 9,886,800,00 atau 100%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 11,289,600,00 realisasi Rp. 11,289,450,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 9,300,000,00 realisasi Rp. 9,120,000,00 atau 98,06%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp. 14,751,200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12,251,200,00 atau 83,05%.
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 9,360,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,360,000,00 0 atau 100%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran Rp. 1,920,000,00 terealisasi Rp. 1,920.000,00 atau 100%



- 13) Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman Rp. 55,362,000,00 terealisasi Rp. 43,195,500,00 atau 78,02%
- 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah , anggaran Rp. 17.760,000,00 terealisasi Rp. 6.492,000,00 atau 36,55%
- b. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran untuk program ini sebesar Rp. 357,919,000,00 realisasi Rp.315,284,135,00 atau 88,09% untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.207,604,000,00 realisasi Rp. 197,300,000,00 atau 95,04%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 34,665,000,00 terealisasi Rp. 30,860,000,00 atau 89,02 %
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 21,670,000,00 realisasi Rp. 21,155,000,00 atau 97,62%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp 93,980,000,00 realisasi sebesar Rp. 65,968,835,00 atau 70,19%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur. alokasi anggaran pada program ini Rp.16,095,000,00 terealisasi Rp. 16,095,000,00 atau 100%, digunakan untuk mendanai 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp. 9,750,000,00 terealisasi Rp. 9,750,000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 6,345,000,00 terealisasi Rp. 6,345,000,00 atau 100%
- d. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. alokasi anggaran untuk program ini Rp. 101,635,000,00 terealisasi Rp. 91,585,000,00 atau90,11%, digunakan untuk mendanai 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp. 2,690,000,00 terealisasi Rp. 2,690,000,00 atau 100%



- 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 62,220,000,00 terealisasi Rp. 52,920,000,00 atau 85,05%
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 15,960,000,00 terealisasi Rp. 15,960,000,00 atau 100%
- 4) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap , anggaran Rp. 18,450,000,00 terealisasi Rp. 17,700,000,00 atau 95,93%
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesarRp.60,400,000,00 realisasi Rp. 60,400,000,00 atau 100% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan LPTQ Tingkat Kecamatan , anggaran sebesar Rp. 21,550,000,00 realisasi Rp.21,550,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp.38,850,000,00 realisasi Rp.38,850,000,00 atau 100%.

5.20.7. Kecamatan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015,Kecamatan Kesambi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.604.258.900,00 realisasi Rp.579.850.153,00 atau 95,96% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.255.736.900,00 realisasi Rp.243.063.220,00 atau 95,04%, untuk melaksanakan 14(empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.43.041.600,00 realisasi Rp. 37.652.971,00 atau 87,48%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.6.205.000,00 realisasi Rp.6.191.700,00 atau 99,79%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.2.859.000,00 terealisasi Rp.1.662.300,00 atau 58,14%



- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 68.800.000,00 terealisasi Rp.68.110.000,00 atau 99%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp.6.115.000,00 realisasi Rp. 5.635.000,00 atau 92,15%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp.18.457.000,00 realisasi Rp. 18.436.600,00 atau 99,89%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp.6.717.000,00 realisasi Rp. 6.600.400,00 atau 98,25%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 3.383.100,00 realisasi Rp. 3.381.400,00 atau 99,95%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 18.457.000,00 realisasi Rp. 18.436.600,00 atau 99,89%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 2.940.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.940.000,00 atau 100%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 1.400.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 846.000,00 atau 60,43%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 30.326.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.621.600,00 atau 87,78%.
- 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.977.749,00 atau 99,78%.
- 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran sebesar Rp. 47.080.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.599.100,00 atau 98,98%.
- b. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Alokasi anggaran untuk program inisebesar Rp.191.935.200,00 realisasi



Rp.184.633.683,00 atau 96,20% untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 realisasi Rp. 49.530.000,00 atau 99,06%.
- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.56.108.200,00 realisasi Rp. 55.511.000,00 atau 98,94%.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 19.200.000,00 terealisasi Rp. 19.200.000,00 atau 100%
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 66.627.000,00 realisasi Rp. 60.392.683,00 atau 90,64%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur. alokasi anggaran pada program ini Rp.25.680.000,00 terealisasi Rp. 25.680.000,00 atau 100%, digunakan untuk mendanai 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI, anggaran Rp. 5.280.000,00 terealisasi Rp. 5.280.000,00 atau 100 %
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp.
 9.200.000,00 terealisasi Rp. 9.200.000,00 atau 100 %
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 11.200.000,00 terealisasi Rp. 11.200.000,00 atau 100 %
- d. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. alokasi anggaran untuk program ini Rp. 68.757.500,00 terealisasi Rp. 67.169.350,00 atau 97,69%, digunakan untuk mendanai 5(lima) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp.26.230.000,00 terealisasi Rp. 25.323.400,00 atau 96,54%
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp.0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0%



- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 11.510.000,00 terealisasi Rp. 11.485.200,00 atau 99,78%
- 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 19.620.000,00 terealisasi Rp. 19.505.750,00 atau 99,42%
- 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD, anggaran Rp. 11.397.500,00 terealisasi Rp. 10.855.000,00 atau 95,24%
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesarRp.62.149.300,00 realisasi Rp.59.303.900,00 atau 95,42% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - **1)** Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 62.149.300,00 realisasi Rp. 59.303.900,00 atau 95,42%

5.20.8. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015,Kecamatan Lemahwungkuk mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 404,066,500,000,00 realisasi Rp. 362,281,236,00 atau 89,66% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.197,548,500,00 realisasi Rp. 176,164,673,00 atau 89,18%, untuk melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 42,915,000,00 realisasi Rp. 29,991,623,00 atau 69,89%
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.2,000,000,00 realisasi Rp.1,724,900,00 atau 86,25%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp.44,875,000,00 terealisasi Rp.44,275,000,00 atau 98,66%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 28,212,500,00 terealisasi Rp.28,080,400,00 atau 99,53%



- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp.11,960,000,00 realisasi Rp. 11,637,750,00 atau 97,31%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp.3,206,000,00 realisasi Rp. 3,206,000,00 atau 100%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp.7,650,000,00 realisasi Rp. 7,205,000,00 atau 94,18%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 3,600,000,00 realisasi Rp. 3,600,000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 1,560,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,560,000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 42,170,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 40,319,000,00 atau 95,61%.
- 11)Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 9,400,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,565,000,00 atau 48,56%.
- b. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Alokasi anggaran untuk program inisebesar Rp.109,008,000,00 realisasi Rp. 90,308,563,00 atau 82,85% untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 30,788,000,00 realisasi Rp. 30,263,000,00 atau 98,29%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 70,855,000,00 realisasi Rp. 52,680,563,00 atau 74,35%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 7,365,000,00 realisasi Rp. 7,365,000,00 atau 100%.



- c. Program peningkatan disiplin aparatur. alokasi anggaran pada program ini Rp.14,300,000,00 terealisasi Rp. 14,300,000,00 atau 100%, digunakan untuk mendanai 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 14,300,000,00 terealisasi Rp. 14,300,000,00 atau 100%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. alokasi anggaran untuk program ini Rp. 24,825,000,00 terealisasi Rp. 24,823,000,00 atau 99,99%, digunakan untuk mendanai3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 8,675,000,00 terealisasi Rp. 8,675,000,00 atau 100 %
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 1,450,000,00 terealisasi Rp. 1,448,000,00 atau 99,86%
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 14,700,000,00 terealisasi Rp. 14,700,000,00 atau 100%
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesarRp. 58,385,000,00 realisasi Rp. 56,685,000,00 atau 97,09% untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan Qori dan Qoriah, anggaran sebesar Rp.13,000,000,00 realisasi Rp.13,000,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp.45,385,000,00 realisasi Rp. 43,685,000,00 atau 96,25%.

5.20.9. Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Harjamukti mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 508,849,950,00 realisasi Rp.487,612,931,00 atau 95,83% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan sebagai berikut :



- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.206,441,400,00 realisasi Rp.176,569,613,00 atau 85,53%, untuk melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp. 1,800,000,00 realisasi Rp. 1,800,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 20.400.000,00 realisasi Rp. 16,759,113,00 atau 82,15%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran sebesar Rp. 8,600,000,00 terealisasi Rp. 8,596,000,00 atau 99,95%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 6,600,000,00 terealisasi Rp. 1,763,800,00 atau 26,72 %
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 64,290,000,00 realisasi Rp. 64,262,028,00 atau 99,96%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp. 14,100,000,00 realisasi Rp. 13,890,000,00 atau 98,51%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 20,362,000,00 realisasi Rp. 20,228,300,00 atau 99,34%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 5,880,,000,00 realisasi Rp. 5,879,400,00 atau 99,99%
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 4,635,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,635,000,00 atau 100%.
 - 10)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran sebesar Rp. 8,284,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,284,000,00 atau 100%.
 - 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp. 3,600,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,600,000,00 atau 100%.



- 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran sebesar Rp. 900,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 421,650,00 atau 46,85%.
- 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp. 85,370,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 84,809,400,00 atau 99,34%.
- 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 15,300,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12,770,000,00 atau 83,46%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 143,123,300,00 realisasi Rp.134,934,240,00 atau 94,28% untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 59,500,000,00 terealisasi Rp 59,500,000,00 atau 100%
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 73,720,000,00 terealisasi Rp. 65,676,000,00 atau 89,09%.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 1,250,000,00 terealisasi Rp. 1,250,000,00 atau 100 %.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 8,653,300,00 terealisasi Rp. 8,508,240,00 atau 98,32%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 13,300,000,00 realisasi Rp.13,300,000,00 atau 100% untuk melaksanakan 2(dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran sebesar Rp. 6.650.000,00 realisasi Rp. 6.650.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran sebesar Rp.6.650.000,00 realisasi Rp. 6.650.000,00 atau 100%.



- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. alokasi anggaran pada program ini Rp. 47.880.000,00 terealisasi Rp. 47.880.000,00 atau 100%, digunakan untuk mendanai 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran sebesar Rp. 27.740.000,00 terealisasi Rp. 27.740.000,00 atau 100 %.
 - 2) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD, anggaran sebesar Rp. 20.140.000,00 terealisasi Rp. 20.140.000,00 atau 100%.
- e. Program Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur. alokasi anggaran untuk program ini Rp. 7.885.000,00 terealisasi Rp. 7.260.000,00 atau 92,07%, digunakan untuk mendanai 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan rohani aparatur, anggaran Rp. 7.885.000,00 terealisasi Rp. 7.260.000,00 atau 92,07%.
- f. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesarRp. 36.540.000,00 realisasi Rp.36.540.000,00atau 100% untuk melaksanakan1(satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan, anggaran sebesar Rp. 36.540.000,00 realisasi Rp. 36.540.000,00 atau 100%.

5.20.10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk urusan otonomi darerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.17.235,006,426,00 realisasi Rp.15.730.126.979,00 atau 91,27% untuk melaksanakan 11 (sebelas) program dan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.093.443.500,00 realisasi Rp.1.956.974.213,00atau 93,48%, untuk melaksanakan 16(enambelas) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran sebesar Rp.4.650.000,00 realisasi Rp. 3.558.000,00 atau 76,52%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.264.000.000,00 realisasi Rp.207.715.602,00 atau 78,68%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran sebesar Rp.72.515.000,00 terealisasi Rp.66.155.860,00 atau 91,23%
- 4) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, anggaran Rp. 18.250.000,00 terealisasi Rp.11.961.300,00 atau 65,54%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp.204.702.200,00 realisasi Rp. 204.462.200,00 atau 99,88%.
- 6) Kegiatan Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran sebesar Rp.95.295.000,00 realisasi Rp. 93.465.000,00 atau 98,08%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp.203.734.600,00 realisasi Rp. 203.148.000,00 atau 99,71%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 191.639.500,00 realisasi Rp. 190.436.000,00 atau 99,37%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 5.529.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.363.000,00 atau 78,90%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.457.600,00 realisasi Rp. 768.300,00 atau 31,26%.
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran sebesar Rp.61.740.000,00 realisasi Rp.43.525.000,00 atau 70,50%.
- 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor, anggaran sebesar Rp.1.530.000,00 realisasi Rp. 569.000,00 atau 37,19%.



- 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran sebesar Rp.152.260.000,00 realisasi Rp. 131.325.875,00 atau 86,25%.
- 14) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran sebesar Rp. 559.640.000,00 realisasi sebesar Rp. 540.261.176,00 atau 96,54%.
- 15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 212.190.000.00 terealisasi Rp. 211.950.000,00 atau 99,89%
- 16) Kegiatan Penataan Dokumen Arsip Kantor/Dinas/Badan/Sekretariat, anggaran Rp. 43.309.900,00 terealisasi Rp. 43.309.900,00 atau 100%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi anggaran untuk program inisebesar Rp.2.084.057.076,00 realisasi Rp.1.822.789.386,00 atau 87,46% untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp.450.680.000,00 realisasi Rp. 432.235.000,00 atau 95,91%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp.773.890.076,00 realisasi Rp. 768.755.000,00 atau 99,34%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 355.887.000,00 terealisasi Rp. 328.333.500,00 atau 92,26%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran sebesar Rp. 355.887.000,00 realisasi Rp. 328.333.500,00 atau 92,26%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 421.080.000,00 realisasi sebesar Rp. 211.865.586,00 atau 50,31%.
 - 6) Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas Jabatan, anggaran sebesar Rp. 82.520.000,00 realisasi sebesar Rp. 81.600.300,00 atau 98,33%.



- c. Program peningkatan disiplin aparatur. alokasi anggaran pada program ini Rp.115.060.000,00 terealisasi Rp. 113.136.500,00 atau 98,33%, digunakan untuk mendanai 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp. 36.995.000,00 terealisasi Rp. 35.471.500,00 atau 95,88%
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 78.065.000,00 terealisasi Rp. 77.665.000,00 atau 99,49%
- d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. alokasi anggaran untuk program ini Rp. 55.000.000,00 terealisasi Rp. 19.300.000,00 atau 35,09%, digunakan untuk mendanai 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. . 55.000.000,00 terealisasi Rp. 19.300.000,00 atau 35,09%. 55.000.000,00 terealisasi Rp. 19.300.000,00 atau 35,09%
- e. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.849.548.150,00 realisasi Rp.806.598.150,00 atau 94,94% untuk melaksanakan5(lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp.369.876.500,00 realisasi Rp.332.034.500,00 atau 89,77%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, anggaran sebesar Rp. 314.234.000,00 realisasi Rp. 313.526.000,00atau 99,77%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 29.782.500,00 realisasi Rp. 29.782.500,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran sebesar Rp. 65.880.150,00 realisasi Rp. 65.880.150,00 atau 100%
 - 5) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD, anggaran sebesar Rp. 69.775.000,00 realisasi Rp. 65.375.000,00 atau 93,69%



- g. Program Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.386.424.300,00 realisasi Rp.1.109.904.100,00 atau 80,06,00% untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah, anggaran Rp. 504.634.500,00 terealisasi Rp. 353.105.000,00 atau 69,97%
 - 2) Kegiatan Peningkatan manajemen investasi asset daerah, anggaran Rp. 67.202.000,00 terealisasi Rp. 52.301.500,00 atau 77,83%
 - 3) Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang daerah, anggaran Rp. 105.224.000,00 terealisasi Rp. 101.254.600,00 atau 96,23%
 - 4) Kegiatan Sistem Integrasil aset/barang daerah, anggaran Rp. 286.057.800,00 terealisasi Rp. 233.097.000,00 atau 81,49%
 - 5) Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset, anggaran Rp. 248.356.000,00 terealisasi Rp. 226.921.000,00 atau 91,37%
 - 6) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset/Barang Daerah, anggaran Rp. 248.356.000,00 terealisasi Rp. 143.225.000,00 atau 81,87%
- h. Program Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.358.920.500,00 realisasi Rp.4.258.724.650,00 atau 97,70% untuk melaksanakan 9(sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah, anggaran sebesar Rp.414.949.000,00 realisasi Rp. 413.649.500,00 atau 99,69%.
 - 2) Kegiatan Monitoring Penerimaan Pajak daerah, anggaran sebesar Rp. 159.468.000,00 realisasi Rp. 157.531.000,00 atau 98,79%.
 - 3) Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Daerah, anggaran Rp. 297.710.000,00 terealisasi Rp. 297.410.000,00 atau 99,90%
 - 4) Kegiatan Penataan Reklame, anggaran Rp.591.669.000,00 terealisasi Rp. 574.325.000,00 atau 97,07%



- 5) Kegiatan Penelitian Pelaporan Pajak Daerah (SPTPD), anggaran Rp.331.176.000,00 terealisasi Rp. 327.980.000,00 atau 99,03%
- 6) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Pendapatan Asli Daerah, angaran sebesar Rp. 399.227.000,00 realisasi Rp. 386.482.650,00 atau 96,81%.
- Kegiatan Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, anggaran Rp. 969.971.500,00 terealisasi Rp. 935.906.500,00 atau 96,49%
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Basis Data PBB, anggara Rp. 615.445.000,00 terealisasi Rp. 593.975.000,00 atau 98,65%
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi SIMPBB, anggaran Rp. 615.445.000,00 terealisasi Rp. 593.975.000,00 atau 98,65%
- i. Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.3.129.594.400,00 realisasi Rp.2.739.873.700,00 atau 87,55% untuk melaksanakan 15(limabelas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi Penelitian RKA SKPD, anggaran sebesar Rp.295.425.850,00 realisasi Rp. 277.323.500,00 atau 93,87%.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Penelitian DPA SKPD, anggaran sebesar Rp. 292.152.250,00 realisasi Rp. 252.899.500,00 atau 86,56%.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Penelitian DPA Perubahan SKPD, anggaran sebesar Rp. 260.551.000,00 realisasi Rp. 244.157.000,00 atau 93,87%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan Perubahannya, anggaran Rp. 92.017.500,00 terealisasi Rp. 6134500061.345.000,00 atau 66,67%
 - 5) Kegiatan Penerbitan Surat Penyediaan dana (SPD), anggaran Rp.151.650.000,00 terealisasi Rp. 119.135.000,00 atau 78,56%



- 6) Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan APBD Berbasis SIMDA, anggaran Rp.222.572.000,00 terealisasi Rp. 154.496.400,00 atau 69,41%
- 7) Kegiatan Fasilitasi Tim Pertimbangan rekomendasi Bantuan Sosial dan Hibah, angaran sebesar Rp. 229.869.600,00 realisasi Rp. 196.054.000,00 atau85,29%.
- 8) Kegiatan Penatausahaan Administrasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Lainnya, anggaran Rp. 335.862.500,00 terealisasi Rp. 328.077.500,00 atau 97,68%
- 9) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Bendaharawan, anggara Rp. 123.973.200,00 terealisasi Rp. 108.362.000,00 atau 87,41%
- 10) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai, anggaran Rp. 187.304.000,00 terealisasi Rp.180.032.500,00 atau 96,12%
- 11) Kegiatan Pembekalan dan Rekonsiliasi Belanja Pegawai, anggaran Rp. 214.435.000,00 terealisasi Rp. 209.040.500,00 atau 97,48%
- 12) Kegiatan Penyusunan Buku Perkembangan APBD, anggaran Rp. 88.407.500,00 terealisasi Rp. 86.293.800,00 atau 97,61%
- 13) Kegiatan Fasilitasi Dana-Dana Transfer (Provinsi dan Pusat), anggaran Rp. 272.602.000,00 terealisasi Rp. 188.558.500,00 atau 69,17%
- 14) Kegiatan Fasilitasi Penelitian RKA Perubahan SKPD, anggaran Rp. 259.501.000,00 terealisasi Rp. 231.789.500,00 atau 89,32%
- 15) Kegiatan Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah, anggaran Rp. 103.271.000,00 terealisasi Rp.102.309.000,00 atau 99,07%
- j. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.285.310.500,00 realisasi Rp.1.226.622.325,00 atau 95,43% untuk melaksanakan 7(tujuh) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD, anggaran sebesar Rp.134.247.000,00 realisasi Rp. 121.299.500,00 atau 90,36%.
- 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, anggaran sebesar Rp. 139.682.000,00 realisasi Rp. 128.619.500,00 atau 92,08%.
- 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, anggaran sebesar Rp. 129.827.000,00 realisasi Rp. 122.617.000,00 atau 94,45%.
- 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, anggaran Rp. 300.759.500,00 terealisasi Rp. 287.754.325,00 atau 95,68 %
- Kegiatan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota, anggaran Rp.193.248.000,00 terealisasi Rp. 187.415.000,00 atau 96,98%
- 6) Kegiatan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran **APBD** Rp.211.488.000,00 Kabupaten/Kota, terealisasi Rp. anggaran 204.878.000,00 atau 96,87%
- Kegiatan Penyusunan Rencana Peraturan Tentang Keuangan Daerah, anggaran Rp. 176.059.000,00 terealisasi Rp. 174.039.000,00 atau 98,85%
- k. Program Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.243.833.000,00 realisasi Rp.1.050.522.455,00 atau 84,46% untuk melaksanakan 3(tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, anggaran sebesar Rp. 665.265.000,00 realisasi Rp. 524.092.000,00 atau 78,78%.



- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Penatausahaan Keuangan, anggaran sebesar Rp. 218.568.000,00 realisasi Rp. 179.945.000,00 atau 82,33%.
- 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah, anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 realisasi Rp. 346.485.455,00 atau 96,25%.
- I. Program peningkatan Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban APBD. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.633.815.000,00 realisasi Rp.625.681.500,00 atau 98,72% untuk melaksanakan 3(tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, anggaran sebesar Rp.120.066.000,00 realisasi Rp. 119.716.000,00 atau 99,71%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD, anggaran sebesar Rp. 272.329.000,00 realisasi Rp. 264.949.000,00 atau 97,29%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun Kota Cirebon, anggaran sebesar Rp. 241.420.000,00 realisasi Rp. 241.016.500,00 atau 99,83%.

5.20.11.Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 11.220.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.638.388.733,00 atau 94,81% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 27 (duapuluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp.729.350.000,00 dengan realisasi sebesar



Rp.569.185.235,00 atau 78,04% digunakan untuk 12 (duabelas) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 2.700,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.700.000,00 atau 100%.
- **2)** Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 218.400,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 125.090.575,00 atau 57,28%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.38,500,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.777.000,00 atau 7,21%.
- **4)** Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 116.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 112.650.000,00 atau 96,97%.
- **5)** Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 46.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.060,000,00 atau 98,57%.
- **6)** Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 39.275,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.970,000,00 atau 81,40%.
- **7)** Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 28.970,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.570,000,00 atau 98,62%.
- **8)** Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 6.235,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.235,000,00 atau 100%.
- **9)** Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 41.400,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.062,000,00 atau 60,54%.
- **10)** Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 3.600,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.595,000,00 atau 99,86%.



- **11)** Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.130.870,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 128.910,000,00 atau 98,50%.
- **12)** Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 56.500,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.565.660,00 atau 98,35%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 3.043.590.420,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.961.363.498,00 atau 97,30% digunakan untuk 6 (enam) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, anggaran Rp. 900.000.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 885.449.500,00 atau 98,38%
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 1.155.619.920,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.144.577.920,00 atau 99,04%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 754.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 716.057.078,00 atau 94,94%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 16.100,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.750,000,00 atau 41,93%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 17.650,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.200,000,00 atau 52,12%.
 - 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, anggaran Rp.200,000,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.199.329,000,00 atau 99,68%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 407.695.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 399.970,000,00 atau 98,11% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:



- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, anggaran Rp.150.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.147.270.000,00 atau 97,60%.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp.128.930,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.126.730,000,00 atau 98,29%
- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp.127.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.125.970,000,00 atau 98,51%.
- d. Program Penanggulangan Bancana, alokasi anggaran pada program ini Rp. 669.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 632.670.000,00 atau 94,53% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan koordinasi penanggulangan bencana.
- e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 3.527.215.580,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.421.310.000,00 atau 97,00% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran, anggaran Rp. 103.182.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.100.372.500,00 atau 97,28%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, anggaran Rp.2.867.783.080,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.846.032.500,00 atau 99,24%.
 - 3) Kegiatan Pelayanan Pemadam Kebakaran di Luar Jam Kerja, anggaran Rp.556.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.474.896.000,00 atau 85,37%.
- f. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 2.843.697.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.653.899.000,00 atau 93,33% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:



- 1) Kegiatan dana alokasi khusus sarana dan prasarana pemadam kebakaran, anggaran Rp. 2.820.774.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.632.929.000,00 atau 93,34%.
- 2) Kegiatan pendamping dana alokasi khusus sarana dan prasarana pemadam kebakaran, anggaran Rp. 22.922.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.970.000,00 atau 91,48%.

5.20.12.Kelurahan Kejaksan

Kelurahan Kejaksan pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.307.778.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.293.583.236,00 atau 95,39% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp.133.328.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.125.723.059,00 atau 94,30% digunakan untuk 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:
 - **1)** Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp.27.600.000,00 dengan realisasi Rp.23.231.859,00 atau 84,17%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.627.300,00 atau 66,73%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp.22.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.650.000,00 atau 100%.
 - **4)** Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp.10.353.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.533.000,00 atau 92,08%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp.6.406.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.626.900,00 atau 87,82%.



- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp.7.171.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.171.000,00 atau 100%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp.7.970.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.885.000,00 atau 98,93%.
- 8) KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp.13.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.632.000,00 atau 100%.
- 9) KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.720.000,00 atau 100%.
- **10)** KegiatanPenyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.11.236.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.236.000,00 atau 100%.
- **11)** KegiatanRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp.2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.760.000,00 atau 38%.
- **12)** KegiatanPenyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp.22.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.650.000,00 atau 100%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp.74.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.525.177,00 atau 93,05% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.18.340.000,00 dengan realisasi Rp.18.115.000,00 atau 98,77%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.31.440.000,00 dengan realisasi Rp.30.620.000,00 atau 97,39%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp.2.680.000,00 dengan realisasi Rp.2.680.000,00 atau 100%.



- **4)** Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.17.060.000,00 dengan realisasi Rp.14.410.177,00 atau 84,47%.
- **5)** Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.5.200.000,00 dengan realisasi Rp.3.700.000,00 atau 71,15%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 16.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.200.000,00 atau 100% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - **1)** Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp.6.600.000,00 dengan realisasi Rp.6.600.000,00 atau 100%.
 - **2)** Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp.9.600.000,00 dengan realisasi Rp.9.600.000,00 atau 100%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 57.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.56.560.000,00 atau 98,19% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp.4.160.000,00 dengan realisasi Rp.3.720.000,00 atau 89,42%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp.1.860.000,00 dengan realisasi Rp.1.860.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp.15.000.000,00 dengan realisasi Rp.14.800.000,00 atau 98,67%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD, anggaran Rp.36.580.000,00 dengan realisasi Rp.36.180.000,00 atau 98,91%.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 25.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.575.000,00 atau 98,63% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:



3) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan, anggaran Rp.. 25.930.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.575.000,00 atau 98,63%.

5.20.13. Kelurahan Kebon Baru

Kelurahan Kebon Barupada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.275.169.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.246.236.576,00 atau 89,49% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp.99.094.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.89.038.917,00 atau 89,85% digunakan untuk 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp.990.000,00 dengan realisasi Rp.990.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp.20.700.000,00 dengan realisasi Rp.17.295.967,00 atau 83,56%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.1.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.822.500,00 atau 68,54%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp.23.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.705.000,00 atau 94,27%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp.10.831.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.451.250,00 atau 96,49%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp.6.708.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.015.200,00 atau 89,67%.



- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp.1.777.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.694.500,00 atau 95,36%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp.3.735.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.367.500,00 atau 90,16%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp.13.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.632.000,00 atau 100%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.480.000,00 atau 72,73%.
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.11.256.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.845.000,00 atau 96,35%.
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp.4.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.740.000,00 atau 37,99%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program iniRp.92.757.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.84.549.259,00 atau 91,15% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.16.416.000,00 dengan realisasi Rp.15.927.500,00 atau 97,02%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.33,059,500,00 dengan realisasi Rp.32.554.400,00 atau 98,47%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp.15.789.000,00 dengan realisasi Rp.15.545.500,00 atau 98,46%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.23.030.000,00 dengan realisasi Rp.17.696.859,00 atau 76,84%.



- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.4.463.000,00 dengan realisasi Rp.2.825.000,00 atau 63,30%.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.920.000,00 atau 92,80% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp.6.000.000,00 dengan realisasi Rp.6.000.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp.9.000.000,00 dengan realisasi Rp.7.920.000,00 atau 88%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 58.115.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.48.726.400,00 atau 83,84% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp.34.785.000,00 dengan realisasi Rp.25.880.900,00 atau 74,40%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp.5.170.000,00 dengan realisasi Rp.5.133.400,00 atau 99,29%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp.18.160.000,00 dengan realisasi Rp.17.712.100,00 atau 97,53%.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 10.202.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.002.000,00 atau 98,03% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembinaan Qori dan Qoriah, anggaran Rp. 10.202.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.002.000,00 atau 98,03%.

5.20.14. Kelurahan Kesenden

Kelurahan Kesendenpada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.303.525.500,00 dengan realisasi



sebesar Rp.276.640.872,00 atau 91,14% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp.101.215.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.87.933.475,00 atau 86,88% digunakan untuk 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp.600.000,00 dengan realisasi Rp.516.000,00 atau 86%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp.15.600.000,00 dengan realisasi Rp.8.279.575,00 atau 53,07%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.627.300,00 atau 66,73%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp.26.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.165.000,00 atau 90,62%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp.7.763.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.763.500,00 atau 100%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp.9.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.400.000,00 atau 94,95%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp.2.438.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.435.000,00 atau 99,88%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp.1.504.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.504.000,00 atau 100%.



- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp.20.448.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.448.000,00 atau 100%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.480.000,00 atau 100%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.11.517.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.517.000,00 atau 100%.
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp.3.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.050.000,00 atau 31,82%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp.97.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.85.827.397,00 atau 87,61% digunakan untuk 6 (enam) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.18.200.000,00 dengan realisasi Rp.17.775.000,00 atau 97,66%.
 - **2)** KegiatanPengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp.30.194.000,00 dengan realisasi Rp.30.094.000,00 atau 99,67%.
 - **3)** KegiatanPengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.27.790.000,00 dengan realisasi Rp.27.040.000,00 atau 97,30%.
 - **4)** Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp.17.766.000,00 dengan realisasi Rp.9.738.397,00 atau 54,81%.
 - **5)** KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp.1.460.000,00 dengan realisasi Rp.1.080.000,00 atau 73,97%.
 - **6)** Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp.2.550.000,00 dengan realisasi Rp.100.000,00 atau 3,92%.



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 12.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.125.000,00 atau 100% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran Rp.2.500.000,00 dengan realisasi Rp.2.500.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp.3.850.000,00 dengan realisasi Rp.3.850.000,00 atau 100%.
 - **3)** Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp.5.775.000,00 dengan realisasi Rp.5.775.000,00 atau 100%.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 62.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.62.205.000,00 atau 99,17% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp.3.720.000,00 dengan realisasi Rp.3.720.000,00 atau 100%.
 - 2) KegiatanPenyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, anggaran Rp.2.640.000,00 dengan realisasi Rp.2.640.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp.3.740.000,00 dengan realisasi Rp.3.740.000,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp.19.775.000,00 dengan realisasi Rp.19.775.000,00 atau 100%.
 - 5) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD, anggaran Rp.32.850.000,00 dengan realisasi Rp.32.330.000,00 atau 98,42%.
- e. Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 29.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.550.000,00 atau 96,78% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu:



1)Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan, anggaran Rp.. 29.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.28.550.000,00 atau 96,78%

5.20.15. Kelurahan Sukapura

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Sukapura mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 281,703,900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 279,048,023,00 atau 99,06% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 105,464,900,00 realisasi Rp. 104,988,687,00 atau 99,55%, untuk melaksanakan10 (sepuluh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.13,800,000,00 realisasi Rp. 13,435,440,00 atau 97,36%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 450,000,00 realisasi Rp. 441,000,00 atau 98,01%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , anggaran sebesar Rp. 20,200,000,00 realisasi Rp. 20,200,000,00 atau 100 %
 - 4) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 7,305,500,00 realisasi 7,305,300,00 atau 100%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp. 14,102,400,00 realisasi Rp. 14,092,391 atau 99,93%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar 1,522,000,00 realisasi 1,510,000,00 atau 99,21%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 2,328,000,00 realisasi Rp. 2,326,000,00 atau 99,91%



- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 18,744,000,00 realisasi Rp. 18,744,000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 420,000,00 realisasi Rp. 415,000,00 atau 98,81%
- 10)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp.26,20,000,00 realisasi Rp. 26,519,500,00 atau 99,72%
- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 63,820,000,00 realisasi Rp. 62,150,336,00 atau9 97,36%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 17,275,000,00 realisasi Rp. 16,125,000,00 atau 93,34%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 29,050,000,00 realisasi Rp. 28,550,000,00 atau 98,28%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 10,845,000,00 realisasi Rp. 10,825,336,00 atau 99,82%
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 6,650,000,00 realisasi Rp. 6,650,000,00 atau 100%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18,600,000,00 realisasi Rp. 18,600,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri , anggaran sebesar Rp. 4,200,000,00 realisasi Rp. 4,200,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu , anggaran sebesar Rp. 4.800,000,00 realisasi Rp. 4,800,000,00 atau 100%



- 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 9.627,000,00 realisasi Rp. 9,627,000,00 atau 100%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 33,386,500,00 realisasi Rp. 33,386,500,00 atau 100%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 9,627,000,000,000 realisasi Rp. 9,627,000,000 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 6,275,000,00 realisasi Rp. 6,275,000,00 atau 100%.
- e. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 23,602,500,00 realisasi Rp. 23,602,500,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 23,602,500,00 realisasi Rp. 23,602,500,00 atau 100%
- f. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 36,830,000,00 realisasi Rp. 36,320,000,00 atau 98,62% , untuk melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik , anggaran sebesar Rp. 36,830,000,00 realisasi Rp. 36,320,000,00 atau 98,62%

5.20.16. Kelurahan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kesambi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 343,790,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 336,989,700,00 atau 98,05% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 104,769,500,00 realisasi Rp. 103,823,526,00 atau 99,55%, untuk melaksanakan12 (dua belas) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat , anggaran sebesar Rp. 1,200,000,00 realisasi Rp. 1,200,000,00 atau 100%
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.14,400,000,00 realisasi Rp. 13,902,176,00 atau 96,54%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 950,000,00 realisasi Rp. 893,300,00 atau 94,03%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 23,606,000,00 realisasi Rp. 23,510,000,00 atau 99,59 %
- 5) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 11,105,000,00 realisasi 11,105,000,00 atau 100%
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp. 8,160,000,00 realisasi Rp. 8,134,550 atau 99,69%
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar 2,033,500,00 realisasi 2,033,500,00 atau 100%
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 2,478,000,00 realisasi Rp. 2,478,000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 14,400,000,00 realisasi Rp. 14,371,000,00 atau 199,80%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 1,800,000,00 realisasi Rp. 1,770,000,00 atau 98,33%
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 19,987,000,00 realisasi Rp. 19,981,000,00 atau 99,97%
- 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah , anggaran sebesar Rp. 4,650,000,00 realisasi Rp. 4,445,000,00 atau 95,59%



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 134,908,000,00 realisasi Rp. 129,161,674,00 atau 99,55%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 18,111,000,00 realisasi Rp. 18,111,000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 88,171,000,00 realisasi Rp. 86,149,000,00 atau 97,11%
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 22,480,000,00 realisasi Rp. 19,391,674,00 atau 86,26%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 5,600,000,00 realisasi Rp. 5,510,000,00 atau 98,39%
 - 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 6,650,000,00 realisasi Rp. 6,650,000,00 atau 100
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18,600,000,00 realisasi Rp. 18,600,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri , anggaran sebesar Rp. 4,200,000,00 realisasi Rp. 4,200,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu , anggaran sebesar Rp. 3,600,000,00 realisasi Rp. 3,600,000,00 atau 100%
 - 3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 9,600,000,00 realisasi Rp. 9,600,000,00 atau 100%
- d.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.



35,299,500,00 realisasi Rp. 35,272,500,00 atau 99,92%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 14,442,000,000,00 realisasi Rp. 14,415,000,00 atau 99,81%.
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 3,587,500,00 realisasi Rp. 3,587,500,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya , anggaran sebesar Rp. 17,270,000 realisasi Rp. 17,270,000,00 atau 100%
- e. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42,542,000,00 realisasi Rp. 42,542,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 42,542,000,00,00 realisasi Rp. 42,542,000,00atau 100%
- f. Program Kerukunan Umat Beragama , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8,790,000,00 realisasi Rp. 8,790,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu
 - 1) Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan , anggaran sebesar Rp. 8,790,000,00 realisasi Rp. 8,790,000,00 atau 100% .

5.20.17. Kelurahan Sunyaragi

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Sunyaragi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 315,219,200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 299,474,644,00 atau 95,01% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan27 (dua puluh tujuhkegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 158,158,300,00 realisasi Rp. 146,583,499,00 atau 92,68%, untuk melaksanakan13 (tigabelas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat , anggaran sebesar Rp. 600,000,00 realisasi Rp. 600,000,00 atau 100%



- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.16,800,000,00 realisasi Rp. 14,058,499,00 atau 83,68%.
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 1,200,00,00 realisasi Rp. 714,000,00 atau 59,58%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , anggaran sebesar Rp. 43,950,000,00 realisasi Rp. 43,806,000,00 atau 99,67 %
- 5) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 10,432,000,00 realisasi Rp. 10,432,000,00 atau 100%
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp. 8,760,000,00 realisasi Rp. 8,684,100,00 atau 99,13%
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar 9,789,000,00 realisasi Rp. 3,588,800,00 atau 36,66%
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 5,295,000,00 realisasi Rp. 5,294,500,00 atau 99,99%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 21,600,000,00 realisasi Rp. 21,600,000,00 atau 100%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp.720,000,00 realisasi Rp. 720,000,00 atau 100%
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 14,262,000,00 realisasi Rp. 14,254,400,00 atau 99,95%
- 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah , anggaran sebesar Rp. 2,400,000,00 realisasi Rp. 600,000,00 atau 25%
- 13) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor , anggaran sebesar Rp. 22,350,000,00 realisasi Rp. 22,230 000,00 atau 99,46%



- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 86,745,500,00 realisasi Rp. 86,178,000,00,00 atau 99,35%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pengadaan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 17,275,000,00 realisasi Rp. 16,125,000,00 atau 93,34%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 29,050,000,00 realisasi Rp. 28,550,000,00 atau 98,28%
 - 3). Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
 - 4) ,Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 10,845,000,00 realisasi Rp. 10,825,336,00 atau 99,82%
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 6,650,000,00 realisasi Rp. 6,650,000,00 atau 100%
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18,600,000,00 realisasi Rp. 18,600,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu
 - 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri , anggaran sebesar Rp. 4,440,000,00 realisasi Rp. 4,440,000,00 atau 100%.
 - 2). Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu , anggaran sebesar Rp. 7,056,000,00 realisasi Rp.7,056,000,00 atau 100%
 - 3). Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 4,560,000,00 realisasi Rp. 4,560,000,00 atau 100%
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 26,967,400,00 realisasi Rp. 25,700,000,00 atau 95,30%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:



- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 6,429,900,00 realisasi Rp. 6,180,000,00 atau 96,11%.
- 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun , anggaran sebesar Rp. 2,050,000,00 realisasi Rp. 1,975,000,00 atau 96,34 %
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 2,807,500,00 realisasi Rp. 2,807,500,00 atau 100%.
- 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya , anggaran sebesar Rp. 12,450,000,00 realisasi Rp. 11,895,000,00 atau 95,54%
- 5) Penyusunan SOP dan SPM SKPD , anggaran sebesar Rp. 3,230,000,00 realisasi Rp. 2,842,500,00 atau 88,00%
- f. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 27,292,000,00 realisasi Rp. 24,957,145,00 atau 91,44% , untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 27,292,000,00 realisasi Rp. 24,957,145,00 atau 91,44%

5.20.18. Kelurahan Drajat

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Drajat mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 364,032,600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 328,882,685,00 atau 90,34% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 127,067,600,00 realisasi Rp. 112,439,603,00 atau 88,49% , untuk melaksanakan11 (sebelas) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.15,600,000,00 realisasi Rp. 9,326,403,00 atau 59,78%.



- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 1,300,000,00 realisasi Rp. 574,200,00 atau 44,17%
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 42,635,000,00 realisasi Rp. 42,561,500,00 atau 98,83 %
- 4) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 14,985,900,00 realisasi Rp. 14,985,900,00 atau 100%
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp. 4,877,400,00 realisasi Rp. 3,367,300,00 atau 69,04%
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar Rp, 2,470,000,00 realisasi Rp, 2,470,000,00 atau 100%
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 3,840,000,00 realisasi Rp. 3,838,800,00 atau 99,96%
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 17,040,000,00 realisasi Rp. 17,040,000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 1,800,000,00 realisasi Rp. 1,650,000,00 atau 91,67%
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 17,040,000,00 realisasi Rp. 17,040,000,00 atau 100%
- 11) Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah , anggaran sebesar Rp. 4,940,000,00 realisasi 1,490,000,00 atau 30,16%
- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 63,820,000,00 realisasi Rp. 62,150,336,00 atau9 97,36%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 145,646,000,00 realisasi Rp. 132,931,682,00 atau 91,27%



- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 83,475,000,00 realisasi Rp. 82,230,000,00 atau 98,51%
- 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 2,968,000,00 realisasi Rp. 2,968,000,00 atau 100%
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 23,616,000,00 realisasi Rp. 14,756,182,00 atau 62,48%
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 2,820,000,00 realisasi Rp. 2,740,000,00 atau 97,16%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18,720,000,00 realisasi Rp. 17,112,000,00 atau 91,41%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri , anggaran sebesar Rp. 4,901,000,00 realisasi Rp. 4,440,000,00 atau 90,59%.
 - 2). Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu , anggaran sebesar Rp. 8,918,000,00 realisasi Rp. 8,232,000,00 atau 92,31%
 - 3). Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 4,901,000,00 realisasi Rp. 4,440,000,00 atau 90,59%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32,246,500,00 realisasi Rp. 30,216,400,00 atau 93,70%, untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 15,456,000,000,00 realisasi Rp. 15,193,500,00 atau 98,30%.
 - 2). Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 2,618,000,00 realisasi Rp. 2,538,000,00 atau 96,94%
 - 3). Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 2,500,000,00 realisasi Rp. 2,448,000,00 atau 97,90%.



- 4). Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya , anggaran sebesar Rp. 11,672,000,00 realisasi Rp. 10,036,900,00 atau 85,99%'
- e. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40,352,500,00 realisasi Rp. 36,183,000,00 atau 89,67%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 40,352,500,00 realisasi Rp. 36,183,000,00 atau 89,67%

5.20.19. Kelurahan Pekiringan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Pekiringan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 428,904,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 417,516,768,00 atau 97,35% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 136,737,000,00 realisasi Rp. 129,682,856,00 atau 94,84%, untuk melaksanakan12 (dua belas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat , anggaran sebesar Rp. 1,440,000,00 realisasi Rp. 1,440,000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.19,200,000,00 realisasi Rp. 16,231,506,00 atau 84.54%.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 780,000,00 realisasi Rp. 500,000,00 atau 64,10%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , anggaran sebesar Rp. 46,449,000,00 realisasi Rp. 44,580,000,00 atau 95,98 %
 - 5) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 10,666,000,00 realisasi Rp. 10,665,500,00 atau 100%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp. 7,720,000,00 realisasi Rp. 7,663,100 atau 99,26%



- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar Rp, 1,780,000,00 realisasi Rp. 1,775,500,00 atau 99,75%
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 4,094,000,00 realisasi Rp. 4,083,500,00 atau 99,74%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 21,600,000,00 realisasi Rp. 21,072,000,00 atau 97,56%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 1,800,000,00 realisasi Rp. 1,630,000,00 atau 90,56%
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 17,908,000,00 realisasi Rp. 17,811,750,00 atau 99,46%
- 12) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah , anggaran sebesar Rp. 3,300,000,00 realisasi Rp.2,230,000,00 atau 67,58%
- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 195,031,000,00 realisasi Rp. 190,709,512,00 atau 97,78%, untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 18,065,000,00 realisasi Rp. 18,062,500,00 atau 99,99%
 - 2). Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 86,168,000,00 realisasi Rp. 85,291,600,00 atau 98,98%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 8,080,000,00 realisasi Rp. 7,994,000,00 atau 98,94%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 24,990,000,00 realisasi Rp. 22,841,931,00 atau 91,40%



- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 7,750,000,00 realisasi Rp. 7,691,881,00 atau 99,25%
- 6) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 49,978,000,00 realisasi Rp. 48,827,600 atau 97,70
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6,960,000,00 realisasi Rp. 6,960,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran sebesar Rp. 2,700,000,00 realisasi Rp. 2,700,000,00 atau 100%.
 - 2).Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 94,260,000,00 realisasi Rp. 4,260,000,00 atau 100%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 34,596,000,00 realisasi Rp. 34,587,200,00 atau 99,97%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 12,471,000,000,00 realisasi Rp. 12,464,500,00 atau 99,95%.
 - 2). Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 4,585,000,00 realisasi Rp. 4,583,700,00 atau 99,99%.
- e. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 47,491,000,00 realisasi Rp. 47,489,600,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 47,491,000,00 realisasi Rp. 47,489,600,00 atau 100%,



- f. Program Kerukunan Umat Beragama , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8,089,000,00 realisasi Rp. 8,087,600,00 atau 99,98%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu
 - Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan , anggaran sebesar Rp. 8,089,000,00 realisasi Rp. 8,087,600,00 atau 99,98% .

5.20.20. Kelurahan Karyamulya

Pada tahun anggaran 2015 , Kelurahan Karyamulya mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 377,154,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 327,593,996,00 atau 86,86% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan21 (dua puluh satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 126,312,000,00 realisasi Rp. 107,384,773,00 atau 85,02%, untuk melaksanakan10 (sepuluh) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp. 9,600,000,00 realisasi Rp. 6,382,533,00 atau 66,48%.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 1,320,000,00 realisasi Rp. 714,000,00 atau 54,09%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 44,850,000,00 realisasi Rp. 44,706,000,00 atau 99,68 %
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja , anggaran sebesar Rp. 3,362,000,00 realisasi Rp. 660,000,00 atau 19,63%
 - 5) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 9,500,000,00 realisasi Rp. 8,643,240,00 atau 90,98%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp. 11,420,000,00 realisasi Rp. 5,779,000,00 atau 50,60%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar Rp. 2,500,000,00 realisasi Rp. 1,395,000,00 atau 55,80%



- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 5,295,000,00 realisasi Rp. 5,294,500,00 atau 99,99%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 34,860,000,00 realisasi Rp. 34,200,000,00 atau 98,11%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 900,000,00 realisasi Rp. 900,000,00 atau 100%
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 8,000,000,00 realisasi Rp. 4,005,000,00 atau 50,06%
- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 160,030,000,00 realisasi Rp. 136,496,000,00,00 atau 85,29%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 30,956,000,00 realisasi Rp. 30,651,000,00 atau 99,01
 - 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 35,500,000,00 realisasi Rp. 33,600,000,00 atau 94,65%
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 54,594,000,00 realisasi Rp. 49,758,000,00 atau 91,14%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 3,500,000,00 realisasi Rp. 3,500,000,00 atau 100%
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 35,480,000,00 realisasi Rp. 18,987,523,00 atau 53,52%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 12,750,000,00 realisasi Rp. 12,750,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu , anggaran sebesar Rp. 6,750,000,00 realisasi Rp. 6,750,000,00 atau 100%



- 3). Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 6,000,000,00 realisasi Rp. 6,000,000,00 atau 100%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 23,062,000,00 realisasi Rp. 20,610,000,00 atau 89,37%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun , anggaran sebesar Rp. 5,030,000,00 realisasi Rp. 4,050,000,00 atau 80,52 %
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya , anggaran sebesar Rp. 9,000,000,00 realisasi Rp. 7,660,000,00 atau 85,11%
 - 3) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap , anggaran sebesar Rp. 9,032,000,00 realisasi Rp. 8,900,000,00 atau 98,54%
- f. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 27,292,000,00 realisasi Rp. 24,957,145,00 atau 91,44%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 55,000,000,00 realisasi Rp. 50,352,700,00 atau 91,55%

5.20.21. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015 , Kelurahan Lemahwungkuk mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309,626,125,00 dengan realisasi sebesar Rp. 248,982,492,00 atau 80,41% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan21 (dua puluh satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 113,737,475,00 realisasi Rp. 84,510,362,00 atau 74,30%, untuk melaksanakan11 (sebelas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.24,600,000,00 realisasi Rp. 14,002,662,00 atau 56,92%.



- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran sebesar Rp. 1,400,00,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran sebesar Rp. 18,058,100,00 realisasi Rp15,790,700,00 atau 87,44 %
- 4) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 18,184,875,00 realisasi Rp. 16,871,600,00 atau 92,78%
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp 4,959,400,00 realisasi Rp. 3,879,600,00 atau 78,22%
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar Rp. 480,000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 3,046,400,00 realisasi Rp. 1,114,400,00 atau 36,58%
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 16,800,000,00 realisasi Rp. 11,928,000,00 atau 71,00%
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 1,800,000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 10,708,600,00 realisasi Rp. 8,923,400,00 atau 83,33%
- 12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor , anggaran sebesar Rp. 13,699,700,00 realisasi Rp. 12,000,000,00 atau 87,59%
- a. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 133,984,000,00 realisasi Rp. 113,933,780,00 atau 85,04%, untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapam Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 33,550,000,00 realisasi Rp. 32,185,000,00 atau 95,93%



- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 9,999,000,00 realisasi Rp. 9,799,900,00 atau, 98,01%
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 10,655,000,00 realisasi Rp. 10,427,000,00 atau 97,86%
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 38,409,000,00 realisasi Rp. 22,322,880,00 atau 58,12%
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 6,371,000,00 realisasi Rp 5,245,000,00 atau 82,33%
- 6) Kegiatan rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 35,000,000,00 realisasi Rp. 33.954,000,00 atau 97,01%
- a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5,150,000,00 realisasi Rp. 4,653,000,00 atau 90,35%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 5,150,000,00 realisasi Rp. 4,653,000,00 atau 90,35%
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 41,754,650,00 realisasi Rp. 41,385,350,00 atau 90,35%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 17,617,450,00 realisasi Rp. 17,617,450,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 4,660,000,00 realisasi Rp. 4,660,000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya , anggaran sebesar Rp. 19,177,200,00 realisasi Rp. 19,107,900,00 atau 98,10%



- i. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15,000,000,00 realisasi Rp. 4,500,000,00 atau 30,00% , untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 15,000,000,00 realisasi Rp. 4,500,000,00 atau 30,00%

5.20.22. Kelurahan Panjunan

Pada tahun anggaran 2015 , Kelurahan Lemahwungkuk mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 247,650,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 222,344,031,00 atau 89,78% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan20 (dua puluh) kegiatan sebagai berikut:

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 88,879,500,00 realisasi Rp. 83,810,981,00 atau 94,30%, untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.12,000,000,00 realisasi Rp. 8,561,281,00 atau 71,34%.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 1,200,00,00 realisasi Rp. 355,700,00 atau 26,64%
 - 3) Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor , anggaran sebesar Rp. 7,009,000,00 realisasi Rp. 6,819,000,00 atau 97,29%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp 4,010,000,00 realisasi Rp. 3,580,000,00 atau 89,28%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar Rp. 900,000,00 realisasi Rp.900,000,00 atau 100%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 1,498,500,00 realisasi Rp. 1,333,000,00 atau 88,96%



- 7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 18,744,000,00 realisasi Rp. 18,744,000,00 atau 100%
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 816,000,00 realisasi Rp. 816,000,00 atau 100%
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 42,702,000,00 realisasi Rp. 42,702,000,00 atau 100%
- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 83,856,000,00 realisasi Rp. 67,838,300,00 atau 80,90%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapam Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 5,098,500,00 realisasi Rp. 4,000,000,00 atau 78,45%
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, anggaran sebesar Rp. 29,599,500,00 realisasi Rp. 28,985,500,00 atau, 97,93%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 21,292,000,00 realisasi Rp15,095,500,00 atau 70,90%
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp 19,826,000,00 realisasi Rp. 12,167,800,00 atau 61,37%
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 8,040,000,00 realisasi Rp 7,590,000,00 atau 94,40%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5,500,000,00 realisasi Rp. 5,500,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. 5,500,000,00 realisasi Rp. 5,500,000,00 atau 100%
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.



49,414,500,00 realisasi Rp. 45,869,750,00 atau 92,83%, untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD , anggaran sebesar Rp. 1,500,000,00 realisasi Rp. 1,500,000,00 atau 100%.
- 2) Monitoring dan Evaluasi , anggaran sebesar Rp. 27,834,000,00 realisasi Rp. 24,987,250,00 atau 89,77%
- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD , anggaran sebesar Rp. 1,500,000,00 realisasi Rp. 1,500,000,00 atau 100% .
- 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran sebesar Rp. 18,580,000,00 realisasi Rp. 17,882,500,00 atau 96,24%
- e. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15,000,000,00 realisasi Rp. 4,500,000,00 atau 30,00% , untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan , anggaran sebesar Rp. 20,000,000,000 realisasi Rp. 19,325,000,00 atau 96,63%

5.20.23. Kelurahan Kesepuhan

Pada tahun anggaran 2015 , Kelurahan Kasepuhan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 411,201,410,00 dengan realisasi sebesar Rp. 361,671,149,00 atau 87,95% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan27 (dua puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 149,095,910,00 realisasi Rp. 129,638,221,00 atau 94,30%, untuk melaksanakan 12 (duabelas) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran sebesar Rp.15,040,000,00 realisasi Rp. 11,616,111,00 atau 77,23%.
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah , anggaran sebesar Rp 4,550,000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%



- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 1,200,00,00 realisasi Rp. 467,100,00 atau 38,93%
- 4) Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor , anggaran sebesar Rp. 43,000,000,00 realisasi Rp. 43,000,000,00 atau 100%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja , anggaran sebesar Rp. 3,560,000,00 realisasi Rp. 1,280,000,00 atau 35,96%
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran sebesar Rp. 11,136,910,00 realisasi Rp. 11,132,010,00 atau 99,96%
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , anggaran sebesar Rp 7,220,000,00 realisasi Rp. 7,220,000,00 atau 100%
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor , anggaran sebesar Rp. 1,700,000,00 realisasi Rp.1,450,000,00 atau 85,20%
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , anggaran sebesar Rp. 7,835,000,00 realisasi Rp. 2,085,000,00 atau 26,61%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , anggaran sebesar Rp. 25,812,000,00 realisasi Rp. 25,650,000,00 atau 99,37%
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor , anggaran sebesar Rp. 720,000,00 realisasi Rp. 720,000,00 atau 100%
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman , anggaran sebesar Rp. 27,322,000,00 realisasi Rp. 25,018,000,00 atau 91,57%
- b. Program Pengingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 188,500,000,00 realisasi Rp. 164,948,004,00 atau 85,51%, untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp. 18,525,500,00 realisasi Rp. 18,000,000,00 atau 97,17%



- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 126,450,000,00 realisasi Rp. 117,310,000,00 atau, 92,77%
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor , anggaran sebesar Rp. 9,915,000,00 realisasi 0,00 atau 0%
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional , anggaran sebesar Rp 31,810,000,00 realisasi Rp. 29,138,004,00 atau 91,60%
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor , anggaran sebesar Rp. 1,800,000,00 realisasi Rp 500,000,00 atau 27,78%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 11,550,000,00 realisasi Rp. 11,550,000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri , anggaran sebesar Rp 3,850,000,00 realisasi Rp. 3,850,000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu , anggaran sebesar Rp. 3,850,000,00 realisasi Rp. 3,85,000,00 atau 100%
 - 3) Pengadaan Pakaian Dinas Harian , anggaran sebesar Rp. . 3,850,000,00 realisasi Rp. 3,850,000,00 atau 100%
 - d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 38,760,500,00 realisasi Rp. 32,688,000,00 atau 84,33%, untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 3,265,000,00 realisasi Rp. 3,695,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran , anggaran sebesar Rp. 3,850,000,00 realisasi Rp. 3,850,00,00 atau 100%
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun , anggaran sebesar Rp. 3,800,000,00 realisasi Rp. 3,600,000,00 atau 94,74%



- 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran sebesar Rp. 3,697,500,00 realisasi Rp. 3,600,000,00 atau 97,36%.
- 5) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya , anggaran sebesar Rp. 17,943,000,00 realisasi Rp. 17,943,000,00 atau 100%
- 6) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD , anggaran sebesar Rp. 5,775,000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%
- e. Program Peningkatan Peningkatan Kompetensi Keagamaan , Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 23,295,000,00 realisasi Rp. 22,846,924,00 atau 98.08% , untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan, anggaran sebesar Rp. 23,295,000,00 realisasi Rp. 22,846,924,00 atau 98.08%

5.20.24. Kelurahan Pegambiran

Kelurahan Pegambiran pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 357.767.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 325.290.524,00 atau 90,92% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 26 (duapuluh enam) kegiatan sebagai berikut :

- b. Program pelayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 125.956.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 108.726.847,00 atau 86,32% digunakan untuk 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 900.000,00 realisasi Rp. 897.000,00 atau 99,67%.
 - 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 23.140.000,00 realisasi Rp. 11.132.447,00 atau 48,11%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 1.050.000,00 realisasi Rp. 653.200,00 atau 62,21%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 41.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.330.000,00 atau 99,71%.



- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.855.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.834.900,00 atau 99,79%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 3.226.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.980.000,00 atau 92,37%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 956.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 388.000,00 atau 40,57%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 2.342..200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.101.700,00 atau 89,73%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 33.264.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.184.000,00 atau 96,75%.
- 10)Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 1.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.000,00 atau 100%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.8.572.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.025.600,00 atau 70,29%.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 125.547.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 111.514.677,00 atau 88,82% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran Rp. 19.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.325.000,00 atau 88,85%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 61.399.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.980.000,00 atau 96,06%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 8.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.240.000,00 atau 100%.



- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 31.888.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.919.677,00 atau 75,01%.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 4.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.050.000,00 atau 67,48%.
- d. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 12.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.900.000,00 atau 100% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan dinas beserta perlengkapannya, anggaran Rp. 3.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.150.000,00 atau 100%.
 - Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 4.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.500.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 5.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.250.000,00 atau 100%.
- e. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 34.348.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.929.000,00 atau 98,78% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 2.520.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.520.500,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, anggaran Rp. 2.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.665.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 2.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.174.500,00 atau 98,84%.
 - 4) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 7.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.541.000,00 atau 99,16%.



- 5) Kegiatan pelaporan kinerja pegawai tidak tetap, anggaran Rp. 19.357.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.028.000,00 atau 98,30%.
- f. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 38.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.910.000,00 atau 99,10% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.
- g. Program kerukunan umat beragama, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 20.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.310.000,00 atau 97,83% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu peringatan hari-hari besar keagamaan.

5.20.25. Kelurahan Pekalipan

Kelurahan Pekalipan pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 348.991.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 337.224.928,00 atau 96,63% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (duapuluh tiga) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 156.536.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 148.596.204,00 atau 94,93% digunakan untuk 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 540.000,00 realisasi Rp. 375.000,00 atau 69,44%.
 - 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 15.600.000,00 realisasi Rp. 11.907.654,00 atau 76,33%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 720.000,00 realisasi Rp. 462.800,00 atau 64,28%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 42.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.130.000,00 atau 100%.



- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.946.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.938.000,00 atau 99,91%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 4.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.275.000,00 atau 100%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 1.965.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.965.000,00 atau 100%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 32.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.400.000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1127.750,00 atau 35,49%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.48.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 45.015.000,00 atau 92,62%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 124.595.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 120.859.224,00 atau 97,00% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran Rp. 18.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.835.000,00 atau 99,03%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 40.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.150.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 10.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.042.000,00 atau 98,63%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 42.113.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.813.224,00 atau 92,16%.



- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 14.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.019.000,00 atau 99,14%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 10.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.175.000,00 atau 100% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI, anggaran Rp. 2.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 3.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 4.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.125.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 35.246.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.156.500,00 atau 99,74% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 9.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.960.000,00 atau 100%
 - 2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, anggaran Rp. 1.727.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.727.500,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 3.090.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 97,09%.
 - 4) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 20.469.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.469.000,00 atau 100%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 22..438.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.438.000,00 atau 100% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.



5.20.26. Kelurahan Pekalangan

Kelurahan Pekalangan pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 348.266.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 337.372.935,00 atau 96,87% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (duapuluh lima) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 149.564.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.144.419.922,00 atau 96,56% digunakan untuk 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp.750.000,00 realisasi Rp. 748.500,00 atau 99,80%.
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00 realisasi Rp. 16.853.422,00 atau 80,25%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 720.000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 40.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.700.000,00 atau 99,71%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.950.000,00 atau 100%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp.9.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.500.000,00 atau 100%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100%.



- 8) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, anggaran Rp. 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.000.000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 960.000,00 atau 100%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.39.864.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.708.000,00 atau 99,61%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 111.727.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.105.978.013,00 atau 94,85% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran Rp.18.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.460.000,00 atau 94,38%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 34.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.500.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 26.767.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.767.500,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 24.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.330.513,00 atau 80,54%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 7.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.920.000,00 atau 99,50%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 12.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:



- 1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran Rp. 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100%.
- 2) Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI, anggaran Rp. 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000,00 atau 100%.
- Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp.
 3.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
 3.200.000,00 atau 100%.
- 4) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 3.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.500.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 38.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.275.000,00 atau 100% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.000.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, anggaran Rp. 1.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.780.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp.3.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.555.000,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 26.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.940.000,00 atau 100%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 36.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.500.000,00 atau 100% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.



5.20.27. Kelurahan Jagasatru

Kelurahan Jagasatru pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 254.308.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 238.252.675,00 atau 93,69% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (duapuluh) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 121.269.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.109.966.968,00 atau 90,68% digunakan untuk 12 (duabelas) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp.750.000,00 realisasi Rp. 750.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 13.200.000,00 realisasi Rp. 10.645.468,00 atau 80,65%.
 - Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 1.200.000,00 realisasi Rp.0,00 atau 0%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 46.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.538.000,00 atau 99,06%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kantor, anggaran Rp.8.070.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.430.000,00 atau 67,29%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 100%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp.3.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.297.200,00 atau 99,92%.



- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 2.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.613.600,00 atau 77,58%.
- 9) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, anggaran Rp.3.651.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.697.700.000,00 atau 73,88%.
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 20.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.957.000,00 atau 88,02%.
- 11)Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
- 12)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.12.032.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.032.000,00 atau 100%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 74.315.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.72.480.207,00 atau 97,53% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 57.185.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.810.000,00 atau 99,34%.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 17.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.15.670.207,00 atau 91,48%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 15.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.030.000,00 atau 100% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran Rp. 3.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.500.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp.5.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.030.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 6.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.500.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 19.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.515.500,00 atau 93,78% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, anggaran Rp.4.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.744.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.771.500,00 atau 91,81%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 23.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.22.260.000,00 atau 92,94% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

5.20.28. Kelurahan Pulasaren

Kelurahan Pulasaren pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 264.388.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.242.835.039,00 atau 91,85% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (duapuluh tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program palayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 117.625.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 109.906.027,00 atau 93,44% digunakan untuk 12 (duabelas) kegiatan, yaitu
 - 1) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 16.200.000,00 realisasi Rp. 12.668.427,00 atau 78,20%.



- 2) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 1.800.000,00 realisasi Rp. 743.400,00 atau 41,30%.
- **3)** Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 45.212.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.958.000,00 atau 99,44%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja, anggaran Rp. 6.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.875.000,00 atau 100%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.491.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.374.400,00 atau 98,77%.
- **6)** Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 3.012.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.712.400,00 atau 56,85%.
- **7)** Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 988.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 988.000,00 atau 100%.
- **8)** Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 842.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 842.000,00 atau 100%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 15.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.336.000,00 atau 100%.
- **10)**Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 1.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 990.000,00 atau 95,19%.
- **11)**Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.14.328.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.328.400,00 atau 98,95%.
- **12)**Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, anggaran Rp.2.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.240.000,00 atau 49,60%



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 108.422.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 94.991.012,00 atau 87,61% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pembangunan gedung kantor, anggaran Rp. 42.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.020.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran Rp. 17.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.275.000,00 atau 94,18%.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 18.504.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.030.000,00 atau 92,03%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp.
 5.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.086.000,00 atau 100%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 25.532.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.580.012,00 atau 57,10%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 7.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.150.000,00 atau 100% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 3.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.300.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 3.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 13.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.153.000,00 atau 98,12% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.000.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.955.000,00 atau 97,75%.
- 3) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 9.405.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.198.000,00 atau 97,80%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 17.785.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.635.000,00 atau 99,16% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaituPelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

5.20.29. Kelurahan Harjamukti

Kelurahan Harjamukti pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 240.686.992,00 dengan realisasi sebesar Rp.229.320.746,00 atau 95,28% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (duapuluh tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program palayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 132.993.492,00 dengan realisasi sebesar Rp. 128.971.552,00 atau 96,98% digunakan untuk 12 (duabelas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 1.350.000,00 realisasi Rp. 1.336.000,00 atau 98,96%.
 - 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 16.519.992,00 realisasi Rp. 16.260.312,00 atau 98,43%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 700.000,00 realisasi Rp. 586.000,00 atau 83,71%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 44.137.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.969.425,00 atau 99,62%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 12.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.942.700,00 atau 91,19%.



- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 7.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.554.365,00 atau 99,24%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 975.000,00 atau 48,75%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 2.854.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.243.550,00 atau 78,61%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 23.856.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.856.000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 294.000,00 atau 73,50%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.16.564.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.959.200,00 atau 96,35%.
- 12)Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, anggaran Rp.5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.995.000,00 atau 99,90%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 57.758.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.569.119,00 atau 89,28% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pembangunan gedung kantor anggaran Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 23.224.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.901.000,00 atau 98,61%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 12.684.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.012.119,00 atau 71,05%.



- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 6.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.656.000,00 atau 67,97%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 12.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.600.000,00 atau 100% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran Rp. 3.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.500.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 4.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.550.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 4.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.550.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 22.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.026.575,00 atau 98,73% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp. 7.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.480.700,00 atau 98,95%.
 - 2) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 2.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.300.000,00 atau 92,00%.
 - 3) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 12.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.245.875,00 atau 99,97%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 15.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.153.500,00 atau 94,20% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaituPelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.



5.20.30. Kelurahan Argasunya

Kelurahan Argasunya pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 242.729.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.196.854.206,00 atau 81,10% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (duapuluh lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program palayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 109.449.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 85.916.899,00 atau 78,50% digunakan untuk 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 1.650.000,00 realisasi Rp. 960.000,00 atau 58,81%.
 - 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 14.004.000,00 realisasi Rp. 7.414.299,00 atau 52,94%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 1.700.000,00 realisasi Rp. 557.700,00 atau 32,81%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 42.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.180.000,00 atau 97,35%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.507.900,00 atau 59,64%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 2.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 550.000,00 atau 26,19%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 1.020.000,00 dengan realisasi sebesarRp. 1.020.000,00 atau 100%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 2.472.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 509.000,00 atau 20,59%.



- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 20.448.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.448.000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 576.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.13.944.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.770.000,00 atau 55,72%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 81.860.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 68.370.307,00 atau 83,52% digunakan untuk 6 (enam) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran Rp. 23.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.350.000,00 atau 95.11%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 13.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.680.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 22.904.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.231.000,00 atau 97,15%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 4.244.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 15.192.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.929.307,00 atau 78,52%.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 2.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 180.000,00 atau 7,69%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 14.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.197.000,00 atau 98,25% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:



- Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 3.795.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.542.000,00 atau 93,33%.
- 2) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 10.655.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.655.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 10.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.850.000,00 atau 44,29% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 1.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran, anggaran Rp. 1.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 100.000,00 atau 6,06%.
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp.
 1.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%.
 - 4) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 1.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.600.000,00 atau 94,12%.
 - 5) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 4.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.150.000,00 atau 73,26%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 26.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.520.000,00 atau 90,39% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaituPelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

5.20.31. Kelurahan Kalijaga

Kelurahan Kalijaga pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 292.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.273.327.707,00 atau 93,32% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 24 (duapuluh empat) kegiatan sebagai berikut:



- a. Program palayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 123.741.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 112.723.561,00 atau 91,10% digunakan untuk 12 (duabelas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 900.000,00 realisasi Rp. 605.000,00 atau 67,22%.
 - 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 23.400.000,00 realisasi Rp. 17.368.661,00 atau 74,23%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 realisasi Rp. 785.200,00 atau 52,35%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 23.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.786.000,00 atau 99,36%.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 13.572.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.565.000,00 atau 99,94%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 4.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.076.700,00 atau 65,39%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 2.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.909.500,00 atau 75,25%.
 - 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 4.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.351.000,00 atau 97,23%.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 27.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.400.000,00 atau 97,13%.
 - 10)Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, anggaran Rp. 600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 480.000,00 atau 80%.



- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.18.930.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.506.500,00 atau 97,76%.
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.890.000,00 atau 94,50%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 134.144.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 126.621.146,00 atau 94.39% digunakan untuk 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional, anggaran Rp. 19.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.725.000,00 atau 94,81%.
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 70.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 68.152.000,00 atau 97,15%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 7.704.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.700.000,00 atau 99,95%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 27.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.034.146,00 atau 85,25%.
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 9.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.010,000,00 atau 94,64%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 12.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.509.200,00 atau 99,91% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, anggaran Rp. 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100%.



- Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp.
 4.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.189.200,00 atau 99,74%.
- 3) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 4.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.320.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 14.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.198.800,00 atau 92,95% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 5.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.620.000,00 atau 82,87%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran Rp. 1.225.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.215.800,00 atau 99,18%.
 - 3) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 7.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.363.800,00 atau 99,51%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 8.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.275.000,00 atau 100% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaituPelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

5.20.32. Kelurahan Kecapi

Kelurahan Kecapi pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 321.435.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.317.987.503,00 atau 98,93% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (duapuluh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program palayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 139.295.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 137.409.503,00 atau 98,65% digunakan untuk 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 1.350.000,00 realisasi Rp. 1.350.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 realisasi Rp. 16.128.123,00 atau 89,60%.
- 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 775.000,00 realisasi Rp. 775.000,00 atau 100%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 21.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.786.380,00 atau 99,94%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.990.000,00 atau 100%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 8.150,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.150.000,00 atau 100%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 2.030,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.030,000,00 atau 100%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 2.804,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.804.000,00 atau 96,21%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 35.376,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.376,000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.33.420,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.420,000,00 atau 38.89%.
- 11)Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 5.600,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.600.000,00 atau 100%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 131.270.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.908.000,00 atau 99,72% digunakan untuk 4 (empat) kegiatan, yaitu:



- 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 51.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.600.000,00 atau 99,81%.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 51.400,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.155,000,00 atau 99,52%.
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 22.510,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.503,000,00 atau 99,97%.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 5.660,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.650,000,00 atau 99,82%.
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 15.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.700.000,00 atau 93,33% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, anggaran Rp. 9.750,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.100,000,00 atau 93,33%.
 - 2) Kegiatan pengadaan pakaian dinas harian, anggaran Rp. 6.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.600,000,00 atau 93,33%.
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 12.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.120.000,00 atau 100% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 3.450,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.450,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 8.670,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.670.000,00 atau 100%.
- e. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 23.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.



22.850.000,00 atau 99,35% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan.

5.20.33. Kelurahan Larangan

Kelurahan Larangan pada tahun anggaran 2015 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 248.193.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.193.026.023,00 atau 77,77% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 20 (duapuluh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program palayanan administrasi perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 134.733.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 103.034.695,00 atau 76,47% digunakan untuk 12 (duabelas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, anggaran sebesar Rp. 600,000,00 realisasi Rp. 600,000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, anggaran sebesar Rp. 15.800.000,00 realisasi Rp. 7.977.395,00 atau 50,49%.
 - 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, anggaran sebesar Rp. 1.600.000,00 realisasi Rp. 950.800,00 atau 59,43%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 44.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.150.000,00 atau 98,90%.
 - 5) Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja, anggaran Rp. 4.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.260.000,00 atau 70,11%.
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 9.138.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.739.800,00 atau 62,81%.
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 2.010,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 874.600,00 atau 43,51%.



- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 1.175,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 465,000,00 atau 39,57%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 1.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 962.100,00 atau 96,21%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 43.920,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.255,000,00 atau 80,27%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp.7.200,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.800,000,00 atau 38.89%.
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 3.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 39.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.742.078,00 atau 44,78% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 7) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, anggaran Rp. 9.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.800.000,00 atau 40,43%.
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 4.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.234,000,00 atau 80,85%.
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 26.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.708.078,00 atau 40,84%.
- c. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 44.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.353.750,00 atau 97,34% digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran Rp. 4.035,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.980.050,00 atau 98,64%.



- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran Rp. 23.880,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.670,000,00 atau 9912%.
- 3) Kegiatan penyusunan RKA/DPA SKPD dan perubahannya, anggaran Rp. 16.625,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.703.700,00 atau 94.46%.
- d. Program peningkatan kompetensi keagamaan, alokasi anggaran pada program ini Rp Rp. 29.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.895.500,00 atau 98,62% digunakan untuk 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kelurahan, anggaran Rp. 25.000,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 24.595.500,00 atau 98,38%.
 - 2) Pelaksanaan Lomba MTQ/STQ Tingkat Kecamatan,anggaran Rp. 4.300,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.300.000,00 atau 100%.

5.21. Urusan Ketahanan Pangan

Urusan ketahanan pangan ditangani oleh Kantor Ketahanan Pangan. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.21.1 Kantor Ketahanan Pangan

Pada tahun anggaran 2015, Kantor Ketahanan Pangan , mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.804.087.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.736.074.455,00 atau 96.23% untuk melaksanakan6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp. 339.260.500,00 terealisasi Rp. 307.929.580,00 atau 90.76% digunakan untuk melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 42,000,000,00 terealisasi Rp. 19.245.182,00 atau 45.82%
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 8.500.000,00 terealisasi Rp. 7.641.300,00 atau 89.90%



- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 6,000,000,00 terealisasi Rp. 2.012.500,00 atau 33.54%
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 107.800.500,00 terealisasi Rp.107.217.000.00 atau 99.46%
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran Rp. 8,000,000,00 terealisasi Rp. 8.000.000,00 atau 100%
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 15,000,000,000 terealisasi Rp. 14.999.100,00 atau 99.99%
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 15.000,000,00 terealisasi Rp. 14.955.000,00 atau 99.70%
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 5,000,000,00 terealisasi Rp. 4.450.800,00 atau 89.02 %
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 12,360,000,00 terealisasi Rp. 12.360.000,00 atau 100%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 3,000,000,000 terealisasi Rp. 696.000,00 atau 23.20%
- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 19.580.000,00 terealisasi Rp. 19.391.500,00 atau 99,04%
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 97.020.000,00 terealisasi Rp. 96.961.198,00 atau 99.94%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 68.563.000,00 terealisasi Rp. 57.695.925,00 atau 83,27% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 16.163.000,00 terealisasi Rp.13.806.000,00 atau 85.42 %



- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 52.400.000,00 terealisasi Rp. 43.889.925,00 atau 83.76%
- a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program ini Rp. 3.900.000,00 terealisasi Rp. 3.900.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, anggaran Rp. 3.900.000,00 terealisasi Rp. 3.900.000,00 atau 100%
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 6.429.000,00 terealisasi Rp. 6.402.000,00 atau 99.58% digunakan untuk melaksanakan1(satu) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, anggaran Rp. 6.429.000,00 terealisasi Rp. 6.402.000,00 atau 99.58%
- c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), alokasi anggaran pada program ini Rp. 1.214.941.000,00 terealisasi Rp. 1.191.933.000,00 atau 98.11% digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan, anggaran Rp. 253.537.500,00 terealisasi Rp. 237.660.000,00 atau 93.74%
 - 2) Kegiatan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, anggaran Rp. 55.391.000,00 terealisasi Rp.51.322.500,00 atau 99.75%
 - 3) Kegiatan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan, anggaran Rp. 55.095.000,00 terealisasi Rp.54.955.000,00 atau 97,15%
 - 4) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan, anggaran Rp. 57.480.000,00 terealisasi Rp.57.480.000,00 atau 100%
 - 5) Kegiatan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok, anggaran Rp. 46.920.000,00 terealisasi Rp. 46.920.000,00 atau 100%
 - 6) Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah, anggaran Rp. 166.980.000,00 terealisasi Rp. 164.228.000,00 atau 98.35%



- 7) Kegiatan Koordinasi kebijakan perberasan, anggaran Rp. 480.152.500,00 terealisasi Rp. 480.017.500,00 atau 99.97
- 8) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran Rp50.010.000,00 teralisasi Rp. 50.005.000,00 atau 99.99%
- 9) Kegiatan Pemantapan Koordinasi dewan Ketahanan Pangan, anggaran Rp.49.375.000,00 terealisasi Rp. 49.345.000,00 atau 99.94%
- a. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 170.994.000,00 terealisasi Rp. 168.213.950,00 atau 98.37% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Kemananan Pangan anggaran Rp. 105.697.000,00 terealisasi Rp.103.578.950,00 atau 98.00%
 - Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pangan, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 65.297.000,00 terealisasi Rp. 64.635.000,00 atau 98,60%

5.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditangani beberapa SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan. Adapun uraian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

5.22.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pada tahun anggaran 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.092.031.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.840.665.333,00 atau 91,87% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 32 (tigapuluh dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 892.492.900,00 dengan realisasi anggaran



sebesar Rp. 756.771.889,00atau 84,79% untuk melaksanakan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 6.120.000,00 realisasi anggaran Rp. 6.120.000,00 atau 100%.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 132.900.100,00 realisasi anggaran Rp. 93.345.946,00 atau 70,24%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp.
 realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 14.950.000,00 realisasi anggaran Rp. 11.692.600,00 atau 78,21%.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 123.169.900,00 realisasi anggaran Rp. 121.669.900,00 atau 98,78%.
- 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 59.780.000,00 realisasi anggaran Rp. 56.436.400,00 atau 94,41%.
- 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 44.379.500,00 realisasi anggaran Rp. 44.045.000,00 atau 99,25%.
- 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 11.323.400,00 realisasi anggaran Rp. 11.269.400,00 atau 99,52%.
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp. 23.940.000,00 realisasi anggaran Rp 23.940.000,00 atau 100%.
- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 1.800.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.800.000,00 atau 100%.
- 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 102.370.000,00 realisasi anggaran Rp. 99.271.000,00 atau 96,97%.



- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, anggaran Rp. 371.760.000,00 realisasi anggaran Rp. 287.181.643,00 atau 77,25%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 392.0011.200,00 dengan realisasi anggaran Rp. 312.057.844,00 atau 79,60%, digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 20.167.500,00 realisasi anggaran Rp. 17.162.500,00 atau 85,10%.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 75.853.700,00 realisasi anggaran Rp. 75.303.200,00 atau 99,27%.
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 267.440.000,00 realisasi anggaran Rp. 191.042.144,00 atau 71,43%.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 28.550.000,00 realisasi anggaran Rp. 28.550.000,00 atau 100%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 25.800.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 24.899.800,00 atau 96,51%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaituKegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 132.894.900,00 dengan realisasi anggaran Rp. 127.294.750,00 atau 95,79%, digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 43.866.400,00 realisasi anggaran Rp. 43.866.400,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, anggaran Rp. 16.628.000,00 realisasi anggaran Rp. 16.627.950,00 atau 100%.



- 3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, anggaran Rp. 14.647.000,00 realisasi anggaran Rp. 14.647.000,00 atau 100%
- 4) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 35.720.000,00 realisasi anggaran Rp. 30.120.000,00 atau 84,32%.
- 5) Kegiatan Penyusunan SOP dan SPM SKPD, anggaran Rp. 22.033.500,00 realisasi anggaran Rp. 22.033.400,00 atau 100%.
- e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 755.642.550,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 745.338.550,00 atau 98,64%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG, anggaran Rp. 142.725.000,00 realisasi anggaran Rp. 135.555.000,00 atau 94,98%
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kota, anggaran Rp. 612.917.550,00 realisasi anggaran Rp. 609.783.550,00 atau 99,49%.
 - 3) Kegiatan Pendataan UED-SP dan KUBE, anggaran Rp. 0 realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%.
- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 255.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 253.632.500,00 atau 99,37%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penunjang Bantuan RW, anggaran Rp. 75.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 74.559.000,00 atau 99,41%.
 - 2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, anggaran Rp. 80.240.000,00 realisasi anggaran Rp. 79.437.500,00 atau 99,00%.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi), realisasi anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 99.636.000,00 atau 99,64%.



- g. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 217.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 200.470.000,00, atau 92,38%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota, anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 85.190.000,00 atau 85,19%.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kelurahan, anggaran Rp. 92.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 92.000.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan, anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 23.280.000,00 atau 93,12%.
- h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 420.950.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 420.200.000,00 atau 99,82%, digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan LKK.

5.22.2. Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Kejaksan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 445.920.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 383.036.050,00 atau 85,90% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 16.409.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.160.750,00 atau 98,49% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 180.750.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 153.751.500,00 atau 85,06% digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:



- 1) Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang pembangunan, anggaran Rp. 0 realisasi Rp. 0 atau 0%.
- 2) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 36.183.500,00 realisasi Rp. 35.511.500,00 atau 98,14%.
- 3) Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan, anggaran Rp. 64.812.000,00 realisasi Rp. 38.625.000,00 atau 59,60%.
- 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 79.755.000,00 realisasi Rp. 79.615.000,00 atau 99,82%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 248.761.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 213.123.800,00 atau 85.67%, digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan, anggaran Rp. 30.235.000,00 realisasi Rp. 28.707.500,00 atau 94,95%.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, anggaran Rp. 91.860.000,00 realisasi Rp. 90.012.000,00 atau 97,99%.
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan, angggaran Rp. 25.430.000,00 realisasi Rp. 24.782.000,00 atau 97,45%.
 - 4) Kegiatan Lokakarya dan Vitalisasi Kinerja, anggaran Rp. 24.196.000,00 realisasi Rp. 16.607.500,00 atau 68,64%.
 - 5) Kegiatan Pembinaan LKK, anggaran Rp. 77.040.000,00 realisasi Rp. 53.014.800,00 atau 68,81%.

5.22.3. Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Pekalipan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 209.254.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.527.500,00



atau 91,87% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.387.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 42.387.500,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 39.872.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.872.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 17.434.500,00 realisasi Rp. 17.434.500,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan, anggaran Rp. 22.437.500,00 realisasi Rp. 22.437.500,00 atau 100%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 126.994.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.268.000,00 atau 97,85% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pembinaan LKK, anggaran Rp. 91.994.500,00 realisasi Rp. 91.188.000,00 atau 99,12%.
 - 2) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi Rp. 33.080.000,00 atau 94,51%.

5.22.4. Kecamatan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Kesambi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 327.572.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 321.961.600,00 atau 98.29% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:



- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 60.068.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 59.202.500,00 atau 98,56% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/ Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 56.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.356.200,00 atau 98,88% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 24.581.000,00 realisasi Rp. 24.002.000,00 atau 97,64%.
 - 2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 32.414.000,00 realisasi Rp. 32.354.200,00 atau 99,82%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 210.509.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.402.900,00 atau 98.05% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan, anggaran Rp. 150.930.800,00 realisasi Rp. 146.897.300,00 atau 97,33%.
 - 2) Kegiatan Pembinaan LKK, anggaran Rp. 59.578.500,00 realisasi Rp. 59.505.600,00 atau 99,88%.

5.22.5. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Lemahwungkuk untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 304.255.500,00 atau 98,39% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 108.830.000,00 dengan realisasi



sebesar Rp. 107.355.000,00 atau 98,64% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pelatihan ketrampilan usaha, anggaran Rp. 99.650.000,00 realisasi Rp. 98.350.000,00 atau 98,70%.
- 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan, anggaran Rp. 9.180.000,00 realisasi Rp. 9.005.000,00 atau 98,09%.
- b. Program RW Bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 26.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.470.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kecamatan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.590.000,00 atau 97,91% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan lomba kelurahan tingkat kecamatan, anggaran Rp. 8.525.000,00 realisasi Rp. 8.415.000,00 atau 98,71%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran Rp. 34.975.000,00 realisasi Rp. 34.175.000,00 atau 97,71%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 130.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.840.000,00 atau 98.02% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan, anggaran Rp. 41.445.000,00 realisasi Rp. 41.445.000,00 atau 100%.
 - Kegiatan Pembinaan LKK, anggaran Rp. 88.975.000,00 realisasi Rp. 86.395.000,00 atau 97,10%.

5.22.6. Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, Kecamatan Harjamukti untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung



sebesar Rp. 248.935.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 236.915.000,00 atau 95,17% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 25.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.770.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan fasilitasi dan pembinaan posyandu tingkat kecamatan.
- b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan/kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 73.185.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.185.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyusunan profil kecamatan, anggaran Rp. 23.875.000,00 realisasi Rp. 23.875.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran Rp. 49.310.000,00 realisasi Rp. 49.310.000,00 atau 100%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 149.980.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 137.960.000,00 atau 91,99% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 44.480.000,00 realisasi Rp. 44.280.000,00 atau 99,55%.
 - 2) Kegiatan Pembinaan LKK,anggaran Rp. 105.500.000,00 realisasi Rp. 93.680.000,00 atau 88,80%.

5.22.7. Kelurahan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kejaksan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 222.021.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 218.557.750,00



atau 98,44% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 78.380.000,00 atau 99.37% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 17.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.030.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 8.430.000,00 realisasi Rp. 8.430.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran Rp. 8.600.000,00 realisasi Rp. 8.600.000,00 atau 100%.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 126.111.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 123.147.750,00 atau 97,65% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 69.925.000,00 realisasi Rp. 67.091.750,00 atau 95,95%.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 31.068.000,00 realisasi Rp. 30.956.000,00 atau 99,58%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 25.100.000,00 realisasi Rp. 25.100.000,00 atau 100%.



5.22.8. Kelurahan Kebonbaru

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kebonbaru untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 250.737.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 241.073.550,00 atau 96,15% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 8 (lima) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 22.137.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.334.000,00 atau 87,34% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan fasilitasi dan pembinaan posyandu tingkat kelurahan
- b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.967.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.706.000,00 atau 99,41% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah
- c. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.870.000,00 atau 95,47% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.256.200,00 atau 97,37% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 14.300.000,00 realisasi Rp. 13.566.000,00 atau 94,87%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran Rp. 17.800.000,00 realisasi Rp. 17.690.200,00 atau 99,38%.
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 132.767.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.



127.907.350,00 atau 96,34% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 28.012.500,00 realisasi Rp. 25.525.000,00 atau 91,12%.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 16.475.000,00 realisasi Rp. 16.014.000,00 atau 97,20%.
- 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 88.280.000,00 realisasi Rp. 86.368.350,00 atau 97,83%.

5.22.9. Kelurahan Kesenden

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kesenden untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 235.374.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 170.799.500,00 atau 72,56% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 61.065.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.805.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.695.000,00 atau 99,65% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, anggaran Rp. 15.045.000,00 realisasi Rp. 14.935.000,00 atau 99,27%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 16.760.000,00 realisasi Rp. 16.760.000,00 atau 100%.



c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 142.504.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 139.104.500,00 atau 97,61% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan LKK, anggaran Rp. 88.280.000,00 realisasi Rp. 86.368.350,00 atau 97,83%.

5.22.10. Kelurahan Sukapura

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Sukapura untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 426.179.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 426.087.000,00 atau 99,98% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam)kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 37.692.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.692.500,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembangunan kampung percontohan RW ramah
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.896.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.808.500,00 atau 99,83% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 16.424.500,00 realisasi Rp. 16.424.500,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran Rp. 34.472.000,00 realisasi Rp. 34.384.000,00 atau 99,74%.
- e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 337.590.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 337.586.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:



- 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 97.272.740,00 realisasi Rp. 97.268.500,00 atau 100%.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 78.085.000,00 realisasi Rp. 78.085.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 162.232.500,00 realisasi Rp. 162.232.500,00 atau 100%.

5.22.11. Kelurahan Kesambi

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kesambi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 166.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 166.190.000,00 atau 99,58% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 5 (lima)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 13.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.957.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 17.503.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.503.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 41.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.960.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 12.420.000,00 realisasi Rp. 12.420.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 29.540.000,00 realisasi Rp. 29.540.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 93.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 92.770.000,00 atau 99,25% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan LKK

5.22.12. Kelurahan Sunyaragi

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Sunyaragi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 225.877.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 210.863.500,00 atau 93,35% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9101.462.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 96.706.000,00 atau 95,31% digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kota,anggaran Rp. 41.650.700,00 realisasi Rp. 41.303.000,00 atau 99,71%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan,anggaran Rp. 20.458.000,00 realisasi Rp. 17.333.500,00 atau 84,73%.
 - 3) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 9.615.500,00 realisasi Rp. 9.615.500,00 atau 100%.
 - 4) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 29.738.000,00 realisasi Rp. 28.454.000,00 atau 95,68%.
- b. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 124.415.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 114.157.500,00 atau 91,76% digunakan untuk melaksanakan terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :



- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 39.450.000,00 realisasi Rp. 38.425.000,00 atau 97,40%.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 22.362.000,00 realisasi Rp. 21.172.000,00 atau 94,68%.
- 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 62.603.500,00 realisasi Rp. 54.560.500,00 atau 87.15%.

5.22.13. Kelurahan Drajat

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Drajat untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 184.305.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 174.179.500,00 atau 94,51% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 19.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.285.500,00 atau 88,37% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40.091.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.062.00,00 atau 94,94% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 8.343.500,00 realisasi Rp. 8.325.500,00 atau 99,78%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 31.748.000,00 realisasi Rp. 29.736.500,00 atau 93,66%.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 124.654.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.



118.832.000,00 atau 95,33% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan,anggaran Rp. 97.682.500,00 realisasi Rp. 92.310.500,00 atau 94.50%.
- 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 26.971.500,00 realisasi Rp. 26.521.500,00 atau 98,33%.

5.22.14. Kelurahan Pekiringan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Pekiringan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 187.938.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 186.657.100,00 atau 99,32% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 6 (enam)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.264.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.263.400,00 atau 99,99% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18.012.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.860.800,00 atau 99,16% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.638.100,00 atau 99,99% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 14.101.000,00 realisasi Rp. ,14.100.900,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 29.540.000,00 realisasi Rp. 29.537.200,00 atau 99,99%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 121.021.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 119.894.800,00 atau 99,07% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 9.461.000,00 realisasi Rp. 8.981.000,00 atau 94.93%.
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 111.560.000,00 realisasi Rp. 110.913.800,00 atau 99,42%.

5.22.15. Kelurahan Karyamulya

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Karyamulya untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 266.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 249.472.350,00 atau 93,47% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.993.100,00 atau 98,94% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.970.000,00 atau 99,80% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan lomba RW zero waste Tingkat kelurahan,anggaran Rp. 7.500.000,00 realisasi Rp. 7.485.000,00 atau 99,80%.
 - 2) Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan,anggaran Rp. 7.500.000,00 realisasi Rp. 7.485.000,00 atau 99,80%.



- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 35.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.503.000,00 atau 88,47% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 10.450.000,00 realisasi Rp. 10.085.000,00 atau 96,51%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 25.160.000,00 realisasi Rp. 21.418.000,00 atau 85.13%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 206.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 193.006.250,00 atau 93,60% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 181.200.000,00 realisasi Rp. 168.156.250,00 atau 92,80%.
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 24.850.000,00 atau 99,40%.

5.22.16. Kelurahan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Lemahwungkuk untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 120.204.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 115.373.600,00 atau 95,98% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 13.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.449.600,00 atau 84,37% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.



- 23.174.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 22.174.000,00 atau 95,68% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 9.464.000,00 realisasi Rp. 8.464.000,00 atau 89.43%.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 13.710.000,00 realisasi Rp. 13.710.000,00 atau 100%.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 83.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.750.000,00 atau 97,95% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 58.500.000,00 realisasi Rp. 58.050.000,00 atau 99,23%.
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 24.960.000,00 realisasi Rp. 23.700.000,00 atau 94,95%.

5.22.17. Kelurahan Panjunan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Panjunan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 265.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 248.193.100,00 atau 93,62% untuk melaksanakan 4 (tiga) program dan 6 (enam)kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 139.602.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 135.881.650,00 atau 97,33% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pelatihan keterampilan usaha.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.



- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 63.442.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 62.761.450,00 atau 98,93% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan fasilitasi administrasi kelurahan,anggaran Rp. 43.461.250,00 realisasi Rp. 43.286.450,00 atau 99,60%.
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 19.981.500,00 realisasi Rp. 19.475.000,00 atau 97,47%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 52.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.550.000,00 atau 95,20% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 22.500.000,00 atau 90,00%.
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 27.050.000,00 realisasi Rp. 27.050.000,00 atau 100%.

5.22.18. Kelurahan Kasepuhan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kasepuhan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 254.103.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 249.764.600,00 atau 98,29% untuk melaksanakan 4 (tiga) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 53.030.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.700.300,00 atau 99,38% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pelatihan keterampilan usaha.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 14.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.990.000,00 atau 99,36%



- digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 56.981.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.426.500,00 atau 97,27% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 17.085.000,00 realisasi Rp. 16.785.000,00 atau 98,24%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 39.896.000,00 realisasi Rp. 38.641.500,00 atau 96,86%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 130.012.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.647.800,00 atau 98,18% digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 15.540.000,00 realisasi Rp. 15.540.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 86.110.000,00 realisasi Rp. 84.695.000,00 atau 98,36%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 28.362.800,00 realisasi Rp. 27.412.800,00 atau 96,65%.

5.22.19. Kelurahan Pegambiran

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Pegambiran untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 233.405.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 222.540.700,00 atau 95,34% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :



- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 65.500.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.205.500,00 atau 99,55% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha,anggaran Rp. 55.040.000,00 realisasi Rp. 54.820.000,00 atau 99,60%.
 - 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan,anggaran Rp. 10.460.500,00 realisasi Rp. 10.385.500,00 atau 99,28%.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 9.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.630.000,00 atau 96,69% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 45.695.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.548.400,00 atau 82,17% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 9.397.500,00 realisasi Rp. 8.912.500,00 atau 94,84%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 36.297.500,00 realisasi Rp. 28.635.900,00 atau 78,89%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 112.250.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 110.156.800,00 atau 98,13% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 75.085.500,00 realisasi Rp. 73.167.000,00 atau 97,44%.



2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 37.164.800,00 realisasi Rp. 36.989.800,00 atau 99,53%.

5.22.20. Kelurahan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Pekalipan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 278.136.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 273.992.250,00 atau 98,51% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 6 (enam)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8.199.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.199.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 69.901.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.879.250,00 atau 99,97% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.333.000,00 atau 94,67% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 21.244.000,00 realisasi Rp. 21.124.000,00 atau 99,44%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 29.811.000,00 realisasi Rp. 27.209.000,00 atau 91,27%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 148.981.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.581.000,00 atau 98,13% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu :



- 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 124.598.000,00 realisasi Rp. 124.508.000,00 atau 99,93%.
- 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 24.383.000,00 realisasi Rp. 23.073.000,00 atau 94,63%.

5.22.21. Kelurahan Pekalangan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Pekalangan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 325.713.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 324.409.500,00 atau 99,60% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 8 (delapan)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 27.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.000.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 48.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 48.745.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 56.485.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.445.500.000,00 atau 99,93% digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan lomba kelurahan tingkat kecamatan,anggaran Rp. 10.031.000,00 realisasi Rp. 10.031.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 20.687.500,00 realisasi Rp. 20.647.500,00 atau 99,81%.



- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 25.767.000,00 realisasi Rp. 25.767.000,00 atau 100%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 193.483.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 192.219.000,00 atau 99,35% digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 118.483.000,00 realisasi Rp. 118.483.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan lokakarya dan vitalisasi kinerja LKK,anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 48.736.000,00 atau 97,47%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 25.000.000,00 atau 100%.

5.22.22. Kelurahan Jagasatru

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Jagasatru untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 246.581.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 139.316.000,00 atau 56,50% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima)kegiatan sebagai berikut :

- d. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 38.455.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.455.000,00 atau 99,35% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 10.720.000,00 realisasi Rp. 10.720.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 27.735.000,00 realisasi Rp. 27.735.000,00 atau 100%.
- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 178.126.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.861.000,00 atau 39.78% digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 120.000.000,00 realisasi Rp. 14.623.000,00 atau 12,19%.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 23.526.000,00 realisasi Rp. 22.526.000,00 atau 95,75%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 34.600.000,00 realisasi Rp. 33.712.000,00 atau 97,43%.

5.22.23. Kelurahan Pulasaren

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Pulasaren untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 155.707.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.477.000,00 atau 96,64% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 33.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.290.000,00 atau 97,51% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.290.000,00 atau 97,51% digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyusunan profil kelurahan,anggaran Rp. 11.560.000,00 realisasi Rp. 11.440.000,00 atau 98.96%.



- 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 9.350.000,00 realisasi Rp. 9.350.000,00 atau 100%.
- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 22.460.000,00 realisasi Rp. 21.500.000,00 atau 95,73%.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 78.862.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 75.232.000,00 atau 95,40% digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 37.510.000,00 realisasi Rp. 36.340.000,00 atau 96.88%.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 16.000.000,00 realisasi Rp. 16.000.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 25.352.000,00 realisasi Rp. 22.892.000,00 atau 90,30%.

5.22.24. Kelurahan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Harjamukti untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 284.458.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 282.821.150,00 atau 99,42% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam)kegiatan sebagai berikut:

- a. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 41.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.865.250,00 atau 99,38% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.



43.988.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.403.100,00 atau 98,67% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 12.280.000,00 realisasi Rp. 12.180.000,00 atau 99,19%.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 31.708.000,00 realisasi Rp. 31.223.100,00 atau 98,47%.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 199.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 198.552.800,00 atau 99,60% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 44.900.000,00 realisasi Rp. 44.843.000,00 atau 99,87%.
 - 2) Kegiatan lokakarya dan vtalisasi kinerja LKK,anggaran Rp. 80.000.000,00 realisasi Rp. 79.935.200,00 atau 99,92%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 74.450.000,00 realisasi Rp. 73.774.600,00 atau 99,09%.

5.22.25. Kelurahan Argasunya

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Argasunya untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 212.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 205.087.800,00 atau 96,40% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 6 (enam)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 86.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 85.950.000,00 atau 99,42% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pelatihan keterampilan usaha.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 27.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.475.000,00 atau 91,06%



digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.

- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 30.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.342.800,00 atau 95,97% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 16.015.000,00 realisasi Rp. 15.825.600,00 atau 98,81%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 14.560.000,00 realisasi Rp. 13.517.800,00 atau 92,84%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 67.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.320.000,00 atau 94,94% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 42.750.000,00 realisasi Rp. 40.250.000,00 atau 94.15%.
 - 2) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 24.070.000,00 atau 96,28%.

5.22.26. Kelurahan Kalijaga

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Lemahwungkuk untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 147.445.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 146.771.700,00 atau 99,54% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 5 (lima)kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 70.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.606.000,00 atau 99,44% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pelatihan keterampilan usaha.



- b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan penunjang bantuan RW.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.445.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.185.000,00 atau 99,39% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 12.785.000,00 realisasi Rp. 12.785.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 29.660.000,00 realisasi Rp. 29.400.000,00 atau 99,12%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.980.700,00 atau 99,94% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan LKK

5.22.27. Kelurahan Kecapi

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kecapi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 203.315.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 195.515.000,00 atau 96,16% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.000.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha,anggaran Rp. 32.000.000,00 realisasi Rp. 32.000.000,00 atau 100%.



- 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Posyandu Tingkat Kelurahan,anggaran Rp. 23.000.000,00 realisasi Rp. 23.000.000,00 atau 100%.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 47.915.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.615.000,00 atau 99,37% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 8.615.000,00 realisasi Rp. 8.315.000,00 atau 96,52%.
 - 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi,anggaran Rp. 39.300.000,00 realisasi Rp. 39.300.000,00 atau 100%.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 100.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 92.900.000,00 atau 92,53% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,anggaran Rp. 36.300.000,00 realisasi Rp. 36.300.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan lokakarya dan vitalisasi kinerja LKK,anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi Rp. 20.000.000,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 43.800.000,00 realisasi Rp. 36.300.000,00 atau 82,88%.

5.22.28. Kelurahan Larangan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Larangan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 326.807.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 307.104.150,00 atau 93,97% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh)kegiatan sebagai berikut :



- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 59.695.650,00 atau 99,49% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pelatihan keterampilan usaha.
- b. Program RW bersih, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.861.500,00 atau 97,33% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Lomba Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3) Tingkat Kelurahan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 26.807.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.100.000,00 atau 41,41% digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan penyusunan profil kelurahan,anggaran Rp. 15.082.000,00 realisasi Rp. 0,00 atau 0%.
 - 2) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan,anggaran Rp. 11.725.000,00 realisasi Rp. 11.100.000,00 atau 94,67%.
- d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 160.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 158.447.000,00 atau 99.03% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 45.000.000,00 realisasi Rp. 44.734.500,00 atau 99,41%.
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan,anggaran Rp. 90.000.000,00 realisasi Rp. 89.360.000,00 atau 99,29%.
 - 3) Kegiatan pembinaan LKK,anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasi Rp. 24.352.500,00 atau 97,41%.



5.23. Urusan Statistik

Urusan statistik dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut

5.23.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun anggaran 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk urusan statistik mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 389.326.000,00 realisasi Rp. 383.107.700,00 atau 98,40% untuk melaksanakan1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 389.326.000,00 realisasi Rp. 383.107.700,00 atau 98,40% digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB, anggaran Rp. 61.462.000,00 realisasi Rp. 60.110.400,00 atau 97,80%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan IPM,anggaran Rp. 59.942.000,00 realisasi Rp. 59.020.400,00 atau 98,46%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah,anggaran Rp. 78.927.000,00 realisasi Rp. 78.347.000,00 atau 99,27%.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Indikator Makro Daerah,anggaran Rp. 60.887.000,00 realisasi Rp. 59.585.400,00 atau 97,86%.
 - 5) Kegiatan penyusunan selayang pandang Kota Cirebonanggaran Rp. 68.411.000,00 realisasi Rp. 67.187.500,00 atau 98,21%.
 - 6) Kegiatan Penyusunan Indikator Kemahalan Konstruksi Kota Cirebon,anggaran Rp. 59.697.000,00 realisasi Rp. 58.857.000,00 atau 98.59%.

5.23. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan Sekretariat Daerah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :



5.23.1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pada tahun anggaran 2015, urusan kearsipan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.359.869.970,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.184.566.879,00 atau 87,11% yang digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan sebagai berikut :

- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program Rp. 582.013.770,00 terealisasi Rp. 485.514.173,00 atau 83,42%, digunakan untuk 14 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 7.170.000,00 terealisasi Rp.7.020.000,00 atau 97,91%
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 153.000.000,00 terealisasi Rp. 94.362.824,00 atau 61,68%
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 18.000.000,00 terealisasi Rp. 13.354.240,00 atau 74,19%
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 14.960.000,00 terealisasi Rp. 5.230.300,00 atau 34,96%
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 123.904.500,00 terealisasi Rp. 121.302.200,00 atau 97,90%
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, anggaran Rp. 23.020.000,00 terealisasi Rp. 21.460.000,00 atau 93,22%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 17.671.970,00 terealisasi Rp. 17.296.400,00 atau 97,87%
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 17.085.300,00 terealisasi Rp. 16.018.000,00 atau 93,75%
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 7.111.000,00 terealisasi Rp. 7.111.000,00 atau 100%



- 10)Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 4.000.000,00 terealisasi Rp. 4.000.000,00 atau 100%
- 11)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp. 49.232.000,00 terealisasi Rp. 35.792.000,00 atau 72,70%
- 12)Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp. 3.960.000,00 terealisasi Rp. 3.240.000,00 atau 81,82%
- 13)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 44.399.000,00 terealisasi Rp. 40.833.500,00 atau 91,97%
- 14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp. 98.500.000,00 terealisasi Rp. 98.493.709,00 atau 99,99%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran pada program Rp. 316.851.200,00 terealisasi Rp. 255.018.256,00 atau 80,49 %, digunakan untuk3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 66.001.000,00 terealisasi Rp. 62.132.500,00 atau 94,14%
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, alokasi anggaran Rp. 49.696.000,00 terealisasi Rp. 48.784.500,00 atau 98,17%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, alokasi anggaran Rp. 201.154.200,00 terealisasi Rp. 144.101.256,00 atau 71,64%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran pada program
 Rp. 20.075.000,00 terealisasi Rp. 15.395.000,00 atau 76,69%,
 digunakan untuk1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, alokasi anggaran Rp. 20.075.000,00 terealisasi Rp. 15.395.000,00 atau 76,69%,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran pada program Rp. 29.175.000,00 terealisasi Rp. 29.175.000,00 atau 100%, digunakan untuk1 (satu) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, alokasi anggaran Rp. 29.175.000,00 terealisasi Rp. 29.175.000,00 atau 100%
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran pada program Rp. 54.795.000,00 terealisasi Rp. 54.195.000,00 atau 98,91%, digunakan untuk3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, alokasi anggaran Rp. 33.716.000,00 terealisasi Rp. 33.716.000,00 atau 100%.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, alokasi anggaran Rp. 5.166.500,00 terealisasi Rp. 5.166.500,00 atau 100%.
 - 3) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, alokasi anggaran Rp. 15.912.500,00 terealisasi Rp. 15.312.500,00 atau 96,23%
- f. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, alokasi anggaran pada program Rp. 162.190.950,00 terealisasi Rp. 156.915.950,00 atau 96,75%, digunakan untuk1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1. Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, alokasi anggaran Rp. 162.190.950,00 terealisasi Rp. 156.915.950,00 atau 96,75%.
- g. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, alokasi anggaran pada program Rp. 123.394.450,00 terealisasi Rp. 120.064.500,00 atau 97,30%, digunakan untuk 2(dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah, alokasi anggaran Rp. 55.782.500,00 terealisasi Rp. 53.857.500,00 atau 96,55%
 - 2) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data, alokasi anggaran Rp. 67.611.950,00 terealisasi Rp. 66.207.000,00 atau 97,92%.
- h. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi*, alokasi anggaran pada program Rp. 71.374.600,00 terealisasi Rp. 68.289.000,00 atau 95,68%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :



1) Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta, alokasi anggaran Rp. 71.374.600,00 terealisasi Rp. 68.289.000,00 atau 95,68%

5.23.2. Sekretariat Daerah

Pada tahun anggaran 2015, urusan kearsipan pada Sekretariat Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.020.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.020.000,00 atau 100% yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, alokasi anggaran pada program Rp. 9.020.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.020.000,00 atau 100%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - ii. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data, anggaran Rp. 9.020.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.020.000,00 atau 100%

5.24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Sekretariat Daerah, Kelurahan Kebonbaru dan Kelurahan Panjunan dengan total anggaran Rp. 3.037.372.900,00 terealisasi Rp. 2.836.395.743,00 atau 93,38%. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.24.1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.491.640.000,00 realisasi Rp.2.399.780.743,00 atau 96,31% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (duabelas) kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 817.608.000,00 realisasi Rp.



748.912.443,00 atau 91,60%digunakan untuk melaksanakan3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi,anggaran Rp. 167.968.000,00 realisasi Rp. 119.568.000,00 atau 71,18%.
- 2) Kegiatan Pengelolaan LPSE,anggaran Rp. 249.640.000,00 realisasi Rp. 243.460.000,00 atau 97,52%.
- 3) Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi Kota Cirebon,anggaran Rp. 400.000.000,00 realisasi Rp. 385.884.443,00 atau 96,47%.
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 190.000.000,00 realisasi Rp.183.847.500,00 atau96,76% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
- c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 72.032.000,00 realisasi Rp.70.291.800,00 atau 97,58% digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Informasi, Komunikasi dan Telematika.
- d. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100% digunakan untuk melaksanakan1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
- e. Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi, alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.362.000,00 realisasi Rp. 1.346.792.000,00 atau 98,88% digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Wireless,anggaran Rp. 190.000.000,00 realisasi Rp. 188.955.000,00 atau 99,45%.
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Tower,anggaran Rp. 190.000.000,00 realisasi Rp. 189.100.000,00 atau 99,53%.



- 3) Kegiatan Pemeliharaan Server dan Upgrade Konten Websiteanggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi Rp. 49.380.000,00 atau 98,769%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan peralatan pendukung,anggaran Rp. 700.000.000,00 realisasi Rp. 687.888.000,00 atau 98,27%.
- 5) Kegiatan Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon,anggaran Rp. 102.000.000,00 realisasi Rp. 101.456.000,00 atau 99,47%.
- 6) Kegiatan Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan Jaringan Teknologi Informasi LPSE,anggaran Rp. 130.000.000,00 realisasi Rp. 129.950.000,00 atau 99,96%.

5.24.2. **Sekretariat Daerah**

Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat Daerah untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 485.746.400,00 realisasi Rp. 400.506.500,00 atau 82,45% untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 1 (satu)kegiatan yaitu Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

5.24.3. Kelurahan Kebonbaru

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kebonbaru untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 36.581.000,00 realisasi Rp.36.108.500,00 atau 98,71% untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media yang tersiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.



5.24.4. Kelurahan Panjunan

Pada tahun anggaran 2015, Kelurahan Kebonbaru untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 23.405.500,00 realisasi Rp.0,00 atau 0% untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

5.25. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dengan total anggaran Rp. 339.362.200,00 terealisasi Rp. 332.296.100,00 atau 97,92%. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

5.25.1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 339.362.200,00 terealisasi Rp. 332.296.100,00 atau 97,92%. untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 339.362.200,00 terealisasi Rp. 332.296.100,00 atau 97,92%, digunakan untuk 4(empat) kegiatan yaitu :
 - 2) Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca, anggaran Rp. 87.676.500,00 terealisasi Rp. 86.510.500,00 atau 98,67 %.
 - 3) Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, anggaran Rp. 100.374.500,00 terealisasi Rp. 98.487.800,00 atau 98,12%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, anggaran Rp. 97.074.000,00 terealisasi Rp. 94.467.000,00 atau 97,31%.



5) Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, anggaran Rp. 54.237.200,00 terealisasi Rp. 52.830.800,00 atau 97,41%.

6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Cirebon dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013–2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 ini, dimaksudkan untuk mensinergikan program-program pembangunan di daerah dalam kerangka pelaksanaan RPJP KOTA Cirebon tahun 2005-2025, sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJP Daerah yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan



dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Secara umum kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada setiap SKPD cukup memenuhi kebutuhan. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada beberapa SKPD terutama sarana pendukung berupa komputer.

Kekurangan tersebut dapat diatasi oleh setiap SKPD melalui pengadaan (belanja modal) dengan mengalokasikan anggaran pengadaan perangkat computer masing-masing SKPD.

8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa isu-isu strategis merupakan kumpulan permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan di Kota Cirebon antara lain :

Tabel 13. Permasalahan dan Solusi

N O.	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	URUSAN WAJIB	
01	PENDIDIKAN	
1	Masih adanya anak putus sekolah dan rawan putus sekolah	Peningkatan Wajar Dikdas 9 tahun dan menuju Wajar 12
2	Masih terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan	tahun serta tata kelola pendidikan
3.	Masih ada masyarakat yang buta huruf	Penuntasan angka melek huruf di Kota Cirebon
02	KESEHATAN	
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
		Peningkatan pelayanan kesehatan lanjutan



		3.	Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan antara pemerintah , masyarakat dan
			stokeholder
03	PEKERJAAN UMUM		
1	Pengembangan kawasan yang mempunyai aksebilitas rendah	1.	Pembangunan jalan baru untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan aksebilitas kawasan
		2.	Pembangunan (peningkatan) ruas-ruas jalan kolektor strategis
2	Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat genangan air	1.	Rehabilitasi ruas – ruas jalan yang rusak paska genangan air (hujan)
3	Masih dijumpainya kawasan-kawasan rawan tergenang banjir pada musim hujan	1.	Pengendalian dan penanganan banjir pada kawasan rawan banjir
04	PERUMAHAN		
1	Masih banyaknya permukiman kumuh dan padat serta rendahnya kualitas hunian	1.	Perbaikan lingkungan perumahan
			Perbaikan perumahan kumuh
2	Kurangnya penataan dan pemanfaatan TPU		Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
		2.	Pengelolaan areal TPU
05	PENATAAN RUANG		
1	Sudah habis masa berlakunya	1.	Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Cirebon
	Rencana Induk Kota (RIK) Cirebon 1986 - 2004 dan telah disusunnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 2015 yang mengacu kepada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang	2.	terhadap RTRW Kota Cirebon Penyusunan Rencana Tata Ruang turunan RTRW
2	1986 - 2004 dan telah disusunnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 2015 yang mengacu kepada UU	2.	terhadap RTRW Kota Cirebon Penyusunan Rencana Tata Ruang turunan RTRW



	pemerintah dalam hal penataan ruang		ruang secara intensif
06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1	Belum optimalnya koordinasi dalam ruang lingkup bidang Sarana dan Prasarana	1.	Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah dalam ruang lingkup Bidang Sarana dan Prasarana
2	Belum terjadinya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD lingkup bidang ekonomi , lembaga ekonomi masyarakat /lembaga keswadayaan masyarakat maupun badan –badan usaha.	1.	Koordinasi lintas sektor dan lintas program/kegiatan agar dicapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
3	Kurangnya komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkup Bidang Sosial & Budaya	1.	Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkup Bidang Sosial & Budaya
4	Kemampuan teknis aparatur perencana dalam penysusunan Proposal Activity Plan belum dimiliki semua sebagian besar SKPD	1.	Capacity building aparatur dalam penyusunan Proposal Activity Plan
5	Masih tingginya angka kematian bayi pada pelayanan kesehatan lanjutan walau terobosan RSBM telah 2 tahun berlangsung. Masih tingginya siswa rawan putus sekolah	1.	Akselerasi penurunan AKB dan akselerasi WAJAR 12 tahun
6	Ancaman bencana alam dan sosial meningkat	1.	Konsep penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
7	Masih tingginya kekerasan pada anak dan perempua baik dirumah, sekolah maupun di masyarakat	1.	Optimalisasi jejaring perlindungan anak dan perempuan dengan lembaga terkait Bidang Sosial Budaya
8	Ancaman bencana alam dan sosial meningkat	1.	masyarakat
9	Manajemen pusat pendidikan belum optimal	1.	pendidikan formal dan non formal
10	Pemilihan Walikota Baru	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan
07	PERHUBUNGAN		



1	Menurunnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana jalan akibat meningkatnya pertumbuhan lalu lintas	. Meningkatkan sa prasarana perhu didukung oleh pa IPTEK	bungan yang
2	Banyaknya simpul kemacetan lalulintas yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara kemampuan daya dukung jalan dengan volume lalulintas/beban kendaraan serta terbatasnya perlengkapan jalan yang terpasang	. Pengurangan wi kemacetan	layah rawan
3	Belum optimalnya kinerja pelayanan angkutan umum	. Peningkatan kin angkutan umum	
4	Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kota dengan Bandara, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Perikanan Kejawanan.	Pelabuhan Kejawanan	ra Pemerintah n Bandara, irebon, dan Perikanan
5	Masih banyaknya daerah yang belum mendapat pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	. Pemasangan c PJU	lan perbaikan
08	LINGKUNGAN HIDUP		
1.	Meningkatnya kerusakan berbagai ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan konservasi terbatas dan lingkungan perairan (pantai dan estuaria).	. Pengelolaan da ekosistem pesis	
	,	0 0	kualitas an penataan da kawasan terbatas
		3. Meningkatkan	si sumber daya kungan hidup
2.	Menurunnya kualitas air dan udara pada kawasan kota akibat	. Pengendalian dan perusaka	pencemaran



	peningkatan emisi gas buang dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya ruang terbuka hijau dan berkurangnya resapan air tanah		hidup
		2.	Pengendalian polusi/pencemaran udara dan air
		3.	Pengelolaan, Pemanfaatan dan menambah ruang terbuka hijau
		4.	Konservasi air tanah
3.	Kurang memadainya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara terpadu, simultan dan sinergis		Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
		2.	Pengembangan basis data informasi lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses masyarakat.
4.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah/K3	1.	Pencegahan dan penaggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah dan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah
		2.	Peningkatan kemampuan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah
5.	Belum tersedianya perencanaan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	1.	Peningkatan kualitas Iingkungan melalui perencanaan lingkungan terpadu
6.	Banyaknya sarana dan prasarana persampahan yang rusak	1.	Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan
09	PERTANAHAN		
1	Masih banyaknya tanah-tanah	1.	Pembebasan tanah untuk



	yang diperuntukan untuk pelebaran jalan dan ruang terbuka hijau yang masih dikuasai masyarakat	kepentingan pembangunan
2	Penguasaan tanah timbul sepanjang pantai yang tidak terkendali	Ketertiban kepemilikan tanah timbul
		Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi
10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1	Peningkatan pelayanan kependudukan	Pengendalian penduduk migran
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Masih banyak perempuan yang tidak berdaya	Peningkatan pemberdayaan perempuan
13	SOSIAL	
1	Semakin meningkatnya penyandang masalah sosial	Pemberantasan penyandang masalah sosial
14	TENAGA KERJA	
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diimbangi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari Kota Cirebon	Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja
15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1	Peran KUKM, IKM dan sektor informasi (PKL) belum optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal	 Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UKM Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Pelaksanaan pembinaan organisasi PKL (Korwil) dan asongan



16	PENANAMAN MODAL	
1	Iklim investasi belum kondusif	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
17	KEBUDAYAAN	-
1	Pelestarian budaya daerah	 Pengembangan nilai budaya Pengelolaan kekayaan budaya Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai agama dan Budaya Daerah
22	PEMERINTAHAN UMUM	
1.	Proses penyusunan APBD tidak sesuai dengan jadwal.	Penyusunand dokumen-dokumen pendukung APBD sesuai aturan
2.	Tata organisasi pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik melalui tata organisasi pemerintah yang efisien dan efektif
3.	Hubungan legislatif dan eksekutif masih belum optimal	Peningkatan kualitas hubungan eksekutif – legislatif
4.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan: - laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan per triwulan belum optimal dilakukan seluruh SKPD (bahan laporan dari PPTK sering tidak disusun) Intensitas penanganan pengaduan masyarakat	 Pembenahan kinerja SKPD dalam pelaporan. Pembenahan substansi LAKIP Optimalisasi kinerja SKPD yg menangani Pengaduan Masyarakat Optimalisasi SKPD yang bertugas sebagai "pemberi peringatan dini".
5.	Pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.	 Peningkatan pemanfaatan dana-dana masyarakat dan mitra kerja. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah



6.	Penyusunan produk hukum terutama peraturan daerah selama ini berbiaya tinggi.	Penyusunan produk hukum sesuai aturan.
7.	Keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah menyebabkan perlunya upaya alternatif mencari sumber pembiayaan lainnya.	Penyusunan dokumen rencana pembangunan yang dibiayai dari dunia usaha melalui CSR, dan alternatif sumber pembiayaan lainnya.
21	KEPEGAWAIAN	
1.	Pengembangan karir PNS yang belum berbasis kompetensi	Penerapan pola karir PNS yang berbasis kompetensi
2.	Kualitas SDM Aparatur masih kurang	Peningkatan kualitas SDM Aparatur
3.	Pelayanan administrasi kepegawaian yang belum optimal	Peningkatan pelayanan administrasi secara cepat, tepat, aman, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan
4.	Penghargaan bagi PNS yang berprestasi masih kurang	Meningkatkan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
5.	Sistem pengolahan data dan informasi kepegawaian belum optimal	Penerapan sistem pengolahan data dan informasi secara optimal
6.	Disiplin PNS masih perlu ditingkatkan	Peningkatan pembinaan disiplin PNS
23	STATISTIK	
1.	Terbatasnya data/informasi hasil pembangunan Kota Cirebon	Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan CDA Kota Cirebon Tahun 2015
2.	Terbatasnya data/informasi untuk kebutuhan investasi	Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan Profil Daerah Kota Cirebon Tahun 2015
3.	Terbatasnya data statistik ekonomi dan indikator ekonomi Kota Cirebon	Pemenuhan data/informasi statistik ekonomi dan indikator ekonomi makro Kota Cirebon melalui penyusunan PDRB Kota Cirebon Tahun 2015



4. II.	Terbatasnya data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan lingkup bidang sosial dan budaya URUSAN PILIHAN	Pemenuhan data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan lingkup bidang sosial dan budaya
01	PERTANIAN	
1	Ketahanan Pangan dan peningkatan Agribisnis	 Peningkatan pembinaan dan sosialisasi program dan kegiatan kepada pelaku pertanian untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi Mempertajam dan mengaktualisasikan sistem informasi kinerja outcome (pencapaian sasaran) Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya) pertanian yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar (agribisnis) Peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, peternakan) yang berwawasan lingkungan Peningkatan efisiensi usahatani (tanaman pangan hortikultura, peternakan) yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK dan IMTAK
04	PARIWISATA	
1	Promosi Pariwisata	 Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan kemitraan
05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	



	Peningkatan industri berbasis kelautan	 Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya) kelautan yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar. Peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan. Peningkatan efisiensi usaha perikanan (petambak dan pembudidaya ikan air tawar) serta nelayan yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif). Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK dan IMTAK
06	PERDAGANGAN	
1	Pengembangan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan dan pengembangan ekspor Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
07	PERINDUSTRIAN	
1	Pengembangan Industri	Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Pengembangan industri kecil menengah Peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra Industri potensial



B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN

1.1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai

berikut:

1.1.1. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pada program ini terdapat
 - 14 (empat belas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



- 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
 - 3) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 6) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
- f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
 - 2) Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan;
 - 3) Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh (Dana Propinsi).
- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak.
 - 2) Kegiatan Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan;
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan;



- 4) Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan
- 5) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.
- 6) Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (dana Provinsi)
- h. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian. Pada program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Biaya Umum Kegiatan Bidang Pertanian (DAK Bidang Pertanian);
 - 2) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Kualitas Pertanian (DAK Bidang Pertanian);
 - 3) Kegiatan Biaya Umum Kegiatan Bidang Peternakan (DAK Bidang Pertanian);
 - 4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (DAK Bidang Pertanian);
 - 5) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Kualitas Pertanian (Luncuran DAK 2014);
 - 6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (Luncuran DAK 2014).
- i. Program Pencegahan Penyakit Ternak. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.

1.2. Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan Peternakan dan Pertanian. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1 Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pada program ini terdapat 1 (satu)
 kegiatan yaitu :



1) Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.

1.3. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1.3.1 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, pada program ini terdapat3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
 - 2) Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;
 - Pelaksanaan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 1) Kegiatan Destinasi Wisata Siap Kunjung (Dana Propinsi)
- c. Program Pengembangan kemitraan, pada program ini terdapat2 (dua) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database;
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

1.4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

- a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :



- 1) Kegiatan Pengembangan BIbit Ikan Unggul;
- 2) Kegiatan Gemar Makan Ikan;
- 3) Kegiatan Temu Teknologi Penyuluhan Perikanan.
- c. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan, pada program ini terdapat (tiga) kegiatan :
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Kegiatan Biaya Umum Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (SILPA).

1.5 Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1.5.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada program ini terdapat14
 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;



- 10)Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 4) Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas Jabatan.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Pada program ini terdapat 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
 - 3) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.
 - 4) Kegiatan Penyusunan Profil SKPD
- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen;
 - Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa .
- f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri , Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;



- 2) Kegiatan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- 3) Rehabilitasi dan Renovasi Pasar Tradisional (DAK P3K2)

1.6. Urusan Industri

Urusan industri ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

1.6.1 DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta;
- b. Program peningkatan kemampuan Teknologi industri. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri.
- c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Promosi Pemasaran Industri Kecil Menengah.

1.7 Urusan Ketransmigrasian

Urusan ketransmigrasian ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketransmigrasian tidak terlaksana.

2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PILIHAN

2.1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

2.1.1. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

Pada tahun anggaran 2015 , Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung



sebesar Rp. 8,738,752,550,00 realisasi Rp. 8,340,418,962,00 atau95,44%untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan yaitu

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 1,230,802,550,00 terealisasi Rp. 1.128,767,498,00 atau 91,71 % digunakan untuk 14 (empat belas) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 1.500.000,00 terealisasi Rp. 827,500,00 atau 55,17 %
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 188,040,000,00 terealisasi Rp. 160,745,569,00 atau 85,48 %
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 47,729,000,00 terealisasi Rp. 43,102,663,00 atau 90,31 %
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 26,000,000,00 terealisasi Rp. 10,872,850,00 atau 41,82 %
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 236,070,000,00 terealisasi Rp. 222,022,000,00 atau 94,05 %
 - 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp. 67,950,450,00 terealisasi Rp. 67,110,000,00 atau 98,76%
 - 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 53,170,000,00terealisasi Rp. 43,162,600,00 atau 81,18 %
 - 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp. 6,789,000,00 terealisasi Rp. 6,590,000,00 atau 97,07 %
 - 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran Rp. 25,598,000,00 terealisasi Rp. 24,338,000,00 a tau 95,08 %
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp 14,520,000,00 terealisasi Rp. 13,450,000,00 atau 92,63 %



- 11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 64,519,100,00 terealisasi Rp. 63,697,000,00 atau 98,73%
- 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp 399,980,000,00 terealisasi Rp. 378,713,316,00 atau 94,68 %
- 13) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 95,337,000,00 terealisasi Rp 91,544,000,00 atau 96,02 %
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 912,678,000,00 terealisasi Rp. 800,950,974,00 atau 87,76 %, digunakan untuk 5(lima) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan , anggaran Rp. 151,615,000,00 terealisasi Rp. 148,640,000,00 atau 98,04%
 - 2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor, anggaran Rp. 149,640,000,00 terealisasi Rp 143,295,000,00 atau 95,78%
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 168,800,000,00 terealisasi Rp. 162,776,000,00 atau 96,43%
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp 416,653,000,00 terealisasi Rp. 336,331,174,00 atau 80,72%
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 26,000,000,00 terealisasi Rp. 9,908,800,00 atau 38,11%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 39,953,000,00 terealisasi Rp. 36,175,000,00 atau 90,54%, digunakan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian, anggaran Rp. 39,953,000,00 terealisasi Rp. 36,175,000,00 atau 90,54%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 18,310,000 terealisasi Rp. 14,550,000,00 atau 79,46%



- 1). Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, anggaran Rp. 18,310,000,00 terealisasi Rp. 14,550,000,00 atau 79,46%.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 187,566,000,00 terealisasi Rp. 176,445,500,00 atau 94,07%, digunakan untuk 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp. 53,477,000,00 terealisasi Rp. 53,037,000,00 atau 99,18 %
 - 2) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, anggaran Rp. 4,449,000,00 terealisasi Rp. 4,425,000,00 atau 99,46%
 - 3) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, anggaran Rp. 7,070,000,00 terealisasi Rp. 4,320,000,00 atau 61,10%
 - 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 72,150,000,00 terealisasi Rp. 70,117,500,00 atau 97,18 %
 - 5) Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 35,600,000,00 terealisasi Rp. 30,396,000,00 atau 85,38 %
 - 6) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap, anggaran Rp. 14,480,000, terealisasi Rp14,150,000,00 atau 95,48 %
- f. Program Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 489,925,000,00 terealisasi Rp. 472,479,000,00 atau 96,44 %, digunakan untuk 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan, anggaran Rp. 220,000,000,00 terealisasi Rp. 215,172,000,00 atau 97,81 %
 - 2) Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, anggaran Rp. 235,365,000,00 terealisasi Rp. 222,747,000,00 atau 94,64 %
 - 3) Kegiatan Biaya Operasional Penyuluh (Dana Propinsi), anggaran Rp. 34,560,000,00 terealisasi Rp. 34,560,000,00 atau 100 %



- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 3,210,401,500,00 terealisasi Rp. 3,145,626,490,00 atau 97,98 % digunakan untuk 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak,anggaran Rp. 410,731,000,00 terealisasi Rp. 404,794,690,00 atau 98,55%
 - 2) Kegiatan Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan, anggaran Rp. 150,000,000,00 terealisasi Rp. 133,136,000,00 atau 88,76 %
 - 3) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan, anggaran Rp. 1,200,000,000,000 terealisasi Rp. 1,177,406,000,00 atau 98,12 %
 - 4) Kegiatan Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan, anggaran Rp. 299,670,500,00 terealisasi Rp. 293,966,800,00 atau 98,11 %
 - 5) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna, anggaran Rp. 150,000,000,00 terealisasi Rp. 145,862,000,00 atau 97,24 %
 - 6) Pembangunan Rumah potong Hewan Ruminansia (Dana Propinsi), anggaran Rp. 1,000,000,000,000 terealisasi Rp. 990,431,000,00 atau 99,04%
- h. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini Rp. 2,423,408,000,00 terealisasi Rp. 2.377,252,000,00 atau 98,10 % digunakan 6 (enam) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Biaya Umum Kegiatan Bidang Pertanian (DAK Bidang Pertanian), anggaran Rp. 89,270,000,00 terealisasi Rp. 87,080,000,00 atau 97,55%
 - Kegiatan Peningkatan Produksi dan Kualitas Pertanian (DAK Bidang Pertanian), anggaran Rp. 990,000,000,00 terealisasi Rp. 981,913,000,00 atau 99,18 %



- 3) Kegiatan Biaya Umum Kegiatan Bidang Peternakan (DAK Bidang Pertanian), anggaran Rp. 112,170,000,00 terealisasi Rp. 104,070,000,00 atau 92,78 %
- 4) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (DAK Bidang Pertanian), anggaran Rp. 1,123,573,000,00 terealisasi Rp. 1,115,617,000,00 atau 99,29 %
- 5) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Kualitas Pertanian (Luncuran DAK 2014), anggaran Rp. 18,984,000,00 terealisasi 0,00 atau 0 %
- 6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan (Luncuran DAK 2014), anggaran Rp. 89,411,000,00 terealisasi Rp. 88,572,000,00 atau 99,06 %

2.2. Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan Peternakan dan Pertanian. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

2.2.1 Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan kehutanan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 314,833,500,00 realisasi sebesar Rp. 309,716,750,00 atau 98,37%untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 314,833,500,00 realisasi sebesar Rp. 309,716,750,00 atau 98,37% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan,anggaran sebesar Rp. 314,833,500,00 realisasi sebesar Rp. 309,716,750,00 atau 98,37%



2.3. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata ditangani Tahun 2015 oleh Dinas Pemuda , Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan pariwisata mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10,574,990,500,00 realisasi Rp. 561,550,500,00 atau 5,31% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,alokasi anggaran pada program ini Rp. 414,245,000,00 terealisasi Rp.411,485,000.00 atau 99,15 %, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, anggaran Rp. 29,245,000,00 terealisasi Rp. 28,995,000 atau 99,15 %
 - 2) Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, anggaran Rp. 90,000,000,00 terealisasi Rp. 89,080,000,00 atau 98,98%
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri, anggaran Rp.295,000,000,00 terealisasi Rp. 293,410,000,00 atau 99,46%
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , alokasi anggaran pada program ini Rp. 10,000,000,000,000 terealisasi 0,00 atau 0%
 - 1) Kegiatan Destinasi Wisata Siap Kunjung (Dana Provinsi) , anggaran Rp. 10,000,000,000,000 terealisasi 0,00 atau 0%
- c. Program Pengembangan Kemitraan, alokasi anggaran pada program ini Rp. 160,745,500,00 terealisasi Rp. 150,065,500,00 atau 93,36%, digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :



- 1) Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan database, anggaran Rp. 70,745,500,00 terealisasi Rp. 70,145,500,00 atau 99,15%
- 2) Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesiMonitoring , Evaluasi dan Pelaporan , anggaran Rp90,000,000,000 terealisasi Rp. 79,920,000,00 atau 88,80 %

2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.1. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan kelautan dan perikanan mengelola anggaran sebesar Belanja Langsung sebesar Rp. 5,433,255,400,00 realisasi Rp. 4,551,647,500,00 atau 83,77% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 147,463,000,00 realisasi Rp. 144,785,500,00 atau 98,18% untuk melaksanakan1(satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, anggaran sebesar Rp. 147,463,000,00realisasi Rp. 144,785,500,00atau 98,18%
- b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 454,712,500,00 realisasiRp. 418,237,000,00 atau 91,98% untuk melaksanakan 3(tiga) kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Blbit Ikan Unggul, anggaran Rp. 173,000,000,00 teralisasi Rp. 164,540,000,00 atau 95,11%
 - 2) Kegiatan Gemar Makan Ikan , anggaran Rp. 122,807,500,00teralisasi Rp. 110,872,000,00 atau 90,28%
 - 3) Kegiatan Temu Teknologi Penyuluhan Perikanan, anggaran Rp. 158,905,000,00 teralisasi Rp. 142,825,000,00 atau 89,88%



- c. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 4,831,079,000,00 terealisasi Rp. 3,988,625,000,00 atau 82,56%, digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan, anggaran Rp. 4,588,628,000,00 terealisasi Rp. 3,771,702,000,00 atau 82,20%
 - 2) Kegiatan Biaya Umum Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan , anggaran Rp. 208,574,000,00 teralisasi Rp. 183,542,000,00 atau 88,00 %
 - 3) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (SILPA), anggaran Rp. 33,877,900,00 teralisasi Rp. 33,381,000,00 atau 98,53%

2.5. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

2.5.1 DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan perdagangan mengelolaanggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.989.316.925,00 realisasiRp. 1.866.748.188,00 atau 46,79 %untuk melaksanakan6 (enam) program dan 30 (dua puluh sembilan) kegiatan yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran pada program ini Rp. 808.748.188,00 terealisasi Rp. 767.216.332,00 atau 94,91% digunakan untuk melaksanakan14 (empat belas) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp. 3,400,000,00 terealisasi Rp. 3,368,000,00 atau 99,06 %



- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp. 148,600,000,00 terealisasi Rp. 114,222,902,00 atau 76,87%
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, anggaran Rp. 36,868,540,00 terealisasi Rp. 36,030,000,00 atau 97,73 %
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 11,875,000,00 terealisasi Rp. 8,745,800,00 atau 73,65 %
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, anggaran Rp. 54,855,000,00 terealisasi Rp. 54,125,000,00 atau 98,67 %
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. anggaran Rp. 23,856,000,00 terealisasi Rp. 23,856,000,00 atau 100 %
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, anggaran Rp.48,212,085,00 terealisasi Rp. 47,993,950,00 atau 99,55%
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp.11,461,500,00 terealisasi Rp. 11,067,900,00 atau 96,57%
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp.4,300,000,00 terealisasi Rp. 4,300,000,00 atau 100%
- 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, anggaran Rp.15,660,000,00 terealisasi Rp. 15,660,000,00 atau 100%
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp 3,000,000,00 terealisasi Rp. 3,000,000,00 atau 100%
- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 44,186,800,00 terealisasi Rp. 43,826,800,00 atau 99,19%
- 13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, anggaran Rp.324,975,000,00 terealisasi Rp. 324,895,980,00 atau 99,98%
- 14) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, anggaran Rp. 77,125,000,00 terealisasi Rp. 76,225,000,00 atau 99,83%.



- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 471,216,500,00 terealisasi Rp.394,415,906,00 atau 83,70 %, digunakan untuk mendanai 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, anggaran Rp. 124,640,000,00 terealisasi Rp. 123,455,000,00 atau 99,05 %
 - 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, anggaran Rp. 103,196,500,00 terealisasi Rp. 102,642,500,00 atau 99,46 %
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, anggaran Rp. 205,380,000,00 terealisasi Rp. 168,318,406,00 atau 81,95%
 - Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor/Rumah Dinas jabatan , anggaran Rp. 38,000,000,00 tidak ada Realisasi atau 0%
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, anggaran pada program ini Rp. 40,795,000,00 terealisasi Rp.39,599,000,00 atau 97,07% digunakan untuk melaksanakan2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. anggaran Rp. 22,347,500,00 terealisasi Rp. 22,191,500,00 atau 99,30%
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, anggaran Rp. 18,447,500,00 terealisasi Rp. 17,407,500,00 atau 94,36 %
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. alokasi anggaran pada program ini Rp. 109,002,500,00 terealisasi Rp. 107,612,500,00 atau 98,72 % digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, anggaran Rp. 32,664,000,00 terealisasi Rp. 32,664,00000 atau 100%
 - 2) Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya, anggaran Rp. 29,685,000,00 terealisasi Rp. 29,685,000,00 atau 100%



- 3) Kegiatan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap, anggaran Rp. 18,372,500,00 terealisasi Rp. 18,050,000,00 atau 98,24%
- 4) Penyusunan Profil SKPD , anggaran Rp. 2,281,000,00 terealisasi Rp. 27.213.500,00 atau 96,23%
- e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan , alokasi anggaran pada program ini Rp. 624,073,000,00 terealisasi Rp. 485,049,450,00 atau 77,72 % digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, anggaran Rp. 526,813,000,00 terealisasi Rp. 389,009,450,00 atau 98,75 %
 - 2) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, anggaran Rp. 97,260,000,00 terealisasi Rp. 96,040,000,00 atau 98,75%
- f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. alokasi anggaran pada program ini Rp. 1,935,855,000,00 terealisasi Rp. 72,855,000,00 atau 3,76% digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan , anggaran Rp.29,205,000,00 terealisasi Rp. 29,205,000,00 atau 100%
 - Kegiatan Sosialisasi 43,650,000,00 terealisasi Rp. 43,650,000,00 atau
 100%
 - c. Rehabilitasi dan Renovasi Pasar Tradisional (DAK P3K2) , anggaran Rp. 1,863,000,000,00 tidak terealisasi atau 0% .

2.6. Urusan Industri

Urusan industri ditangani oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :



2.6.1. DinasPerindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan Industri mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 501,541,000,00 realisasiRp. 484,030,750,00 atau 96,51% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Alokasi anggaran pada program ini Rp. 138,820,000 terealisasi Rp. 136,820,000,00 atau 98,44 %, digunakan untuk mendanai 1 (satu) Kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta, anggaran Rp. 138,820,000,00 terealisasi Rp. 136,655,000,00 atau 90,44 %
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 63,016,000,00 terealisasi Rp. 62,789,250,00 atau 99,64%, digunakan untuk mendanai 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri, anggaran Rp. 63,016,000,00 terealisasi Rp. 62,789,250,00 atau 99,64 %
- c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, alokasi anggaran untuk program ini Rp. 299,705,000,00 teralisasi Rp. 284,586,500,00 atau 94,96 %, digunakan untuk mendanai 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - 1) Kegiatan Promosi Pemasaran Industri Kecil Menengah, anggaran 299,705,000,00 terealisasi Rp. 284,586,500,00 atau 94,96 %

2.7. Urusan Ketransmigrasian

Urusan ketransmigrasian ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketransmigrasian tidak terlaksana.



3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN PILIHAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 14
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

NO	SKPD	Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian	Kelautan dan Perikananan Pertanian, dan	
	Totalianan dairi ortaman	Kehutanan	
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata	
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Industri Perdagangan	
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketransmigrasian	

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Dalam konteks penyelenggaaan otonomi daerah, sekalipun diberikan seluas-luasnya bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, namun tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku tidak tumpang tindih dengan agar kewenangan-kewenangan pemerintah Provinsi dan atau pemerintah pusat.

Hubungannya dengan pemisahan kewenangan sebagaimana di atas, sekaligus dalam konteks mengukur keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan otonomi, maka beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap daerah, yaitu aspek yang menjadi indikator kinerja.

Indikator kinerja, adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja tersebut digambarkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yang selanjutnya diuraikan menjadi bagian-bagian sebagai Indikator Kinerja Kunci, (IKK) yaitu:

- 1. Aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan untuk pemerintah, dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kunci, yaitu :
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
 - c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah
 - d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
 - e. Efektivitas proses pengambilankeputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
 - f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
 - g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan



- h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah
- i. Transparansi dalam memanfaatkan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil
- j. Intensitas, Efektivitas, Dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Pinjaman/ Obligasi Daerah
- k. Efeltivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban, Dan Pengawasan APBD
- I. Pengelolaan potensi daerah, dan
- m. Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2. Aspek pelaksanan kebijakan (kewenangan yang dilimpahkan ke setiap SKPD), dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kunci, yaitu :
 - a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
 - c. Tingkat capaian spm
 - d. Penataan kelembagaan daerah
 - e. Pengelolaan kepegawaian daerah
 - f. Perencanaan pembangunan daerah
 - g. Pengelolaan keuangan daerah
 - h. Pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
- 3. Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan, terdiri dari 26 (duapuluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yaitu :

1). Urusan Wajib

- a. Urusan Pendidikan
- b. Urusan Kesehatan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Perumahan
- e. Urusan Penataan Ruang



- f. Urusan Perencanaan Pembangunan
- g. Urusan Perhubungan
- h. Urusan Lingkungan Hidup
- i. Urusan Pertanahan
- j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- I. Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
- m. Urusan Sosial
- n. Urusan Ketenagakerjaan
- o. Urusan Koperasi & UKM
- p. Urusan Penanaman Modal
- q. Urusan Kebudayaan
- r. Urusan Kepemudan & Olah Raga
- s. Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
- t. Urusan Otonomi daerah, Pemerintaha umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- v. Urusan Statistik
- w. Urusan Kearsipan
- x. Urusan Komunikasi dan Informatika
- y. Urusan Perpustakaan Daerah
- z. Urusan Ketahanan Pangan

2). Urusan Pilihan

- a. Urusan Pertanian
- b. Urusan Kehutanan
- c. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
- d. Urusan Kelautan dan Perikanan
- e. Urusan Perdagangan
- f. Urusan Industri, dan
- g. Urusan Ketransmigrasian.



Secara garis besar gambaran yang diperoleh atas hasil penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kota Cirebon untuk ketiga aspek di atas, diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tersebut pada lampiran II.1 untuk Tataran Pengambil Kebijakan, Lampiran II.2 untuk Tataran Pelaksanaan Kebijakan, dan Lampiran II.3 untuk Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.



BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Prinsip penyelenggaraan Tugas Pembantuan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yaitu Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Tugas Pembantuan menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang tersebut di atas, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pasal 1 ayat 19 menyebutkan, bahwa Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Urusan Bersama Pusat dan Daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaa Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 ayat 5, adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh



Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara ayat 6 dan 7 menyebutkan bahwa Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dana Urusan Bersama yang bersumber dari APBN selanjutnya disebut Dana Urusan Bersama (DUB), sedangkan yang bersumber dari APBD disebut Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB).

A. Dasar Hukum.

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 5. Undang-undang Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indoinesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015:
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaa Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.



B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

B.1 Tugas Pembantuan

- 1. Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2. Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan;

B.2 Urusan Bersama

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan.

- 1. Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
- 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.

D. Program, Kegiatan Yang Diterima dan Dilaksakanan.

D.1 Tugas Pembantuan

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : 024.03.4.029494/2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.994.172.000,-

- b. Instansi Pemberi Tugas : Kementerian Kesehatan
- c. Program dan Kegiatan

Program: Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Outcome : Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui pelayanan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan tradisional.



IKU : 1. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan

2. Jumlah balita gizi kurang yang ditangani

3. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) berkualitas

Kegiatan: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Indikator Kinerja: Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)

Output : 1. Bantuan Operasional Kesehatan

2. Perencanaan BOK

3. Dokumen Money BOK

4. Laporan kegiatan/sosialisasi/pembinaan

 d. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 99,51%

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Program ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor: 024.04.4.025427/2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,-

b. Instansi Pemberi Tugas : Kementerian Kesehatan

c. Program dan Kegiatan

Program: Pembinaan Upaya Kesehatan

Outcome : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.

IKU : 1. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Sistem Pelayanan Rujukan Terstruktur

2. Jumlah RS yang terakreditasi

3. Jumlah PUSKESMAS yang terakreditasi



Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Indikator Kinerja : 1. Jumlah RS Rujukan regional yang sesuai standar;

- 2. Terwujudnya Pusat Rujukan Nasional;
- 3. Jumlah RS yang telah memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS;
- 4. Jumlah RS yang memenuhi standar keselamatan pasien
- Terbentuknya Badan Pengawas RS (BPRS) di Provinsi
- Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya;
- 7. Jumlah RS Pratama di DTPK;
- 8. Jumlah Provinsi yang melaksanakan SPGDT sehari-hari;
- Persentase penduduk yang berobat di UPT Vertikal mendapatkan pelayanan kesehatan

Output : 1. Alat Kesehatan RS Rujukan regional

- 2. Layanan perkantoran
- 3. Dokumen Monev BOK
- 4. Laporan kegiatan/sosialisasi/pembinaan
- d. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 84,98%

D.2 Urusan Bersama

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon, dengan penjelasan sebagai berikut :



a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : DIPA-033.05.5.502732/2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,-

- a. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Program dan Kegiatan

Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Outcome : Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang asri.

IKU : Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukimannya

Kegiatan: Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan

Indikator Kinerja: Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off site dan sistem on site (12 kawasan)

 d. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 100%

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

DIPA Nomor : DIPA-033.05.6.502731/2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.295.000.000,-



- c. Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Program dan Kegiatan

Program : Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Outcome : Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang asri.

IKU : Jumlah kawasan yang tertangani infrastruktur permukimannya

Kegiatan : Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung dan rumah negara.

Indikator Kinerja: Jumlah kelurahan / desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial (p2kp/pnpm) 22 kelurahan.

 d. Sampai dengan akhir triwulan IV realisasi penyerapan keuangan mencapai 100%



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Melalui kebijakan Desentralisasi dan Otonomi daerah tersebut, Pemerintahan Daerah diharapkan mampu menampilkan kreativitasnya dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat, membangun daerah serta meningkatkan Layanan Publik Civil dan Layanan Publik bagi masyarakat.

Langkah awal sebuah Pemerintahan Daerah dalam menggulirkan layanan Civil dan Layanan Publik adalah melalui optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan. Tugas tersebut hakekatnya terfokus pada kebutuhan masyarakat beradab akan sebuah Pemerintahan yang mampu menegakan hokum dan menciptakan ketertiban serta meyejahterakan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan beberapa kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan sebagaimana tersebut di bawah ini :

A. Kerjasama Antar Daerah

Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah, Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2015 telah menyelenggarakan beberapa kerjasama Antar Daerah sebagai berikut:

 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon Nomor: 974/3368/2012 dan 974/perj. 1-DKP/2012 tentang



Penanganan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan selama 2 (dua) Tahun.

B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan :

- A. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan KODIM 0614/KOTA CIREBON tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Nomor: 520/KB,1-DKPPP/2015 dan Nomor: B/86/II/2015 Tanggal 12-2-2015;
- B. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kota Cirebon sebagai Penempatan Jaringan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Fiber Optik dengan Metode Kamuflase di Kota Cirebon Nomor: 032/KB.3-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor: 344.a/BTS-DIR/VI/15 Tanggal 30-06-2015;
- C. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tentang Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 893/KB.4-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor :Mou.014a/DIRPB/PBIRM/VII /2015 tanggal 07-07-2015;
- D. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tentang Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan serta Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Nomor: 893 / PKS.5-BK.DIKLAT / 2015 dan Nomor: PKS.155a / DIRPB / PBIRM / VII / 2015 tanggal 07-07-2015;
- E. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Pertamina EP ASSET 3 tentang Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Cirebon di atas aset PT. Pertamina EP ASSET 3 Kawasan Stadion Bima Nomor : 600/KB.6-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor : 02/EP3300/2015-S0 Tanggal 29-07-2015;
- F. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Pertamina EP ASSET 3 tentang Pembangunan Infrastruktur Penunjang Pelaksanaan



Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Cirebon di atas aset PT. Pertamina EP ASSET 3 Kawasan Stadion Bima Nomor: 600/PKS.7-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor: 03/EP3300/2015-S0 Tanggal 29-07-2015;

- G. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Cirebon tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Nomor: 973/KB.11-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor: 0001.MoU/Keu.03.01/A.CRB/2015 Tanggal 04-11-2015;
- H. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Cirebon tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Nomor: 973/PKS.12-Adm.Pem.Um/2015 dan Nomor: 0047.PJ/Keu.03.01/A.CRB/2015 Tanggal 04-11-2015;
- I. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon dan Kantor Pertanahan Kota Cirebon tentang Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara Nomor : 973/KB.13-Adm.Pem.Um/2015, Nomor : PRJ-001/WPJ.22/KP.06/2015 dan Nomor : 439/32.74/XI/2015 Tanggal 04-11-2015.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks. Berkenaan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara Legislatif, Eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk:

- 1. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)
- 2. Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda)
- 3. Rapat Koordinasi lainnya



dengan materi bahasan antara lain :

- 1. Isu-isu actual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama
- 2. Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara seperti Presiden / Wakil Presiden / Menteri.
- Berdialog langsung dengan masyarakat dalam menampung aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pembinaan batas wilayah Kota Cirebon selama tahun 2015 terfokus upaya penyelesaian penegasan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon, mengingat upaya-upaya fasilitasi dan mediasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemendagri sudah sampai batas pengambilan keputusan dikarenakan upaya-upaya kesepakatan dari kedua daerah sampai dengan tahun 2015 tetap belum ada kesepakatan.

Dimasa yang akan datang penyelesaian penegasan batas wilayah sangat penting dan harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon yang memuat titik koordinat batas daerah yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran.

Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Upaya-upaya penyelesaian penegasan batas daerah terhadap 7 (tujuh) titik koordinat yang belum disepakati telah dilakukan oleh Tim Penegasan



Batas Daerah Kota Cirebon, Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat serta Kemendagri selama tahun 2015 yang dibuktikan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 135.4/533/Pem.Um tanggal 9 Juni 2015 perihal undangan tindak lanjut penyelesaian batas daerah segmen Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon, telah dilaksanakan rapat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di Ruang Ciremai Gedung Sate Bandung, dan hasilnya sebagai berikut :
 - Belum tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon Provinsi Jawa barat, khususnya pada titik koordinat 07,08 dan 09 (draf-2 peta batas daerah Kabupaten dan Kota Cirebon di sekitar Desa Tuk.
 - Pemerintah Kota Cirebon tetap sepakat terhadap peta alternatif ke 2 dan draf Permendagri yang telah diserahkan. Persiapan penyelesaian penegasan batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.
 - Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menyetujui alternative ke2 kecuali perubahan garis batas pada titik koordinat 07,08 dan 09 yang lebih tepatnya dari sebelah barat Jalan Dr.Cipto MK atau depan ex Kantor Bappeda Kota Cirebon / Selokan depan Pom Bensil TNI AL kea rah selatan sampai dengan Kantor Dinsosnakertrans Kota Cirebon.
 - Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa Desa Tuk meliputi wilayah yang ada di titik koordinat tersebut diatas sesuai peta blok desa di Kabupaten Cirebon, tetapi peta blok tersebut belum diserahkan ke Provinsi Jawa Barat dalam waktu 1 (satu minggu setelah rapat ini).
 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi internal dan mengambil keputusan atau diserahkan kepada Kemendagri.
- Pada pertemuan tersebut di atas adalah pertemuan ke-3 atau yang terakhir dan hasilnya tetap tidak sepakat, maka sesuai Pasal 28 aayat (1) dan ayat
 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan



Batas Daerah, perselisihan batas daerah Kota/Kabupaten dalam Provinsi diambil alih oleh Gubernur dengan melakukan antara lain :

- A. Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah.
- B. Apabila Gubernur tidak dapat mengambil keputusan maka Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Sudah tidak ada lagi pertemuan antara Tim Penegasan Kota dan Kabupaten, tinggal Gubernur atau Kemengadri memanggil kedua Kepala Daerah untuk menandatangani draf Peta dan Permendagrinya.

- 3. Selanjutnya dengan mengacu Pasal 28 dan kewenangannya tersebut diatas, maka Gubernur Jawa Barat mengundang kedua Kepala Daerah beserta Tim Penegasan Batas Daerah Kota/kabupaten serta dihadiri Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perwakilan Kementrian Dalam Negeri melaksanakan pembahasan penyelesaian penegasan batas daerah pada tanggal 10 September 2015 di Ruang Rapat Utama Gedung Sate Bandung serta dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat dengan hasil sebagai berikut :
 - Gubernur menyampailkan bahwa mengacu peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan masukan TPBD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa : BATAS DAERAH KOTA CIREBON DENGAN KABUPATEN CIREBON MENGGUNAKAN PERMENDAGRI BERIKUT PETA KE-2 yaitu Wilayah Perumahan Pilang Setrayasa dan Wilayah Krematorium sebelah timur Gedung DKP3 Kota Cirebon masuk kedalam Wilayah Kabupaten Cirebon, sementara wilayah Desa Tuk (Belakan CSB Mall ke selatan Jalan Citra Remaja belakang Dinsosnakertrans masuk Wilayah Kota Cirebon.
 - Batas wilayah ini lokasinya ditengah-tengah antara Jalan Dr.Cipto Mk dengan Sungai Kijing (banjir kanal) depan Perum Taman Cipto.
 - Bupati Cirebon tidak menyetujui dan meminta perubahan garis titik koordinat.



- 4. Tidak tercapainya upaya fasilitasi Gubernur dalam pembahasan draf final permendagri dan peta alternatif ke-2 disebabkan adanya inkonsistensi Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai hasil rapat pertemuan terakhir atau yang ke 3 pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana point 1 tersebut diatas yang intinya meminta perubahan garis batas titik koordinat 07,08 dan 09 dengan dasar peta blok Desa Tuk yang tidak diakui, maka berubah ke titik koordinat 05 (masjid CSB Mall) ditarik lurus ke titik koordinat 08 (Halaman Tk.Hang Tuanh TNI AL).
- 5. Menjelang akhir tahun 2015 ada informasi dari Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat melalui sambungan telepon kepada Kabag Adm.Pem.Um Setda Kota Cirebon yang intinya ingin menghadap Walikota Cirebon untuk menyampaikan informasi bahwa BUPATI CIREBON telah SETUJU dengan Draf Permendagri berikut Peta Ke-2 yang diinginkan Kota Cirebon, dengan catatan antara lain :
 - a. Wilayah Desa Tuk (titik koordinat 07,08 dan 09) menjadi wilayah Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon.
 - b. Setuju Draf Peta ke-2 secara utuh.
 - c. Kegiatan survey lapangan terkait adanya indikasi perubahan gambar peta draf ke-2 yang pernah dilakukan oleh TPBD Provinsi Jawa Barat, Kemendagri, TPBD Kota dan Kabupaten dianggap tidak berlaku.
 - d. Sebagian sebelah barat area parkir motor CSB Mall tetap menjadi wilayah Kabupaten Cirebon.
 - e. Tidak ada permintaan-permintaan perubahan batas kembali oleh Kota Cirebon.
- 6. Dalam Draf Peta ke-2 yang diinginkan Kota Cirebon masih terdapat permasalahan antara lain :
 - a. Sebagian sebelah barat area parkir motor CSB Mall tetap menjadi wilayah Kabupaten Cirebon yang diharapkan Bidang Tanah CSB Mall seluruhnya masuk ke dalam wilayah Kota Cirebon.



 Adanya Surat dari warga Perumahan Pilang Setrayasa telah sampai di Gubernur yang intinya ingin tetap tidak terpisahkan dari Bagian Wilayah Administrasi Kota Cirebon.

Selanjutnya setelah mengetahui informasi, maka Tim Penegeasan Batas Daerah Kota Cirebon sesegera mungkin ingin menyampaikan kepada Ketua Tim dalam hal ini Walikota Cirebon dalam hal pengambilan keputusan selanjutnya terhadap penyelesaian batas daerah yang sudah memakan waktu ± 30 tahun, namun nampaknya Walikota Cirebon menjelang akhir tahun 2015 tidak bisa ditemui karena sedang melaksanakan kedinasan di luar kota sehinga pertemuan tersebut diundur di tahun 2016 mendatang.

Oleh karena itu progres penyelesaian batas daerah sampai akhir tahun 2015 tidak tercapai, maka dalam rangka kepastian hukum wilayah administratif dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan untuk sementara berjalan sebagaimana biasa dengan berpedoman pada dokumen yang dimiliki oleh masyarakat.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada tahun anggaran 2015, potensi bencana pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologi, seismis, hidrologis, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam yang mengancam kehidupan, struktur dan malapetaka. Sedangkan bencana sosial lebih disebabkan munculnya masalah-masalah dalam hubungan-hubungan soaial kemasyarakatan.

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Selama Tahun 2015, jenis bencana yang terjadi adalah bencana banjir, Hujan angin dan kebakaran. Kejadian-Kejadian bencana banjir tercatat sebanyak 3 kejadian, kebakaran tercatat sebanyak 84 kejadian (untuk wilayah



Kota Cirebon sebanyak 77 kejadian sedangkan bantuan pada wilayah perbatasan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sebanyak 7 kejadian) dan Hujan angin sebanyak 4 kejadian. Kejadian-kejadian bencana tersebut Pemerintah Kota Cirebon melakukan penanggulangannya dengan mengerahkan seluruh personil/ relawan bencana, menyalurkan bantuan sosial, bantuan kesehatan dan pelayanan umum kepada korban bencana serta penanganan terhadap bencana yang terjadi.

2. Status Bencana

Berdasarkan statusnya, kejadian bencana yang terjadi secara keseluruhan masih bersifat local, sehingga penanggulangannya, dan rehabilitasinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah kota bersama-sama masyarakat.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana bersumber dari anggaran APBD Tahun 2015 dengan program Penanggulangan Bencana alokasi anggaran pada program ini Rp. 669.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 632.670.000,00 atau 94,53% digunakan untuk 1 (satu) kegiatan, yaitu: dengan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Bencana dengan mengalokasikan kemungkinan kebutuhan belanja pada bantuan sosial, belanja tak terduga, dan upaya-upaya pencegahan serta latihan penanggulangan sesuai program SKPD terkait.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Berdasarkan potensi yang ada, kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana selama Tahun 2015 dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2015 sebagai berikut :

Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana.
 Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :



- Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya pada lokasi rawan bencana.
- Meningkatkan cakupan layanan dan tanggap bencana dengan capaian akhir 60 %'
- 2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadapa tanggap darurat bencana.
 - Bintek tanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dan kecamatan kepada 1000 penduduk.
- 3. Program perencanaan pengendalian dan penanggulangan Bencana Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
 - Penyusunan kebijakan / reguasi mitigasi bencana dan strategi ketahanan kota.

Antisipasi terhadap kemungkinan bencana adalah melakukan monitoring di titik-titik rawan bencana dan melakukan piket siaga bencana selama 7 x 24 jam di posko Satlak Kota Cirebon, serta terus menerus melakukan monitoring online Website BKMG.

5. SKPD Yang Menangani Bencana

Sesuai dengan jenis-jenis bencana yang terjadi, secara fungsional kejadian bencana ditangani SKPD terkait, seperti Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPUESDM dan Kelembagaan Koordinatif lainnya.



Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Tabel 15 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

	SKPD/ Golongan Ruang																	
NO	Jabatan		l II				III				IV							
		а	b	С	d	а	b	С	d	а	b	С	d	а	b	С	d	е
Α	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran																	
1	Struktural																	
	Es.II.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Es.II.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Es.III.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	Es. IV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
3	Fungsional:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Staf	0	0	0	0	1	7	2	2	3	6	0	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah	0	0	0	0	1	7	2	2	3	6	0	4	0	1	0	0	0

7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Bencana Alam potensial yang diperkirakan terjadi di Kota Cirebon dapat berupa:

- Bencana Banjir
- ROB
- Kekeringan
- Angin Putting Beliung
- Tanah Longsor

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa di daerah.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang direalisasikan dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;



- b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa;
- c. Sarasehan penanaman dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- d. Forum kerukunan umat Beragama.
- 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan Seminar, talkshow, Diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pentas Seni Budaya, Festival lomba cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan.
- 4. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- 5. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan memberikan penunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

- 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
- 2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diselenggarakan melalui:

- Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat.
- Penegakan Peraturan Daerah
- Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat
- Peningkatan Koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum



- Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan permukuman maupun tempat-tempat vital
- Membangun komunikasi dan silahturahmi diantara komponen-komponen masyarakat

1. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2015 pada umumnya dalam beberapa kasus bersifat anarkisme khususnya dalam hal penyampaian aspirasi publick

2. SKPD Yang Menangani

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2015, ditangani dan melibatkan SKPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Beberapa kendala penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat sampai saat ini antara lain :

- Masih kurangnya personil Tenaga Kontrak, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan ketentuan yang berlaku.
- Beban tugas yang semakin besar dan kompleks perlu penambahan anggaran dalam rangka melaksanakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan Perda.
- Kurangnya sarana dan prasarana terutama pengadaan Mobil Patroli dan Pengadaan Truck, hal ini menyebabkan kurang efektifnya pengawasan terhadap para pelanggaran Perda.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Kota Cirebon sebagai tempat penampungan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, PSK dan Waria.



- Belum optimalnya koordinasi teknis sehingga bidang penuntutan Peradilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dapat lebih berperan dalam penenggakan kepastian hukum terutama dalam hal pelaksanaan peradilan singkat (tipiring).
- Munculnya kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara illegal pada tempat terlarang sehingga berpotensi, memperburuk wajah kota. Program dan pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di beberapa lokasi tetap menjadi permasalahan yang belum selesai.

Beberapa pemecahan masalah yang diterapkan antara lain:

- Melakukan rekruitmen personil untuk meningkatkan rasio jumlah kebutuhan personil.
- Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian Resort Cirebon Kota, KODIM, DENPOM dan lain-lain.
- Meningkatkan pengendalian floating relokasi pedagang kaki lima yang telah ditertibkan untuk pembinaan dan penataan yang strategis dan efektif di masa yang akan datang pada wilayah Kecamatan/ Kelurahan.



BAB VI PENUTUP

Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semenjak menganut sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arahan yang jelas untuk pencapaian tiga tujuan yang meliputi; peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2015 yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 secara umum pelaksanaan kegiatan-kegiatan telah sesuai dengan kebijakan yang ada. Namun demikian pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Penjelasan secara garis besar mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya, antara lain :

- Perubahan iklim dan cuaca yang semakin ekstrem akhir-akhir ini berdampak pada percepatan kerusakan beberapa bagian infrastruktur kota yang mengakibatkan tingginya biaya rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur.
- 2. Selain dari APBD Kota Cirebon pembangunan fisik infrastruktur di tahun 2015
 - telah didukung melalui pendanaan APBD Propinsi Jawa Barat. Namun upaya ini belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat, karena memerlukan juga upaya partisipasi seluruh komponen untuk dapat menjaga dan memelihara infrastruktur yang ada.
- Persoalan terkait dengan sektor informal terutama pedagang kaki lima, masih belum dapat diselesaikan dengan optimal. Upaya untuk membuat jalan Karanggetas sebagai pusat PKL di malam hari tidak dapat



dilaksanakan karena adanya konflik di internal PKL itu sendiri. Masih ada anggapan bahwa kerjasama dengan pemerintah identik dengan pemberian bantuan. Upaya penyediaan ruang untuk sektor informal terutama PKL telah dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

- 4. Permasalahan di bidang pendidikan khususnya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah masih munculnya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil penerimaan peserta didik baru. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan upaya penerapan PPDB Online untuk SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri dan Pembatasan kuota siswa yang berasal dari luar kota.
- 5. Lokasi Kota Cirebon yang berada di jalur strategis pantura menjadikan masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis (heterogen) dengan potensi yang luar biasa dan di sisi lain adanya kendala perbedaan pandangan dalam visi pembangunan Kota. Diakui bahwa menyatukan persepsi pada masyarakat yang tingkat heterogenitasnya tinggi tidaklah mudah, namun bagaimanapun Pemerintah Kota telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua golongan.
- 6. Konsekuensi dari lokasi geografis yang berada di kawasan pesisir, menyebabkan kawasan rawan genangan banjir yang berjumlah 11 titik lokasi banjir belum dapat diselesaikan secara maksimal tetapi upaya-upaya seperti normalisasi aliran sungai serta rencana pembuatan embung untuk menjadikan Kota Cirebon terbebas dari genangan banjir terus dilakukan.
- 7. Sebagai kota pesisir dengan panjang pantai sepanjang ± 7 km, Kota Cirebon memiliki beberapa sarana pangkalan pendaratan ikan tradisional serta Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, beberapa program pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan dan penataan wilayah pesisir sarana dan prasarana telah dilaksanakan dan akan tetap dilanjutkan untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian Kota Cirebon.



- 8. Kota Cirebon sebagai satu-satunya kota di Jawa Barat yang memiliki berbagai peninggalan bersejarah yaitu Keraton belum dapat dikelola menjadi produk wisata berdaya saing tinggi. Kondisi ini disebabkan diantaranya karena belum adanya kesatuan visi dan misi dalam pengelolaan potensi wisata dari stakeholders yang ada.
- 9. Berdasarkan penilaian Transparansi Internasional Indonesia, Kota Cirebon mendapat predikat Kota dengan peringkat terendah dalam indeks persepsi Korupsi. Untuk itu kami bersama para stekeholders telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Cirebon tahun 2012-2017. Dokumen ini berisi program dan kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi yang dimulai pada tahun 2012.
- 10. Alokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebesar 20% ruang terbuka hijau public dan 10% ruang terbuka hijau private akan dipenuhi secara bertahap. Secara umum untuk tahun 2014 telah diupayakan untuk mengembangkan ruang terbuka hijau melalui penanaman pohon peneduh di beberapa ruas jalan terutama di ruas jalan terutama di ruas jalan terutama di ruas jalan pusat kota dan melalui pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Beberapa aspek yang perlu diagendakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cirebon, antara lain :

a. Pelembagaan mekanisme bagi partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi tersebut terutama diperlukan dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam proses politik lokal di satu pihak, dan dalam upaya mendorong transparansi proses perumusan kebijakan di Daerah. Dimensi partisipasi masyarakat ini diharapkan akan mendorong terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Cirebon;



- b. Perluasan Sumber Pendapatan Daerah. Mengingat bahwa tidak akan pernah ada otonomi tanpa sumberdaya ekonomi dan keuangan, maka dengan memperhatikan Potensi Daerah Kota Cirebon, paradigma Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini berjalan perlu diubah melalui pendekatan progresif, kreatif dan inovatif.
- c. Dengan memperhatikan bahwa keberhasilan dan kegagalan pembangunan bukan hanya tergantung pada pemerintah daerah saja, maka sangat diperlukan dukungan seluruh jajaran stakeholders yang merupakan pilar pemerintahan.
- d. Pengembangan tingkat daya beli masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan keterampilan/skills atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami, atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik antara, Pemerintah Kota Cirebon, masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2015 di Kota Cirebon, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Cirebon, Maret 2016 WALIKOTA CIREBON

Drs. NASRUDIN AZIS, SH